

Editor: Dr. Nur Hygiawati Rahayu, S.T., M.Sc., dkk.



BUNGA RAMPAI

TESIS/DISERTASI PHRD-IV

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IV

Administrasi dan Ekonomi

Bunga Rampai Tesis/Disertasi PHRD-IV

Tema: Administrasi dan Ekonomi

Program Beasiswa PHRD-IV

Editor:

Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc, dkk.

Project Implementing Unit (PIU) PHRD-IV
Pusbindiklatren-Bappenas



Bunga Rampai Tesis /Disertasi PHRD-IV

Tema: Administrasi dan Ekonomi

©2017 oleh Bappenas

Editor

Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc., Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.,

Ali Muharram, SIP, MSE, MA., Rita Miranda, S.Sos, MPA.,

Wiky Witarni, S.Sos, MA.

Kontributor:

Agus Widodo SP – Anindya Arief Setiadi – Cornelia Rina Krimawardhani – Dwiyana Sholichatin – Fitasari Ayu Wardani – Nirmala Krishna Dewi – Nur Rahmi Endah Utama – RR. Tantri Jazziyatul Khasanah – Sigit Swastono – Supriyono, S.IP – Zaraqo – Dian Titisari Putrikusuma, S.KM – Dina Trisiana Iskandar, ST – M. Aminudin – Reni Tri Pujiastuti – Ribut Rahayu – Yosi Yosandi – Debby Trisia Lukman – Eska Nugrahini Murniati – Hendra Subiyanto, S.E – Imron Rosyadi, S.E – Jumirah – Pramadiansyah – Romai Kurniawan, S.E – Wahyu Dona Pasa Sulendra – Ahmad Zaini – Al Kania, S.P., M.E.

Cetakan I, Oktober 2017

ISBN: 978-602-1154-85-4

Diterbitkan oleh

**Project Implementing Unit (PIU), Pusbindiklatren
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia**

Jalan Proklamasi Nomor 70 Jakarta Pusat 10320

Kata Pengantar

Professional Human Resource Development (PHRD-IV) merupakan program beasiswa Bappenas bergelar S2 dan S3 maupun non-gelar (*Short-term Training Program, Staff Enhancement Program, dan Program for Academic Staff*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia khususnya dari daerah. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan meningkatkan sumber daya manusia di pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan mengurangi disparitas ekonomi antar daerah.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan bagi para penerima beasiswa PHRD-IV dapat melakukan pendalaman pengetahuan dan penelitian terkait pembangunan bersifat konkret yang dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing. Di samping itu, para penerima beasiswa juga diharapkan dapat mengunjungi fasilitas-fasilitas publik dan pemangku kepentingan setempat yang terkait dengan bidang studinya sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan pemahaman lebih mendalam.

Buku *Bunga Rampai Tesis/Disertasi Program Beasiswa PHRD-IV, Tema: Administrasi dan Ekonomi* ini merupakan buku kedua dari dua buku yang akan diterbitkan pada tahun 2017, sebagai salah satu upaya mendiseminasikan karya tulis ilmiah yang telah diselesaikan oleh karyasiswa penerima beasiswa PHRD-IV.

Agar hasil-hasil penelitian tesis/disertasi dalam program PHRD-IV dapat tersebar luas, maka hasil-hasil penelitian tersebut dirangkum untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Tujuan *pertama* setelah diterbitkan adalah agar dapat direplikasi atau diadopsi di tempat kerja karyasiswa; *kedua*, sebagai *benchmark* pemanfaatannya di instansi pemerintah lain; dan *ketiga*, merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan kegiatan PHRD-IV, dalam bentuk terbitan ilmiah buku ber-ISBN sehingga dapat disebutkan oleh karyasiswa dalam resume masing-masing.

Materi tesis/disertasi dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, yaitu Administrasi dan Ekonomi. *Kedua*, yaitu Perencanaan, Lingkungan, dan Teknik Lingkungan. Dasar pembagiannya adalah disiplin keilmuan (*tree of science*) serta keseimbangan jumlah materi tesis/disertasi yang ada.

Serial buku ini diharapkan dapat menggambarkan manfaat dan kontribusi positif Program PHRD-IV terhadap peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah, dan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Program PHRD-IV juga diharapkan

dapat berkontribusi bagi pencapaian sasaran prioritas nasional dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Versi cetak serial buku ini dapat di akses secara *online* www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Jakarta, Oktober 2017

Pusbindiklatren Bappenas

Daftar Isi

KATA PENGANTAR — III

**KINERJA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI SLEMAN
PERFORMANCE OF REGIONAL LAND MANAGEMENT OFFICE IN CONTROL LAND UTILIZATION AT SLEMAN**

Agus Widodo — 1

**ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN
ANALYSIS OF THE ENHANCEMENT ACCELERATION STRATEGY OF BIRTH CERTIFICATE OWNERSHIP
BY POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY AT KEBUMEN REGENCY**

Anindya Arief Setiadi — 11

**KESIAPAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN
INSPECTORATE GENERAL MINISTRY OF WORKS READINESS**

Cornelia Rina Krismawardhani — 23

**SISTEM REMUNERASI BERDASARKAN EKSPEKTASI DAN KEPUASAN PEGAWAI (STUDI DI RSUD SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO)
REMUNERATION SYSTEM BASED ON EMPLOYEES EXPECTATION AND SATISFACTION (STUDY AT RSUD SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO)**

Dwigana Sholichatin — 33

**WASTE BANK ROLE IN MAGELANG MUNICIPALITY SOLID WASTE MANAGEMENT
PERAN BANK SAMPAH DI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Fitasari Ayu Wardhani — 43

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA
MECHANISMS OF FILLING THE POSITIONS OF HIGH LEADERSHIP THROUGH AN OPEN SELECTION IN KUBU RAYA REGENCY**

Nirmala Khrisna Dewi — 53

**DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE IN INDONESIA
CASE STUDY: ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL BENEFIT OF ORGANIC FARMING IN JAVA ISLAND
PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA
STUDI KASUS: MANFAAT EKONOMI DAN LINGKUNGAN PERTANIAN ORGANIK DI PULAU JAWA**

Nur Rahmi Endah Utami — 61

**ANALYZING INCIDENT COMMAND SYSTEM IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT (A LESSON LEARNED FROM DISASTER MANAGEMENT PRACTICES IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION)
ANALISA SISTEM KOMANDO TANGGAP BENCANA DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA (PELAJARAN DARI PRAKTIK PENGELOLAAN BENCANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Rr. Tantri Jazziyatul Khasanah — 71

**ANALISIS KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ANALYSIS OF E-PROCUREMENT POLICY IN MAKING ACCOUNTABILITY OF PUBLIC AND GOOD GOVERNANCE IN GUNUNGKIDUL DISTRICT**

Sigit Swastono — 81

**PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEREMPUAN DI TIGA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
POLITICS PARTICIPATION OF WOMEN MEMBER IN VILLAGE CONSULTATIVE BOARD AT THE THREE VILLAGES OF GUNUNGKIDUL REGENCY**

Supriyono — 93

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF HUTAN TANAMAN RAKYAT PROGRAM IN THE OGAN KOMERING ILIR REGENCY**

Zaraqo — 101

**STRATEGI PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ALAT ANALISIS STRATEGY FORMULATION FRAMEWORK
(STUDI DI PUSKESMAS PURWODADI KABUPATEN PASURUAN)
PLANNING STRATEGY OF PUBLIC SERVICE QUALITY IMPROVEMENT WITH STRATEGY FORMULATION FRAMEWORK ANALYSIS TOOLS
(STUDY AT PUSKESMAS PURWODADI PASURUAN REGENCY)**

Dian Titrisari Putrikusuma — 111

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA DINAS INDUSTRI PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO)
PROGRAM EVALUATION OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES COACHING AND DEVELOPMENT
(STUDY AT THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, PONOROGO REGENCY GOVERNMENT)**

Dina Trisian Iskandar — 119

**RENCANA AKSI REFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA)
ACTION PLAN OF GOVERMENT EMPLOYEES REFORM IN ACHIEVING NEUTRALITY OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES(STUDY IN BLORA REGENCY GOVERNMENT)**

M. Aminudin — 131

CONTINUING SCHOOL DROPOUT ISSUE IN INDONESIA'S BASIC EDUCATION: ASSESSING THE COMMUNITY AND HOUSEHOLD SOCIO-ECONOMIC BARRIERS LEADING CHILDREN TO DROPOUT OF SCHOOL

KELANJUTAN ISU PUTUS SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA: MENILAI HAMBATAN SOSIO-EKONOMI PADA ANAK-ANAK PUTUS SEKOLAH

Reni Tri Pujiastuti — 143

**KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
(STUDI DI BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI)
BAPPEDA BANYUWANGI PERFORMANCE IN FORMULATING THE LOCAL DEVELOPMENT**

**ACTION PLAN (RKPD)
(STUDY IN BAPPEDA OF BANYUWANGI REGENCY)**

Ribut Rahayu — 153

**STRATEGIC PLANNING TO PREVENT FOREST AND LAND FIRE IN INDONESIA
(CASE STUDY IN DIRECTORATE OF LAND AND FOREST FIRE CONTROLLING)
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN)**

Yosi Yosandi — 163

**THE IMPACT OF ROAD INFRASTRUCTURE ON HOUSEHOLD EXPENDITURE IN INDONESIA
DAMPAK INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI
INDONESIA**

Debby Trisia Lukman — 175

**DAMPAK KREDIT MIKRO TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PENGGUNA KREDIT
MIKRO DI INDONESIA
IMPACT OF MICRO CREDIT ON HOUSEHOLD WELLBEING THAT USE MICRO CREDIT IN
INDONESIA**

Eska Nugrahini — 183

**DAMPAK KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) TERHADAP
KONSUMSI RUMAH TANGGA
IMPACT OF DIRECT ASSISTANCE POLICY (BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT
- BLSM) ON HOUSEHOLD CONSUMPTION**

Hendra Subijanto — 191

**PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN PENDEKATAN
TABEL INPUT-OUTPUT
DETERMINATION OF KULON PROGO REGENCY LEADING SECTOR WITH INPUT-OUTPUT
TABLE APPROACH**

Imron Rosyadi — 197

**ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA
ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL IMPACT ON WELFARE IN INDONESIA**

Jumirah — 207

**THE IMPACT OF LEVIES ABOLITION POLICY ON FISH CONSUMPTION IN INDONESIA
DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERHADAP KONSUMSI IKAN DI
INDONESIA**

Pramahdiansyah — 219

**PENGARUH BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, PDRB DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2010 – 2014**

**IMPACT OF OPERATIONAL EXPENSES, CAPITAL EXPENDITURES, GRDP AND POVERTY RATE
AGAINST HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH SUMATRA PROVINCE 2010 - 2014**

Romai Kurniawan — 227

**EDUCATIONAL GENDER GAP AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA
KESENJANGAN PENDIDIKAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
INDONESIA**

Wahyu Dona Pasa Sulendra — 237

**PENGARUH KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM BATUBARA TERHADAP KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
THE EFFECT OF COAL ABUNDANCE ON INCOME INEQUALITY IN EAST KALIMANTAN
PROVINCE**

Ahmad Zaini — 247

**ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
ANALYSIS OF DISTRICT OWN SOURCE REVENUE (PAD) IMPACT AGAINST FINANCIAL
PERFORMANCE OF CITY OR DISTRICT GOVERNMENT IN WEST JAVA PROVINCE**

Ai Kania 259

**ANALISIS MENGENAI KETERSEDIAAN KEDELAI LOKAL DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA
KEDELAI DI KABUPATEN GROBOGAN
ANALYSIS OF LOCAL SOYBEAN AVAILABILITY FOR SUPPORTING SOYBEAN SELF
SUFFICIENCY IN GROBOGAN DISTRICT**

Taufiq Budi Prasetyo — 269

**KINERJA KANTOR PENGENDALIAN
PERTANAHAN DAERAH DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI
SLEMAN**

**PERFORMANCE OF REGIONAL LAND
MANAGEMENT OFFICE IN CONTROL LAND
UTILIZATION AT SLEMAN**

Nama : Agus Widodo
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Dalam penelitian ini kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) dalam pengendalian pemanfaatan tanah masih kurang karena meskipun target kinerja secara administratif tercapai, namun ditemukan adanya indikator bahwa data pemanfaatan lahan masih belum sesuai dengan kenyataan dilapangan. Masih banyak program dan kegiatan yang belum memenuhi prinsip administrasi yang baik serta masih banyak keluhan mengenai kinerja pengendalian pemanfaatan lahan. Dari hasil temuan dilapangan, kurangnya kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah disebabkan oleh 1), struktur organisasi terutama spesifikasi pekerjaan tidak dapat dijalankan sesuai jabatan. Dan kewenangan yang dimiliki masih terbatas. 2) masih ada kesenjangan antara kebutuhan ideal pegawai dengan kemampuan pegawai yang ada dan rendahnya ability sehingga menimbulkan adanya rangkap jabatan. 3) ketidakberpihakan anggaran dan buruknya perencanaan anggaran membuat program dan kegiatan menjadi tidak leluasa dijalankan. 4) masih belum adanya standar operasional prosedur dalam hubungan antar organisasi perangkat daerah dalam pengawasan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan membuat pelayanan menjadi tidak standar. 5) masih adanya celah dalam regulasi kebijakan perizinan pertanahan dan tata ruang, membuat pengendalian pertanahan menjadi semakin kompleks dan rumit.

Kata kunci: Sistem Administrasi Publik, Kinerja Organisasi, KPP

ABSTRACT

In this study the performance of the Office of Regional Land Control in controlling the use of land is still less because although administrative performance targets are achieved yet found any indication that the data of land use is still not correspond to the reality on the ground. There are still many programs and activities that do not meet the principles of Administrative good and still a lot of complaints about the performance of control of land use. From the findings in the field, a lack of performance Control Office Regional Land due to 1), the organizational structure, especially the job specifications can not be run in accordance positions. And the authority is still limited. 2) there is still a gap between the ideal needs of employees with the capabilities of existing employees and low ability causing the double post. 3) impartiality budget and poor budget planning made programs and activities be freely executed. 4) still have not their standard operating procedures in the relationship between regional organizations in monitoring the use of land and land conflict resolution making services are not standard. 5) there is still a gap in the regulation of licensing policy and spatial land, making land management is becoming increasingly complex and complicated.

Keywords: System of Public Administration, Organizational Performance, Regional Land Management Office

Adanya Permasalahan Dalam Kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah

Maraknya perubahan pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Sleman menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak negatif dari adanya perubahan pemanfaatan lahan menurut Krisdyatmiko (2015), Wicaksono (2015), dan Suwito (2016) adalah a) dampak sosial yaitu mengubah pola interaksi masyarakat yang berbasis budaya pertanian dari komunal menjadi individualis. Sehingga masyarakat terpinggirkan di wilayahnya sendiri. b) dampak ekonomi yaitu menurunkan penghasilan petani dan mengganggu produktifitas pertanian. Lebih lanjut Wicaksono dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat ketahanan pangan di Sleman mengalami penurunan rata-rata 8,85% pertahun. Dan c) dampak ekologis yaitu terhalangnya fungsi resapan air karena semakin banyaknya bangunan yang memanfaatkan daerah resapan air dan mengakibatkan kekeringan. Lebih lanjut Suwito (2016) menjelaskan bahwa kurangnya resapan air di wilayah Kabupaten Sleman akan ditanggung oleh Kabupaten/ Kota yang berada dibawahnya yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Seperti kejadian banjir di bantaran Kali Winongo dan Kali Code pada Bulan Maret tahun 2016 yang membuat warga di bantaran kedua kali tersebut diungsikan (harianjogja.com).

Pentingnya kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil beras dan sebagai daerah resapan air (sumber air) sudah disadari oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya melindungi lahan di Sleman dari ancaman alih fungsi lahan baik untuk permukiman atau untuk tujuan lain. Upaya melindungi ancaman alih fungsi lahan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031.

Dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman harus melindungi sawah abadi seluas 12.377 ha dan menetapkan pembatasan alih fungsi lahan maksimal 100 hektar persegi pertahun. Namun kebijakan ini tidak efektif karena pada tahun 2014, dari catatan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K), di wilayah Pemkab Sleman sepanjang tahun 2014 areal persawahan menurun dari 22.560 ha menjadi seluas 22.300 hektar atau mencapai 260 ha.

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah sebagai organisasi publik yang mempunyai tugas utama mengendalikan pemanfaatan tanah menghadapi berbagai persoalan dalam melaksanakan tugasnya. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dihadapkan pada tantangan untuk dapat memuaskan semua pihak yang dilayani. Oleh karena itu Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah diharuskan meningkatkan kinerja secara terus menerus. Dalam kasus ini kinerja adalah kemampuan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi yaitu pengendalian pemanfaatan tanah di wilayah Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kinerja organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah ini memiliki makna penting karena peranan dan kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah sangat strategis dan memiliki dampak yang luas, melewati batas wilayah kabupaten.

Besarnya dampak alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Sleman terhadap masa depan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan kondisi lingkungan di wilayah DI Yogyakarta maka tanggung jawab Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam pengendalian pemanfaatan tanah sangat besar. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa ada permasalahan dalam kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Dengan demikian sangat diperlukan analisis mengenai kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dengan harapan dapat mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan tanah di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas/kemampuan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengayaan ilmu administrasi publik khususnya mengenai analisis kinerja organisasi publik. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk alternatif informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi publik di daerah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam penelitian ini dilihat sebagai wadah atau wahana interaksi dimana para petugas, aparat birokrasi, atau pejabat yang berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Dari definisi tersebut, maka proses terbentuknya struktur organisasi merupakan logika penyederhanaan kerja yang terdiri dari adanya kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja di antara anggotanya karena pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tidak dapat dilakukan sendiri. Atas pembagian kerja tersebut, maka diperlukan koordinasi di antara berbagai departemen, unit kerja, dan individu-individu yang memiliki tugas berbeda-beda (Purwanto,2012; h130).

Dalam wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembagian satuan organisasi dalam struktur organisasi di Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah masih belum tetap. Pengelompokan tugas dan fungsi masih tidak serumpun antara fungsi pelayanan di kantor dengan fungsi pelayanan dilapangan. Kendala perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan, terutama pada pelayanan informasi yang dilakukan oleh staf Subbagian Tata Usaha, padahal pelayanan informasi merupakan fungsi dari Seksi Pemetaan dan Informasi Usaha sehingga pelayanan menjadi tidak efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah tidak tepat karena tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mintzberg (1979:h7) bahwa spesialisasi kegiatan, berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementalisasi), sehingga kelompok pekerjaan ini menjadi serumpun. Jika satuan-satuan kerja tidak didasarkan pada pekerjaan yang serumpun, maka akan terjadi ketidakefektifan.

Terkait dengan kecukupan kewenangan, dalam penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah hanyalah pengawasan pasca izin dan fasilitasi permasalahan pertanahan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Kantor Pengendalian Pertanahan tidak akan bisa melakukan pengendalian pemanfaatan tanah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kusdi (2009;h180) bahwa sentralisasi (kewenangan) didefinisikan sebagai sejauhmana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada perseorangan, sebuah unit, atau suatu level. Dengan kewenangan yang terbatas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat membuat pilihan-pilihan yang bebas karena tergantung pada organisasi yang lain. Keterbatasan

pilihan dalam membuat keputusan akan menjadi kendala dalam keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab (Sutarto,2006;h162).

Dilihat dari definisi operasional resposivitas, bahwa organisasi yang memiliki respon terhadap aspirasi dari publik rendah, menunjukkan lemahnya kinerja resposibilitas organisasi tersebut. Dari faktor struktur organiasi ada dua hal yang secara signifikan mempengaruhi kinerja resposivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah yaitu; 1) ketidaktepatan struttuktur organisasi mangakibatkan pelayanan informasi (baik aduan, saran, dan kritik) baik secara offline dan online di Kantor Pengendalian Pertanahan menjadi tidak berjalan. 2) Keterbatasan kewewenangan membuat kegiatan penyelesaian masalah pertanahan menjadi lebih lama karena adanya ketergantungan terhadap organisasi perangkat daerah lainnya dalam penyelesaiannya. Sedangkan pengaruh terhadap kinerja responsibilitas dan akuntabilitas tidak secara signifikan (tidak secara langsung) berpengaruh.

Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menynergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya akan menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan,2009;h1). Dalam wawancara dan observasi penulis menemukan bahwa di Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, sebagian besar pegawai, kemampuannya tidak sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi.

Dari hasil wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa kesenjangan kemampuan menimbulkan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai lain. Pengalihan tanggung jawab pekerjaan menimbulkan beban kerja berlebih pada sebagian pegawai. Beban yang berlebih membuat kinerja pegawai menurun karena membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Kekurangan kemampuan seharusnya bisa diatasi jika ada kemauan untuk belajar atau motivasi untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Namun dengan sebagian besar pegawai yang mendekati usia pensiun, kemauan (motivasi) untuk bekerja juga ikut menurun. Kurangnya motivasi kerja membuat peningkatan kemampuan pegawai tidak terjadi. Dua kondisi tersebut membuat kinerja pegawai menjadi turun yang pada akhirnya kinerja organisasi menjadi buruk, karena kedua hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Jika kemampuan dan kemauan (motivasi) berada dalam level yang baik maka kinerja organisasi juga akan baik dan juga berlaku sebaliknya. Seperti diungkapkan oleh Purwanto (2012;h151), kemauan (motivasi) dan kemampuan merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang menjadi tanggung jawab organisasi. Komitmen tersebut akan berkontribusi dalam menghasilkan output

kerja yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki kompetensi atau keahlian atau kemampuan untuk menjalankan tugas yang didelegasikan.

Pelaksanaan kegiatan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar menunjukkan bahwa kinerja responsibilitas suatu organisasi berada pada level yang baik. Dari data hasil penelitian di atas terlihat bahwa kegiatan dan program diselesaikan hanya oleh beberapa pegawai saja. Sehingga beberapa target tidak tercapai seperti tidak selesainya Rencana Strategis Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Laporan Administratif yang banyak terlambat. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar.

Sedangkan pada kinerja responsivitas dan akuntabilitas, pengaruhnya tidak secara langsung. Pegawai yang kelimpahan pekerjaan dari pegawai yang lain akan memilih dan memilah pekerjaan sehingga target kerja seperti Rencana Strategis dan beberapa laporan administratif tidak tercapai. Akses publik terhadap laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban juga tidak menjadi prioritas.

Financial/Anggaran: Ketersediaan anggaran

Sebaik apa pun strategi dan program direncanakan dan dirumuskan tetap harus diikuti dengan dukungan/ketersediaan fasilitas (termasuk di dalamnya dana) yang memadahi agar bisa berjalan dengan baik. Dari data hasil penelitian di atas, sangat terlihat bahwa pada pelaksanaan beberapa kegiatan anggaran yang ada tidak mencukupi, sehingga beberapa pos anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan yang lain. seperti pos BBM dialihkan untuk transport peserta kegiatan. Kualitas komputer untuk pemetaan dan olah data pertanahan tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan karena tidak ada anggaran. Padahal pemetaan dan olah data pertanahan sudah harus dalam bentuk digital. Tidak sesuainya spesifikasi komputer yang ada juga membuat pengembangan sistem informasi pertanahan tidak berjalan. Berbagai permasalahan tersebut membuat kinerja dan kapasitas organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi buruk. Hal tersebut membuktikan pendapat Edwards (1980 dalam Winarno,2008;h188-189) bahwa seorang pelaksana mungkin mempunyai staf memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ketersediaan dana/kecukupan dana, maka besar kemungkinan implementasi (program dan kegiatan) yang direncanakan akan gagal.

Kekurangan dana membuat Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah tidak dapat menyediakan fasilitas pelayanan informasi pertanahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bisa melakukan komunikasi online sehingga membuat saluran

aspirasi masyarakat menjadi kurang lancar atau malah macet. Macetnya saluran aspirasi masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja responsivitas organisasi. Kekurangan dana juga membuat kegiatan penyelesaian masalah pertanahan juga menjadi tebang pilih untuk memenuhi target capaian kinerja. Hal tersebut membuat respon organisasi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan menurun dan terkesan pilih-pilih.

Tambal sulam anggaran juga membuat pelaksanaan kegiatan dan program menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar serta tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan organisasi. Itu berarti kinerja responsibilitas organisasi rendah.

Tersendatnya pelayanan informasi offline dan macetnya komunikasi online membuat publik tidak bisa leluasa mengakses pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program, sehingga kinerja akuntabilitas juga ikut menurun.

Koordinasi antar organisasi

Kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah yang melibatkan banyak organisasi membuat koordinasi dan kerjasama antar berbagai organisasi dan aktor yang terlibat menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi (Purwanto,2012;h138). Dengan metode koordinasi kerja sequensial pada proses implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah, maka keberhasilan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah sangat tergantung dari kesuksesan tahap pertama dalam penyusunan peraturan zonasi pertanahan terutama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) dalam pengendalian pemanfaatan tanah masih buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi indikator kinerja yang digunakan penulis, yaitu: Pertama, Tidak berjalan pelayanan informasi baik offline dan online serta penyerapan aspirasi hanya dilakukan pada kegiatan wajib (Musrenbang, survey kepuasan masyarakat), membuat saluran penyerapan aspirasi menjadi macet. Hal tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan informasi, adanya ketidaksinkronan kegiatan, ketidaktegasan terhadap pelanggaran, lamanya waktu pelayanan proses perizinan tanah kas desa, dan sulitnya akses data dan informasi pertanahan. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan yang selama ini dihasilkan birokrasi belum dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Tinggi atau banyaknya

keluhan dari masyarakat mengenai kegiatan, dan pelayanan publik menunjukkan bahwa responsivitas organisasi dalam mengantisipasi keluhan masyarakat pengguna jasa sangat lemah (Dwiyanto,2002;h61).

Kedua, tidak adanya Rencana Strategis SKPD, perencanaan anggaran yang tidak baik, tambal sulam anggaran kegiatan, dan tebang pilih penyelesaian masalah pertanahan. Menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi. Organisasi yang pelaksanaan kegiatan dan program tidak konsisten dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerja responsibilitas organisasi tersebut rendah (Dwiyanto,1995;h10)

Ketiga, merangkum dari pendapat Dwiyanto (2002,h49-55) dan Elwood (1993 dalam Mahsun, 2006;h86-87) akuntabilitas organisasi bisa dilihat: 1) Apakah prosedur dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik, dalam ranah kebijakan aturan pengendalian pemanfaatan tanah belum didukung Rencana Detail Tata Ruang, dan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada tataran teknis, aturan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Ruang belum ada, Mekanisme dan jaringan pengawasan pemanfaatan tanah belum ada. 2) Apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan bagaimana penilaian anggota DPRD. Dalam LPPD tahun 2015 diakui bahwa alih fungsi lahan masih tinggi, meskipun realisasi keuangan mencapai 90,58% dan capaian kinerja urusan wajib pertanahan mencapai 100%, dan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman memberikan penilaian kurang terhadap kinerja pengendalian pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah karena banyak laporan permasalahan pertanahan. 3) dapat dilihat apakah masyarakat dapat mengakses pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan kritikan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Akses publik terhadap laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban tidak berjalan karena tidak berjalannya pelayanan offline dan online. Dan penyerapan aspirasi masih terbatas pada kegiatan dan program resmi. Kombinasi ketiga hal tersebut membuat kinerja akuntabilitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi buruk.

Kinerja atau kemampuan implementing agency untuk menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau efektivitas organisasi tersebut. Kapasitas organisasi itu sendiri merupakan fungsi dari berbagai macam hal (Purwanto,2012;h125). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dibahas dalam bab terdahulu, bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah memiliki berbagai permasalahan sehingga belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

**ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN
PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN KEBUMEN**

**ANALYSIS OF THE ENHANCEMENT
ACCELERATION STRATEGY OF BIRTH
CERTIFICATE OWNERSHIP
BY POPULATION AND CIVIL REGISTRATION
AGENCY AT KEBUMEN REGENCY**

Nama : Anindya Arief Setiadi
Unit Kerja : Din Hub Kominfo Pemerintah Kabupaten
Kebumen
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik. Konsep ini dinamakan konsep Five C's Strategy. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dukungan data sekunder dari instansi terkait. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan strategi percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Core strategy, kelemahan strategi ini adalah sampai saat ini belum dibentuk UPTD sehingga fungsi pelayanan belum bisa dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Kata kunci: Akta Kelahiran, pelayanan publik, strategi peningkatan kinerja

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the acceleration strategies in the birth certificate ownership that have been implemented by the Department of Population and Civil Registration using the concept which proposed by Osborne and Plastrik.

The method in this research is a descriptive qualitative. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis technique consists of data reduction, data presentation and conclusion. The data collection is done by in-depth interviews, observation and support secondary data from relevant instance. The data analysis technique consists of data reduction, data presentation and conclusion.

The research results shows some weaknesses and obstacles in the implementation strategy of accelerating the increase ownership Birth Certificates. Core strategy, the weaknesses of this strategy are up to this time have not established Technical Implementation Unit so the service function can not be implemented at district level. The absence UPTD resulted Civil Registration Division carry out two functions, policy-makers and service functions.

Keywords: birth certificate, public services, performance improvement strategy

Tesis ini menganalisis tentang strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Upaya untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran penting dilakukan sebagai bentuk kewajiban negara dalam rangka melindungi sekaligus memenuhi hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Secara konseptual, hak atas kewarganegaraan termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, namun hal tersebut akan berdampak pada penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam skala nasional, berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, dari sekitar 82 juta anak Indonesia, 27% diantaranya tidak memiliki akta kelahiran, 19% memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan, 1% tidak tahu dan hanya 53% yang memiliki serta dapat menunjukkannya. Hasil SUSENAS 2012 juga menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan tidak dipunyainya Akta Kelahiran oleh penduduk.

Untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana penelitian ini dilakukan, tugas dan wewenang untuk menerbitkan Akta Kelahiran telah dimandatkan oleh Bupati Kebumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perbup No. 77 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dalam Perbup tersebut disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selaku instansi yang diberi mandat, mengingat arti penting Akta Kelahiran bagi penduduk seperti yang disebutkan di atas, Dispendukcapil berusaha agar tingkat kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kebumen memiliki prosentase yang tinggi. Beberapa strategi telah dilaksanakan seperti dengan menyelenggarakan beberapa model pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Beberapa model pelayanan tersebut diantaranya adalah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas terkait dengan penerbitan Akta Kelahiran cepat bagi bayi yang baru dilahirkan, program jemput bola ke pelosok desa dalam rangka mendekatkan pelayanan yang dinamakan dengan program "SEHATI" Sehari dan Pasti serta fasilitasi terhadap Bidan Desa yang akan mengurus secara kolektif pembuatan Akta Kelahiran bagi pasiennya.

Namun dari pelaksanaan beberapa strategi tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran secara signifikan dan angka keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran juga masih relatif tinggi. Kenaikan rasio kepemilikan Akta

Kelahiran bagi anak (0-17) tahun belum menggambarkan angka yang menggembirakan karena tingkat kepemilikannya masih saja berkuat pada angka 50 an persen. Sementara dari total penduduk yang mengurus Akta Kelahiran tiap tahun hampir 50% diantaranya terlambat (melebihi dua bulan dari kelahiran).

Dengan kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian analisis terhadap strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam upaya mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan perumusan masalah seperti disebutkan di atas, penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen dalam upaya mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahira

Analisis Strategi Terkuat dan Terlemah

Strategi terkuat yang telah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran adalah Customer strategy. Hal ini didasari dari telah diselenggarakannya berbagai model pelayanan sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Disamping pelayanan reguler yang dilaksanakan di kantor Dispendukcapil, masyarakat bisa mengurus pembuatan Akta Kelahiran melalui Rumah Sakit/Puskesmas, Bidan maupun pada saat pelaksanaan pelayanan jemput bola.

Selain menyelenggarakan berbagai model pelayanan, Dispendukcapil dalam pelayanan Akta Kelahiran juga telah memberikan jaminan mutu pelayanan dengan terdapatnya Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kelahiran serta sistem keluhan pelanggan. Dalam SOP telah disebutkan dengan jelas persyaratan, prosedur dan jangka waktu pelayanan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh tentang mekanisme pengurusan Akta Kelahiran dan memperoleh jaminan waktu penyelesaian. Apabila masyarakat mengalami permasalahan atau mau menyampaikan keluhan, Dispendukcapil juga telah menyediakan sarana untuk menyampaikannya, baik itu melalui tatap muka langsung ataupun lewat media elektronik seperti Twitter, Facebook, Email dan Whatsapp. Nomor HP pejabat juga telah terpampang dalam spanduk besar yang terdapat di halaman gedung Dispendukcapil sehingga masyarakat bisa mengadu langsung kepada para pejabat jika menemui hambatan atau permasalahan.

Customer Strategy merupakan satu-satunya strategi yang mempunyai keterkaitan dan berpengaruh secara langsung kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan strategi ini akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dispendukcapil. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, permasalahan utama yang kerap dijumpai dari pelaksanaan berbagai model pelayanan adalah ketidaksinkronan data ataupun data yang belum diperbaharui. Untuk data yang belum diperbaharui kasus yang sering dijumpai diantaranya status perkawinan yang belum diubah, belum dipungainya Kartu Keluarga sendiri (masih menginduk KK orang tua) ataupun alamat yang tidak sesuai domisili, sementara untuk ketidaksinkronan data masalah yang sering dijumpai adalah perbedaan ejaan nama, tidak sesuai nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya. Hal ini terjadi karena di masyarakat khususnya di perdesaan, mengganti nama setelah menikah atau untuk mencegah sakit yang berkepanjangan masih kerap kali ditemui.

Inovasi pelayanan melibatkan Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan bisa juga dikembangkan dengan membuat aplikasi khusus atau memodifikasi aplikasi SIAK yang sudah ada. Dalam inovasi ini, pegawai Rumah Sakit/Puskesmas dan Bidan dimungkinkan untuk menginput form pembuatan Akta dengan melampirkan berkas permohonan. Pihak Dispendukcapil tinggal memverifikasi berkas permohonan dan memberikan persetujuan untuk mencetaknya. Jika hal ini dirasa tidak tepat, setidaknya pihak Rumah Sakit/ Puskesmas dan Bidan dapat menginput berkas permohonan dan tinggal mengambil Akta Kelahiran yang sudah jadi di Dispendukcapil. Dengan melakukan inovasi ini akan membuat proses pembuatan Akta Kelahiran menjadi lebih praktis, cepat dan mudah.

Strategi yang palih lemah dilakukan adalah Core Strategy. Hal ini dikarenakan belum adanya pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan peraturan dengan fungsi penyampaian pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil. Akibatnya Bidang Pencatatan Sipil sebagai unsur yang bertanggung jawab langsung dalam tugas pencatatan sipil tidak fokus pada satu fungsi saja. Dengan jumlah pegawai yang hanya 18 orang (termasuk pejabat) tentunya cukup merepotkan untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut sekaligus. Terlebih lagi jika melihat jumlah penduduk dan luas daerah yang harus dilayani. Penyampaian pelayanan kurang maksimal terutama jika ada acara pelayanan jemput bola, pelatihan, sosialisasi maupun rapat koordinasi, karena pegawai yang seharusnya memberikan pelayanan di kantor sering diikutkan atau diperbantukan dalam acara tersebut. Belum lagi pelaksanaan tugas-tugas lainnya seperti pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Belum dipisahkannya fungsi pembuat kebijakan dan penyampai pelayanan tidak terlepas dari belum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menurut UU No. 23 Tahun 2006 seharusnya berfungsi sebagai satuan kerja di tingkat kecamatan

yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta. UU No. 23 Tahun 2006 sebenarnya mengamanatkan pembentukan UPTD paling lambat tahun 2011, namun hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana.

Ketiadaan unit pelaksana pelayanan di tingkat kecamatan mengakibatkan masyarakat yang tidak mengurus Akta Kelahiran melalui Rumah Sakit/Puskesmas, Bidan atau pelayanan jemput bola harus membuat Akta Kelahiran di Dispendukcapil. Hal inilah yang cukup memberatkan terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pelosok desa yang jauh dari pusat pemerintahan dengan akses yang cukup sulit. Membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukannya dan hal ini dilakukan tidak hanya sekali tetapi minimal dua kali yakni pada saat menyerahkan berkas permohonan dan pada saat mengambil Akta yang sudah jadi. Belum lagi jika syarat permohonan yang dibawa tidak lengkap atau ada ketidaksesuaian data, mereka harus bolak-balik lagi untuk melengkapi dan membenarkannya.

Core strategy penting untuk diperhatikan mengingat strategi ini memusatkan pada fungsi pengarahan, sementara strategi lain memusatkan pada perbaikan fungsi pelaksanaan. Dilaksanakannya core strategy dengan baik, akan membantu menentukan arah tujuan yang hendak dicapai dan mengorganisir perjalanan organisasi (Osborne dan Plastrik, 2000:94-95).

Pengembangan Strategi

Core strategy memang menjadi strategi terlemah yang dilakukan Dispendukcapil untuk mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kebumen. Upaya untuk memisahkan fungsi pengarahan (pembuat kebijakan dan peraturan) dengan fungsi penyampaian pelayanan terbentur pada masalah klasik yakni keterbatasan dana dan sumber daya manusia (PNS). Walaupun demikian, usaha untuk mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan memperkuat strategi lainnya.

Belajar dari daerah lain yang telah berhasil mencapai prosentase kepemilikan Akta Kelahiran cukup tinggi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan strategi, diantaranya adalah peluncuran Kartu Insentif Anak (KIA) berfungsi sebagai kartu identitas warga yang berumur di bawah 17 tahun. Dengan menggunakan KIA, anak-anak akan memperoleh beberapa manfaat diantaranya mendapatkan keringanan atau diskon pada saat berbelanja atau menggunakan jasa di mitra pendukung yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Fasilitas yang didapat oleh pemegang KIA ini meliputi bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, boga/kuliner, busana dan transportasi.

Masih ada kalangan masyarakat yang menikah sesuai agama tetapi belum tercatat sehingga belum memiliki Surat/Akta Nikah. Hal ini menyebabkan anak-anaknya tidak dibuatkan Akta Kelahiran karena adanya anggapan tabu untuk membuat Akta Kelahiran tanpa mencantumkan nama ayah. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pengetahuan yang cukup dan keterbatasan finansial untuk mengatasi permasalahan ini. Keadaan inilah yang kemudian perlu untuk dicarikan solusi mengingat pemecahan permasalahan melibatkan beberapa instansi sehingga perlu terobosan inovasi untuk memperlancar proses penyelesaian melalui pengorganisasian pelayanan terpadu dengan harapan masyarakat tidak terbebani biaya yang memberatkan dan birokrasi yang berbelit.

Untuk melakukan program ini memang bukan perkara yang mudah, dibutuhkan komitmen melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi yang baik dalam menyiapkan segala sesuatunya. Salah satu cara untuk mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran adalah dengan mengembangkan relasi dalam pencatatan kelahiran.

Core strategy

Pada pelaksanaan core strategy, ada tiga pendekatan dilakukan yaitu penghapusan dan atau pelepasan fungsi penghambat kontribusi pada pencapaian tujuan, kejelasan peran dan kejelasan arah organisasi. Pada pendekatan penghapusan dan atau pelepasan fungsi yang menghambat kontribusi pencapaian tujuan, hal tersebut dilakukan dengan mendelegasikan beberapa fungsi pelayanan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, diantaranya pelayanan penerbitan Akta Kematian, Kartu Keluarga, perekaman dan pencetakan E-KTP yang dapat dilakukan di Kecamatan. Pendelegasian fungsi pelayanan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dimaksudkan agar pelayanan menjadi lebih dekat, mudah dan praktis. Dengan demikian akan lebih berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk fungsi pelayanan Akta Kelahiran belum bisa diserahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya personel dan belum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat Kecamatan.

Pada pendekatan kejelasan peran, belum ada pemisahan antara fungsi perumus kebijakan dan fungsi pelaksana pelayanan. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2008 menggariskan Dispendukcapil khususnya Bidang Pencatatan Sipil masih berperan sebagai perumus kebijakan teknis sekaligus sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan. Berikutnya pada pendekatan arah, Dispendukcapil telah mengembangkan suatu sistem yang secara berkesinambungan menetapkan tujuan, pengembangan

strategi dan pemilihan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Penetapan tujuan pelayanan dalam hal ini outcome dalam jangka 5 (lima) tahunan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra), sedangkan sasaran setiap tahunnya disusun dalam rencana kerja (Renja) SKPD. Dalam Rencana Strategi (Renstra) memuat diantaranya tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan organisasi, rencana program kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif lima tahun. Kelemahan yang dijumpai pada pendekatan ini adalah tujuan yang ditetapkan masih terlalu luas, belum spesifik untuk masing-masing misi dan adanya pegawai yang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap visi dan misi organisasi karena menganggap organisasi hanya menjalankan visi misi dari pejabat politik yang terpilih dalam Pilkada.

Consequences strategy

Pendekatan yang paling mungkin untuk diterapkan di Dispendukcapil adalah pendekatan manajemen kinerja. Pendekatan ini dilakukan dengan menetapkan standar dan pengukuran kinerja yang mengacu pada Sasara Kinerja PNS (SKP) dan Perilaku Kerja. Dalam SKP memuat uraian kegiatan tugas jabatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun oleh masing-masing personel dan juga target kuantitas/output yang harus dihasilkan dalam masing-masing kegiatan. Sementara Perilaku Kerja memuat unsur orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin kerjasma dan kepemimpinan (khusus pejabat). Pengukuran SKP dilakukan pada akhir tahun dengan menilai prosentase capaian/realisasi dengan target yang ditetapkan. Hasil nilai akhir prestasi kerja dihitung dengan menggabung prosentase nilai sasaran kerja PNS (SKP) dan nilai perilaku kerja dengan bobot masing-masing 60% dan 40%. Walaupun sudah diterapkan manajemen kerja, tetapi pemberian reward dan punishment belum dilakukan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Akta Kelahiran masih dianggap sebagai hal yang biasa, masih sebagai pekerjaan rutin.

Customer strategy

Pada pelaksanaan Customer strategy, ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan pilihan layanan bagi pelanggan dan pemastian mutu layanan. Pada pendekatan pilihan layanan bagi pelanggan, walaupun fungsi untuk menerbitkan Akta Kelahiran menjadi hak monopoli dari instansi pelaksana dalam hal ini Dispendukcapil berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun Dispendukcapil dalam pelaksanaannya menempuh beberapa model pelayanan. Beberapa model pelayanan tersebut yaitu kerjasama dengan Rumah Sakit/Puskesmas, kerjasama dengan Bidan Desa dan pelaksanaan pelayanan jemput bola ke desa-desa. Dengan demikian masyarakat mempunyai pilihan untuk mengurus pembuatan Akta

Kelahiran sesuai dengan keinginan mereka di luar mekanisme pengurusan secara reguler yang dilakukan di gedung Dispendukcapil. Hambatan yang ditemui dalam pendekatan ini adalah sering terjadinya ketidaksinkronan data sehingga harus bolak-balik ke Dispendukcapil untuk memperbaiki dokumen yang menyebabkan proses pembuatan menjadi lama. Disamping itu juga tidak semua Bidan mau membantu untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran, keterbatasan dana operasional Puskesmas terutama yang jaraknya jauh dan masalah koneksi jaringan pada saat pelayanan jemput bola.

Terkait dengan pendekatan pemastian mutu layanan, telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan kelahiran. SOP tersebut memuat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar aturan. Disamping SOP pencatatan kelahiran juga terdapat maklumat pelayanan dimana dalam maklumat tersebut memuat komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan kesediaan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika tidak menepati janji.

Control strategy

Control strategy dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan organisasi dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada masing-masing Kepala Seksi untuk menyusun anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan memperhatikan prioritas kebutuhan tanpa intervensi dari atasan. Masing-masing Bidang juga diberi peluang dalam hal penyusunan staf termasuk diantaranya merekrut pegawai dengan status Tenaga Harian Lepas (THL) yang sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan personel PNS yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proses pengadaan jasa juga sudah dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pejabat pengadaan sehingga mengurangi adanya intervensi dari atasan. Sementara laporan keuangan sudah dilakukan secara online melalui aplikasi SIMDA yang mengurangi bentuk kontrol secara manual. Kelemahan pada pendekatan ini adalah masih ditemuinya ego sektoral dari masing-masing Seksi/Sub Bag yang kadang memaksakan agar anggaran yang diajukannya diakomodir padahal anggaran tersebut belum terlalu urgen dan belum tentu dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Pemberdayaan pegawai yang dilaksanakan di Dispendukcapil dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada pegawai khususnya pegawai lini pertama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contohnya pembentukan tim/kelompok untuk melaksanakan

kegiatan program jemput bola ke desa-desa. Dalam tim tersebut terdiri dari karyawan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diberi tugas melaksanakan program jemput bola tanpa adanya pengawasan/kontrol yang ketat dan kaku dari atasan. Pejabat selaku atasan hanya akan mengecek apakah ada hambatan, jika tidak maka tim dapat bekerja dengan sendirinya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan pegawai juga dilakukan dengan menampung segala masukan, ide dan gagasan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan yang biasanya dilakukan pada saat apel pagi dan staff meeting. Kelemahan yang ditemui pada pendekatan ini adalah mekanisme penampungan ide dan gagasan dari pegawai belum dilakukan secara tepat, pimpinan terkesan "menginterogasi" pegawai apakah dengan ide yang disampaikan akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan atau apakah ide tersebut tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal ini mengakibatkan pegawai merasa malas untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

**KESIAPAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN**

**INSPECTORATE GENERAL MINISTRY OF
WORKS READINESS**

Nama : Cornelia Rina Krismawardhani
Unit Kerja : Inspektorat Wil II Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Tesis ini disusun untuk mengetahui hubungan antara iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan Computer Self-Efficacy dengan kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap adanya perubahan tata kerja yang akan terjadi dengan akan adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh kesiapan untuk berubah terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer hasil kuesioner yang disebar kepada seluruh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 114 kuesioner serta data sekunder lainnya.

Hasil pengolahan data menggunakan PLS menunjukkan bahwa semua variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Namun, tidak semua variabel independen memberikan pengaruh yang positif. Kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan untuk berubah. Namun, iklim organisasi memberikan pengaruh negatif terhadap kesiapan untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kesiapan untuk berubah sendiri memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator bagi variabel independen terhadap variabel dependen.

Kata Kunci: kesiapan untuk berubah, iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy.

ABSTRACT

This thesis was composed to know the connection between the organizational climate and organizational learning capability, technology readiness and Computer Self-Efficacy, and the readiness of the General Inspectorate of Ministry of Public Works and Housing towards the change of the working procedure happening due to the implementation of the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan in 2018. Besides, this research aims to see the effect of readiness to adjust towards the success in implementing the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. This research used the primary data of the results of 114 questionnaires which were distributed to all the auditors of the General Inspectorate of Ministry of Public Works and Housing and other secondary data.

The results of the data processing using PLS show that all the independent variables give the significant effect to the readiness in implementing the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. However, not all the independent variables give positive effects. The organizational learning capability, technology readiness and Computer Self-Efficacy give the positive effects to the readiness for change. On the other side, the organizational climate gives negative effects to readiness for change. The readiness for change gives significantly positive effects towards the effectiveness of the implementation of Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. The results of the research also show that the readiness for change is not the mediator variables to independent variables towards dependent variables.

Key words: readiness for change, organizational climate, organizational learning capability, technology readiness, and computer self-efficacy.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan maraknya penggunaan sistem informasi sebagai sarana pelaksanaan kegiatan. Sistem Informasi yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan anggaran antara lain Sistem Akuntansi Instansi, SIMAK BMN, SIM RKAKL, e-procurement, e-monitoring, dan lain-lain. Penggunaan sistem informasi ini, selain akan mempermudah pelaksanaan kegiatan, akan mengakibatkan data terkomputerisasi dan paperless (Ahmi. dkk,2014), besarnya volume transaksi (big data) serta kompleksitas data (Elefterie & Badea,2016) sehingga fokus dan cakupan audit juga bertambah dan berubah pada deteksi input, proses, dan output sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu (Ahmi.dkk,2014;Mahzan &Veerankutty,2011).

Pada sisi peningkatan kapabilitas Auditor Intern Pemerintah, seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharuskan untuk meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 2 (Infrastructure) menjadi level 3 (Integrated) sebelum tahun 2019 selaras dengan RPJMN 2015-2019. (LAKIP Itjen KempUPR 2015 dan Perka BPKP No.16 Tahun 2015).

Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa Auditor harus menggunakan metodologi audit yaitu antara lain adalah penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik sampling dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern. (Standar No. 3220 Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi dan Alokasi Sumber Daya, bagian Metodologi poin 42.c). Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi harus dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu audit telah banyak dilakukan. Elefterie & Badea (2016) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi memudahkan auditor untuk memperoleh data terkomputerisasi dengan lebih cepat dan mudah sehingga proses audit dapat mencapai hasil optimal dan meningkatkan efisiensi. Ahmi dkk (2014) mengusulkan konsep adopsi teknologi informasi oleh auditor menggunakan framework TOE (technological, organizational, and environment) perspectives dan menekankan pentingnya IT bagi auditor terutama untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses audit.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penelitian yang menunjukkan pentingnya pemanfaatan IT bagi pencapaian proses audit yang optimal, efektif, dan efisien, maka sebenarnya Sistem Manajemen Pengawasan merupakan hal yang

sangat penting dan strategis yang diperlukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawal pelaksanaan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara ekonomis, efektif, dan efisien. Penelitian tentang kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan ini bermanfaat untuk melihat pentingnya peran kesiapan untuk berubah dalam implementasi suatu Sistem Informasi Manajemen agar sistem yang terbangun dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan organisasi dan pengguna dalam rangka implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan agar sistem yang terbangun dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Analisa Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Kesiapan untuk berubah sendiri memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kesiapan untuk berubah memberikan pengaruh sebesar 0,027 (path coeff. = 0,270; t-stat = 2,854; p-values = 0,004; sig. level = 0,05) terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hasil pengujian data kuantitatif menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator bagi variabel independen terhadap variabel dependen.

Intepretasi data kuantitatif diperjelas kembali dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, peraturan terkait kegiatan Audit, literatur penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta literatur lain yang terkait.

Iklm Organisasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut para Auditor Iklm Organisasi pada sisi Pendekatan Sistem Terbuka telah mulai dilakukan walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum berhasil dilakukan. Di dalam dimensi Inovatif dan Fleksibilitas, para Auditor merasa bahwa organisasi memberikan perhatian dan tanggapan terhadap adanya perubahan dan tuntutan dari luar organisasi serta melakukan usaha-usaha untuk menghadapi perubahan dan tuntutan tersebut. Di sisi lain, para Auditor merasa bahwa ide baru dari para Auditor sudah mulai diterima oleh organisasi. Akan tetapi, realisasi dan pengembangan dari ide-ide baru tersebut masih terkendala dengan

masalah birokrasi yang terkenal berbelit-belit terlebih dari sisi penganggaran dan pertanggungjawabannya. Selain itu, cara-cara pemecahan masalah yang diusulkan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya dalam memberikan rekomendasi atas suatu temuan Audit, Auditor harus memberikan rekomendasi mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan temuan.

Auditor melihat bahwa perhatian terhadap revidi dan refleksi dari tujuan, strategi, dan proses kerja untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas telah diberikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengupayakan untuk melakukan perbaikan terhadap efektivitas pelaksanaan kerjasama antar pegawai. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat sebelum pelaksanaan audit, melakukan workshop sebagai media penyampaian peraturan atau prosedur baru yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Namun, cara kerja baru ini belum tentu mampu diadopsi dan dilaksanakan oleh Auditor secara cepat sehingga terjadi peningkatan kinerja. Auditor masih memerlukan tata kerja yang lebih rinci dan diskusi yang lebih mendalam dengan rekan sejawat ataupun tenaga ahli untuk melaksanakan suatu pekerjaan terutama pekerjaan yang baru.

Pada dimensi Fokus lingkungan luar, Auditor menganggap bahwa Fokus pada lingkungan luar kurang berpengaruh terhadap iklim organisasi yang mendukung kesiapan untuk berubah. Organisasi sudah melihat bahwa kebutuhan pelanggan sangat penting untuk diperhatikan. Organisasi mulai melakukan perbaikan pelayanan terhadap Auditor dan meningkatkan respon terhadap permintaan Auditor terkait pengawasan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, fokus ke dalam juga menjadi perhatian bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama dalam hal peningkatan kinerja pengawasan. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai organisasi publik tidak mencari peluang usaha lain selain melakukan pengawasan internal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kapabilitas Pembelajaran Organisasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mampu menyediakan sumber daya bagi organisasi untuk melakukan pembelajaran terutama pembelajaran yang mendorong kesiapan untuk berubah. Para Auditor didorong untuk mengambil risiko yang besar di dalam melakukan Audit. Hal ini lebih berkenaan dengan kondisi lapangan selama pelaksanaan Audit. Pelaksanaan Audit Lapangan mengandung risiko yang besar. Auditor harus melakukan perjalanan di segala medan baik itu melalui darat, air, dan udara untuk mencapai lokasi pekerjaan

yang diaudit. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Auditor selalu dibekali dengan pengetahuan, aturan, prosedur mengenai proses audit maupun karakteristik objek audit.

Proses belajar terjadi lewat kanal dialog dengan adanya sharing pengetahuan dan informasi serta diskusi antar Auditor. Kanal dialog yang diwujudkan di dalam rapat persiapan audit dan group aplikasi percakapan online digunakan untuk saling tukar menukar informasi dan pengetahuan. Kanal dialog ini juga digunakan untuk meningkatkan perasaan empati antar Auditor dengan sapaan dan ucapan selamat antar sesama Auditor. Kanal dialog ini juga digunakan untuk menyampaikan ide-ide baru mengenai proses Audit dan diskusi mengenai prosedur audit yang efektif.

Kesiapan Teknologi

Pengaruh kesiapan teknologi terhadap kesiapan untuk berubah yang tinggi dipengaruhi oleh latar belakang responden yang mayoritas telah menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2) serta usia mayoritas responden antara 25 sampai dengan 35 tahun. Perasaan optimis dipengaruhi oleh pengalaman dalam menggunakan teknologi yang dapat mempermudah proses, menyingkat waktu, menghemat tenaga, dan memperluas akses. Auditor yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi memiliki kesiapan teknologi yang tinggi pula. Kesiapan teknologi yang dimiliki para Auditor dipengaruhi oleh pengalamannya dalam menggunakan komputer dan aplikasi berbasis komputer. Pengalaman yang menyenangkan dalam menggunakan teknologi ini meningkatkan perasaan optimis dalam menggunakan teknologi.

Computer Self-Efficacy

Pengaruh computer self-efficacy terhadap kesiapan untuk berubah yang tinggi dipengaruhi oleh latar belakang responden yang mayoritas telah menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2) serta usia mayoritas responden antara 25 sampai dengan 35 tahun. Auditor yang pernah menempuh pendidikan tinggi memiliki tingkat kepercayaan diri dalam menggunakan komputer lebih tinggi. Computer Self-Efficacy dipengaruhi juga oleh pengalaman baik itu pengalaman menggunakan komputer secara umum maupun menggunakan sistem informasi secara khusus. Orang dengan jenjang pendidikan tinggi memiliki pengalaman menggunakan komputer dengan frekuensi yang tinggi. Responden dengan rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun merupakan generasi yang telah mengenal teknologi sejak usia anak-anak. Generasi Y ini memiliki keistimewaan dalam hal penguasaan teknologi (Meier, dkk.,2010). Responden juga ada yang masuk ke dalam kelompok Generasi X yang juga telah mengenal teknologi. Keterampilan generasi ini dalam menggunakan komputer

tentu sudah tidak dapat disangkal lagi. Mereka lebih familiar dengan aplikasi berbasis komputer. Mereka akan dengan mudah menerima adanya sistem informasi karena mereka memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan aplikasi berbasis komputer. Generasi Y memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menggunakan komputer dan aplikasinya.

Kesiapan untuk Berubah

Komitmen kolektif berkaitan dengan implementasi kebijakan internal di organisasi publik yang bersifat mandatori bukan pilihan. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam organisasi publik mau tidak mau harus dipatuhi oleh seluruh bawahannya. Kepatuhan tersebut akan lebih diperkuat apabila kebijakan tersebut diinstitusionalisasi menjadi sebuah peraturan.

Inspektur Jenderal sebagai pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus bersikap bijak dalam menyikapi kondisi kesiapan untuk berubah terutama dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Ketidaksiapan organisasi secara keseluruhan dapat menghambat proses adopsi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan oleh Auditor. Ketidaksiapan tersebut akan membuat Auditor sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan penolakan. Penolakan Auditor berpotensi menggagalkan implelementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Kwahk & Kim, 2008). Auditor akan memiliki alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Penolakan yang terjadi ini akan menghambat pencapaian tujuan dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, yaitu mempermudah proses pengawasan agar berjalan komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir secara online untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, penolakan tersebut akan memicu kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan secara khusus akan berakibat pada tidak tercapainya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan level IACM dari level 2 Infrastructure ke level 3 Integrated pada tahun 2019.

Pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu menjadi Agent of Change. Peran pimpinan sangat penting dalam proses inialisasi perubahan sampai dengan proses institusionalisasi perubahan tersebut (Wahid & Sein, 2013). Pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu mendorong dan mengawal agar implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja khususnya Inspektorat Jenderal dan umumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perspektif Baru Kesiapan untuk Berubah

Penelitian mengenai kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dengan variabel iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy sebagai variabel independen menghasilkan beberapa kesimpulan.

Kesiapan untuk berubah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipengaruhi secara positif oleh computer self-efficacy, kapabilitas pembelajaran organisasi, dan kesiapan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan computer self-efficacy, kapabilitas pembelajaran organisasi, dan kesiapan teknologi akan meningkatkan kesiapan untuk berubah. Computer Self-Efficacy memberikan pengaruh paling besar terhadap kesiapan untuk berubah. Hal ini terjadi karena mayoritas Auditor termasuk dalam Generasi X dan Generasi Y yang sudah mengenal teknologi semenjak kecil (Meier,dkk., 2010) serta latar belakang pendidikan para Auditor yang tinggi. Alasan ini juga yang mendukung kesiapan teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kesiapan untuk berubah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipengaruhi secara signifikan negatif oleh iklim organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Iklim Organisasi pada kuadran Sistem Terbuka akan menurunkan tingkat kesiapan untuk berubah terutama kepercayaan akan kemampuan kolektif untuk berubah. Temuan ini bertentangan dengan teori tentang Iklim Organisasi pada kuadran Sistem Terbuka Quinn and Rohrbaugh's Competing Values model yang digunakan oleh Patterson, dkk (2005) yang menyatakan bahwa Pendekatan Sistem Terbuka menekankan pada kesiapan, perubahan, dan inovasi. Temuan ini juga mendukung penelitian Rogiest, dkk (2015) bahwa iklim organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap komitmen organisasi untuk berubah.

Kesiapan berubah berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesiapan untuk berubah akan meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Temuan ini mendukung penelitian Yusof & Aziz (2015) yang menyatakan bahwa organisasi dengan tingkat kesiapan yang tinggi akan mendukung kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen.

Kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator antara variabel independen dengan variabel dependen. Iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy tidak berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel kesiapan untuk berubah terhadap variabel dependen kesuksesan perubahan sistem pengawasan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada variabel kesiapan untuk berubah dan variabel efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan berada dalam kategori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel selain iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy yang mempengaruhi kesiapan untuk berubah. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada variabel lain selain kesiapan untuk berubah yang mempengaruhi efektivitas implementasi Sistem

Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai kesiapan untuk berubah dalam menghadapi perubahan akibat adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen pada organisasi publik. Penelitian terdahulu tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen kebanyakan lebih menekankan kepada kesiapan pengguna baik itu dilihat dari kesiapan teknologi, Computer Self-Efficacy, TAM (Technology Acceptance Model), dan lainnya. (Wibowo, 2014; Kuddus, 2016; Wahyono, 2014; Florestiyanto, 2013; & Hadi, 2012) Penelitian ini mengkombinasikan antara kesiapan organisasi dilihat dari sudut pandang iklim organisasi dan kapabilitas pembelajaran organisasi serta kesiapan individu dilihat dari sudut pandang kesiapan teknologi dan Computer Self-Efficacy.

**SISTEM REMUNERASI BERDASARKAN
EKSPEKTASI DAN KEPUASAN PEGAWAI
(Studi di RSUD Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro)**

**REMUNERATION SYSTEM BASED
ON EMPLOYEES EXPECTATION AND
SATISFACTION
(Study at RSUD Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro)**

Nama : Dwiyana Sholichatin
Unit Kerja : RSUD Sumberrejo Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus melalui pemberian remunerasi finansial. Remunerasi perlu diterapkan dalam manajemen rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Remunerasi adalah hak yang wajar diterima oleh pegawai sebagaimana telah diatur dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sistem remunerasi harus diatur sedemikian rupa sehingga jelas dan terkendali pelaksanaannya, yang akan menjamin rasa aman, berharga, serta rasa adil bagi pegawai (Lampiran Kepmenkes No. 625/Menkes/SK/V/2010). Ketika sistem remunerasi tidak adil dan tidak layak, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial antar pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem remunerasi di RSUD Sumberrejo, dan menganalisis apakah ekspektasi dan kepuasan pegawai sudah menjadi ukuran sistem remunerasi di RSUD Sumberrejo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian secara cross-sectional.

Proses penyusunan sistem remunerasi RSUD Sumberrejo telah melibatkan berbagai pihak terkait baik dari perwakilan unit maupun perwakilan dari berbagai profesi. Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo terdiri dari dua pola pokok yaitu Jasa Langsung (66%) dan Jasa Tidak Langsung (34%). Jasa Langsung yaitu persentase jasa yang diberikan langsung kepada unit yang didasarkan pada pendapatan dari unit masing-masing. Sedangkan Jasa Tidak Langsung dibagikan ke Direktur (6%) dan sisanya diberikan kepada seluruh pegawai dengan menggunakan sistem indeksing yang telah mempertimbangkan pada: basic index (gaji pokok), competency index, risk index, emergency index, position index, dan performance index. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sistem remunerasi belum memenuhi ekspektasi dan kepuasan pegawai. Namun, perlu ditinjau kembali dalam hal penentuan perolehan remunerasi, yaitu harus benar-benar didasarkan pada kinerja bukan pada pekerjaan tambahan.

Katakunci: sistem administrasi rumah sakit, remunerasi, ekspektasi dan kepuasan pegawai

ABSTRACT

Human resources are an important element in the provision of quality health services. Therefore, special attention is required through the provision of financial remuneration. Remuneration needs to be applied in hospital management because it involves the cost of living and livelihood of all employees. Remuneration is a reasonable right received by employees as regulated in Law no. 44 of 2009 on Hospital. The remuneration system should be regulated in such a way that clear and controlled implementation will ensure safe, valuable, and fair sense for employees (Appendix Kepmenkes No. 625 / Menkes / SK / V / 2010). When the remuneration system is unfair and unfeasible, it will generate social jealousy among employees. This study aims to analyze the remuneration system in RSUD Sumberrejo, and analyze whether the expectation and employee satisfaction has become the size of the remuneration system in RSUD Sumberrejo. The research was conducted by qualitative approach with cross-sectional research design. The process of preparing the remuneration system of RSUD Sumberrejo has involved various related parties from both the unit representatives and representatives from various professions. The remuneration system of RSUD Sumberrejo consists of two main patterns, namely Direct Service (66%) and Indirect Services (34%). Direct Service is the percentage of services provided directly to the unit based on the revenue from each unit. Indirect Services are distributed to Directors (6%) and the remainder is provided to all employees using the indexing system that has considered: basic index, competency index, risk index, emergency index, position index and performance index. Based on the results of interviews with informants, the remuneration system has not met the expectations and employee satisfaction. However, it needs to be reviewed in terms of determination of remuneration gain, which should be based on performance rather than on additional work.

Keywords: hospital administration system, remuneration, expectation and employee satisfaction

SDM kesehatan merupakan unsur penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan, namun hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam hal rekrutmen, pemeliharaan, dan motivasinya (Bertone & Lagarde, 2016; Bertone & Witter, 2015). Dewasa ini, motivasi dan kinerja pegawai kesehatan menjadi isu hangat dan perdebatan utama dalam strategi manajemen SDM pada sistem pelayanan kesehatan (Nakpakpere, Tchable, & Gnoufougou, 2014). Oleh karena itu, remunerasi finansial untuk pegawai kesehatan menjadi perhatian utama dalam rangka mengatasi permasalahan manajemen SDM kesehatan (Bertone, Goire Lurton, & Mutombo, 2016). Remunerasi adalah hak pegawai yang bekerja di Rumah Sakit (UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit), sebagai kompensasi atas risiko terpapar oleh berbagai macam penyakit baik karena kontak dengan pasien langsung maupun akibat lingkungan kerja.

Sebagai sebuah organisasi dengan beragam profesi di dalamnya baik tenaga medis, tenaga keperawatan, maupun tenaga penunjang dan administrasi dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan kontribusinya masing-masing, maka rumah sakit harus mampu mengelola pegawainya dan memberikan kompensasi yang adil dan layak. Karena pegawai memiliki tingkat kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap imbalan jasa pelayanan kesehatan. Ketentuan dalam sistem remunerasi harus diatur sedemikian rupa secara jelas dan terkendali implementasinya sehingga melalui sistem remunerasi tersebut pegawai akan mendapatkan rasa aman, berharga dan merasa diperlakukan adil serta memiliki daya dorong motivasi (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010). Sehingga kebijakan remunerasi dirancang sesuai dengan organisasi tertentu dan disesuaikan dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai (Nakpakpere et al., 2014). Sistem remunerasi sebaiknya mampu memuaskan kebutuhan pegawai, memberikan imbalan atas kinerja pegawai, serta memberi perlakuan yang adil pada pegawai (Simamora, 2006: 461). Karena ketidakadilan pemberian remunerasi antara kelompok pegawai medis, paramedis, dan tenaga lainnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik berkepanjangan yang akan berdampak pada penurunan komitmen pegawai terhadap rumah sakit (Sudirman, 2016:24).

Tema ini menjadi menarik karena (1) pemberian imbalan jasa pelayanan (remunerasi) merupakan hak rumah sakit seperti dalam UU No. 44 Tahun 2009; (2) remunerasi dapat mendorong semangat kerja, "healthworker payments remain a core concern as a precondition for motivation" (Bertone et al., 2016); (3) remunerasi menjadi harapan pegawai untuk meningkatkan kesejahteraannya (Rumborumbo, 2015:1); dan (4) remunerasi selalu menjadi permasalahan karena munculnya kecemburuan sosial antarpegawai.

Sebelum menggunakan sistem remunerasi yang baru, RSUD Sumberrejo menggunakan sistem pembagian jasa pelayanan dengan menggunakan fee for service untuk pegawai

bagian pelayanan, dan menggunakan sistem poin tertentu untuk seluruh pegawai yang telah ditetapkan oleh direktur dengan berdasarkan pada golongan dalam kepegawaian. Sistem pembagian jasa pelayanan tersebut dirasakan masih jauh dari keadilan dan kelayakan, karena tingkat perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antarprofesi. Contohnya, jasa pelayanan yang diperoleh perawat di unit rawat inap lebih besar dibanding jasa pelayanan yang diperoleh perawat di unit rawat jalan. Selain itu, jasa pelayanan yang diperoleh pegawai bagian manajemen sangat rendah dibanding pegawai-pegawai lain. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dan ketidakpuasan pegawai terhadap perolehan jasa pelayanan, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya motivasi kerja pegawai yang dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang datang terlambat ke kantor serta adanya keluhan pegawai terhadap sistem pembagian jasa pelayanan tersebut. Penelitian ini mengulas mengenai sistem remunerasi ditinjau dari perspektif ekspektasi dan kepuasan pegawai.

Remunerasi

Remunerasi merupakan imbal jasa yang manfaatnya diterima pegawai berupa komponen-komponen untuk penghargaan atas pekerjaan dan penghargaan atas kinerja, selain untuk perlindungan keamanan pegawai dalam bekerja juga merupakan penghargaan atas masa kerja pegawai (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010). Istilah lain terkait remunerasi adalah insentif (incentive), yaitu tambahan kompensasi di atas atau selain gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi (Simamora, 2006: 445). Insentif kerja merupakan penghargaan berupa uang yang diberikan organisasi kepada pegawai agar mereka termotivasi dan berprestasi dalam bekerja demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi (Mangkunegara, 2008: 89). Remunerasi jasa pelayanan pada dasarnya adalah besaran nilai jumlah uang yang harus diterima oleh pegawai di pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas kinerja yang dilakukan berkaitan dengan tingkat risiko dan tanggung jawab profesi dari pekerjaannya (Emanuel & Edi, 2008).

Tujuan Remunerasi

Pembuatan suatu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, serta untuk memudahkan mencari strategi-strategi alternatif yang diperlukan (Abidin, 2012:133). Untuk itu, manajemen SDM harus memikirkan tujuan sistem remunerasi dan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut (Simamora, 2006: 449). Penentuan tujuan sistem remunerasi juga harus disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi karena tujuan yang baik adalah tujuan yang diinginkan oleh berbagai pihak, serta rasional dalam arti dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia, dan jelas

(Abidin, 2012:133). Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan menawarkan perangsang finansial (Yuswanti, 2015: 25). Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan dari pekerjaannya (Hasibuan, 2003: 120-121).

Sistem remunerasi adalah suatu sistem yang mengatur gaji, insentif, merit atau bonus pegawai di suatu organisasi, yang dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain tergantung pada tipe organisasi, kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan serta hasil pekerjaan (Anousheh, 2015). Sistem remunerasi di rumah sakit didefinisikan sebagai cara/mekanisme pembagian imbalan jasa atas kinerja pegawai secara adil dan layak, transparan dan memuaskan semua pihak. Dananya diperoleh dari pendapatan fungsional rumah sakit yang menyangkut jasa pelayanan (Yuswanti, 2015: 27). Dalam sistem remunerasi, hal tersulit untuk dilakukan adalah bagaimana menentukan cara pemberian remunerasi yang adil dan layak bagi pegawai (Tohardi, 2002:412). Sukses atau gagalnya sistem remunerasi tergantung pada bagaimana kesesuaian sistem tersebut dengan pelaksanaan keseluruhan sistem organisasi (Latief, 2008: 24). Sistem remunerasi yang tidak adil dapat memicu jurang pemisah (gap) diantara pegawai dan akhirnya menyulut kecemburuan sosial, timbul stress dan memunculkan konflik diantara sesama pegawai ataupun antara pegawai dengan pihak manajemen (Tohardi, 2002: 412).

Ada dua prinsip dasar dalam menerapkan sistem remunerasi di rumah sakit yaitu (Permenkes No. 18/2014):

Kelayakan, yaitu memenuhi kewajaran tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat kerja pegawai.

Keadilan. Prinsip ini meliputi: 1) keadilan penerimaan remunerasi; 2) keadilan penghargaan pekerjaan; 3) keadilan penghargaan kinerja; dan 4) keadilan penghargaan perorangan/individu.

Indikator Penilaian Sistem Remunerasi

Remunerasi rumah sakit ditetapkan berdasarkan kebutuhan profesional yang meliputi berbagai hal, perbedaan dalam bentuk pendapatan yang disebabkan oleh tingkat risiko pekerjaan, tingkat kesulitan, jenis spesialisasi/kompetensi yang dibutuhkan, senioritas, kelas dan jenis rumah sakit, serta jenis asuransi pemberi jaminan pelayanan (Yuswanti, 2015). Menyusun sistem remunerasi harus diikuti dengan menetapkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk menentukan nilai-nilai pegawai sebagai dasar untuk memperoleh remunerasi. Adapun indikator penilaian dalam penetapan

remunerasi menurut Permendagri No. 61 tahun 2007 yaitu: (1) Pengalaman dan masa kerja/basic index; (2) Ketrampilan dan ilmu pengetahuan/competency index; (3) Resiko kerja/risk index; (4) Tingkat kegawatdaruratan/emergency index; (5) Jabatan yang disandang/position index; dan (6) Hasil/capaian kinerja/performance index.

Ekspektasi Pegawai

Pada dasarnya, orang mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan (Suwatno & Priansa, 2011:172). Maka, pegawai memiliki ekspektasi-ekspektasi pada pekerjaan mereka demi untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi pegawai, imbalan yang telah diberikan organisasi memungkinkan pegawai untuk mempertahankan harkat dan martabatnya dan juga dapat memungkinkan pegawai mempertahankan taraf hidup yang wajar, layak, dan mandiri tanpa tergantung kepada orang lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Suwatno & Priansa, 2011: 219). Zainun (1989: 43) menyatakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar bagi adanya harapan yang akan diperoleh dari tercapainya tujuan organisasi, dan imbalan yang diharapkan akan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar yang diharapkan tersebut.

Ekspektasi adalah kemungkinan persepsi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berdasarkan atas pengalaman di masa lampau (Winardi, 2001:43). Sedangkan (De Simone, 2015) mendefinisikan ekspektasi sebagai suatu perkiraan seorang pegawai dari kemungkinan bahwa upaya yang berhubungan dengan pekerjaan akan menghasilkan tingkat kinerja tertentu. Teori terkait ekspektasi yaitu Equity Theory dan Expectancy Theory. Equity theory Smith bermula dengan penegasan bahwa kewajaran dan keadilan penting bagi semua orang. Teori ini memandang individu pegawai menentukan apakah dia telah diperlakukan secara wajar/adil dengan cara membandingkan rasio masukan/keluarannya dengan rasio masukan/keluaran orang lain (Davis, 1987: 64; Simamora, 2006: 453). Jika perbandingannya sama, pegawai merasa adil, namun jika perbandingannya tidak sama, maka pegawai merasakan ketidakadilan. Expectancy theory berhasil menjelaskan konsep motivasi dan ternyata teori ini sejalan dengan teori kebutuhan atau kepuasan (Zainun, 1989: 53). Expectancy theory Victor H. Vroom mengatakan bahwa jika seseorang melakukan pekerjaan tertentu sesuai kemampuannya, apakah mereka akan menerima imbalan yang sesuai dan apakah imbalan tersebut sesuai dengan tujuan mereka (Taboli, 2012).

Kepuasan Pegawai

Setiap pekerja mempunyai motif dan kebutuhan (needs) tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya (Hasibuan, 2003: 120). Ketika kebutuhan-kebutuhan

terpenuhi, maka pegawai akan merasakan kepuasan terhadap pekerjaannya dan akan semakin bersemangat untuk bekerja. Kepuasan menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Kepuasan merupakan suatu kondisi akhir yang timbul akibat tercapainya tujuan tertentu pegawai (Winardi, 2001: 137). Kepuasan kerja dilihat sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Wibowo, 2014: 413). Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi (Siagian, 2007: 253). Sulistiyani & Rosidah (2003: 214) menyatakan bahwa sistem imbalan yang paling adil dan wajar yaitu jika pegawai merasa bahwa sistem tersebut benar-benar adil, selain itu sistem imbalan ini juga harus dijelaskan kepada para pegawainya. Karena pada dasarnya kepuasan pegawai tercapai pada saat adanya keseimbangan antara harapan/ekspektasi pegawai terhadap imbalan yang diterima atas hasil kerja yang telah diberikannya kepada organisasi.

Sistem Remunerasi RSUD Sumberrejo

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 72 ayat (5) Perda Kab. Bojonegoro No. 8/2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sumberrejo. Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Bojonegoro tentang remunerasi dilakukan tanggal 27 Agustus 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur RSUD Sumberrejo No. 900/1447/210.412/2016 yang terdiri dari berbagai unsur profesi yang sekaligus merupakan perwakilan dari berbagai unit-unit pelayanan. Dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan, perlu dibedakan dua kelompok yaitu para pelaku (actors) yang terlibat langsung dalam proses perumusan atau penyusunan kebijakan, dan pihak terkait (stakeholders) yaitu yang terlibat/terkait dengan hasil dari suatu kebijakan (Abidin, 2012:134).

Jasa pelayanan RSUD Sumberrejo ditetapkan sebesar 30%-50% dari total pendapatan (Permenkes No. 28 Tahun 2014). Komponen pembagian jasa pelayanan dibedakan menjadi dua yaitu penghasil dan non-penghasil, yang diatur dalam dua pola dasar proporsi yakni Jasa Langsung (66%, untuk unit penghasil) dan Jasa Tidak Langsung (34%, untuk seluruh pegawai). Jasa tidak langsung dibagikan ke seluruh pegawai dengan menggunakan sistem indeksing (kecuali direktur). Setiap pegawai akan memperoleh total nilai poin/indeks yang didapatkan dari 6 (enam) komponen indeks yaitu Basic Index, Competency Index, Emergency Index, Risk Index, Position Index, dan Performance Index. Sistem indeksing yang diterapkan RSUD Sumberrejo telah sesuai dengan Pasal 53 Permendagri No. 61 Tahun 2007.

Ekspektasi Pegawai

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo sudah memenuhi aspek keadilan melalui perbedaan perolehan remunerasi untuk pegawai di unit penghasil dan unit non penghasil. Selain itu juga perbedaan indeks berdasarkan pada tingkat risiko, kegawatdaruratan, tanggungjawab yang diemban pegawai. Sesuai dengan equity theory Smith yang bermula dari penegasan bahwa kewajaran dan keadilan penting bagi semua orang. Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif meliputi individual equity, internal equity dan external equity (Angliawati, 2016). Dilihat dari aspek kelayakan, sudah memenuhi harapan pegawai yakni mengarah pada besarnya imbalan yang akan diperoleh. Terjadi peningkatan besaran imbalan yang diperoleh pegawai karena adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan yang tertuang dalam Perda Kab. Bojonegoro No. 8/2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sumberrejo. Harapan pegawai untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dibanding pada saat sistem yang sebelumnya adalah wajar seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Karena pada dasarnya, orang mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan (Suwatno & Priansa, 2011:172).

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek penghargaan hasil kinerja. Masih ditemukan adanya pengabaian kinerja, yakni terkait penetapan terhadap pekerjaan utama pegawai yang berhak mendapat remunerasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial antar pegawai dan dapat menurunkan kinerja pegawai lainnya. Karena reward dan pengakuan kerja memegang peranan penting dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai (Danish & Usman, 2010). Ketika usaha yang dilakukan pegawai diakui dan mendapat reward yang adil dan layak, maka pegawai akan lebih bersemangat/termotivasi dalam bekerja dengan harapan akan mendapatkan reward yang lebih besar. Harapan pegawai terhadap sistem remunerasi ditinjau dari aspek transparansi masih belum terpenuhi. Terbukti masih ada informan yang menanyakan tentang bagaimana mereka mendapatkan nominal tersebut. Sudah semestinya pegawai mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana mereka mendapatkan bagian baik itu jasa langsung (untuk unit penghasil) maupun jasa tidak langsung. Karena, sistem imbalan selain harus adil dan layak, juga harus dijelaskan kepada para pegawainya (Sulistiyani & Rosidah, 2003: 214).

Berdasarkan wawancara dengan bagian manajemen, yang menyatakan tidak akan bisa memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak, namun pihak manajemen telah melaksanakan usaha terbaik selama proses penyusunan remunerasi yang telah mengundang dan mendengarkan usulan atau masukan dari perwakilan unit-unit dan perwakilan profesi. Manajemen tidak berani menjamin bahwa sistem remunerasi akan memenuhi seluruh ekspektasi dan akan menimbulkan kepuasan pegawai, hal ini karena

ekspektasi dan kepuasan pegawai sangat dipengaruhi oleh subyektifitas masing-masing pegawai dan mereka telah memiliki ekspektasi-ekspektasi yang ingin mereka capai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat De Simone (2015) yang menyatakan ekspektasi sebagai suatu perkiraan seorang pegawai dari kemungkinan bahwa upaya yang berhubungan dengan pekerjaan akan menghasilkan tingkat kinerja tertentu.

Kepuasan Pegawai

Sistem remunerasi dilihat dari aspek kesesuaian dengan harapan, masih belum memenuhi kepuasan pegawai. Karena belum sesuai dengan harapan pegawai dalam aspek penghargaan atas hasil kerja meskipun sudah mengandung unsur keadilan dan kelayakan bagi pegawai. Karena pada dasarnya kepuasan pegawai tercapai pada saat adanya keseimbangan antara harapan/ekspektasi pegawai terhadap imbalan yang diterima atas hasil kerja yang telah diberikannya kepada organisasi. Jika dilihat kesesuaian harapan pegawai pada aspek kelayakan jumlah imbalan yang diterima, informan merasa puas karena apa yang diperolehnya meningkat dibanding sebelum sistem remunerasi. Meningkatnya imbalan yang diterima pegawai maka pegawai akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk kesejahteraan, status sosial dan egoistiknya.

Remunerasi RSUD Sumberrejo Masih Belum Memenuhi Ekspektasi

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek penghargaan atas kinerja dan transparan, namun sudah memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek keadilan dan kelayakan. Aspek keadilan dan kelayakan terpenuhi karena selama proses penyusunan sistem remunerasi telah melibatkan berbagai unsur profesi dan perwakilan unit yang sekaligus sebagai bagian dari Tim Penyusun Remunerasi. Pembagian jasa pelayanan ini dibagi menjadi dua yaitu penghasil dan non-penghasil, yang diatur dalam dua pola dasar yaitu: Jasa Langsung dan Jasa Tidak Langsung. Jasa Langsung di masing-masing unit dibagi dengan persentase yang telah ditetapkan dalam aturan internal. Sedangkan untuk Jasa Tidak Langsung menggunakan sistem indeksing (kecuali direktur). Ditinjau dari kepuasan pegawai, sistem remunerasi belum mampu memuaskan pegawai baik dari aspek kesesuaian dengan harapan, komponen perhitungan remunerasi, maupun perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan untuk pelaksanaan sistem remunerasi RSUD Sumberrejo di masa depan.

**WASTE BANK ROLE IN MAGELANG
MUNICIPALITY SOLID WASTE
MANAGEMENT**

**PERAN BANK SAMPAH DI PENGELOLAAN
LIMBAH PADAT PEMERINTAH KOTA
MAGELANG**

Nama : Fitasari Ayu Wardhani
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota
Magelang
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM-JEPANG

ABSTRACT

Waste bank is a place for sorting valuable recyclable waste, which can give incentive for its members. It has been developed quickly in Indonesia. The Indonesian government fully supports this movement by establishing Regulation of the Ministry of Environment No.13 of 2012. It is also part of national strategy for controlling pollution and environmental damage, which is projected to contribute for 31% of total waste reduction targeted in five years. Many overloaded landfill sites and limited land available require waste reduction from the source. Waste bank is expected to change Indonesia people's behavior who often burn waste and dump it illegally. However, waste bank performance in Magelang is still limited. This research aims to identify needed policies that should be implemented by government for optimizing waste bank role in Magelang City solid waste management. The study uses qualitative method with case study in Ngudi Raharjo, a waste bank in Magelang City. It also draws lessons learned from one of the best waste bank in Indonesia, Malang Waste Bank, and from an advanced solid waste management in Kyoto, Japan. This research found that waste bank which applies composting and recycling has contribution on recyclable inorganic and organic waste reduction. It also has social and educational contribution to the community by raising their environment pro-awareness and social bond among members through waste bank operations and related activities. This study also tries to make policy recommendations for strengthening operational capacity of CWBs

ABSTRAK

Bank Sampah adalah tempat untuk menyortir limbah daur ulang yang berharga, yang dapat memberi insentif bagi anggotanya. Ini telah berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan ini dengan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2012. Ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang diproyeksikan berkontribusi untuk 31% dari total pengurangan limbah yang ditargetkan pada lima tahun. Banyak situs TPA yang kelebihan beban dan lahan terbatas yang tersedia memerlukan pengurangan limbah dari sumbernya. Bank Sampah ini diharapkan bisa mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang sering membakar sampah dan membuangnya secara tidak sah. Namun, kinerja bank sampah di Magelang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang dibutuhkan agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan peran bank sampah dalam pengelolaan sampah padat di Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Ngudi Raharjo, sebuah bank sampah di Kota Magelang. Ini juga menarik pelajaran dari salah satu bank limbah terbaik di Indonesia, Malang Waste Bank, dan dari pengelolaan limbah padat di Kyoto, Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa limbah bank yang menerapkan pengomposan dan daur ulang memiliki kontribusi terhadap pengurangan limbah anorganik dan organik daur ulang. Ini juga memberi kontribusi sosial dan pendidikan kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran lingkungan dan ikatan sosial antar anggota melalui operasi bank limbah dan kegiatan terkait. Studi ini juga mencoba membuat rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas operasional CWB.

In Indonesia two ministries have authority in managing solid waste. Ministry of environment and forestry is responsible for improving waste management system while Ministry of public works and public housing is responsible for developing solid waste infrastructure. Those two ministries help the local government, which mandated as solid waste management operator by Law No 18 of 2008, organizes appropriate solid waste management corresponding duties and authority in the context of decentralization.

Based on the Law, government is responsible for financing waste transportation from the source to final disposal site. In the implementation, local government handles transportation only from temporary shelter to landfill site because of capability limitation. Community has responsibility to transport their waste to the temporary shelters. Local government is only able to provide several temporary shelters so sometimes those facilities quite far away from settlement.

This condition triggers many people dumping their waste to the river, vacant land or even burning it. According to economic condition, citizens do not want to spend their money for dumping their waste to temporary shelters. Waste burning and illegal dumping are easier, faster and cheaper. There is any contradiction between people's awareness with people's behavior. Survey held by Central Statistics Bureau in 2012 argued that more than 60% households knew that burning waste might pollute the air and they had to separate their waste before dispose it (as cited in Kiswanto, Novitasari, Ardiansyah, and Noor, 2014, p. 101). However, more than 75% households never separate their waste, while 25% households living in urban area and 54% households living in rural area burn their waste (as cited in Kiswanto, Wijaya, & Sartono, 2014, p.124).

The main job of local government is managing waste dumped in temporary shelters. It means only managing 21-64% from total waste generated. Different from Japan where landfill site is only for dumping ash produced by incinerator, landfill site in Indonesia is used for dumping all the waste. Most local governments only move it from temporary shelters to final disposal site. Accommodating only that amount of waste, many final disposal sites are overloaded. If many landfill sites must be closed, the number of illegal dumping and waste burning will increase significantly. Based on this profile, household's behavior toward waste has important role for better solid waste management. Encouraging people to reduce, reuse and recycle (3Rs) is important for avoiding the waste disaster.

Ma'ruf and Suyatno (2015, pp. 55-56) claimed that people participation in Surabaya's waste management significantly effects to waste reduction entered the landfill site after "flood waste" in 2001. They counted that waste dumped to Surabaya's landfill site in 2012 was only 36% from amount of waste dumped in 2005. One of programs related with people participation on waste management is "waste bank", which first introduced

in 2008 and regulated by Ministry of Environment in 2012. Based on the regulation, waste bank is defined as a sorting and collecting place for recyclable waste, which still has economic value. Different from conventional bank customers that saving their money, waste bank members deposit their recyclable waste. It gives incentives to its members to encourage them separate their waste especially for low-income household. Members of waste bank deposit their recyclable waste such as plastic, paper, metal, glass, etc. The amount of their saving is equivalent with waste's commercial value.

This program is part of national strategy for controlling pollution and environmental damage (Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2015, pp 19-20). As more people participation toward solid waste management, waste banks are expected to contribute for 113,150ton waste reduction in 5 years or 31% from total waste reduction target (p.38). The Ministry of Environment hoped that it could increase people's environmental awareness for sorting their waste (as cited in Fauziah, Mardiyono, & Kawano, 2015).

Existing Problems

Magelang is a minuscule city with 18km² territory area and densely populated and no disposal space is available in this city. Magelang City final disposal site, Banyuurip, is located in the neighboring regency. Overload of landfill site is appeared in Banyuurip, although only 40% of volume waste generated enters this site. Expansion of Banyuurip is very difficult since it is not accordance with the neighboring regency spatial regulation. Landfill site is too close to the settlement (\pm 100 m) and to the water source (\pm 250 m). The management does not even meet sanitary landfill standard because of needed high operational cost to implement this method. Local government budget and the tipping fee are not enough to support it. Landfill often emits bad smell and triggers local people's complains. Sukarman, a resident who lives around Banyuurip, told that wildfire often occurs annually in this area (as cited Fitriana, 2015, para.8&9). Unrecovered methane emitted from landfill causes flammable areas triggering the wildfire. Ground water around Banyuurip was polluted with lead and cadmium exceeding the maximum concentration allowed although the surrounding area is categorized as difficult and very difficult polluted zone based (Ermawati, 2014, p. 113). New final disposal site plan that can accommodate waste from two districts is still far away to be come true.

On the other hand, 52.23% from total waste generated in Magelang City is burnt or dumped illegally. Since this city is flanked by two rivers (Elo River in the east side and Progo River in the west side) and has other two rivers flowing through the middle of city, peoples are easy to dump their waste to the river. Unfortunately, waste banks performance in Magelang City is very low. Waste bank program is supposed to reduce

recyclable inorganic waste, which constitutes of 39% of Magelang City total waste. However, 56 waste banks are only able to reduce 1.72 m³/day or 0.5% of total waste generated in entire city. Comparing with potential waste that could be managed, its low waste reduction result indicates ineffectiveness of this program. Moreover, only around 3.57% households actively join this program even though Magelang Municipality already encouraged society by conducting waste bank competition with appealing money prize. If landfill site is closed and the role of waste bank in waste reduction is still small, amount of illegal dumping and waste burning will raise. Therefore, Magelang City citizen's participation in waste bank is needed to be increased to prolong landfill site utilization age and reduce both illegal dumping and waste burning.

Waste Bank Development

Mandated on Regulation of the Ministry of Environment No.13 of 2012, it is local government responsibility to increase citizen's participation on waste bank. One of Magelang Municipality programs is organizing waste bank competition. The second winner of this competition in 2016 is a community-based waste bank (Ngudi Raharjo), which combines composting and recycling in their activities. The waste bank members can deposit not only their inorganic waste but also chopped organic waste. The value of one kilogram of chopped organic waste is Rp.200 (¥1.6/kg). Then, the waste bank composts the organic waste and uses it for planting vegetables and fruits. The crops are sold as waste bank income. This breakthrough successfully attracts members chopping household organic waste and sell them to the waste bank even the price is very cheap.

According to the Environment Agency Magelang Municipality (2015), the household waste has 43.7% organic composition (10% yard waste and 33.7% food waste). Organic waste composting will be so much important on waste reduction. The waste bank system applied by Ngudi Raharjo potentially gives bigger contribution for reducing waste. Considering the necessity in improving waste bank role and 14% of Magelang Municipality's waste reduction target in 2021, promoting this composting system has a chance to achieve those goals.

Besides increasing citizen's participation, local governments should help marketing product from community-based waste banks. Then, Magelang Municipality established a holding waste bank in 2016. Magelang holding waste bank purposes to buy inorganic waste collected by community-based waste banks. It imitates Malang Waste Bank (a holding waste bank in Malang City) that was claimed by Fauziah et al. (2015) as a successful waste bank attracting many people to separate their waste. Magelang Municipality provides an office building, facilities, equipment and one unit of pick-up. Since it is still new, it only has few clients. It does not operate regularly and does not

have full time employee working there. To develop Magelang holding waste bank, it is important to learn from best practices about main factors determining waste bank success and failure.

The objective of this research is to identify needed policies that should be implemented by the government for optimizing waste bank role in Magelang City solid waste management. Below research questions are raised for attaining the objective.

How waste bank system which applying composting and recycling can be utilized in terms of economic, social, educational and technological instrument?

What kind of lessons drawn from other waste bank best practices that can be applied?

Holding Waste Bank (HWB) in Malang as an Advanced Model

BSM is “created” by Malang Municipality. Legally, BSM is a co-operative enterprise owned by its members but several government officials are BSM’s members. This connectivity eases BSM to get subsidies from Malang Municipality. As national pilot of HWB, it gets Power Company’s CSR since 2011. Both Malang Municipality and Power Co. are important stakeholders which support BSM so it can survive although often produces losses. They were giving aids (fund, equipment, employee, facilities and infrastructures), and establishing companion program (socialization, training and coaching for BSM clients, sanitation village competition, and pay electricity by waste program).

Sanitation village competition held by Malang Municipality and Power Company CSR successfully attracts CWBs to be BSM clients. Only villages which have CWBs as BSM’s clients can join this competition with total prize ¥1.9 million for 5 villages. Clients mean groups that have saving account in BSM. This policy that is strengthened with incentive policy price (saving price higher than cash) indirectly gives BSM fund which can be used for operation.

On the other hand, “pay electricity by waste” program, which aims to ensure waste bank sustainability and ease society to pay electricity bill, does not have good attractiveness. This program seems difficult to be implemented. One of reasons is monthly electricity bill is too expensive. It cannot be covered by waste saving in one month. Based on author estimation , one household produces 10.26 kg valuable waste/month as worth as ¥85.5. However, one household usually must pay more than ¥833/month for electricity. Therefore, waste saving only covers maximum 10% of the bill. The big gap between bill and waste value effects on the amount of benefit perceived. The society

is not interested to pay electricity bill with waste because they feel the value of benefit perceived is too small compared with their effort collecting waste in whole month.

During 6 years operation, BSM successfully gained profit only in 2014. Many reasons were explained before. In addition, author points several potential weaknesses¹. Magelang Municipality and Magelang HWB management should pay attention with those potential weaknesses when developing Magelang HWB.

In BSM co-operative enterprise, BSM employees must be co-operative members. This policy makes employees become more loyal and responsible with their job. However, not all clients are BSM's members. Whereas, BSM has enough capital investment and does not depend on aids if BSM can attract many clients become members. The clients as owners want to receive benefit from their investment. It will avoid loss because clients are encouraged depositing more waste to BSM. Increasing number of BSM waste purchasing from clients raises the BSM sales. It can produce profit growth. Besides, more waste accepted by BSM, more waste reduction. Society will be more aware with their waste so they do not burn or dump the valuable waste.

An Advanced Solid Waste Management in Kyoto City, Japan

From above description, it can be concluded that Kyoto City applies advanced solid waste management. Hardoy, Mitlin, & Satterthwaite (1992, p. 134) claimed solid waste management provided in developed country needs high cost. It is a fact that advanced solid waste management needs huge capital and operational budget. Kyoto Municipality spend ¥32 billion for building a clean center and ¥52.3 billion for establishing landfill site with ¥22 billion expenditure for waste treatment each year. One of factors influencing effectiveness of this system is waste separation from the source. If citizens separate their waste carefully based on characteristic determined, distinguishing recyclables and hazardous, waste burned into incinerator is limited. Energy used for operating clean center and ash dumped to landfill site decline. Expenditure for waste treatment reduces. At the same time, it extends landfill site utilization terms and lessens greenhouse gas emission.

Considering this argument, Kyoto City rigorous regulations about waste disposal are right policies, encouraging waste separation from the source as citizen's responsibility. Kyoto citizens must buy paid designated bags but it does not cause problems for them because Japanese people have high income. Furthermore, people's awareness about purpose of waste disposal rules is quite good. To increase environmental awareness since beginning, there is a program for schoolchildren visiting clean center and

1

landfill site. Japanese citizens who have high education are easy to understand how to separate based on these complex requirements. In addition, Japanese disciplined culture influences their obedience for practicing waste separation. Kyoto City assigns manufacturing, restaurant, supermarket, festivals, hotel and universities as six areas emphasized for waste reduction and separation. The decided policies supported by Kyoto citizen's participation produce good outcome. The shutdown of two clean centers represents a result of Kyoto City's effort supporting waste reduction by recycling promotion. In 2004, there were five clean centers operated, but since 2013, only three plants work (north, east north and south).

On the other hand, Indonesia as a middle-income country does not have enough capacity on both capital and human resource to operate advanced solid waste management like in Japan. Table 6.2 shows the comparison between Japan and Indonesia about level of education and income. Although paid designated bags policy is successfully implemented in Kyoto, it may not work in Indonesia. Indonesian citizens might refuse to buy paid designated bags considering their income and solid waste management system in Indonesia. It is easy and free to dump garbage to temporary shelters. Another reason is citizen's compliance obeying regulation and environmental awareness. Burning waste and dumping it illegally still become bad habits. Indonesia people cannot follow waste dumping time schedule. Furthermore, many scavengers pick up valuable waste from trash bins going around the city, different from Kyoto where waste belongs to government and no scavenger picking waste. In addition, with level of education especially in rural area, Indonesian people might have difficulty to understand the complicated ways to disposal like rules used in Kyoto.

It is difficult for society to separate waste properly if there is no penalty or incentive given. Although giving reward and punishment is mandated by law, there is no government regulation released. Furthermore, local government cannot suddenly give punishment for citizens who do not separate their waste when the system and infrastructure supporting this policy is not ready yet. Magelang Municipality also faces this condition. Therefore, waste bank as a sorting and collecting place for recyclable waste, which offers incentive to its members, is expected to encourage citizens doing waste separation. They are willing to do that since they realize that recyclable items are valuable especially for low-income households. Dumping recyclable waste means dumping money.

Citizen's awareness about the importance of waste separation and benefits by joining waste bank is expected to decrease amount of waste burned and dumped illegally. People's participation leads to waste reduction in temporary shelters and final disposal site. Cost for waste transportation from temporary shelters to landfill site will be

reduced. Additionally, waste reduction from the source may extend final disposal site utilization term.

CWBs which applies composting and recycling have contribution to solid waste management in Magelang by playing role on waste reduction. Recyclable inorganic waste collected increases year by year, while organic waste collected is still limited due to small demand. In addition, it has social and educational contribution to the community by raising their environment pro-awareness and social bond among members through waste bank operations and related activities.

BSM, The National Pilot Of HWB

CWB still utilizes low technology with limited capacity in its operation. As voluntary organization, CWB lacks human resources in term of quality and quantity. It impacts on the low skill management in accounting, limited track record, not transparent and not accountable. CWB receives very small economic benefit from its operation. Since the current regulations (Law No. 23 of 2014 and Government Regulation No. 46 of 2013) create constraint of CWB's sustainable operation, integrating CWBs into HWB can help to resolve the problems.

This study found that BSM, a national pilot of HWB and one of the best waste banks in Indonesia, often produced losses during 6 years operation although it received many aids from Malang Municipality and Power Company's CSR. Learning from BSM practices, there are potential weaknesses in BSM operation, (1) not all BSM clients are BSM co-operative members, (2) most of waste purchasing is picked up by BSM not delivered by clients, (3) inappropriately client's waste separation, and (4) some administration still in manual based.

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN KUBU
RAYA**

**MECHANISMS OF FILLING THE POSITIONS
OF HIGH LEADERSHIP THROUGH AN OPEN
SELECTION IN KUBU RAYA REGENCY**

Nama : Nirmala Khrisna Dewi
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses serta tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka secara umum sudah berjalan dengan baik, hal ini didasarkan atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata cara dan pedoman serta tidak ditemukannya praktek-praktek transaksional dalam penentuan pejabat yang terpilih. Selain itu hasil dari pelaksanaan seleksi juga dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan promosi dan mutasi pejabat.

Kata kunci: *Pengisian jabatan, jabatan pimpinan tinggi pratama, seleksi terbuka, merit sistem.*

ABSTRACT

This study was conducted to determine the mechanisms of filling the positions of high leadership through an open selection in Kubu Raya. The focus of this research is in the process and stage charging of filling leadership positions and stage charging and what are the constraints facing. The method used in this study is a qualitative research method with data collection was conducted through interviews, observation and documentation.

The results showed that the implementation of filling high leadership positions through an open selection in general has been running well, it's based on the suitability of the activities with the procedures and guidelines and there is no transactional practices in the determination of elected officials. In addition the results of the implementation of selection is also used as a reference for the Regional Head in carrying out promotions and transfers of officials.

Keywords: Filling positions, Officials high leadership, open recruitment, merit system

Sesuai dengan UU ASN, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai melaksanakan seleksi terbuka pada 3 (tiga) jabatan kosong tersebut. Dalam melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi.

Tahap persiapan dimulai dengan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah melalui koordinasi dengan Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN). Panitia seleksi terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana pada unsur internal diisi oleh 2 (dua) orang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sedangkan unsur eksternal diisi oleh 3 (tiga) orang akademisi atau profesional.

Masalah lain yang ditemui adalah dalam tahap pelaksanaan dimana sampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan, pegawai yang mendaftarkan diri hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Ini terdiri dari 4 (empat) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, 8 (delapan) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu serta 10 (sepuluh) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Jumlah pegawai yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi jabatan tersebut masih tidak sesuai dengan ekspektasi karena dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kubu Raya, paling tidak terdapat 80 (delapan puluh) orang pegawai yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti seleksi jabatan tersebut. Tapi ternyata, jumlah pegawai yang mengikuti seleksi terbuka tersebut tidak lebih dari 50 persen dari target yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa ternyata masih banyak pegawai yang enggan untuk mengikuti seleksi terbuka ini sehingga pelaksanaan seleksi terbuka ini menjadi tidak se-kompetitif seperti yang diharapkan.

Tahapan pelaksanaan dilanjutkan dengan serangkaian seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara serta tes psikologi. Setelah berbagai tahapan seleksi tersebut, maka kemudian Panitia Seleksi menentukan 3 (tiga) nama dari masing-masing jabatan untuk kemudian diserahkan kepada Bupati. Bupati memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa dari 3 (tiga) nama tersebut yang akan dipilih untuk menduduki jabatan. Kewenangan penuh Bupati dalam memilih pejabat tersebut juga kemudian menjadi celah bagi terjadinya praktek-praktek transasional.

Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi dimana pada tahap ini pejabat yang terpilih akan diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)

dan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan orientasi tugas selama satu bulan. Rangkaian tes yang begitu panjang berdampak tidak hanya pada keharusan untuk mengalokasikan waktu yang lebih pada pelaksanaan kegiatan juga berimplikasi pada penyediaan dana yang juga cukup besar.

Selain itu, belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dinilai oleh pelaksana sebagai suatu kendala. Sesuai dengan UU ASN pasal 74 bahwasanya pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 sampai pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak adanya aturan operasional baku dalam teknis pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut sehingga dimungkinkan terjadinya multiinterpretasi dalam pelaksanaannya utamanya dalam proses maupun cara serta parameter penilaian. Walaupun dalam pelaksanaannya seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah namun idealnya pelaksanaan seleksi terbuka hendaknya didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum dapat disahkan karena masih dilakukan pembahasan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan latar belakang di atas, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan. Adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah tentang pengisian jabatan yang dilaksanakan secara tertutup dirasakan sudah tidak lagi ideal. Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka kemudian pertanyaan penelitian adalah bagaimana mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta masukan dalam bentuk karya ilmiah khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengenai pelaksanaan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan tinggi pratama dalam rangka pelaksanaan *civil service reform* di tingkat daerah.

Analisis Mekanisme dan Kendala

Mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) tahapan penting dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratamadimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya tidak lepas dari berbagai kendala. Pola pengisian jabatan yang baru yang jauh berbeda dengan pola lama yang dilaksanakan tentunya menimbulkan banyak perubahan yang harus dilakukan bagi penyelenggara kegiatan. Perubahan yang cukup signifikan juga dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dimana mereka dituntut untuk dapat siap menerima pola baru dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun kendala yang ditemukan oleh penulis dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya akan dibahas melalui 3 (tiga) hal yakni kendala suplai, kendala ethis dan kendala organisasional.

Dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menghadapi kendala dalam hal jumlah/suplai dari calon pejabat yang bersedia untuk ikut serta dalam pelaksanaan seleksi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk ikut serta dalam pelaksanaan seleksi terbuka untuk 3 (tiga) jabatan yang berjumlah hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) peserta. Ini terdiri dari 4 (empat) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, 8 (delapan) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu serta 10 (sepuluh) orang mendaftarkan diri pada jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Padahal dari informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa terdapat kurang lebih 80 (delapan puluh) orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka.

Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai isu yang berkembang mengenai keraguan akan obyektivitas dan transparansi dari pelaksanaan seleksi terbuka. Untuk mengatasi hal tersebut maka Panitia Seleksi kemudian menetapkan Kode Etik Panitia Seleksi melalui Peraturan Panitia Seleksi Nomor : 01/PANSEL-PTP-KKR/2015.

Kendala organisasional yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka antara lain adalah pada alokasi anggaran serta pada kebijakan mengenai seleksi terbuka. Mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu

Raya secara umum sudah dilaksanakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian proses dan tahapan seleksi dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Secara Umum Sudah Berjalan Dengan Baik

Kendala yang ditemukan dalam mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Sedikitnya jumlah pelamar yang memutuskan ikut dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dikarenakan beberapa hal yaitu masih adanya keraguan bahwa proses seleksi terbuka akan dilaksanakan secara murni dan transparan sehingga masih adanya anggapan bahwa terdapat orang-orang yang telah dipersiapkan pada jabatan-jabatan tersebut. Selain itu masih terdapat pihak-pihak yang merasa bahwa jabatan adalah merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja sehingga merasa kurang sesuai apabila jabatan harus dilamar. Mereka menganggap bahwa jabatan harusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja bukan sesuatu yang harus mereka kejar dan usahakan melalui berbagai rangkaian tes yang panjang. Disisi lain mereka yang memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi dalam seleksi terbuka merasa bahwa tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

Masih adanya isu dan anggapan mengenai pelaksanaan seleksi terbuka yang tidak obyektif dan tidak transparan.

Kendala organisasional yakni pada besarnya alokasi anggaran yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka serta pada peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan seleksi terbuka yang sampai saat ini belum disahkan.

Proses penentuan pejabat yang akan dipilih oleh Bupati didasarkan atas wawancara secara *face to face* yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan masing-masing peserta yang telah berhasil lulus seleksi. Hasil dari pelaksanaan seleksi dijadikan pedoman dan acuan bagi Bupati dalam melakukan promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

**DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE
AGRICULTURE IN INDONESIA
Case Study: Economic and Environmental
Benefit of Organic Farming in Java Island**

**PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG
BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Studi Kasus: Manfaat Ekonomi dan
Lingkungan Pertanian Organik di Pulau
Jawa**

Nama : Nur Rahmi Endah Utami
Unit Kerja : Direktorat Perlindungan Pangan
Kementerian Pertanian
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM-JEPANG

ABSTRACT

Sustainable development in agricultural sector in Indonesia has been being promoted for almost 28 years. Initially, it was triggered by the adverse effects of the green revolution policy that led to the food insecurity and economic instability. In order to address those challenges, in 2016, government stipulated a thousand organic villages policy. Despite being known as one of the rice production centers in Java Island and the pioneer of organic rice farming, many farmers in Yogyakarta Special Region are still reluctant to follow organic farming due to the less confidence of farmers in gaining its outcomes and the difficulty to sell their products. This research aims to describe the development of sustainable agriculture globally and particularly in Indonesia; to describe agricultural policies that have been promoted in Indonesia to actualize sustainable agriculture; to analyze the financial benefit of organic rice farming, and to analyze constraints in developing organic rice farming faced by farmers and environmental benefits gained from organic rice farming. This research uses purposive method for defining sample and revenue cost ratio analysis for assessing the feasibility of organic farming. Internationally, the concept of organic farming as a manifestation of the last movement of sustainable development in agricultural sector has been initiated for many years. Also, in Indonesia, the current direction of sustainable agricultural development leads to organic. Government together with researchers, NGOs, and other environmental communities have contributed to the improvement of sustainable agriculture policies. The result shows that the organic rice farming is profitable and feasible to be widely developed, mainly in other area in Yogyakarta Special Region. Indeed, the farmers are also enjoying the higher revenue due to the premium prices and higher productivity of their organic rice. While, as its environmental impact, the farmers had experienced a significant production decreasing for 2 years during the process of soil fertility improvement. Besides, the study reveals another advantage of organic farming is strengthen social bond among farmers. In addition to all advantages gained by farmers, there are several problems arise, such as the high cost of organic certification, high domestic demand, limited amount of agricultural labors, the inability of farmers to produce their own organic fertilizer, and lacking marketing infrastructure for organic product. Hence, the greater attention from government to overcome all those problem is needed in order to promote the sustainability of organic farming.

Keyword: development, sustainable, agriculture, farming, organic

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian di Indonesia telah dipromosikan selama hampir 28 tahun. Awalnya, hal itu dipicu oleh efek buruk dari kebijakan revolusi hijau yang menyebabkan kerawanan pangan dan ketidakstabilan ekonomi. Meski dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Pulau Jawa dan pelopor pertanian padi organik, banyak petani di Daerah Istimewa Yogyakarta masih enggan mengikuti pertanian organik karena kurang percaya diri petani dalam mendapatkan hasilnya dan kesulitan untuk menjual produk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan pertanian berkelanjutan secara global dan khususnya di Indonesia; untuk menggambarkan kebijakan pertanian yang telah dipromosikan di Indonesia untuk mengaktualisasikan pertanian berkelanjutan; menganalisis manfaat finansial usaha tani padi organik, dan untuk menganalisis kendala dalam pengembangan usaha tani padi organik yang dihadapi petani dan manfaat lingkungan yang diperoleh dari usaha tani padi organik. Penelitian ini menggunakan metode purposive untuk menentukan analisis rasio pendapatan dan pendapatan untuk menilai kelayakan pertanian organik. Secara internasional, konsep pertanian organik sebagai wujud dari gerakan terakhir pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian telah dimulai sejak bertahun-tahun. Juga, di Indonesia, arah pembangunan pertanian berkelanjutan saat ini mengarah pada organik. Pemerintah bersama dengan para periset, LSM, dan komunitas lingkungan lainnya telah berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan pertanian berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa usaha tani padi organik menguntungkan dan layak untuk dikembangkan secara luas, terutama di daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang, para petani juga menikmati pendapatan yang lebih tinggi karena harga premium dan produktivitas beras organik mereka lebih tinggi. Sementara, sebagai dampak lingkungannya, petani mengalami penurunan produksi yang signifikan selama 2 tahun selama proses perbaikan kesuburan tanah. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan keuntungan lain dari pertanian organik adalah memperkuat ikatan sosial antar petani. Selain semua keuntungan yang diperoleh petani, ada beberapa masalah yang muncul, seperti tingginya biaya sertifikasi organik, permintaan domestik yang tinggi, jumlah pekerja pertanian yang terbatas, ketidakmampuan petani untuk memproduksi pupuk organik mereka sendiri, dan kurangnya infrastruktur pemasaran produk organik. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk mengatasi semua masalah tersebut sangat dibutuhkan untuk mempromosikan keberlanjutan pertanian organik.

Kata kunci: pembangunan, berkelanjutan, pertanian, pertanian, organik

Since 1980's, the government issued intensification policy or well known as a green revolution to boost rice productivity and Indonesia finally can reach rice self-sufficiency in 1984. Unfortunately, this achievement followed by negative impact to the environment which is degradation of soil fertility as an effect of the excessive application of chemical fertilizers and chemical pesticides. Recently, Indonesia faces other serious problems in agricultural sector such as sharply narrowing of agricultural lands, while demand for rice remains high, increasing global awareness including Indonesia people about healthy living. It encourages the Indonesian government to be more concern in producing sustainable agricultural products which are healthy to consume and have competitiveness to compete with other countries products. Sustainable agriculture is believed will be able to restore soil fertility thus its productivity will be sustainably increased.

President Joko Widodo answers these challenges by nine priorities for Indonesia (NAWACITA) policy that committed produce eco-friendly products that have competitiveness in the global market. It is aligned with one of Sustainable Development Goals (SDGs) goals in 2016-2030 which are erasing famine, ensuring foods security, improving nutrition, and encouraging sustainable agricultures. Indonesian Ministry of Agriculture breaks down this policy in its strategic planning program for 2015-2019 by establishing A Thousand Organic Villages which is in line with previous policy Go Organic 2010 that introduced in 2001. Thus, it will not only meet the demand of the people but also it can be competing in the global market and preserve the environment. Hence, it will enhance export of agricultural product, increase farmers' welfare and boost Indonesia economic growth from the agricultural sector.

According to Cranfield, et al., (2010) through his study of organic farms in Canada and Chaves (2012) through his study in Mexico argued that organic technology reflects environmentally friendly technology since it could reduce the chemical exposure in the food product thus it enhances food's quality. Moreover, human's health and safety issues occupy the first place that encourages farmers to switch to their agriculture system from conventional to organic farms.

Except as the largest market in the world, US also become the largest exporters of organic foods. United State has an export agreement with some of the countries including Canada, Switzerland, Japan, and South Korea. While in Asia, the largest producers of organic foods are China, while other countries as well as Japan, Singapore, Taiwan, and South Korea depend on organic imported product (IFOAM, 2016).

Nevertheless, up to now, organic farming is still less attractive to farmers in Indonesia especially in Yogyakarta Special Region, unless to support a government program. Lack of interest is partly due to the low confidence of farmers in obtaining its outcomes

and the difficulty of selling their products. Whereas, since organic farming is not new in agricultural technology, therefore many researchs of this concern has been done and most argue that organic farming is more favorable as stated by some researchers that economically, organic farming is more profitable, due to better product quality and lesser production cost that can reimburse the lower yields in developed countries (Nemes, 2009) and even though the number of organic farms lesser than non-organic farms in England, however the mean sales value per ha of organic farm is higher than non-organic farms (Lobley, et al., 2005), and according to Mendoza (2002), since the production's cost of organic farms in The Philippine is lower thus its net's income per ha was slightly higher than conventional one. Other research which conducted in Laos found that farmers who plant organic rice under contract from the government could earn higher returns than non-organic under similar agroecosystem and socio-economic conditions (Setboonsarng, et al., 2008). Meanwhile in some region in Indonesia, like Sukabumi, Bandung, and Tasikmalaya, West Java and also DAS Ular-North Sumatera, organic farming shows good performance since their organic product prices are higher than non-organic that lead to the higher income earned by farmers (Lestari & Suryana (2013); Hidayat & Lesmana (2011); and Jahroh (2010).

Regarding all previous descriptions, this study will try to analyze descriptively the development of sustainable agriculture globally and particularly in Indonesia and also agricultural policies that have been promoted in Indonesia to support sustainable agriculture. While, it also analyzes the financial benefit of organic rice farming, constraints faced by organic rice farmers during this time, and also its environmental benefit after adopting the organic farming system. Thus, it could identify recommendations to re-attract the farmer's interest in improving the further implementation of the organic farming system thus sustainable agriculture could be achieved. Sleman Regency which is located in Yogyakarta Special Region as one of the central areas of rice production in Indonesia has developed organic farming in several years and fit to be a research location.

In order to carry out the study, this research uses purposive method for defining sample as respondents. Research location is Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. Respondents are organic rice farmers who plant organic rice actively and certified as organic rice farmers from "Persada" Organic Certification Bodies in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. In this research, respondents are taken by purposive sampling (58 organic rice farmers) in Sleman Regency.

Organic Rice Farming in Indonesia

The reason of each farmer to apply organic farming system on their rice cultivation in Sleman Regency divided into five groups, which aware to preserve environment, higher commodity prices, yields more, and stable selling prices. According to the result of the survey, most of the farmers are willing to convert to organic farming since it gives higher commodity prices, namely 25 respondents or 43,10 per cent. On the other hand, the awareness of farmers to preserve the environment is also high. It is proved by many respondents stated that they are switching to organic for this reason or 37,93% of total respondents. Therefore, generally, farmers implemented organic rice farming in Sleman Regency because of its higher prices compared with conventional and to preserve the environment.

This analysis was conducted to determine the feasibility of organic farming system to be more developed. Therefore, it is important to compare revenue-cost ratio before its farmer groups and after they converted into organic farming. Comparative analysis of revenue-cost ratio before and after implemented organic farming in its paddy field shows that before applied organic technology its RC ratio is 0,93 while after implemented the RC ratio is higher or reach 1,33. According to Soekartawi (2006), the value of revenue-cost ratio showed the feasibility of a program or policy. If the value of RC ratio is more than 1, it means organic farming is profitable and feasible to be developed, mainly in this research location. However, it is also expected to be appropriate and provide the same results when applied in other areas together with the implementation of a thousand organic villages policy. Hence, it can be concluded that organic farming system is feasible to be more developed and adopted together with improving agricultural infrastructures including providing a larger market for organic products so that the obstacles faced by organic farmers can be resolved.

Soil fertility plays an important role in gaining sustainability of plant's production. According to Sutanto (2002), fertile soil will decrease its nutrient content caused by leaching, surface water runoff, erosion or other chemical reactions and it will lead to the declining of yields. Moreover, fertilizing which is more concern with one element such as N to spur plant's production than other elements or organic fertilizers causing inequality in the soil nutrient balance. The use of fertilizers especially N becomes inefficient. Basically, the use of chemical fertilizers increasingly hardened the soil and killed.

Previously, this farmer group uses urea in addition to compost, liquid organic fertilizer (Pupuk Organik Cair/POC), MOL/PGPR and Chalk. Urea as chemical fertilizer used by the farmer in a limited amount in order to be a nutrient in the process of vegetative growth

of plants such as root, leaves, stems, buds, and others. On the other hands, farmer begins to apply organic fertilizers in order to implement the environmentally friendly farming techniques. POC or liquid organic fertilizer consists of organic substances derived from the waste of vegetables or fruits. It is useful to maintain the stability of nutrients in the soil so that paddy plants can flourish and also to reduce the impact of waste on the surrounding environment. Another fertilizer used by the farmer is MOL. Local microorganism (mikro organisme lokal/MOL/PGPR) is solution derived from fermentation of various types of organic materials which usually comes from household waste or plants such as banana tree trunks or vegetable waste. MOL contains bacteria, growth stimulants, micro and macro nutrients, and as biological agents of plant pest and disease control. Because of this ingredients, MOL can be used as a decomposer, biological fertilizers and as a bio-pesticides. While chalk is applied when tillage in order to increase soil's fertility and to balance soil's PH by reducing the acidity of the soil. After adopting organic farming, a member of "Rukun" farmer group stop to use urea and only apply manure or compost and other liquid fertilizers in their farmland. Apparently, this discontinuation the use of urea affects the amount of rice production produced by farmers.

It shows that organic farming gives good impact to the environment since rice productivity is increasing gradually after they stop to use urea in their field. It reflects that the organic inputs could repair soil fertility. Basically, during 2011-2012, the yield had been decreasing due to the conversion process of farmers' land into an organic farm. It causes reduction of nutrient's supply for plants so that the process of mineralization of organic fertilizer in the soil becomes very slow. Sutanto (2002) also stated that basically, synthetic N fertilizer such as urea will be easily hydrolyzed and immediately converted into N form for the soil so that many forms of nitrogen derived from chemical fertilizers are lost through leaching and other processes. Moreover, continuous use of synthetic N fertilizer for long periods will cause soil degradation and the capacity of the nitrogen cycle in the soil decreases. In addition, Wood et al., (2006) also stated that the utilization of external inputs and production of greenhouse emission on food crops can be reduced through applying organic technology.

Experience of crop failure in various areas of Java island, brown plant hopper outbreaks and other environmental damage suffered by Indonesia due to agricultural industrialization through the planting of high yielding variety, massive application of pesticide and chemical fertilizer in order to boost rice productivity and to reduce famine has successfully encouraged the Indonesian government to develop environmentally friendly agriculture and the active role of researchers, NGOs, and environmentalists is inseparable.

The direction of agricultural development in global context and lately followed by Indonesia is mainly changed by the strengthening of the International community's awareness of sustainable development and Environmental's preservation although the government still plays an important role in it. This new strategy of agricultural development is made to maintain the sustainability of food availability without harming the environment and people's health since the food demand tends to increase along with the increasing population.

In order to achieve those goals, various policies have been issued by Indonesia government such as IPM, banned 57 chemical pesticide, SRI, ICM and the last policy that is currently being promoted is organic farming together with the issuing of various regulations and a huge amount of budget to support it. The importance of maintaining the sustainable productivity of crops by organic farming is only beginning to emerge recently. Basically, in 2001, through Go Organic 2010, the government is obsessed to make Indonesia as one of the largest organic producers in the world. Around 40 farmer groups keep implementing organic technology in their rice cultivations, even some of them can export their product. However, there is not a few farmers also leave organic concept and re-apply chemical inputs due to the various problems such as their lack of confidence in the yields that they will get, especially during transition period when their production sharply decreased as experienced by "Rukun" farmer group and also the certification fees which is considered expensive for farmers.

"Rukun" farmer group as one of the farmer groups in Yogyakarta Special Province that still apply organic farming until now. They experienced a 2-year production decline as a result of the elimination of application of urea due to their commitment to begin planting rice organically. Their experience in rice farming and the desire to obtain high yields and premium prices of their products without polluting the surrounding environment encouraged them to actually apply the organic concepts in their rice fields.

Improving the soil's structure and soil's fertility due to the discontinuation of application of urea and replacing it with organic fertilizer is able to make their soil more fertile so that its production continues to increase from 2013 to present. Because organic products have a higher selling value so that the increase of this production will certainly be accompanied by an increase in income and welfare of farmers. It also seen from the result of cost revenue analysis which shows that organic farming is a profitable farming for farmers. Moreover, organic farming is also able to strengthen family ties among farmers, to maintain the environment, and to produce foods products that are safe to be consumed.

Despite income is increasing, farmers still face issues that the government should address immediately, such as the high cost of certification, aging problem, the limited

number of organic fertilizers, the limited numbers of labor who want to get involved, the limited organic agricultural farmland, and the lack of product processing and packaging tools that have generated its own polemic which gradually needs to be resolved. The active roles of the government to maintain the sustainability of organic farming is necessary. Various ways can be done by providing financial assistance, especially for certification fees and subsidies for those who are currently convert into organic farming, inviting younger people to actively participate in various agricultural activity such as national or international training, expanding the organic area for rice, and providing advanced packaging technology for farmer together with improving their skill to build market networking and promote their own products, and also improve people's knowledge about healthy products.

**ANALYZING INCIDENT COMMAND SYSTEM
IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT
(A lesson learned from disaster
management practices in Yogyakarta
Special Region)**

**ANALISA SISTEM KOMANDO TANGGAP
BENCANA DI PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
(Pelajaran dari praktik pengelolaan
bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Nama : Rr. Tantri Jazziyatul Khasanah
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemprov DIY
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM-JEPANG

ABSTRACT

The effectiveness of emergency management plays a critical role in avoiding further losses and casualties. To perform that task, during emergency response the authority utilized Incident Command System (ICS) as a form of managerial arrangement with command approach as its strategy for all hazard assumption. This thesis focused on the obstacle found on the emergency management practiced in US, Japan and Indonesian local government, and apprehend the importance of community awareness and dissemination of disaster information in the emergency management. This study approves that local governments should have strong initiatives in terms of institutions, human resources, policy implementation, financial, technical and leadership in disaster management to perform effective ICS. Integrating the community approach in risk management to have effective information dissemination for inhabitants in hazard zones and for the communities at large seen as having contribution to the success of emergency management. Constant involvement of local, provincial and central governments are needed to strengthen emergency management capability. Supports from the community, volunteer organizations and business sectors also crucial for completing the resources gap since the early stage of preparedness. Community resilience should also be promoted through people (community in general, tourist and foreigner) participation in mitigation and preparedness activities in the hazard zones, in form of awareness raising and knowledge building about evacuation mechanism, access to early warning system and disaster information dissemination.

ABSTRAK

Keefektifan manajemen darurat memainkan peran penting dalam menghindari kerugian dan korban lebih lanjut. Untuk melakukan tugas tersebut, selama tanggap darurat otoritas menggunakan Incident Command System (ICS) sebagai bentuk pengaturan manajerial dengan pendekatan perintah sebagai strategi untuk semua asumsi bahaya. Tesis ini berfokus pada hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan darurat yang dilakukan di pemerintah daerah di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, dan memahami pentingnya kesadaran masyarakat dan penyebaran informasi bencana dalam manajemen darurat. Studi ini menyetujui bahwa pemerintah daerah harus memiliki inisiatif yang kuat dalam hal institusi, sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan, keuangan, teknis dan kepemimpinan dalam manajemen bencana untuk melakukan ICS yang efektif. Mengintegrasikan pendekatan masyarakat dalam pengelolaan risiko agar penyebarluasan informasi yang efektif bagi penduduk di zona bahaya dan masyarakat pada umumnya dipandang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan manajemen darurat. Keterlibatan pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang terus-menerus diperlukan untuk memperkuat kemampuan manajemen darurat. Dukungan dari masyarakat, organisasi relawan dan sektor bisnis juga penting untuk menyelesaikan kesenjangan sumber daya sejak tahap awal kesiapan. Ketahanan masyarakat juga harus dipromosikan melalui partisipasi masyarakat (masyarakat pada umumnya, wisatawan dan orang asing) dalam kegiatan mitigasi dan kesiapan di zona-zona bahaya, dalam bentuk peningkatan kesadaran dan pengembangan pengetahuan tentang mekanisme evakuasi, akses terhadap sistem peringatan dini dan penyebaran informasi bencana.

Disaster Management

Disasters are not a new phenomenon in human lifecycle. Since the prehistoric time, archeological evidence recorded disaster events in different subcultures all over the world, how the society perceives of disaster occurrences and what they do to reduce the risk (Quarentelli, Lagdec, & Boin, 2006). Asian Disaster Reduction Center (2003) defined disaster as “a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses which exceed the ability of affected society to cope using only its own resources”. Thus, not all hazard that caused loss and casualties in a certain area can be defined as a disaster, it is based on the local people’s ability to overcome the situation.

Further study about definition of disaster by Shaluf (2007) delivers classification of disaster, which consists of “natural disasters, man-made disasters, and hybrid disasters”; completing each types of disaster with definition, hazards, and mitigation, complemented with subsequent disasters (disasters that resulted from natural and/or man-made disasters); and epidemics that can be a disaster or a subsequent disaster. Moe and Pathranarakul (2007; p. 408) defined natural disasters based on its lead time as “slow-onset” (drought, floods and volcanic eruption) and “no lead time” (flash floods, tsunamis, and cyclones). They highlighted that “sufficient lead-time increases the potential for saving lives, livestock, properties and livelihoods of a population at risk” (2007; p. 409). Thus, the first response performed during the critical lead time considered as important to determine people wellbeing.

The specific guideline for each stage of disaster management was not available, but there are international frameworks that accommodate activities in the disaster management in general. In 1980s Japan together with other countries proposed a draft of resolution promoting international cooperation in the field of natural disaster reduction to the 42nd session of the United Nations General Assembly, which then designed the 1990s as the International Decade for Natural Disaster Reduction (Nishikawa, 2010). In 1994 the World Conference on Natural Disaster Reduction was held in Yokohama, Japan, an international discussion on natural disaster based on the Japanese experience in promoting disaster prevention. These conference adopted the “Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World, Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation, which marked first agreement on international cooperation of disaster management and a changing paradigm from focusing more on response to disaster occurrences towards more thorough and integrate approach to disaster risk reduction.

The latest guideline as the alteration of Hyogo Framework is Sendai Framework for Disaster Risk Reduction for 2015-2030 which was developed based on the evaluation

of Hyogo framework achievement and also the lesson learned from the 2011 Great East Japan Earthquake. On the other hand, for the detailed guideline for emergency management, there is no official guideline. However, one of the broadest emergency system implemented in the world and also adopted in Indonesia is Incident Command System developed by FEMA. Jensen, J. and Waugh Jr, W.L., (2014, p. 6) argued that “the system aims to provide an organizational structure through which activities related to the functional areas of command, operations, planning, logistics, and finance and administration can be carried out in concert by all responding entities to any incident”.

Preparedness for Better Emergency Response

Disaster risk management framework introduced by Ghesquiere and Mahul covers risk identification, risk reduction, preparedness, financial protection and resilient reconstruction (as cited in World Bank, 2012, p.16). Preparedness as the third pillar in the framework includes early warning systems, support of the emergency measure and contingency planning.

Understanding hazards

In general, the natural disaster exact event considered as unpredictable, but to a certain extent, its occurrence is possible to forecast. Scientifically, through the historical records, geological and geographical analysis, scholars are able to determine a hazard map which can be valuable for conducting a countermeasure for a specific area (Lavigne et al., 2015). Thus, categorizing disaster based on a predictable or unpredictable event can be a difficult thing to conduct, but scientists keep developing research to detect any possible useful method to mitigate a disaster.

For instance Japan started to conduct scientific study of volcanic activities since the Meiji Restoration in 1868, the interest upsurge due to the eruption of Bandai-san in 1888 and Torisima-san in 1902, and not long after that F. Omori in 1910 developed instrumental recordings of volcanic earthquakes and tremors to conduct temporarily observation of Usuzan volcano in South Hokkaido and Asayama in central Honshu (Suwa, 1980). Furthermore, this article highlighted that at that stages “it is not yet possible for them to establish general methods for precise prediction of the time, place and scale (magnitude) of volcanic eruptions, applicable to any volcano” but observation of other volcanoes continuously carried out by the Japan Meteorological Agency (JMA) and by various universities.

Currently, for a volcanic eruption different method of monitoring involving various disciplines such as visual, geological, geophysical (seismic and deformation), and geochemical (gas analysis) utilizing integrated web-based system was implemented for observing volcano activities (Lavigne, et al., 2015). Although the monitoring method still has some limitation such as it could not estimate the precise time when the eruption might occur, nonetheless under the basic assumption if there are an aggregate of activities above normal parameter, a warning can be discharged, thus it can provide time to set up an emergency response. By studying hazards it is possible to measure vulnerability and assess the capacity needed to conduct emergency management.

Risk information for better response

People perception towards hazards information and their decision making for preparing disaster emergency situation were affected by their attitudes and social norms (Paton, 2007). Information given through passive presentation does not always well accepted, even though this fact coming from the authority and will give them a better opportunity in managing hazard. Summarizing from several studies that exploring risk perception conducted by scholars such as Dake, Hardin and Higgins, Marris et al., Rippl, and Rohrman, individuals and society will have the tendency to perceive information of risks and hazards based on their experiences, believes and expectations, within their cultural and social framework, where each social group may construct different values for susceptible situations (as cited in Paton, 2007, p.80). Thus, social environment is an important consideration in modifying individual perception toward disaster risk situation.

Community-based disaster risk management / CBDRM was developed by ADPC in 2005, it involves community empowerment in all stages of disaster management activities (Kusumasari, 2014, p. 91). Moreover, the research conducted in traditional community lives in flanks of Mount Pinatubo Philippine support the argument that community based considered as the broadest suitable approach for improving people capacity to cope with disaster (Gaillard, J.E. & Le Masson, V., 2007, p. 317). Some details preparedness activities conducted by disaster management institutions and communities during each volcano alert level summarized by Andreastuti et al. (2017, p. 11) provide a very useful guideline for volcanic countermeasures in form of detail actions to be done. However, it does not integrate community as actors in emergency response nor during the whole process.

Emergency Measures

The effectiveness of ICS in the discourse of disaster emergency management was still on a debate, specifically for the command and control approaches for all hazard situation at all level of administration. Jensen, J. and Waugh Jr, W.L., (2014) argued that ICS can be performed effectively by firefighter because it was originally developed for them who has a specific objective to perform and with limited involvement of other stakeholders. Hart (1992), Walker, Andrews, Boyne, Meier, and O'Toole (2010) identified strategy processes refer to "how an organization's objectives and actions are selected or formulated" (as cited in Wang & Kuo, 2014).

Further explanation about member participation in strategy formulation by Wang and Kuo (2014) highlighted on two types of 'commanding' and 'participatory' models of public organization strategy process, where command mode refers to "conscious and controlled process centralized at the very top level of organization". Ashmos, Duchon, and McDaniel (1998), Hart (1992) and Whetten (1978) mentioned about the 'participatory' mode, where "the strategy-making process is based on the interactions and understanding of the organization members, rather than on the execution of a predetermined plan" (as cited in Wang and Kuo, 2014). These two approaches are important in analyzing the decision-making process within an organization, specifically during an emergency response to a disaster.

Effectiveness of Emergency Management

Katrina in the US in 2005, the Great East Japan Earthquake in 2011, and Mount Merapi eruption in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, Indonesia in 2010 that will be assessed in this research were framed mainly based on the indicators summarized by Jensen, J. and Waugh Jr, W.L. (2014). In this research, the discussion of those factors will be grouped into three major discussions of factors that influence the effectiveness of ICS practices. First, the nature of the disaster event itself which also influenced the effectiveness of ICS practiced in form of duration, geographical range, volunteers' involvement, existing convergence, and available resources. Second, pre-disaster factors namely experience of the individual participants in the ICS, existing networking and legal entities before disaster event and local culture orientation toward emergency management. Third, factors that take place during disaster event including the use of ICS in term of system and position adjustment, leadership, decision making, information flow, operating procedures, and continuous evaluation.

Whereas for the discussion people awareness and information dissemination in this paper were based on the disaster preparedness and risk information discourse. Kelman

(2006) argued that warning better not to be seen as an instant process before a calamity, but somewhat a gradual process which takes times elongated beforehand (as cited in Sagala, 2007, p. 8). It highlighted warning system as a process of risk communication to develop required response prior to disaster occurrence. Not all kind of disaster status were well-arranged like flood, landslide, typhoon nor volcanic eruption, therefore the existence of early warning system might fail or not work effectively for certain type of short lead-time disaster such as an earthquake.

Emergency Management in Yogyakarta Special Region

The findings are based on the field data collection in Yogyakarta Special Region and Sleman Regency, in form of interviews with key persons, stakeholders and populations at risk, correspondingly supported with secondary data such as the related document with the Merapi eruption 2010 and current disaster management planning and policy. There are several important points that can be made regarding the implementation of ICS, community response towards the hazards of Mount Merapi, information dissemination during the eruption emergency response, and the resource capability of the local government allocated for undertaking the situation.

Government Perspectives: Implementation of ICS

In terms of the nature of the disaster, as already discussed in early chapter that in the volcanic eruption there are stages of hazard which associated with the disaster emergency status and in this available lead time local government could acquire a short pause to prepare for the emergency response, established ICS and activated the contingency plan before the eruption took place. Furthermore, the emergency status which was previously enacted for two weeks then extended for almost three months and on one side it gave times for the ICS to make several adjustments related to the disaster latest situation. On the other side, because of the location of Mount Merapi is cross-administrative and the geographical range of the volcanic hazard scale was changed several times, its demand a convergence where the existing ICS founded by each local government in the flanks of Merapi, joined into one national ICS. Unfortunately, the united ICS under the national command never really take place, although the resources that were deployed supported by the national government, and scheduled coordination were conducted, ineffective use of resources was unavoidable. Volunteers' involvement in this disaster event also limited just on the operational level, not on the strategic decision making position, but their contribution in the ICS specifically during the evacuation process and at the shelters were evident.

Regarding the pre-disaster factors, most of the officials participated in the ICS at the local level were inexperienced about the command system, only some of them have prior knowledge about emergency management in general. Most of the officials involved in the ICS obtain a basic knowledge of emergency management in a drill, a couple of month before the eruption, leaving a very brief experience of working together in one disaster networking. Sleman Regency has a weak legal basis of disaster management in form of Regent regulation, an emergency operation center and limited local awareness of the importance of emergency management.

Some factors that take place during disaster event, the use of ICS in term of system and position already practiced as explained in the general guideline of Regulation of Head of National Disaster Management Agency number 10 of 2008. The delayed of decision making during the emergency response showed weak leadership within ICS and temporary confused situation of person-in-charge. Delayed of information suggested that there was breach of communication and that some part of the ICS did not perform effectively. Standard operating procedures do exist, although not always easy to be applied, the discretion of operational decision often needed and continuous evaluation was conducted, but unfortunately, the whole process was not well documented.

There are several actions and policy measures that should be adopted for future enhancement of disaster management in Indonesia, which mainly related to the effort to strengthen the capacity for conducting emergency response and developing community-based disaster risk management. Some of the recommendation are based on the lesson learned of emergency management in the US and Japan, and supplemented with the practice from Sleman Regency.

There are some common features of emergency management performed during Great East Japan Earthquake and Tsunami in 2011 and Hurricane Katrina in the US in 2005. At some points although both disasters have different lead time and characteristics, it revealed common problems faced during emergency response as follow: (1) miscalculation in determination of evacuation site, evacuation mechanism and route; (2) complacency because of the construction of structural mitigation which then caused low awareness, (3) delayed decision-making by the authorities; (4) uncertain of disaster information dissemination; and (5) existing gap between emergency planning and implementation.

Whereas learning from the practice of ICS in Indonesian local government, in general, Sleman Regency already have sufficient resource capability it terms of predisaster preparation of disaster management institution, contingency planning, evacuation shelters, logistics and sufficient budget allocation to overcome disaster at the small scale. Despite the number of casualties during the Mount Merapi first eruption in

26th October 2010, the response of Sleman Regency can be categorized as success implementation of ICS by local government.

In ICS implementation assessed in this study shows that for certain extent of disaster, local government as the first responder that has sufficient resources capability demonstrated good performance. Whereas to overcome the escalating degree of disaster, support from other governments, volunteer organizations and business sectors were crucial in covering the resources gap, and so does coordination within extended ICS were critical to ensuring the effectiveness of emergency response system.

Therefore, it can be concluded the weak point of ICS in the local government is it can only be effectively implemented if the local government have adequate capacity to take proper disaster countermeasures. Moreover, in the emergency management studied this research revealed that community awareness and information dissemination are an important part of emergency management.

**ANALISIS KEBIJAKAN E-PROCUREMENT
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ANALYSIS OF E-PROCUREMENT POLICY IN
MAKING ACCOUNTABILITY OF PUBLIC AND
GOOD GOVERNANCE IN GUNUNGKIDUL
DISTRICT**

Nama : Sigit Swastono
Unit Kerja : DPU Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kegiatan yang selalu ada dalam sebuah organisasi publik atau pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi maupun dalam rangka bagian dari pelayanan publik berupa penyediaan barang publik. Kondisi itu membuat dimensi publiknya sangat besar. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol adalah adanya penggunaan anggaran publik dan berbagai regulasi yang harus ditaati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah berusaha membuat terobosan berupa pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau dikenal dengan e-procurement.

Penelitian ini ditulis untuk menganalisis kebijakan publik berupa penerapan e-procurement sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Gunungkidul yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaannya fokus penelitian ini untuk melihat akuntabilitas publik dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 dan perubahannya meliputi efisiensi, efektivitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta manfaatnya bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang lebih kredibel dan berintegritas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan dukungan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa aspek belum tercapai akuntabilitas publik seperti yang dikehendaki dalam peraturan perundangan.

Kata kunci: e-procurement, good governance, prinsip-prinsip pengadaan, akuntabilitas publik.

ABSTRACT

Procurement of good and services is an activity that is always present in a public organizations or government. The activity aims to meet the operational needs of the organization as well as in the framework of a part of public services such as provision of public goods. There is a large public dimension. One of the characteristics that really stands out is the use of public funds and the various regulations that must be adhered to prevent the misuse of funds and to bring transparency and accountability. For that reason the government is trying to make breakthrough in the form of procurement of goods and services electronically, known as e-procurement.

The study was to analyze public policies such as the implementation of e-procurement as an instrument in realizing the principles of good governance in the district of Gunung Kidul which has been running since 2013. The focus of this study is to see public accountability by analyzing the implementation of procurement principles that have been mandated by Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendments were made up of efficiency, effectiveness, transparency, opened, competitive, fair / non-discriminatory and accountable as well as benefits for all stakeholders Gunungkidul. Then it can be recommended some policies in order to yield more credible procurement. The method used is a qualitative method. The data collection is done by doing a depth interviews with key informants, observation, and support secondary data from relevant agencies. The results showed some aspects of public accountability has not been achieved as foreseen in legislation.

Keywords: e-procurement, good governance, the principles of procurement, public accountability

Di Kabupaten Gunungkidul e-procurement sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan good governance telah dimulai dengan keluarnya SK Bupati pada bulan Desember 2012 tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP). Dalam operasionalnya ULP berada dibawah Bagian Administrasi Pembangunan dengan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua ULP. Ini diharapkan bisa memudahkan bagian Administrasi Pembangunan yang dalam tupoksinya diantaranya memonitor dan evaluasi kegiatan di semua SKPD dan pembinaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil observasi awal di ULP Kabupaten Gunungkidul diperoleh informasi pada tahun 2013 sebagai permulaan mulai dijalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebanyak 25% dari seluruh paket pelelangan yang ada. Selanjutnya mulai tahun 2014 seluruh paket pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui ULP (penjelasan dari sekretaris ULP).

Meskipun demikian proses pelelangan secara elektronik tidaklah berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala baik terkait kesiapan masing- masing SKPD dalam menyesuaikan dengan perubahan sistem maupun dari pihak penyedia jasa yang harus segera mengadaptasi teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 terkait percepatan pembangunan, maka seluruh pelelangan proyek fisik atau jasa konstruksi harus sudah masuk/diproses pada bulan Maret dan itu ternyata masih sulit ditepati. Pada prinsipnya argumen yang dibangun bahwa melalui ULP yang berada satu komando dengan bagian Administrasi Pembangunan maka terjadi efektifitas lelang yang berujung pada percepatan pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya terjadi. Hal tersebut karena meskipun ULP dalam kontrol bagian Administrasi Pembangunan, namun pokoknya masih pegawai dari SKPD lain yang dipekerjakan menjadi anggota pokja. Ini bisa dilihat dari serapan anggaran yang secara keseluruhan masih rendah ketika sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. Bahkan dalam yogya.antaranews.com disebutkan dalam semester pertama tahun 2015 penyerapan anggaran Pemda Gunungkidul baru mencapai 30%(Sutarmi,2015).

Harapan bahwa proses elektronik menjadikan proses pelelangan lebih efektif dan efisien juga masih perlu dievaluasi mengingat dalam pelaksanaan puncak lelang juga terjadi pada bulan Juli-Agustus sehingga masih sulit untuk bisa menghindari terutama pekerjaan fisik, yang menumpuk di akhir tahun dan resiko pekerjaan melewati tahun anggaran. Kemudian waktu pelaksanaan yang sempit karena proses lelang sudah di triwulan III juga membuat resiko yang lebih besar bagi penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara terburu- buru bisa berdampak pada kualitas yang dihasilkan, ditambah dengan nilai penawaran yang jauh dibawah HPS namun pelaksana nekat mengerjakan.

Kemudian pada prinsip transparansi, akuntabilitas maupun partisipasi sebagai hasil dari proses pengadaan secara elektronikpun masih memunculkan tanda tanya ketika muncul pemberitaan miring tentang pelaksanaan e-procurement ULP Kabupaten Gunungkidul di media. Ini juga berkaitan dengan kapasitas manajemen dan integritas sumber daya manusia. Seperti diberitakan dalam media on line sorotgunungkidul.com tanggal 31 Juli 2015 yang menyebutkan sebuah perusahaan kontraktor CV.Arung Samudra merasa dirugikan dalam proses e-procurement di ULP Kabupaten Gunungkidul. Mereka menduga proses lelang proyek tersebut terdapat penyimpangan dan bahkan diindikasikan pula sudah diatur pemenangnya meski pelelangan dilakukan secara elektronik (Renna,2015).

Dengan kondisi tersebut tentunya menarik untuk mencermati lebih jauh implementasi e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul dalam kaitannya dengan pelaksanaan good governance. Kemudian bagaimana relasi yang terjadi diantara penyedia jasa, pengguna jasa maupun pokja ULP dan institusi ULP sebagai mediator dalam prosesnya. Lebih jauh lagi seperti apa produk akhir yang dihasilkan dengan sistem elektronik ini. E-procurement bukan hanya sekedar perubahan dari manual menjadi elektronik, tetapi juga bagaimana mengubah pola pikir dan budaya yang sama yaitu tereksponnya nilai- nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif efisien, kepastian hukum dan keadilan.

Berangkat dari hal- hal yang telah diuraikan diatas banyak hal- hal yang perlu diperjelas berkaitan dengan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan akuntabilitas publik dan tata nilai pengadaan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menunjukkan bahwa meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan good governance. Untuk itu maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kebijakan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung good governance di Kabupaten Gunungkidul dengan rumusan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana akuntabilitas publik dalam pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul ?”

Kemudian sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa optimal proses pengadaan diukur dengan dengan implementasi prinsip- prinsip pengadaan dalam kegiatan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul

Akuntabilitas Proses Pengadaan di ULP Kabupaten Gunungkidul

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Dari data yang ada, pada lelang secara e-procurement penyedia jasa mendapatkan efisiensi biaya yang cukup besar yaitu dari biaya Rp 423.000,00 pada lelang manual menjadi hanya Rp 160.000,00 pada lelang secara e-procurement atau terjadi efisiensi 62,18%. Sedangkan dari sisi pengguna jasa juga terjadi penghematan yang lebih besar lagi yaitu dari Rp 2.560.000,00 pada lelang manual menjadi hanya membutuhkan biaya Rp 260.000,00 pada lelang secara e-procurement atau terjadi efisiensi 89,84%. Selanjutnya jika dilihat secara keseluruhan biaya pada lelang manual sebesar Rp 2.983.000,00 dan pada lelang secara e-procurement sebesar Rp 420.000,00 atau terjadi efisiensi sebesar 85,92%. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-procurement memberi manfaat yang optimal dari sisi efisiensi biaya baik dari sisi penyedia jasa maupun pengguna jasa secara keseluruhan.

Efektif dalam hal ini secara operasional lebih menitik beratkan kepada pencapaian kualitas dan kuantitas dari proses lelang elektronik secara optimal. Kualitas adalah terpenuhinya spesifikasi teknis seperti yang diharapkan dalam dokumen teknis, sedangkan secara kuantitas bahwa apa yang ditargetkan atau direncanakan bisa tercapai. Berbicara tentang kualitas atau produk akhir dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini tentu tidak lepas dari bagaimana pokja menentukan dan memilih penyedia yang ditunjuk menjadi pemenang. Saat ini yang terjadi bahwa dalam proses lelang sistem gugur maka yang menjadi pemenang adalah harga terendah dan secara administrasi, teknis dan kualifikasi terpenuhi. Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh rekanan yang bertujuan asal mendapatkan pekerjaan dengan menawar sangat rendah untuk memenangkan lelang.

Prinsip transparan ditunjukkan dengan terbukanya semua informasi tentang pengadaan ini baik dari syarat teknis, HPS, administrasi, tata cara, evaluasi, penetapan pemenang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. Dengan pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan semakin terbukanya segala informasi yang berkaitan dengan pengadaan ini karena semua masyarakat bisa mengakses informasi dari website resmi yang ada, bahkan dalam website tersebut juga telah mencantumkan daftar perusahaan yang masuk dalam daftar hitam secara nasional. Demikian juga bisa diakses semua paket pengadaan diseluruh Kabupaten Gunungkidul bahkan nasional melalui aplikasi SiRUP yang ada dalam menu di tampilan website LPSE Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian aspek transparansi ini tentu saja perlu digali secara

mendalam dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini.

Prinsip terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Ini ditandai dengan persyaratan yang disusun tidak membatasi dari mana pun asal penyedia. Dengan penggunaan teknologi internet ini memang sudah memungkinkan siapapun dan dari daerah manapun bisa mengikuti proses pelelangan di Kabupaten Gunungkidul asalkan memiliki user ID dan password. Pokja juga mengumumkan secara terbuka semua proses pengadaan sesuai peraturan yang ada di website sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memiliki informasi yang sama. Sebagai bentuk keterbukaan informasi setiap awal tahun anggaran pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menayangkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPBJ) dalam website pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat. Tidak mengherankan bila dengan penerapan e-procurement ini membuat banyak penyedia dari luar Gunungkidul bisa mengikuti dan bahkan memenangkan lelang di Gunungkidul.

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Indikator pertama adalah tidak ada pengaturan lelang oleh siapapun. Artinya dengan e-procurement ini semua boleh bersaing diantara para penyedia yang setara dan memenuhi syarat. Sistem dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di ULP Kabupaten Gunungkidul telah mengakomodasi hal tersebut dimana dengan pendaftaran dan pemasukan penawaran secara on line telah menghapus sistem pengaturan lelang yang sebelumnya pada saat sistem manual banyak terjadi di Gunungkidul. Saat masih menggunakan cara manual hanya penyedia tertentu saja yang bisa memenangkan lelang yaitu yang punya power dan mampu mengatur serta mengkondisikan pelelangan dengan bersekongkol diantara penyedia bahkan dengan panitia.

Adil adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Hal ini bisa dilihat dari persyaratan yang disusun tidak diskriminatif/semua boleh mengikuti sesuai aturan yang ada. Dalam pelaksanaan e-procurement di Gunungkidul kondisi ini sudah dapat terlaksana dengan baik karena dengan sistem on line saat pengumuman lelang mulai ditayangkan di website LPSE Kabupaten Gunungkidul maka saat itu juga semua pihak yang berkepentingan akan bisa mengakses informasi tanpa ada yang bisa

menghalangi. Semua peserta akan mendapat informasi yang sama, bahkan jika ada perubahan atau adendum semua juga akan mendapat informasi yang sama.

Manfaat e-procure

Pelaksanaan e-procurement telah menghasilkan pengadaan barang yang transparan, akuntabel, tanpa adanya tatap muka dan terjadinya pengawasan oleh masyarakat sehingga mengurangi peluang untuk korupsi. Profesionalisme aparat ditunjukkan dengan adanya lembaga ULP yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa. Dengan institusi ini tuntutan profesional aparat juga meningkat sehingga mau tidak mau mereka harus berbenah dengan peningkatan kapasitas untuk memastikan apa yang dijalankan sudah sesuai aturan sehingga tidak ada penyedia yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat.

Penghematan APBD

Pelaksanaan e-procurement akan membuat efisiensi biaya yang terjadi dari peningkatan kualitas administrasi dari paper based menjadi paperless dan peningkatan database pengadaan yang baik. Biaya ATK bisa dihemat dengan penyimpanan data dalam bentuk softcopy. Kemudian persaingan bebas dan terbuka menciptakan harga pasar yang kompetitif sehingga ada penghematan dari selisih harga kontrak aktual dengan pagu anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan saat masih manual dimana semua proses pelelangan sudah dikondisikan sedemikian hingga harga kontrak aktual selalu bisa mendekati harga HPS ataupun pagu anggaran.

Proses Pengadaan Lebih Cepat

Penggunaan internet yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun telah membuat proses pengadaan tetap bisa berjalan meskipun tidak pada hari kerja. Hari Minggu atau libur nasional tahapan lelang tetap bisa dijalankan dan ini membuat proses lelang yang pada saat manual berlangsung selama 30 hari sampai 35 hari menjadi rata-rata 23 hari dengan proses elektronik. Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang semua sudah dalam bentuk softcopy juga memudahkan pokja dalam melakukan evaluasi karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian jadwal lelang yang berlangsung secara real time membuat pokja dituntut untuk disiplin mengikuti jadwal yang sudah terprogram.

Menstimulasi pelaksanaan perluasan e-Government

Secara tidak langsung berbagai manfaat positif yang diperoleh akan membuat pmda mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa menjalankan berbagai proses dalam pemerintahan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi yang ada. Bukti nyata bagaimana e-procurement yang merupakan bagian dari sebuah e-government yang benar-benar bisa memangkas birokrasi bisa menjadi pembelajaran nyata sehingga bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sekaligus bisa menjawab tuntutan masyarakat yang semakin maju dan modern.

Manfaat Bagi Penyedia Jasa/ Swasta

Terbukanya peluang yang sama bagi penyedia untuk mengikuti proses lelang tanpa ada pengkondisian membuat pengusaha kecil yang tidak memiliki basis loby dan akses ke pejabat publik bisa ikut berkompetisi bahkan menjadi pemenang lelang. Sistem bagi-bagi proyek sudah tidak ada dan kompetisi ini mau tidak mau membuat pengusaha semakin profesional karena hanya yang profesional dan berkualitas yang akan mampu bersaing karena kompetisi dilakukan secara adil dan transparan antar semua peserta.

Meningkatkan persaingan usaha yang sehat antar penyedia barang dan jasa

Dengan diterapkannya prinsip pengadaan bersaing, terbuka dan adil telah membuat semua penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti lelang bahkan untuk bisa menang sepanjang semua kriteria dan persyaratan yang diminta bisa dipenuhi serta bisa menawarkan harga yang kompetitif/ bersaing. Persaingan usaha yang sehat dengan akses informasi yang sama membuat semua pengusaha akan bisa tumbuh dengan kekuatan dan potensinya masing- masing dan akan tercipta efisiensi dengan sendirinya.

Peningkatan profesionalitas perusahaan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa proses lelang yang profesional telah menuntun perusahaanpun berbenah diri dengan segala aspek legal formal yang dimiliki. Kelengkapan usaha baik berupa SIUP, NPWP, SIUJK maupun tenaga ahli yang profesional dan bersertifikat menjadi hal yang wajib dimiliki untuk menunjukkan kualitas dan profesionalitas perusahaan. Kemudian perlengkapan peralatan pendukung pekerjaan yang menjadi syarat utama layaknya sebuah perusahaan untuk mengerjakan

paket pekerjaan juga harus dimiliki. Pada inipun semua telah memacu perusahaan untuk berdaya saing yang unggul baik dari segi kualifikasi badan usaha, permodalan, tenaga kerja dan peralatan.

Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna akhir dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah akan mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya e-procurement tersebut, diantaranya adalah sebagai kemudahan mengakses informasi tentang proses pengadaan secara cepat, tepat dan terbuka. Dengan semakin transparan dan mudahnya mengakses tahapan proses pengadaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

E-Procurement Di Kabupaten Gunungkidul Telah Memberikan Banyak Perubahan

Pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan secara e-procurement di Kabupaten Gunungkidul telah memberikan banyak perubahan yang mendasar dari sebuah proses yang sebelumnya tertutup, tidak transparan, banyak terjadi pengaturan lelang, hanya dikuasai oleh mereka yang bermodal besar, punya hubungan dekat dengan pejabat publik berubah menjadi sebuah proses yang transparan, terbuka, bersaing secara sehat dan tanpa ada diskriminasi terhadap semua peserta lelang. Dalam hal ini apa yang menjadi tujuan-tujuan dari e-procurement tersebut yaitu (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (3) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (4) mendukung proses monitoring dan audit (5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, sudah mendekati kenyataan. Pelaksanaan prinsip-prinsip pengadaan sesuai dengan amanat Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya telah dilaksanakan dengan beberapa catatan sebagai berikut:

Secara umum prinsip efisien telah berjalan optimal baik dari efisiensi biaya maupun waktu. Ini terlihat dari penghematan biaya dan waktu yang bisa dirasakan baik oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa. Hanya saja untuk efisiensi waktu masih bisa ditingkatkan lagi dengan lebih fokusnya pokja dalam pekerjaannya.

Untuk prinsip efektif belum cukup optimal karena masih belum bisa menghasilkan penyedia yang profesional yang disebabkan masih munculnya fenomena banting harga yang berujung pada menurunnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Prinsip transparan telah berjalan optimal dimana semua informasi tentang pengadaan bisa diakses oleh publik dan bersifat terbuka dengan ditayangkan di portal pengadaan dan tidak adanya tatap muka antara pokja dan penyedia. Hal ini juga telah menghilangkan praktek KKN yang sebelumnya banyak dijumpai dalam lelang manual.

Prinsip terbuka telah berjalan optimal dimana tidak ada lagi pembatasan bagi penyedia dari luar daerah untuk bisa mengikuti lelang di Gunungkidul. Ini juga terlihat dari adanya peningkatan pemenang lelang dari luar Gunungkidul.

Prinsip bersaing yang diharapkan adalah proses lelang tanpa adanya pengaturan sehingga tercipta harga pasar yang kompetitif. Kondisi ini sudah tercapai secara umum pada paket-paket pekerjaan yang mempunyai pangsa pasar relatif banyak (penyedia). Namun pada paket pekerjaan yang mengharuskan kemampuan dan kapasitas khusus dan hanya sedikit pangsa pasarnya menunjukkan masih adanya pengaturan dari pihak penyedia.

Prinsip adil sudah berjalan ketika semua penyedia diperlakukan sama baik dalam mengakses informasi maupun persyaratan yang tidak diskriminatif. Belum optimalnya prinsip adil terutama saat proses klarifikasi. Hal ini karena pokja belum memiliki SOP yang menjadi acuan yang sama dalam memperlakukan penyedia terutama dalam proses klarifikasi penyedia yang masih ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing pokja yang kadang berbeda-beda.

Masa depan e-procurement di Gunungkidul haruslah dilihat dari perspektif yang optimis. Dengan peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia segala hambatan ataupun peluang kecurangan yang masih mungkin timbul akan bisa diatasi. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik eksekutif, legislatif, swasta, LSM dan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam berbagai asosiasi untuk bisa membuka mind set baru tentang sebuah kompetisi yang sehat dan paradigma baru tentang sebuah pelelangan dimana memenangi sebuah lelang adalah karena kapasitas dan profesionalitas bukan karena usaha menghalangi peserta lain.

**PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PEREMPUAN
DI TIGA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**POLITICS PARTICIPATION OF WOMEN
MEMBER IN VILLAGE CONSULTATIVE
BOARD AT THE THREE VILLAGES OF
GUNUNGKIDUL REGENCY**

Nama : Supriyono

Unit Kerja : Setda Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

Diklat : Diklat Gelar 2015

Univ – Prodi : MAP - UGM

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi partisipasi politik anggota BPD perempuan di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Desa Nglipar Kecamatan Nglipar, dan Desa Petir Kecamatan Rongkop dalam menjalankan fungsi BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota BPD perempuan Desa Baleharjo yang berada di wilayah perkotaan dapat berpartisipasi aktif menjalankan fungsi BPD dalam substansi voice, akses, dan kontrol, namun kurang aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sedangkan dua anggota BPD perempuan Desa Nglipar yang berada di wilayah semi perkotaan, cenderung kurang aktif dalam menjalankan semua fungsi BPD. Keaktifan hanya terlihat pada substansi kehadiran. Sementara tiga anggota BPD perempuan Desa Petir yang berada di wilayah perdesaan justru dapat aktif menjalankan fungsi BPD dalam substansi voice, akses, dan kontrol. Kepentingan perempuan juga banyak yang bisa terdani dalam APBDesa. Namun cenderung kurang aktif dalam fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam substansi voice.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

ABSTRACT

This thesis aims to determine the condition of women's political participation in the BPD in Village Baleharjo District of Wonosari, Village Nglipar District of Nglipar, and Village Petir District of Rongkop in performing the function BPD to discuss and agree on the village's draft regulation with the village chief, and share their aspirations of rural communities, and supervise the performance of the village chief, as well as aspects that influence it. This study uses qualitative research methods with data collection through in-depth interviews, observation and documentation.

The results showed that women members of BPD Baleharjo residing in urban areas can participate actively in function of BPD on the substance of voice, access, and control, but less active in channeling the aspirations of communities. Meanwhile, two female members of BPD Nglipar located in semi-urban areas, tend to be less active in performing all the functions of BPD. Activeness only seen on the substance of the presence. While the three women members of BPD Petir residing in rural areas it can be as active in function of BPD on the substance of voice, access, and control. Women's interests too much can be funded in APBDesa. But in voice substance they tend to be less active in the function to oversee the performance of the village chief.

Keywords : Women's Political Participation, Village Consultative Council, Act No. 6 of 2014.

Akses bagi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat telah dijamin dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengenai kebijakan afirmatif untuk menjamin keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa (dalam hal ini BPD). Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan”.

Namun semakin terbukanya akses tersebut tidak serta merta dapat menghilangkan dominasi laki-laki terhadap perempuan baik dari sisi jumlah maupun tingkat partisipasi anggota BPD untuk menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kekhawatiran terhadap potensi semakin tidak berpihaknya kebijakan publik terhadap perempuan di tengah kondisi meningkatnya kemampuan anggaran desa, akibat kurang aktifnya partisipasi perempuan yang duduk dalam lembaga pengambil kebijakan publik dengan keterwakilan yang relatif terbatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi politik anggota BPD perempuan berdasarkan perbedaan karakteristik antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya merumuskan, mempengaruhi, dan menentukan kebijakan publik tingkat desa sesuai aspirasi masyarakat khususnya dari kaum perempuan.

Perbedaan karakteristik wilayah dan tingkat kesulitan geografis pada Desa Baleharjo yang berstatus desa urban di wilayah perkotaan Wonosari, Desa Nglipar yang memiliki sifat semi urban karena menjadi ibu kota Kecamatan Nglipar, dan Desa Petir Kecamatan Rongkop sebagai desa berstatus rural (pedesaan), serta adanya perbedaan kultur masyarakat dan jumlah anggota BPD perempuan diharapkan dapat memberikan gambaran perbedaan tingkat partisipasi anggota BPD perempuan pada masing-masing desa di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggota BPD perempuan berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Secara akademis diharapkan dapat menambah kekayaan keilmuan di bidang administrasi publik khususnya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi Politik Anggota BPD Perempuan

Disajikan temuan dan analisis hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian terkait partisipasi politik anggota BPD perempuan dalam menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Desa Nglipar Kecamatan Nglipar, dan Desa Petir Kecamatan Rongkop.

Fungsi BPD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 3 (tiga) yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Agar fungsi BPD dapat terselenggara dengan baik membutuhkan adanya partisipasi seluruh anggota BPD tidak terkecuali dari anggota BPD perempuan. Anggota BPD perempuan selain sebagai wakil penduduk suatu desa secara umum, juga mengemban amanat sebagai wakil kaum perempuan di desanya yang menaruh harapan kepadanya untuk dapat memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan mempengaruhi pengambilan keputusan mulai tahap perumusan rencana kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik desa.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan kinerja tersebut, BPD secara kelembagaan memiliki hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan secara personal anggota BPD dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan/atau pendapat melalui forum kelembagaan BPD. Namun bahan pengawasan kinerja tersebut dapat diperoleh berdasarkan masukan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing anggota BPD.

Partisipasi anggota BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa mencerminkan jenis partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi kebijakan. Pengawasan kinerja dapat dilaksanakan dalam proses pelaksanaan kebijakan yaitu mengawasi dan meminta keterangan tentang pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan publik yang sedang dilaksanakan oleh kepala desa dan jajarannya. Sedangkan pengawasan dalam evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan kebijakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Berikut adalah hasil penelitian dan analisa mengenai partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Baleharjo, Desa Nglipar, dan Desa Petir yang meliputi substansi voice, akses, dan kontrol dalam menjalankan fungsi BPD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota BPD Perempuan

Budaya patriarki yang telah lama mengakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya, menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, karena politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pelapisan sosial masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula penghargaan dari masyarakat terhadap status kemampuan orang tersebut.

Lembaga-lembaga dan organisasi sektor publik banyak yang tidak memiliki kesadaran gender secara teknis salah satunya dengan budaya menyelenggarakan rapat pada malam hari bahkan terkadang sampai larut malam dalam kondisi sosial masyarakat yang masih memandang hal yang kurang etis bagi perempuan beraktivitas pada malam hari dan berinteraksi dengan banyak laki-laki yang bukan muhrimnya.

Dalam praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor publik, perempuan tidak terlalu terwakili dalam posisi pembuat keputusan dan tidak ada tindakan afirmatif untuk menangani kesenjangan gender di tataran manajemen puncak.

Pelabelan masyarakat terhadap peran perempuan sebagai istri dan ibu dan memberikan status yang lebih rendah dari laki-laki merupakan salah satu hambatan psikologis bagi perempuan dalam berpartisipasi politik. Masih ada anggapan dari sebagian masyarakat Desa Nglipar bahwa perempuan itu lemah, hanya bisa memasak dan mencuci serta tidak bisa berbuat lebih.

Norma-norma kultural patriarki yang telah mengakar di dalam masyarakat dan telah merasuki pemikiran sebagian mayoritas perempuan Indonesia membuat mereka secara psikologis tak siap untuk berpartisipasi dalam politik. Banyak perempuan yang terjangkit rasa rendah diri dan merasa tak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani isu-isu politis. Keadaan ini membuat banyak perempuan menunjukkan sikap atau pendekatan pasif terhadap politik.

Salah satu penghambat partisipasi politik bagi perempuan secara umum adalah persepsi bahwa aktivitas politik sebagai hal yang 'kotor', kasar, dan penuh muslihat sehingga dianggap tidak layak untuk perempuan, karena sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra perempuan.

Motif Dari Anggota BPD Perempuan Dalam Berpartisipasi

Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Baleharjo yang berada di kawasan perkotaan dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong aktif baik dalam substansi voice, akses, maupun kontrol. Namun dalam fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baru dirasakan keaktifannya pada tingkat padukuhan, sedangkan pada tingkat desa termasuk kurang aktif. Kurang aktifnya partisipasi satu-satunya anggota BPD perempuan dalam melaksanakan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat paralel dengan kurang signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.

Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Nglipar dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong kurang aktif dalam substansi voice dan kontrol. Keaktifan hanya terlihat dalam hal akses melalui kehadiran dan mendapatkan informasi untuk fungsi membahas rancangan peraturan desa dan mendapatkan informasi dalam fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Kurang aktifnya partisipasi dua orang anggota BPD perempuan dalam melaksanakan fungsinya, paralel dengan kurang signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.

Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Petir dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong aktif baik dalam substansi voice, akses, maupun kontrol. Namun dalam fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam substansi voice cenderung kurang aktif karena penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang sudah baik. Keaktifan partisipasi tiga orang anggota BPD perempuan dalam melaksanakan semua fungsinya paralel dengan cukup signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.

Motif dari anggota BPD perempuan dalam berpartisipasi menjadi anggota BPD masih sedikit yang dilandasi kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap situasi yang memarginalkan perempuan.

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN
TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

**COMMUNITY PARTICIPATION IN
DEVELOPMENT OF HUTAN TANAMAN
RAKYAT PROGRAM IN THE OGAN
KOMERING ILIR REGENCY**

Nama : Zaraqo
Unit Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering
Ilir Pemkab. Ogan Komering Ilir
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MAP - UNSRI

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan secara purposive dan data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan serta evaluasi bersifat perwakilan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi fikiran, tenaga dan uang. Faktor pendukung partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR yaitu motivasi, kesadaran dan tanggung jawab, kesempatan, kemudahan akses informasi serta adanya kelompok tani hutan/ koperasi. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR yaitu keterbatasan kemampuan individu masyarakat, birokrasi dan administrasi yang sulit dan berbelit-belit dalam pelaksanaan program pembangunan HTR, keterbatasan pembiayaan HTR serta intensitas pendampingan dan fasilitasi masih kurang.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, hutan tanaman rakyat (HTR)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the people's participation process in development of HTR program in Ogan Komering Ilir Regency and determine the factors that support and inhibit people's participation. The method used in this research is qualitative descriptive analysis technique with a case study approach. Informants determined by purposive and data obtained through interviews, observation, and literature study. The results showed that the process of community participation in the development of HTR program in Production Forest Area Terusan Sialang in Ogan Komering Ilir Regency is direct community participation in the decision-making process, implementation, benefit and monitoring and evaluation. Although, in the decision-making process and monitoring and evaluation. are representative. The a form of community participation are participation of thought, effort and money. Factors that support the success in development of HTR program are the motivation, responsibility and awareness, opportunity and the government policy which involves the community in the HTR program, information access, local institutional. Inhibiting factors for people's participation in the development of HTR program are the limited ability of individual communities, the difficulties and convoluted of bureaucracy and administration in the implementation of HTR program, limited of HTR financing abilities, and the lack of facilitation and assistance intensity.

Keywords: community participation, hutan tanaman rakyat (HTR)

Program pembangunan HTR sebagai kebijakan operasional yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi dan merupakan strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik tenurial dengan masyarakat, perambahan kawasan hutan, keamanan hutan dan kemiskinan sehingga masyarakat disekitar dan dalam kawasan hutan diharapkan dapat mengambil manfaat dan memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan (Hakim, 2009:27).

Program pembangunan HTR dimaksudkan untuk menambah sumber penyedia bahan baku kayu bagi usaha atau industri kehutanan. Program pembangunan HTR juga ditujukan sebagai upaya untuk memberikan peluang usaha dan bekerja sebagai pengelola sumber daya hutan bagi masyarakat disekitar hutan sehingga pembangunan kehutanan tidak saja berpihak kepada pemegang modal besar namun berpihak pada masyarakat (Emila dan Suwito, 2007: 14). Program pembangunan HTR bisa memberi manfaat untuk menunjang kebutuhan supply bahan baku industri hasil hutan dan pelestarian hutan. Selain itu tujuan HTR adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan khususnya pada masyarakat sekitar hutan dan merupakan solusi bagi masalah konflik tenurial seperti perambahan dan penjarahan kawasan hutan yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan, pertanian dan pemukiman. Pengusiran paksa terhadap masyarakat dalam kawasan hutan atau yang dikenal dengan sebutan perambah hutan bukanlah solusi yang baik karena tidak menjadikan kawasan hutan lebih baik dan justru semakin rusak (Anwas, 2005 dalam Ayuniara, 2013: 4).

Di sisi lain masyarakat sekitar kawasan hutan tetap saja miskin karena akses mereka terhadap hutan menjadi sulit mengingat kehidupan ekonominya bergantung pada sumber daya hutan. Sumberdaya hutan yang dikuasai oleh pihak pengelola hutan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sehingga menimbulkan enefisiensi sekaligus menutup akses kelompok masyarakat yang lemah terhadap sumberdaya hutan tersebut dan menimbulkan kerugian sosial yang tinggi (Anwas, 2005 dalam Ayuniara, 2013: 4). Jadi dapat dikatakan bahwa program pembangunan HTR ini merupakan salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro-job) dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang seimbang antar pelaku ekonomi (pro-growth) dan perlindungan terhadap lingkungan (pro-environment).

Untuk mendukung program pembangunan HTR tersebut pemerintah telah menetapkan pencadangan areal HTR sampai dengan tahun 2013 seluas 702.520 hektar namun realisasi perizinan HTR sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 188.641 hektar atau 26,85 persen dari total areal pencadangan HTR (Kemenhut, 2013: 209). Di Kabupaten

Ogan Komering Ilir sendiri telah ditetapkan areal pencadangan HTR seluas ± 8.000 hektar melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 357/Menhut-II/2009 tanggal 8 Juni 2009.

Kesiapan fisik (lahan, pasar, dll) bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program HTR, kesiapan aspek sosial (kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat) juga harus diperhatikan (Ekawati et al, 2008) yang secara keseluruhan akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat. Seberapa baiknya suatu program disusun tetap tidak akan berhasil tanpa adanya ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut, terutama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat termasuk program HTR (Pujiastutik, 2011:5).

Menurut Mulyadi (2011: 19) dalam merealisasikan suatu program pembangunan akan mengalami kegagalan apabila tidak melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian untuk mengetahui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pandangan atau kajian terhadap proses pelaksanaan program pembangunan HTR dari perspektif masyarakat sebagai pelaku utama. Hal ini memerlukan kajian tentang proses partisipasi masyarakat dalam program tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam keberhasilan program hutan tanaman rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Proses Partisipasi Masyarakat pada HTR

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan pada tahapan perencanaan program pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dan diberikan kesempatan dalam menghadiri rapat/pertemuan, mengemukakan pendapat maupun saran, memberikan informasi/ data, dan terlibat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan.

Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam program pembangunan adalah dengan keikutsertaan dalam menghadiri rapat atau pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa pertemuan/rapat yang dihadiri oleh masyarakat pada program pembangunan HTR antara lain, sosialisasi program Pembangunan HTR, pembentukan kelembagaan HTR, pengurusan izin HTR, dan penyusunan rencana kerja.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan dengan menghadiri kegiatan sosialisasi tentang program pembangunan HTR yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, BPPHP Wilayah V Palembang dan pendamping HTR. Adanya kegiatan sosialisasi membuka jalan komunikasi antara pemerintah selaku penyelenggara program dan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan. Mardikanto dan Subianto (2015: 125) menyatakan sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan program atau kegiatan sehingga terjadi dialog dengan masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat dalam pertemuan sosialisasi (pembinaan atau fasilitasi) berbentuk perwakilan dengan memberikan mandat kepada tokoh masyarakat atau pengurus dalam kelompok tani/koperasi.

Masyarakat terlibat langsung dengan menghadiri pertemuan pembentukan kelompok tani/koperasi. Dalam pertemuan tersebut masyarakat terlibat dengan mengemukakan pendapat, saran, dan menyampaikan data/informasi terkait pembentukan struktur organisasi, pemilihan pengurus, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART) serta rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan HTR. Serta memberikan kontribusi berupa uang untuk biaya konsumsi pada saat pertemuan atau rapat.

Dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka, anggota kelompok tani/koperasi terlibat secara partisipatif dalam pengurusan perizinan HTR dan penataan areal dengan memberikan informasi terkait lahan garapan dan persyaratan administrasi. Dalam kepengurusan izin anggota kelompok petani/koperasi didampingi oleh pendamping HTR dan dibantu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pengukuran, pembuatan dan pencetakan peta areal kerja. Kontribusi yang diberikan berupa uang untuk biaya perasional dalam pengurusan izin HTR seperti upah juru ukur, pembuatan dan pencetakan peta.

Berdasarkan temuan dilapangan terkait tipe partisipasi mengacu kepada teori Hogley dalam Mardikanto (2014: 88), masyarakat di Kawasan Hutan Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir ikut berperan dengan cara sebagai berikut: 1) Berkonsultasi dan pemerintah (pusat dan daerah) mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya; 2) Membentuk kelompok tani/koperasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari program pembangunan HTR. Pada tahap awal masyarakat masih tergantung kepada pihak luar (pemerintah dan pendamping HTR), namun secara bertahap telah menunjukkan kemandiriannya; 3) Menganalisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan kelompok. Dari uraian tersebut partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan (perencanaan) pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dapat dikategorikan dalam tipe partisipasi tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan HTR yaitu keterlibatan masyarakat pada kegiatan penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hasil serta perlindungan dan pengamanan hutan (BPK, 2007). Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan HTR merupakan salah satu tahapan penting dalam penentuan keberhasilan program pembangunan HTR. Berikut ini beberapa kegiatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan HTR di Kawasan Hutan Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Partisipasi penerimaan manfaat merupakan wujud hasil yang positif baik langsung maupun tidak langsung dari ikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan HTR. Ndraha (1983: 50) mengatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri; menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan; mengusahakan; merawat, memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak tidak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan yang baru.

Jika dilihat dari tujuan program pembangunan HTR dalam rangka mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan perlindungan terhadap lingkungan maka pemanfaatan dalam program pembangunan HTR ini dibagi menjadi tiga yaitu pemanfaatan manfaat sosial, manfaat materi dan manfaat individu

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan. Menurut Suwignjo dalam Mulyadi (2011: 45) partisipasi dalam evaluasi bertujuan agar apa yang sudah dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dari uraian tersebut maka kegiatan evaluasi terhadap program pembangunan HTR mutlak diperlukan. evaluasi bukan hanya sekedar menilai apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana tetapi perlu adanya umpan balik terhadap pemasalahan dan hambatan yang muncul sehingga program pembangunan HTR akan lebih baik ke depan. Partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi pada penelitian ini berasal dari masyarakat selaku pelaksana dan penerima pembangunan.

Selain pemerintah, evaluasi yang bersifat internal oleh masyarakat (anggota kelompok tani/koperasi pemegang izin IUPHHK-HTR) harus dilakukan berupa laporan realisasi pelaksanaan RKTUPHHK-HTR tahun sebelumnya yang tertuang dalam laporan RKT-UPHHK-HTR tahun sekarang. Namun untuk laporan triwulan pada tahun berjalan belum pernah dibuat oleh kelompok tani/koperasi. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus KTH Jelutung berikut ini: "Triwulan belum kalau tahunan sudah 2 kali...kewajiban untuk laporan RKU-RKT sudah...pajak iuran izin sudah waktu keluar izin..."(wawancara dengan S, tanggal 10 Agustus 2016).

Interpretasi Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat

Kebijakan publik adalah sebuah hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana menurut Arisman (2014: 2) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Namun kenyataan dilapangan kebijakan publik terkait program pembangunan HTR terkesan tidak efektif dan efisien. Masih terdapat ketentuan-ketentuan yang justru tidak mendukung atau mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program tersebut seperti persyaratan dan tatacara permohonan izin HTR, penyusunan rencana kerja dan penentuan besaran tarif provisi sumber daya hutan (PSDH) serta pembiayaan. Penyusunan kebijakan tersebut terkesan tidak memperhatikan keanekaragaman potensi (sosial, ekonomi, politik dan budaya) masyarakat setempat. Selain itu kebijakan program pembangunan HTR lebih berorientasi kepada pemberian izin untuk perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan hutan tanaman industri (HTI). Menurut Arisman (2014: 2) sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus ada keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Dalam artian, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan atau aturan terkait program pembangunan HTR melalui FGD atau konsultasi publik.

Selain itu, untuk mewujudkan *good governance* harus ada kesinergian antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan salah satunya melalui program pembangunan HTR. Namun pada kenyataannya kesinergian tersebut belum terwujud seutuhnya. Pemerintah belum mampu menciptakan akses untuk masyarakat dalam pengembangan usaha tani hutan, kelembagaan, pembiayaan dan akses pasar pada program HTR. Pihak swasta belum berperan aktif bekerjasama dalam pengembangan usaha tani hutan, kelembagaan pembiayaan dan akses pasar pada program HTR. Sedangkan masyarakat belum mampu berinteraksi secara aktif dalam membuka akses terhadap usaha tani hutan, kelembagaan pembiayaan dan akses pasar.

Kendala-kendala dalam program pembangunan HTR sebagaimana disebutkan diatas tentu saja dapat menghambat terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan terkait permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kemampuan Individu

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mengarah pada kemandirian (self mobilization) yang ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam mengontrol dan memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada secara swadaya.

Proses partisipasi masyarakat pada program HTR di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikelompokkan dalam 4 tahapan yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahap pengambilan keputusan dengan menghadiri rapat atau pertemuan dan memberikan saran, pendapat, serta informasi, pelaksanaan dengan berkontribusi melalui tenaga dan uang, pemanfaatan berupa manfaat sosial, materi dan individu serta evaluasi berupa penyusunan laporan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Meskipun dalam pengambilan keputusan dan evaluasi keterlibatan masyarakat masih bersifat perwakilan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa pikiran, tenaga dan uang.

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah faktor internal pendorong partisipasi masyarakat yaitu sikap masyarakat seperti motivasi masyarakat untuk mendapatkan legalitas dan peningkatan taraf hidup dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan HTR. Sedangkan faktor eksternal pendorong partisipasi masyarakat yaitu 1) Adanya kesempatan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui pemberian izin pada program pembangunan HTR.; 2) Kemudahan akses informasi tentang program pembangunan HTR; 3) Terbentuknya kelembagaan inti (kelompok tani/koperasi).

Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor internal penghambat partisipasi masyarakat yaitu kemampuan individu (anggota kelompok/koperasi) terkait pengetahuan, keterampilan dan pembiayaan yang masih terbatas. Sedangkan faktor eksternal penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu 1) Birokrasi dan administrasi pelaksanaan program HTR seperti kepengurusan dan persyaratan izin, penyusunan rencana kerja dan tarif PSDH sulit dan berbelit-belit; 2) Pembiayaan program pembangunan HTR masih terbatas; 3) Intensitas pendampingan dan fasilitasi masih kurang.

Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Ogan Komering

Ilir dengan fokus kajian pada empat tahapan partisipasi yaitu pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi. Dengan fokus pada empat tahapan tersebut, melalui penelitian ini diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat baik internal maupun eksternal terhadap partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR.

Dalam penelitian ini terlihat adanya keterkaitan antara faktor-faktor partisipasi masyarakat. Untuk lebih mengembangkan studi tentang kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR, maka diharapkan lebih mengkaji secara mendalam mengenai keterkaitan atau hubungan antara faktor-faktor partisipasi masyarakat satu sama lain, khususnya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, perlu penelitian lanjutan terkait implementasi pelaksanaan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat serta strategi penguatan dan pengembangan kelembagaan (kelompok tani/koperasi) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**STRATEGI PERENCANAAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN
ALAT ANALISIS STRATEGY FORMULATION
FRAMEWORK**

**(Studi di Puskesmas Purwodadi
Kabupaten Pasuruan)**

**PLANNING STRATEGY OF PUBLIC SERVICE
QUALITY IMPROVEMENT WITH STRATEGY
FORMULATION FRAMEWORK ANALYSIS TOOLS
(Study at Puskesmas Purwodadi Pasuruan
Regency)**

Nama : Dian Titrisari Putrikusuma
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, adanya keluhan masyarakat terhadap mutu pelayanan aparatur pemerintah, penduduk miskin belum memanfaatkan puskesmas sebagai penyelenggara layanan kesehatan dasar meskipun terdapat pembebasan biaya. Jenis penelitian dan metodenya adalah penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 100 responden pengguna layanan Puskesmas untuk mengetahui kualitas pelayanan publik (kuesioner 1) dengan metode random sampel, dan 13 responden yang berasal dari stakeholder Dinas Kesehatan dan Puskesmas (kuesioner ke 2 dan kuesioner ke 3) dengan metode jenuh teknik nonprobability sampling. Hasil penelitian kuesioner tahap 1 tentang kualitas pelayanan publik Puskesmas Purwodadi adalah cukup baik dan variable terbaiknya adalah Jaminan/assurance dan indikator yang terbaik adalah sopan santun petugas layanan sedangkan indikator terburuk adalah kecepatan pelayanan, ketepatan dan keakuratan pelayanan, penyampaian informasi. kemudian matrik IFE (Internal Factor Evaluation) dan matrik EFE (Eksternal Factor Evaluation) tahap input diperoleh faktor internal dan eksternal, masing-masing faktor internal untuk kekuatan sebanyak 10 variabel, kelemahan sebanyak 8 variabel, dan faktor eksternal untuk peluang sebanyak 8 variabel, ancaman sebanyak 4 variabel.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan yang lainnya adalah mendapatkan strategi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang kesehatan pada karakteristik penduduk dan geografi di daerah pegunungan, dan ekonomi masyarakat yang beragam dari masyarakat yang mampu sampai dengan masyarakat miskin. Kelemahan penelitian ini masih perlu penyempurnaan dengan menggunakan analisis matrik yang lain dari strategy formulation framework sehingga diperoleh strategi yang lebih fokus, dapat pula dilakukan tindak lanjut perumusan strategi yang telah menjadi prioritas. Implikasi penelitian ini untuk praktek dilapangan dapat menggunakan prioritas strategi perencanaan yang sudah terpilih, implikasi penelitian terhadap teori strategi perencanaan peningkatan pelayanan publik adalah penelitian ini dapat pula dikompilasi dengan analisis lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih terinci.

Kata kunci: Perencanaan, Pelayanan Publik, Perumusan Kerangka Analitik Strategi, QSPM

ABSTRACT

One of the most important concerns at public health facilities in developing countries is improving the quality of public services. Since, improving the quality of public services at public health sectors are able to satisfy many complaints toward all aspects includes quality of human resources in delivering public services, high demand in subjecting poor people who are being sick, and priority of program when human resources and facilities are scarce. One of the ways to improve quality of public service in integrative ways is doing strategic planning. This study uses descriptive surveys with quantitative approach in Strategic Formulation Framework. This study uses three questionnaires, i.e Questionnaire I, II, and III. Questionnaire I is used to measure the quality of public service, with random sampling technique with n=100. While questionnaire II and III are used for measuring Stake Holders' Perspective in doing strategic planning at Puskesmas Purwodadi.

Inspite of some fruitful findings in strategic planning to improve the quality of public services in public health sector, this study has several limitations, as follows: (1) this study conducts only a survey in a local government with characteristics of people lives in mountainous region with varied in occupation, therefore it could generalized for others local governments in Indonesia, (2) this study use a matrix of Strategic Formulation Framework that may not produce the best policy recommendation. Future study must consider another matrix of Strategic Formulation Framework to make specific and focus strategies as well as compilation this concept with Balance Score Card to gain more practice to implement the policy.

Keywords: Planning, Strategic Formulation Framework, Public Services, QSPM

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yaitu dengan melakukan pelatihan untuk puskesmas tentang standarisasi mutu ISO 9001:2007 untuk peningkatan kualitas pelayanan prima di Puskesmas, mengadopsi program yang sudah berhasil di tempat lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan promotif maupun preventif, melakukan strategi dengan mengubah pola pengelolaan Puskesmas menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Puskesmas di Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah melakukan strategi perencanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun dengan adanya tuntutan dari lingkungan global, masyarakat, dan pemerintah tentang universal access dan universal coverage maka Puskesmas harus menjalin mitra dan menjalin hubungan kerja serta harus memiliki strategi perencanaan yang di gunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Strategi perencanaan yang di gunakan seharusnya dapat mengetahui prioritas kegiatan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang menuntut jaminan sosial masyarakat sekarang ini.

Berawal dari hal tersebut maka, penelitian ini mengambil judul “Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Alat Analisis Strategy Formulation Framework Studi di Puskesmas Purwodadi Kabupaten Pasuruan”.

Di Kabupaten Pasuruan kondisi pelayanan publik dilihat dari layanan Puskesmas menurut laporan tahunan Dinas kesehatan tahun 2014 maka diperoleh Pelayanan kesehatan masyarakat di 33 Puskesmas di Kabupaten Pasuruan untuk cakupan rawat jalannya adalah 92,30%, untuk jumlah kunjungan rawat inap di 18 Puskesmas rawat inap Kabupaten Pasuruan sebesar 52,17% naik sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya 2013, dengan rata-rata lama rawat selama 2 hari. Pada tahun 2014 terdapat program lain yang dilakukan yaitu pelatihan service excellent yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemberi layanan di Puskesmas kabupaten Pasuruan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik dibidang kesehatan Puskesmas yang merupakan institusi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar ditingkat kecamatan dan desa. Puskesmas yang akan dilakukan penelitian ini merupakan Puskesmas yang sudah pernah melakukan standarisasi mutu ISO 9001:2007 tetapi program tersebut tidak dilanjutkan karena tidak adanya perbaharuan atau pelatihan untuk tenaga kesehatan (SDM) yang baru sehingga konsistensi program ini tidak dapat berjalan, demikian pula untuk anggaran biayanya juga menjadi salah satu faktor. Puskesmas yang pernah melakukan inovasi pelayanan dokter spesialis untuk mendukung program penurunan angka kematian ibu dan anak, sehingga melakukan inovasi menyediakan konsultasi dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan, tetapi program tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan anggaran. Berdasarkan beberapa permasalahan dan data tersebut maka perlu kiranya untuk melakukan strategi perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik menggunakan tahapan strategy formulation

framework karena terdapat strategi yang harus dilakukan agar dapat menghadapi tuntutan lingkungan yang berubah sangat cepat dan untuk menghadapi era jaminan kesehatan universal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti pada Puskesmas Purwodadi di Kabupaten Pasuruan ini adalah Bagaimanakah kualitas pelayanan publik dan alternative strategi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Purwodadi di Kabupaten Pasuruan?

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, sebenarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan publik Puskesmas Purwodadi di Kabupaten Pasuruan. Dimana penelitian ini nantinya dapat digunakan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam Menyusun strategi perencanaan peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan di tingkat rujukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang lebih mendalam dengan mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup relevan untuk diperhatikan. Selanjutnya fakta yang ditemukan diberikan penafsiran. Pada penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penafsiran data, namun juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan.

Kualitas Pelayanan Publik Puskesmas Purwodadi

Standar pelayanan akan menjamin kualitas minimal dari pelayanan publik sehingga terjadi pemerataan, standar pelayanan didukung oleh persyaratan teknis pelayanan. Penilaian kualitas pelayanan publik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner 1 tentang kualitas pelayanan publik dan hasil pengolahan data primer kuesioner yang menggunakan skala likert skala 1 sampai dengan 5, maka diperoleh bahwa variabel yang menjadi peringkat 1 adalah jaminan (assurance), daya tanggap (responsiveness), bukti fisik (tangibles), empati (empathy) dan yang terakhir adalah reliabilitas (reliability)

Kredibilitas petugas pelayanan terbilang buruk

Pada variabel ini mempunyai nilai rata-rata 4,00 yang memiliki nilai lebih tinggi dari rata – rata total seluruh variabel yaitu 3,90. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa indikator kesopanan petugas dapat membawa pengaruh positif terhadap pengguna

layanan sebab memiliki nilai skor tertinggi pada variabel ini terhadap penilaian kualitas pelayanan publik. yaitu mendapat nilai 4,13. Indikator pada variabel jaminan ini yang mendapatkan peringkat terendah adalah kredibilitas petugas pelayanan yang mendapat skor nilai 3,91.

Pengguna Layanan Masih Merasakan Kurang Dalam Kecepatan Pelayanan Dan Ketepatan Waktu Pelayanan. Variabel bukti fisik (tangibles) dan empati (empathy) menduduki peringkat ketiga dan mempunyai nilai rata-rata variabel yang sama yaitu 3,90 dan nilai tersebut juga sama dengan nilai total rata-rata variabel. Nilai variabel tersebut menunjukkan bukti fasilitas yang tampak atau terlihat berpengaruh sama dengan rasa empati petugas pada pengguna layanan. Variabel daya tanggap (responsiveness) ini menempati peringkat ke dua dengan nilai rata-rata variabel 3,94, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai total rata-rata variabel 3,90. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon petugas Puskesmas Purwodadi dinilai baik dan positif terhadap kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna layanan masih merasakan kurang dalam kecepatan pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan, berbeda halnya dengan kecepatan respon petugas, kecepatan pelayanan disini adalah setelah dilakukan respon keluhan, tindak lanjutnya yang dirasakan kurang oleh pengguna layanan.

Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Purwodadi

Hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah disusun untuk memperoleh strategi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Purwodadi Kabupaten Pasuruan, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Kualitas pelayanan publik di Puskesmas Purwodadi diperoleh hasil penilaian kualitas pelayanan publik adalah dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata variabel 3,90, artinya nilai tersebut masih kurang 0,1 untuk mencapai kategori baik. Variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik adalah (1) jaminan / assurance menempati rangking pertama dengan skor nilai 4,00 dan indikator yang baik adalah sopan santun (keramahan) petugas pelayanan merupakan indikator terbaik dalam pelayanan, (2) daya tanggap / responsiveness dengan skor nilai 3,94 dan menempati peringkat kedua, dengan indikator terbaik adalah kesediaan petugas dalam merespon pengguna layanan, (3) bukti fisik / tangibles menempati peringkat ketiga dengan nilai 3,90 dan indikator yang terbaik adalah menilai penampilan pegawai yang rapi, (4) empati / empathy juga menempati rangking yang sama dengan bukti fisik / tangibles dan indikator terbaiknya terdapat tiga indikator yaitu kemudahan memanfaatkan layanan, kemampuan berkomunikasi dan keadilan dalam pelayanan, artinya petugas

pelayanan di Puskesmas Purwodadi sudah dapat melakukan penyampaian informasi terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas. (5) reliabilitas / keandalan/ reliability menempati peringkat terakhir dengan nilai skor di bawah nilai rata-rata variabel 3,80, artinya variabel ini mempunyai indikator yang kesemuanya dibawah rata-rata total, sehingga indikator pada variabel reliabilitas dapat dimasukkan kedalam kelemahan organisasi. Kualitas pelayanan publik di puskesmas purwodadi yang dapat di masukkan dalam tahapan input yaitu mengenai ketepatan waktu pelayanan, dan keakuratan petugas pelayanan kurang, kecepatan pelayanan kurang, kemampuan memberikan informasi kurang.

Alternatif-alternatif strategi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Purwodadi yang dapat diperoleh antara lain adalah terdapat tiga strategi utama yang dapat direkomendasikan [1] strategi pengembangan produk / product development strategy; merupakan strategi yang dapat memodifikasi atau meningkatkan produk jasa yang sudah ada agar dapat lebih menarik pengguna layanan, contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain peningkatan jumlah SDM, peningkatan kualitas kompetensi SDM, peningkatan dan penguatan monitoring, peningkatan pemeliharaan sarana prasarana serta memaksimalkan penggunaan lahan, sarana, prasarana; [2] strategi penetrasi pasar / market penetration strategy; dapat dilakukan dengan pengembangan atau meningkatkan produk jasa melalui cakupan yang lebih luas, kegiatan yang termasuk dalam strategi ini antara lain : pengembangan dan peningkatan media informasi, media promosi, pengembangan pengelolaan manajemen dan pendataan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; [3] strategi integrasi ke depan / forward integration strategy, merupakan strategi yang bertujuan agar Puskesmas Purwodadi memiliki kemampuan jasa pelayanan serta dapat mengendalikan produk jasanya, kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam strategi utama ini antara lain: peningkatan pelayanan cepat dengan kendaraan, serta penguatan koordinasi antar institusi yang terkait dengan pelayanan publik. Alternatif strategi utama tersebut didasarkan pada proses tahap pencocokan (the matching stage) dengan alat analisis matrik SWOT pada strategy formulation framework. Sebelum dilakukan tahap pencocokan (the matching stage) dilakukan tahap input (the input stage).

Prioritas strategi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Purwodadi diperoleh dengan menggunakan strategy formulation framework pada tahap pengambilan keputusan (the decesion stage), kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), diperoleh hasil analisis yang dapat direkomendasikan sesuai dengan skor kemenarikan strategi (total attractiveness score) atas strategi alternatif, strategi umum yang menjadi prioritas adalah strategi pengembangan produk (product development strategy), strategi utama tersebut memiliki strategi fungsional. Strategi fungsional yang termasuk dalam strategi

utama ini, adalah: Pengembangan Pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi untuk membantu kecepatan dan ketepatan pelayanan Pengembangan pelayanan produk kesehatan dan pengendalian produk kesehatan

Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (pegawai), Peningkatan dan pengendalian pelayanan publik dengan penguatan monitoring dan evaluasi, Peningkatan koordinasi komunikasi, informasi dan sistem manajemen pelayanan Peningkatan pemeliharaan dan memaksimalkan kegunaan sarana dan prasarana.

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
(Studi Pada Dinas Industri Perdagangan
Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten
Ponorogo)**

**PROGRAM EVALUATION OF SMALL AND
MEDIUM INDUSTRIES COACHING AND
DEVELOPMENT
(Study at the Department of Trade and
Industry, Ponorogo Regency Government)**

Nama : Dina Trisian Iskandar
Unit Kerja : Dinas Industri, Dag Kop & UKM Pemerintah
Kabupaten Ponorogo
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW

ABSTRAK

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu program Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM yang turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Ponorogo. Makna perencanaan adalah kegiatan yang menyeluruh dan berlangsung terus-menerus, mulai tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Melalui evaluasi dapat diukur keberhasilan atau kegagalan suatu program dengan melihat sejauh mana rencana yang diimplementasikan dengan realisasi, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan tahun mendatang yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo dengan model evaluasi CIPP. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi Konteks menunjukkan bahwa program ini sejalan dengan tujuan Dinas Indakop dan UKM dalam menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan meningkatkan keterampilan SDM. Evaluasi Masukan, meliputi: perencanaan program yang telah mengkolaborasikan perencanaan top-down dan bottom-up; adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM aparatur; kondisi peserta yang beragam serta sarana prasarana pelatihan yang memadai. Evaluasi proses menunjukkan pelatihan teknis lebih banyak diberikan dibanding non-teknis. Dalam pelaksanaannya, masih minimnya evaluasi pelatihan. Evaluasi hasil berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM karena berada dalam tahap permulaan sehingga belum menunjukkan terhadap peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial. Kinerja Dinas Indakop dan UKM dalam upaya pembinaan dan pengembangan IKM belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Pengembangan IKM, Evaluasi Program, CIPP.

ABSTRACT

Small and Medium Industry Coaching and Development Program (IKM) is one of the programs of Trade Industry Industry and SMEs Services who participated in the economic development of Ponorogo regency. The meaning of planning is a thorough and continuous activity, from the stage of planning, implementation, monitoring and evaluation. Through the evaluation can be measured the success or failure of a program by looking at the extent to which the plan is implemented with realization, so that the evaluation results can be input for the preparation of planning for the coming year better.

This study aims to evaluate the implementation of IKM development and development programs in Ponorogo District with CIPP evaluation model. The research method used is descriptive evaluation with qualitative approach. Context Evaluation shows that the program is in line with the objectives of the Indakop and SME Offices in growing the number of new entrepreneurs and improving human resource skills. Input Evaluations, including: program planning that has collaborated top-down and bottom-up planning; the existence of budget constraints, limited human resources apparatus; diverse participant conditions as well as adequate training facilities. Process evaluation shows more technical training is provided than non-technical. In practice, there is still minimal training evaluation. The evaluation of tangible results on the increase in the knowledge of SMEs craftsmen because it is in the early stages so as not to show the improvement of technical and managerial skills. The performance of Dinas Indakop and UKM in SME development and development efforts has not been fully optimized.

Keywords: IKM Development, Program Evaluation, CIPP.

Secara umum IKM di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan klasik yang dihadapi, antara lain: kurangnya permodalan, sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas, biaya produksi, tingkat teknologi, pemasaran dan persaingan produk (Hafsah, 2004). Begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi IKM di Kabupaten Ponorogo, sehingga diperlukannya suatu program pembinaan dan pengembangan IKM oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai leading sector atau yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sektor industri, sesuai dengan visinya "Terwujudnya Masyarakat Ponorogo yang sejahtera yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menuju daerah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh, serta mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog".

Sejalan dengan arah pengembangan IKM dari Kementerian Perindustrian dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 khususnya bidang perekonomian yang berfokus untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, melalui pembinaan dan pengembangan IKM dengan berpedoman pada rencana strategis Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015, dengan sasaran yang hendak dicapai berupa: (1) meningkatnya penguasaan iptek sistem produksi dan kemampuan teknologi industri; dan (2) berkembangnya IKM serta sentra-sentra industri potensial; dan (3) tertatanya struktur industri. Berdasarkan data LAKIP Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, program pembinaan dan pengembangan IKM memiliki sasaran berupa meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil industri unggulan daerah dengan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan (2) penumbuhan industri baru.

Pada indikator pertama, berupa kontribusi sektor industri terhadap PDRB memiliki target pada akhir tahun Renstra sebesar 9,51% dengan realisasi 6,93%. Sedangkan pada indikator kedua, memiliki target akhir penumbuhan industri baru sebesar 0,60% sedangkan realisasi hanya 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa belum dilakukannya review terhadap Renstra pada tahun berjalan untuk menyesuaikan target dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya yang hanya 6,88%, sehingga target dapat disesuaikan dengan kemampuan capaian kinerja.

Rendahnya penumbuhan industri baru seperti pada indikator kedua dapat terlihat berdasarkan data jumlah IKM Kabupaten Ponorogo terdapat penumbuhan industri baru pada tahun 2015 hanya sebanyak 4 unit, meliputi 1 (satu) industri besar, 1 (satu) industri sedang dan 2 (dua) industri kecil. Dalam usaha pencapaian target penumbuhan industri baru, maka Bidang Industri Dinas Indakop dan UKM melakukan program peningkatan kemampuan teknologi industri berupa kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.068.426.140 dengan realisasi

penyerapan 99,06% atau sebesar Rp.1.058.421.000 yang terbagi ke dalam 15 jenis pelatihan pembinaan dan pengembangan di tahun 2015. Realisasi pertumbuhan industri yang masih sangat kurang, khususnya pertumbuhan IKM sebagai fokus perhatian Dinas Indakop dan UKM, sehingga diperlukan adanya pendampingan bagi calon wirausaha baru yang telah mendapatkan pelatihan untuk memulai usahanya dari lingkup usaha rumah tangga.

Anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pembinaan dan pengembangan IKM hingga akhir tahun perencanaan ternyata belum mampu mencapai target yang direncanakan. Berbagai macam pelatihan yang telah dilakukan dalam upaya membina dan mengembangkan IKM belum sepenuhnya berhasil dalam menumbuhkan wirausaha baru. Masih banyaknya peserta pelatihan yang enggan untuk memulai usaha pasca mendapatkan pembekalan dan lebih memilih usaha lain yang dirasa lebih mudah dengan penghasilan yang menggiurkan, terutama mendaftarkan diri menjadi TKI/TKW serta terlihat masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo. Program pembinaan dan pengembangan IKM masih banyak mengalami kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam mencapai tujuan sasaran yang ingin capai, baik dalam hal perumusan perencanaan program maupun dalam implementasinya yang masih kurang optimal, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan kepada pengrajin IKM pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya.

Sebagai suatu siklus yang berkesinambungan, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional diperlukannya adanya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap: (a) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan © hasil rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, melalui Dinas Indakop dan UKM khususnya dalam pembinaan dan pengembangan IKM, dengan cara mengevaluasi konteks (context), masukan (input), proses (process) dan hasilnya (product) dari program kegiatan yang telah dilaksanakan periode 2010-2015 serta dampaknya terhadap peningkatan keterampilan dan kesejahteraan bagi pengrajin IKM.

Berdasarkan uraian di atas, sangat diperlukan adanya evaluasi program kerja Dinas Indakop dan UKM khususnya Bidang Industri dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan IKM agar mengetahui kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program serta manfaat yang dirasakan pelaku usaha / pengrajin IKM.,

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (Studi Pada Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Ponorogo)”. Melalui hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dianalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Bidang Industri pada saat perencanaan dan implementasinya serta solusi penyelesaiannya dalam upaya pencapaian tujuan program pembinaan dan pengembangan IKM.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian di dalam penelitian ini adalah tentang evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo. Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM untuk memahami persoalan yang sama khususnya yang menyangkut evaluasi program pembinaan dan pengembangan IKM. Selain itu hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan program pembinaan dan pengembangan IKM pada masa Pemerintahan Bupati terpilih baru periode 2016-2020 sehingga terjadi adanya kesinambungan program.

Perencanaan Program

Berdasarkan teori, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Terdapat kemiripan pada penulisan indikator keluaran (output) yang tertulis “Meningkatnya kualitas SDM, Mutu Produk, Desain, Manajemen” dengan indikator manfaat “Meningkatnya kemampuan SDM, Mutu Produk dan Keterampilan”. Indikator tersebut belum dapat memenuhi kriteria dapat terukur (measurable) karena tidak adanya ukuran yang jelas mengenai seberapa tingkat kualitas yang diharapkan dan dimulai dari kondisi seperti apa;

Pada indikator hasil “Terselenggaranya kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri”, dimana kurang tepat dalam mengukur hasilnya dari suatu program. Seharusnya indikator tersebut dapat terukur mengenai berapa banyak IKM yang telah meningkat kualitas mutu produknya? Atau berapa banyak WUB yang tumbuh setelah mengikuti pelatihan? Menurut hemat penulis, seharusnya output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Industri dapat mendukung terhadap pencapaian

indikator kinerja yang telah tertulis pada Renstra, yaitu: (1) kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan (2) pertumbuhan industri baru.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Industri

Mengenai permasalahan kualitas SDM secara teknis sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari berbagai macam pelatihan yang telah diikuti oleh PNS Bidang Industri. Akan tetapi dari sisi pelatihan mengenai implementasi program / kebijakan publik perlu ditingkatkan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Tjiptoherijanto (2010:140) bahwa dalam pelaksanaan kebijakan publik membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan antara lain: (1) kemampuan dalam hal menyusun; (2) kemampuan mengadaptasi dan memahami karakteristik dari indikator-indikator keberhasilan yang digunakan; (3) kemampuan menganalisis strategi tentang hubungan antara indikator keberhasilan; dan (4) kemampuan menganalisis perubahan yang tajam tentang masa depan.

Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas bahwa anggaran yang diterima Bidang Industri dalam program pembinaan dan pengembangan IKM sejak tahun 2011-2015 berfluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh tingkat APBD dan prioritas peruntukannya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Kepala Bidang Industri dan Kepala Dinas Indakop dan UKM bahwa anggaran merupakan permasalahan yang krusial, sehingga apabila minimnya anggaran yang diterima berakibat pada jumlah dan durasi penyelenggaraan kegiatan. Sehingga diperlukan suatu perencanaan yang efektif dan efisien dalam mengalokasikan input sumber daya anggaran yang terbatas dalam merumuskan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh pengrajin IKM pada tahun berikutnya.

Hambatan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan program diantaranya sebagai berikut

Dengan alokasi anggaran yang terbatas, merupakan tantangan bagi Dinas Indakop dan UKM memiliki kewajiban dalam membina IKM yang jumlahnya mencapai 19.706 unit sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya anggaran secara efektif dan efisien agar dengan alokasi yang terbatas mampu mengakomodir kebutuhan IKM dengan skala prioritas. Sehingga perlu adanya pembenahan mengenai penyusunan perencanaan jenis-jenis pelatihan yang akan direncanakan pada tahun mendatang.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Industri yang terbatas. Keterbatasan SDM Industri yang hanya 13 orang dalam melaksanakan 15-25 jenis pelatihan selama

1 tahun anggaran (7 bulan efektif) sehingga diperlukan adanya penjadwalan panitia pelaksana yang baik dan bergantian.

Permasalahan ketidaksesuaian antara latar belakang calon peserta dengan jenis pelatihan yang akan diikuti, perlu adanya pembenahan dalam sistem perekrutan calon peserta. Perlu monitoring Kepala Bidang kepada Kepala seksi selaku pelaksana terhadap penyelenggaraan pelatihan pengembangan keterampilan, sehingga calon peserta memiliki usaha sesuai dengan jenis pelatihan yang akan diikutinya.

Ketidakhadiran peserta dapat diatasi dengan komitmen tinggi setiap individu yang perlu disampaikan oleh panitia pelaksana kepada calon peserta.

Terdapat jenis pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan peserta. Permasalahan ini dapat diatasi dengan peninjauan kembali dalam proses penyusunan rencana kerja, dimana lebih mengutamakan perencanaan bottom-up dimana aspirasi kebutuhan akan pelatihan dapat terselenggara.

Evaluasi Dampak Program Terhadap IKM

Dalam pengembangan produk IKM di Kabupaten Ponorogo, maka Bidang Industri juga berupaya dalam usaha memberikan fasilitasi berupa kemudahan mendapatkan perizinan, bantuan peralatan dan hak merk. Seperti halnya fasilitasi mendapatkan bantuan peralatan berupa mesin "cup sealer 4 line" dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Ibu Lusia pengrajin IKM jangelan "Segaaarin" yang juga selaku ketua kelompok petani janggelan yang berada di Desa Selur Kecamatan Ngrayun.

Pada perbandingan dampak peningkatan keterampilan yang diterima oleh IKM - ILMEA menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan Dinas Indakop dan UKM belum sepenuhnya dapat menampung kebutuhan akan peningkatan keterampilan dari pengrajin IKM khususnya di bidang ILMEA yang terdapat beraneka ragam jenis usaha kerajinan. Misalnya bidang usaha kerajinan konveksi, kerajinan batik, dan kerajinan bambu telah diakomodir dengan penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan, tetapi belum mampu mengakomodir kebutuhan akan pelatihan peningkatan keterampilan dari usaha, seperti kerajinan reyog, kerajinan gamelan dan kerajinan lainnya.

Sementara itu, perencanaan pemilihan jenis pelatihan telah disesuaikan dalam peruntukannya, misalnya penyelenggaraan pelatihan pembuatan roti dan kue dengan peseta calon wirausaha baru diharapkan berdampak untuk meningkatkan keterampilan calon WUB sehingga dapat membuka usaha sendiri. Selain itu pelaksanaan pelatihan

juga terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam sekitar, misalnya pelatihan pembuatan anyaman mendong, dimana tanaman mendong sangat melimpah di Desa Puhijo Kecamatan Sampung, akan tetapi selama ini hanya diolah menjadi anyaman tikar saja sehingga dapat diolah menjadi produk-produk olahan anyaman mendong lainnya, seperti tas dan tempat tisu, sehingga penyelenggaraan pelatihan ini diharapkan berdampak untuk meningkatkan keterampilan bagi pengrajin anyaman mendong agar dapat membuat produk-produk kerajinan mendong dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan anyaman berupa tikar mendong saja.

Evaluasi Dampak Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin IKM

Peningkatan kesejahteraan sangat terlihat pada IKM minuman Janggolan, dimana peningkatan keterampilan usaha minuman sari janggolan dan bantuan peralatan mesin meningkatkan omzet penjualan. Terlebih dengan mengusung keunikan minuman khas daerah membawa Ibu Lusia mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya Juara III IKM Pangan Award bidang minuman yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Tahun 2013 serta Juara I Citi Micropreneur Award yang diselenggarakan oleh Citibank Tahun 2015. Hal tersebut juga memperluas area pemasaran. Pertumbuhan wirausaha baru yang berhasil juga terlihat pada IKM Ria Boga yang mulai merintis usahanya yang mendapatkan bekal dari keterampilan pembuatan kue bolu dan bakpia dari Pelatihan P2WKKS yang diselenggarakan oleh Dinas Indakop dan UKM yang menjadikan Ibu Rida dari seorang Ibu Rumah Tangga biasanya menjadi lebih produktif dan kini usahanya dapat menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

Pada kelompok IKM IKBB dampak kesejahteraan dari Program belum terlihat maksimal dimana ada salah satu IKM yang menjabat juga sebagai Lurah, sehingga tingkat kesejahteranya dapat juga bersumber dari pendapatan sebagai Lurah, sedangkan omzet usahanya dapat dikatakan tetap tidak ada peningkatan produksi. Sedangkan IKM Genteng yang lain omzetnya meningkat karena aktif menerapkan sistem GKM dan termasuk pelopor dalam usaha Genteng glasur di wilayah Ponorogo. Begitu pula pada kelompok IKM ILMEA dampak kesejahteraan dari Program juga belum terlihat maksimal, dimana IKM Yani Bordier telah mendapatkan pelatihan dasar dan lanjutan mengenai bordier yang meningkatkan keterampilannya sehingga berdampak pada peningkatan omzet penjualan. Sedangkan pada IKM kerajinan resleting Zaharaya yang mengikuti pelatihan desain batik, dimana tidak berkorelasi pada bidang usaha yang ditekuni, sehingga peningkatan omzet tidak dapat dinyatakan merupakan hasil dari pelatihan.

Kesimpulan Hasil Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program evaluasi program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode evaluasi CIPP dapat disimpulkan:

Evaluasi Konteks (Context) menunjukkan bahwa tujuan diadakannya program pembinaan dan pengembangan IKM telah sejalan dengan tujuan dari Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo, dimana salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan IKM di Kabupaten Ponorogo yang tangguh, professional dan berdaya saing;

Evaluasi Masukan (Input), meliputi: (a) perencanaan program mengkolaborasi perencanaan top-down dan bottom-up, akan tetapi dengan porsi top-down lebih besar; (b) sumber daya anggaran yang terbatas, karena dipengaruhi oleh tingkat APBD dan prioritas peruntukannya; © sumberdaya manusia (SDM) aparatur bidang Industri yang terbatas hanya 13 orang, sehingga belum optimal dalam melakukan pembinaan IKM; (d) kondisi peserta program yang beraneka macam karakter dan kemampuannya berpengaruh terhadap perbedaan penerimaan materi; dan (e) sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dan telah memenuhi persyaratan dalam menyelenggarakan pelatihan;

Evaluasi Proses (Process) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program komposisi pelatihan teknis lebih banyak diberikan disbanding pelatihan manajerial. Masih kurangnya penerapan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini, yaitu: (1) alokasi anggaran yang terbatas; (2) sumberdaya manusia (SDM) Industri yang terbatas; (3) sistem perekrutan calon peserta; (4) ketidakhadiran peserta; dan (5) terdapat jenis pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan peserta; dan Evaluasi Hasil (Product) menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara terhadap IKM yang telah mengikuti program ini sebanyak 35% menyatakan hasil program ini berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM setelah mengikuti pelatihan, akan tetapi karena berada dalam tahap permulaan sehingga belum menunjukkan terhadap peningkatan keterampilan. Kinerja Dinas Indakop dan UKM dalam upaya pembinaan dan pengembangan IKM belum optimal, dimana indikator kinerja dalam Renstra belum mencapai target yang diharapkan hingga akhir tahun perencanaan 2015, dimana pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB hanya mencapai 6,93% dari target 9,51%, sedangkan indikator kinerja pertumbuhan industri diharapkan mencapai 0,60% namun realisasi hanya 0,020%. Hal ini menunjukkan masih belum adanya upaya review Renstra pada tahun berjalan untuk menyesuaikan target terhadap kemampuan capaian kinerja.

Evaluasi Dampak dari Program pembinaan dan pengembangan IKM ini adalah berupa peningkatan keterampilan IKM yang diharapkan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan IKM dengan cara membandingkan dengan pengrajin IKM lain yang belum pernah menerima pelatihan dari Dinas Indakop dan UKM.

Evaluasi dampak peningkatan keterampilan pengrajin IKM menunjukkan bahwa perbandingan dampak peningkatan keterampilan terlihat dari adanya perbaikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan, serta kemampuan dalam mendesain kemasan menjadi lebih menarik. Pada IKM IKBB peningkatan keterampilan hanya terlihat pada IKM yang telah mendapatkan pelatihan teknis saja dalam penerapan GKM, tetapi pelatihan motivasi tidak begitu berpengaruh dalam produktivitas. Sedangkan peningkatan keterampilan di bidang kerajinan ILMEA hanya terlihat pada IKM yang mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang usaha kerajinannya, masih banyak jenis kerajinan lain yang belum dapat terakomodir, seperti reyog dan gamelan.

Evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan pengrajin IKM terlihat maksimal pada IKM IHPK, dimana setelah mendapatkan peningkatan keterampilan pembuatan produk, kemudahan fasilitas dan bantuan peralatan berdampak pada peningkatan omzet penjualan. Pada IKM IKBB terdapat IKM yang juga menjabat sebagai Lurah, tetapi tidak ada peningkatan produksinya sehingga omzet tetap, sedangkan IKM serupa omzetnya meningkat karena menerapkan GKM dalam produksinya. Pada IKM ILMEA, IKM Yani Bordier telah mendapatkan pelatihan dasar dan lanjutan sehingga berdampak kepada peningkatan omzet penjualan, sedangkan IKM kerajinan resleting mengikuti pelatihan desain batik, yang tidak berkorelasi pada bidang usahanya, sehingga peningkatan omzet tidak dapat dinyatakan merupakan hasil dari pelatihan.

**RENCANA AKSI REFORMASI SUMBER
DAYA APARATUR DALAM MEWUJUDKAN
NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Pemerintah Kabupaten Blora)**

**ACTION PLAN OF GOVERNMENT EMPLOYEES
REFORM IN ACHIEVING NEUTRALITY OF
LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES
(Study in Blora Regency Government)**

Nama : M. Aminudin
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Blora
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW

ABSTRAK

Regulasi yang mengatur netralitas PNS telah ada, namun praktik di lapangan masih lemah, ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan merencanakan sebuah agenda reformasi birokrasi melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 43 Tahun 2013. Rencana aksi merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu sasaran strategis. Salah satu sasaran strategis yang diharapkan dalam implementasi reformasi sumber daya aparatur adalah netralitas PNS. Guna mencapai sasaran strategis tersebut, direncanakan dua tujuan, yaitu perubahan pola pikir aparatur untuk bersikap netral secara politik dengan rencana aksi: sosialisasi peraturan, penegakan peraturan dan keteladanan (*role modelling*). Kedua, *check and balances* dalam menempatkan dan mengangkat PNS dalam jabatan struktural dengan rencana aksi: promosi terbuka, penilaian kompetensi personal PNS, penyusunan standar kompetensi jabatan, dan penyusunan pola karier.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen serta menggunakan analisa data kualitatif model proses sembilan langkah (Mc. Nabb, 2002).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan rencana aksi dengan tujuan perubahan pola pikir telah terimplementasi. Sosialisasi peraturan netralitas secara rutin dilaksanakan, akan tetapi diseminasi informasi ke seluruh PNS tidak cukup berjalan dikarenakan peserta tidak merupakan medium yang efektif, SKPD tidak memiliki medium sosialisasi aturan kepegawaian, dan anggaran di BKD yang terbatas. Penegakan aturan terbagi kedalam dua diskursus, yaitu PP 37 Tahun 2004 dan PP 53 Tahun 2010. Untuk PP 37 Tahun 2004 telah mampu ditegakkan karena konsekuensinya cukup berat, yaitu status sebagai PNS, sedangkan PP 53 Tahun 2010 belum sepenuhnya terlaksana, yaitu masih adanya pelanggaran netralitas saat Pilkada dan penjatuhan hukuman yang justru terpolitisir. Keteladanan juga masih secara parsial diterapkan oleh pimpinan SKPD.

Kata kunci: Rencana Aksi, Reformasi Sumber Daya Aparatur, Netralitas Politik

ABSTRACT

Regulations governing the neutrality of government employee have existed, but practice in field is still weak, captured by Blora County Government by planning a bureaucratic reform agenda through Local Regulation No. 43 of 2013. Action plan is a series of efforts to achieve a strategic goal. One of the strategic objectives expected in the implementation of apparatus resource reform is the neutrality of civil servants. In order to achieve the strategic objectives, two objectives are planned, namely the change of mindset of the apparatus to be politically neutral with the action plan: regulation socialization, rule enforcement and role modeling. Second, checks and balances in placing and appointing civil servants in structural positions with action plans: open promotion, personal competence assessment of civil servants, the preparation of competency standards for office, and the preparation of career patterns.

The research method used is qualitative method with descriptive approach. Data collection techniques from interviews and document studies and using qualitative data analysis of the nine-step process model (Mc Nabb, 2002).

The findings in the field show the action plan with the goal of changing the mindset has been implemented. The socialization of neutrality regulation is routinely implemented, but dissemination of information to all civil servants is not sufficient because the participants are not effective medium, SKPD has no socialization medium of personnel rules, and limited budget in BKD. Enforcement of the rules is divided into two discourses, namely PP 37 Year 2004 and PP 53 Year 2010. For PP 37 Year 2004 has been able to enforced because the consequences are quite heavy, namely the status as civil servants, while PP 53 Year 2010 has not been fully implemented, that is still a violation of neutrality during the elections and the punishment that was actually politicized. Exemplary also still partially applied by the leadership SKPD.

Keywords: Action Plan, Reform of Apparatus Resources, Political Neutrality

Persoalan mendasar dalam sistem kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum dianggap sebagai profesi yang mulia dan profesional. Pandangan ini tidak hanya dari luar, bahkan sangat mungkin, tanpa disadari dari dalam diri Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Menurut Prasojo (dalam Prasojo, 2014:13) bahwa "Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tidak dianggap sebagai aset negara". Akibatnya, kebijakan dan manajemen kepegawaian yang disusun semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik yang justru menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Dalam kajian historis, ketidaknetralan birokrasi tidak terlepas dari sejarah panjang sistem pemerintahan serta dinamika politik dan birokrasi di Indonesia, khususnya pada era orde baru. Menurut Thoha (2003:169), era orde baru dikenal istilah *mono loyalitas* bagi Pegawai Negeri Sipil kepada kekuatan yang memenangkan mayoritas tunggal dalam Pemilu. Slogan birokrasi pemerintah netral dari partai politik, menjadi siasat politik pemerintah yang mendeterminasi Pegawai Negeri menjadi anggota Golkar yang bukan partai politik. Birokrasi pemerintah tidak dapat dibedakan secara jelas, mana yang karier dan mana yang partisan. Orde baru mempergunakan sistem karier dalam peraturannya, namun hampir semua pejabat birokrasi pemerintah merupakan partisan dari kekuatan politik yang memerintah sebagai mayoritas tunggal. Pengangkatan seseorang dalam jabatan birokrasi pemerintah dengan mempertimbangkan keanggotaan atau pendukung kekuatan politik tertentu merupakan wujud intervensi politik yang mengganggu netralitas birokrasi. Pemikiran semacam ini masih bercokol dalam diri Pegawai Negeri Sipil yang mayoritas merupakan bagian sejarah orde baru sekalipun sistem demokrasi politik telah berubah, bergeser dan bertahan pada pemilihan secara langsung. Dengan tidak adanya perubahan mindset tersebut, maka ketidaknetralan birokrasi dalam ajang pemilihan kepala daerah akan sulit direduksi.

Permasalahan secara umum sebagaimana dikemukakan, terjadi di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Blora. Secara faktual, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blora Tahun 2010, relatif banyak Pegawai Negeri Sipil yang ditengarai terjun dalam politik praktis melalui mendukung salah satu pasangan calon waktu itu. Indikasi keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam ajang tersebut diantaranya melalui keterlibatan dalam kampanye, memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih, hingga menjadi tim sukses. Informasi yang diperoleh dari bidang yang menangani pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora, pada Tahun 2010 ada Pegawai Negeri Sipil terbukti terlibat aktif sebagai tim sukses dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini sudah ditangani dan penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan.

Selain faktor endogen, aturan di daerah tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil turut memberikan kontribusi. Secara normatif, pengangkatan dan pemindahan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Aturan tersebut, menurut Prasojo (2014:15) belum menekankan kompetensi dan kinerja dalam manajemen kepegawaian. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa kepangkatan (senioritas) dan kedekatan politik/favoritisme/patronase justru menjadi syarat yang menentukan dalam setiap pengisian jabatan (closed career system).

Menyadari bahwa langkah kuratif dalam mewujudkan netralitas aparatur tidak hanya sebatas pada aktivitas yang bertujuan mengubah pola pikir (mindset), Pemerintah Kabupaten Blora berpandangan bahwa perlu penetratif pada area manajemen kepegawaian sehingga tidak ada lagi kepentingan transaktif yang mendasari ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Prasojo (2010:43) perbaikan seharusnya dilaksanakan secara integratif dan komprehensif sehingga menyentuh semua aspek kepegawaian, disamping harus memperhatikan determinan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat dicarikan langkah yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan PNS yang unggul, netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan pelayan publik.

Menurut Thoha (2010) bahwa untuk mereformasi birokrasi, harus dievaluasi terlebih dahulu existing condition guna mengidentifikasi masalah yang ada. Sebagaimana dibahas, bahwa masalah ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora setidaknya didasari dua hal: pertama, faktor endogen, yaitu pola pikir (mind set) dan perilaku vested interest oleh oknum Pegawai Negeri Sipil, dimana berpikir dan bertindak dalam mencapai karier melalui kedekatan politis, tanpa terlalu mempertimbangkan pengembangan kompetensi bagi dirinya. Kedua, faktor eksogen, yaitu manajemen kepegawaian yang belum menitikberatkan pada aspek kompetensi. Kedua faktor tersebut dapat dibedakan, namun tidak mudah untuk dipisahkan karena satu sama lain akan saling berkorelasi.

Dengan memperhatikan kedua faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora merencanakan agenda reformasi birokrasi melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2014 – 2015. Program makro merupakan langkah strategis yang perlu dijabarkan kedalam program mikro yang memuat rencana aksi dalam mewujudkan netralitas aparatur. Rencana aksi dengan tujuan perubahan pola pikir (mindset), meliputi, Sosialisasi peraturan, penegakan peraturan, dan role modelling.

Bertepatan tahun 2015 pemerintah menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015, termasuk di Kabupaten Bloro. Eskalasi politik dalam Pilkada Kabupaten Bloro tahun 2015 berpotensi berdampak kepada birokrasi mengingat pada kesempatan kali ini Wakil Bupati dan Ketua DPRD maju mencalonkan diri sebagai Bupati bertarung melawan Bupati petahana. Dalam hal petahana mengajukan diri kembali dalam Pilkada, atmosfer politisasi birokrasi lebih terasa. Menurut Nurprojo (2014:50) "pertarungan semakin seru ketika Wakil Bupati dan Ketua DPRD juga berkenan maju bersaing dalam Pilkada Langsung. Dalam hal ini posisi birokrasi akan semakin diperebutkan oleh para elit yang bertarung".

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan, peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian: Rencana Aksi Reformasi Sumber Daya Aparatur dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Bloro).

Pelanggaran Netralitas Politik Di Kabupaten Bloro

Banyak faktor yang terkait dengan kualitas pelayanan publik dan sumber daya aparatur, salah satunya adalah masalah netralitas. Secara teoritis, salah satu bentuk netralitas birokrasi ialah netral dari intervensi politik (apolitik), dimana secara regulatif, setidaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan fakta di Kabupaten Bloro yang menjadi diskursus netralitas penelitian ini, bahwa dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran netralitas politik oleh oknum Pegawai Negeri Sipil yang diaktualisasikan dengan menjadi tim sukses, terlibat aktif dalam kampanye, serta penyalahgunaan wewenang dalam membantu kemenangan salah satu pasangan calon. Ketidaknetralan aparatur Pemerintah Kabupaten Bloro, dapat disebabkan setidaknya oleh dua faktor. Faktor endogen, Pegawai Negeri Sipil berpikir dan bertindak vested interest, dan faktor eksogen, belum adanya check and balances terhadap sistem administratif prosedural dalam pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural.

Larangan dan sanksi yang ada memberikan peringatan dini bagi PNS untuk tidak terjun kedalam politik praktis. Namun, faktanya masih dijumpai transaksi jabatan antara birokrat dan pejabat politik di daerah yang didahului dengan ketidaknetralan seorang birokrat dalam pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, dibutuhkan suatu formulasi baru dalam perubahan pola pikir (mindset) dan penataan sistem manajemen kepegawaian.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dapat diwujudkan dengan: pertama, perubahan pola pikir, bahwa jabatan yang akan diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil tidak seharusnya didapat hanya semata-mata pada pertimbangan kedekatan politis. Kedua, check and balances dalam manajemen sumber daya aparatur. Artinya, seperangkat aturan main yang lebih komprehensif dalam proses pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil.

Berkenaan dengan ajang pesta demokrasi tingkat lokal, Kabupaten Blora adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2015 lalu. Eskalasi dan kontestasi politik saat itu cukup menarik karena Bupati petahana maju kembali mencalonkan diri bertarung melawan Wakil Bupati petahana dan Ketua DPRD. Hal ini sangat mungkin menimbulkan polarisasi birokrat saat menjelang pemilihan dan pasca pelantikan Bupati terpilih. Sebuah momentum yang tepat untuk melihat bagaimana kontribusi rencana aksi dalam mewujudkan netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah tentang rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora. Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual tentang kondisi lapangan di Kabupaten Blora mengenai rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur dan kondisi netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora dalam ajang pemilihan kepala daerah Tahun 2015.

Rencana Aksi Reformasi Sumber Daya Aparatur

Existing condition netralitas PNS Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2010 yang dinilai masih terdapat pelanggaran PNS, bahkan terjadi pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana maupun ketidaknetralan yang cukup terbuka, ditunjukkan melalui mendukung salah satu pasangan calon, sehingga terjadi polarisasi yang cukup kuat ketika itu, ditandai dengan pemindahan pejabat struktural dalam skala masif pasca pelantikan Bupati terpilih, mendasari Pemerintah Kabupaten Blora memasukkan unsur netralitas PNS sebagai suatu yang perlu diwujudkan dalam rangka menjaga stabilitas roda pemerintahan,

Sosialisasi Peraturan

Awal dari proses penegakan aturan adalah melalui sosialisasi aturan yang bertujuan agar PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan netralitas PNS berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota partai politik dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Diseminasi informasi terkait larangan dan disiplin PNS yang berkonsekuensi atas pemberhentian sebagai PNS maupun penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat memang seharusnya tersampaikan dan dipahami oleh seluruh PNS sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir PNS tentang sikap netral. Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berpikir, berbuat, dan bertingkah laku berdasarkan nilai yang telah ditentukan. Pada hakikatnya, sosialisasi merupakan komunikasi, yang mana untuk mencapai keberhasilannya, menurut Nasution (1990:11) harus memperhatikan: permasalahan, komunikasi, tujuan yang akan dicapai, pendekatan yang dipakai, pengembangan pesan, metode/saluran yang digunakan, serta sistem evaluasi yang digunakan.

Promosi Terbuka

Secara teoritis, promosi terbuka merupakan salah satu jenis prosedur dalam pelaksanaan promosi, dimana mengakomodir sistem kompetisi untuk menduduki suatu jabatan tertentu, dalam hal ini Jabatan Pimpinan Tinggi. Melalui kompetisi yang fair, harapannya adalah adanya obyektivitas dari pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat. Secara prosedural, seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora telah sesuai dengan ketentuan, termasuk melaporkan proses seleksi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Poinnya, jika dikaitkan dengan netralitas, maka peran dari KASN, sebagai lembaga yang menjamin sistem merit dalam pelaksanaan manajemen PNS mampu memberikan garansi bagi pejabat karier di daerah apabila merasa ada intervensi politik terhadap proses promosi terbuka. Hal ini dikuatkan dengan pengawasan oleh KASN yang bersifat mengikat karena sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 33 bahwa hasil pengawasan KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, dapat direkomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Kesimpulan ini relevan dengan pendapat Ratna (2012:36) bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pengangkatan pejabat karier diperlukan lembaga yang bisa berfungsi sebagai "wasit" yang mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat politik dan pejabat karier semacam Civil Service Commission di Amerika dan Australia.

Penilaian dan Evaluasi Secara Personal

Sebagai bentuk *check and balances* bagi pejabat politik maupun pejabat karier senior terhadap proses pemindahan PNS, maka penilaian kompetensi pegawai merupakan langkah operasional yang relevan, dengan catatan bahwa pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan informasi kompetensi dapat dipertanggungjawabkan. Urgensitas penilaian kompetensi diungkapkan Manopo (2011:11) karena banyak organisasi sulit menentukan kriteria kesuksesan yang tepat dan menghubungkan dengan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada banyak perilaku yang diperlukan dan implementasinya akan berbeda antar organisasi. Sederhananya, perilaku X mungkin efektif di suatu area dan organisasi tertentu, akan tetapi mungkin tidak efektif di area organisasi yang lain. Akhirnya, mulai menggunakan model kompetensi dalam membantu mengidentifikasi keahlian, pengetahuan, dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pekerjaannya.

Hingga saat ini Pemkab Blora belum melangkah hingga ke tahap ini, dikarenakan beberapa faktor: 1) belum adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menjadikan kompetensi personal sebagai sebuah pedoman dalam manajemen kepegawaian; 2) infrastruktur untuk menuju kearah manajemen berbasis kompetensi belum memadai, termasuk anggaran dan sumber daya manusia; 3) adanya keraguan tentang manfaat penilaian kompetensi itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan netralitas, sebenarnya penilaian kompetensi personal dapat dikatakan cukup efektif untuk melindungi PNS dari intervensi politik sepanjang tiga prinsip yang merupakan satu kesatuan: obyektif, akuntabel dan independen dipegang teguh bersama-sama. Kesimpulan ini senafas dengan pemikiran Irfan (2015:6) bahwa pencegahan intervensi politik terhadap aparatur pemerintah daerah adalah dengan adanya rambu-rambu yang jelas terhadap pengangkatan pejabat karier di daerah. Salah satu perangkat rambu-rambu tersebut adalah dokumen penilaian kompetensi personal. Kompetensi personal akan menjadi daya tawar (*bergaining power*) bagi PNS untuk dipromosikan. Dengan demikian, PNS akan senantiasa berpikir dan bertindak untuk meningkatkan kompetensi individu daripada potong kompas dengan membangun kedekatan politis.

Rencana Aksi Dengan Tujuan Perubahan Pola Pikir Telah Terimplementasi

Sosialisasi peraturan netralitas sebagai salah satu jalur komunikasi personal dapat mempengaruhi sikap aparatur. Namun, pelaksanaan sosialisasi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: peserta sosialisasi belum menjadi mediator dalam keteralihan

informasi di lingkungan kerjanya; media sosialisasi semata-mata dilaksanakan oleh BKD yang memiliki keterbatasan anggaran; kompleksitas tugas di SKPD dengan berbagai regulasi teknis yang diampu SKPD menjadikan aturan kepegawaian bukan prioritas kerja mereka.

Penegakan aturan netralitas politik terdiri dari dua aturan utama. PP 37 Tahun 2004 melarang PNS menjadi pengurus/anggota parpol relatif dapat dipatuhi karena berkonsekuensi pada status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun, penegakan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang didalamnya melarang PNS untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon tidak sepenuhnya terlaksana. Bahkan pada aras eksekusi penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar netralitas justru terpolitisir.

Role modelling (keteladanan) oleh pimpinan SKPD kepada jajaran dibawahnya tidak dapat dilaksanakan secara holistik atau tergantung dari masing-masing individu dan secara umum masih dalam level instruksional.

Promosi Terbuka terimplementasi sesuai ketentuan, UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014. Proses seleksi yang mengakomodir lembaga independen diluar pemerintah daerah seperti panitia seleksi, Tim Assesor Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjamin pelaksanaan seleksi lebih obyektif. Kontribusi yang diberikan berupa paradigma baru bagi PNS bahwa pengangkatan pada level pejabat karier tertinggi di daerah dilaksanakan secara terbuka berpengaruh pada pemahaman bahwa untuk mencapai posisi strategis tertentu (dalam hal ini Jabatan Pimpinan Tinggi) harus mengedepankan kompetensi dan tidak semata membangun kedekatan politis.

Penilaian kompetensi personal belum terimplementasi. Faktor-faktor yang terkait adalah belum adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan kompetensi sebagai dasar promosi, belum adanya infrastruktur untuk melaksanakan penilaian kompetensi personal seperti anggaran dan SDM yang belum memadai, dan masih adanya keraguan tentang manfaat penilaian kompetensi;

Penyusunan standar kompetensi jabatan juga belum terimplementasi. Secara regulasi sudah cukup untuk dipedomani, akan tetapi pelaksanaan di Pemerintah Kabupaten Bora masih mengalami kendala, diantaranya: 1) rencana perubahan SOTK; 2) anggaran dan SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan tersebut belum ada; dan 3) komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan dokumen-dokuman semacam itu masih lemah.

Penyusunan pola karier telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Namun, dalam regulasi tersebut belum menempatkan kompetensi sebagai prioritas dalam pengembangan karier PNS. Artinya, senioritas atau kepangkatan masih menjadi dasar utama.

Netralitas PNS Pemerintah Kabupaten Blora belum sepenuhnya terwujud. Hal ini, setidaknya didasari atas temuan yang tercantum dalam dokumen formal Panwaskab Blora, bahwa satu orang PNS terbukti dan dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar Pasal 4 angka 15 huruf d dengan mendeskriditkan salah satu pasangan calon sekaligus mengarahkan untuk memilih calon yang lain. Namun temuan di lapangan, lebih banyak pelanggaran yang tidak tersentuh. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penindakan memang tidak mudah. Karenanya, fokus dari lembaga Pengawas melalui upaya preventif, baik melalui sosialisasi ulang, deklarasi netralitas, atau Forum Group Discussion. Dari pelbagai pelanggaran tersebut, episentrum ketidaknetralan adalah upaya melanggengkan atau meningkatkan jabatan. Pelanggaran netralitas acap kali diejawantahkan saat kampanye mengingat saat tersebut merupakan tahap bagi pasangan calon untuk mempromosikan diri mereka kepada publik. Dalam perspektif reformasi sumber daya aparatur, sub sistem reformasi atau rencana aksi yang dilaksanakan secara parsial atau sporadis kehilangan kemampuan kohesifitasnya untuk mencapai sasaran sehingga netralitas politik aparatur dalam Pilkada masih sulit untuk diwujudkan.

**CONTINUING SCHOOL DROPOUT ISSUE
IN INDONESIA'S BASIC EDUCATION:
ASSESSING THE COMMUNITY AND
HOUSEHOLD SOCIO-ECONOMIC BARRIERS
LEADING CHILDREN TO DROPOUT OF
SCHOOL**

**KELANJUTAN ISU PUTUS SEKOLAH DALAM
PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA:
MENILAI HAMBATAN SOSIO-EKONOMI
PADA ANAK-ANAK PUTUS SEKOLAH**

Nama : Reni Tri Pujiastuti
Unit Kerja : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pemerintah Kabupaten Sleman
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW-JEPANG

ABSTRACT

Despite the Indonesian government effort in improving education quality and equity by giving autonomy to local governments to manage 9-year free compulsory education, there were around 2.4 million children who dropped out of school before completing junior high school level (MoEC, 2015). This research, therefore, aims to examine (1) reasons and factors influencing children for dropping out of school, and (2) the impact of local policy in term of fiscal autonomy on school dropout reduction in Indonesia's basic education. This study employs a qualitative case study in Sleman Regency, Yogyakarta Province, and a quantitative analysis using individual-level data pooled from Indonesia's Socioeconomic Survey 2014 and official statistics. Face-to-face interviews with 42 school dropouts and parents were conducted during fieldwork to understand the reasons for dropping out of school. Meanwhile, logistic regression analysis was used to observe the impact of fiscal autonomy on school dropouts as well as the association between community, household socioeconomic factors and school dropouts. Following Amartya Sen's (1999) idea on capability approach, dropping out of school is a result of capability deprivation. The findings confirm that it was a process resulted from economic deprivation and social marginalization. Likewise, it was also because of disabling public policy. The results suggest that local policy in term of fiscal policy undermines the school dropout reduction itself along with other community and household socioeconomic factors. This study provides a contribution to existing literatures in understanding on school dropout behavior mainly in Indonesia case by examining both demand-side and supply-side factors through mixed methods analyses. This study leaves several limitations since it only examines the association not the causal order in only one year set of data, and the case study findings in Sleman Regency cannot be generalized to represent all local governments in Indonesia. Finally, this study is conducted to advocate better social opportunities for every child in Indonesia particularly.

Keywords: School dropout, Economic deprivation and social marginalization, Local policy, Mixed methods, Indonesia's Basic education

ABSTRAK

Terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan keadilan pendidikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola wajib belajar 9 tahun, ada sekitar 2,4 juta anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolah menengah pertama (MoEC, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) alasan dan faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah, dan (2) dampak kebijakan daerah dalam hal otonomi fiskal terhadap penurunan pendidikan di sekolah dasar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, dan analisis kuantitatif dengan menggunakan data tingkat individu yang dikumpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2014 dan statistik resmi. Wawancara tatap muka dengan 42 anak putus sekolah dan orang tua dilakukan selama penelitian lapangan untuk memahami alasan putus sekolah. Sementara itu, analisis regresi logistik digunakan untuk mengamati dampak otonomi fiskal terhadap jumlah putus sekolah serta hubungan antara masyarakat, faktor sosial ekonomi rumah tangga dan jumlah putus sekolah. Setelah gagasan Amartya Sen (1999) tentang pendekatan kemampuan, yang putus sekolah merupakan hasil dari kekurangan kemampuan. Temuan tersebut mengkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh perampasan ekonomi dan marginalisasi sosial. Demikian juga karena meniadakan kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan lokal dalam hal kebijakan fiskal merongrong pengurangan angka putus sekolah sendiri bersama dengan faktor sosial ekonomi masyarakat dan rumah tangga lainnya. Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dalam memahami perilaku putus sekolah terutama di Indonesia dengan menguji faktor sisi permintaan dan sisi penawaran melalui analisis metode campuran. Studi ini menghasilkan beberapa keterbatasan karena hanya meneliti hubungan bukan urutan sebab akibat hanya dalam satu tahun data, dan temuan studi kasus di Kabupaten Sleman tidak dapat digeneralisasi untuk mewakili semua pemerintah daerah di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini dilakukan untuk mengadvokasi kesempatan sosial yang lebih baik bagi setiap anak di Indonesia.

Kata kunci: putus sekolah, perampasan ekonomi dan marginalisasi sosial, kebijakan lokal, metode campuran, pendidikan dasar Indonesia

Indonesia's basic education covers six years of elementary school (7-12 years old) and three years of junior high school (13-15 years old) which are monitored under the Ministry of Education and Culture (MoEC) whether it is a public school or a private school. There is another type of school called "Madrasah", an Islamic-based school, under the Ministry of Religious Affairs (MoRA) which is not devolved to local governments so that this type of school is not included in this study. Furthermore, this research also focuses on formal and general education that exclude vocational education, professional education, vocational and technical education, religious education, and special education.

The National Education System in Indonesia is enshrined in Law 20/2003. It states that the national education functions to develop the capability, character, and civilization of the nation for enhancing its intellectual capacity, and is aimed at developing learners' potentials so that they become persons imbued with human values who are faithful and pious to one and only God; who process morals and noble character; who are healthy, knowledgeable, competent, creative, independent; and as citizens, are democratic and responsible (Ministry of Education and Culture, 2015c). Despite its noble purpose, education quality in Indonesia has always been criticized. The report from World Bank (2012) documented that quality of schooling is relatively low due to factors such as low level of teacher qualifications, structure of teacher compensation, teacher attendance rates, large class size, and low quality of infrastructure. As one of the results, there were around 2.4 million students who dropped out from basic education in 2014/2015 school year (MoEC, 2015b, p. 16). The worst case was in transition level when after graduated from elementary school 22.73% of 4,369,259 children did not continue to junior high school (ibid). Based on this case, this study analyzes school dropped-out reasons not only at elementary and junior school levels but also at transition level to get better understanding in promoting school dropout prevention.

The issue of school dropouts is important to discuss since the Indonesia government has implemented several policies to support universal basic education. The most influence policies regarding school dropout prevention are the reduction household financial burden since 2005 and the abolishment of public school tuition at elementary and junior high school levels in 2012 through BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Program, a School Operational Grant. BOS program obligates local government level to allocate its annual budget to be given to schools based on the number of students as a support of central government allocation. Another policy in achieving better quality of education is teacher professional certification policy by doubling teacher's monthly salary based on certificate ownership and their minimum teaching hours for 24 hours lesson per week. These two programs comprise the biggest budget allocation in local education office while the impact is still debatable. Thus, this study also addresses the need for examining the impact of local fiscal policy on school dropout reduction in Indonesia's basic education.

Issues on education reform in Indonesia

There might be another challenge that prevents decentralized education benefits from being realized in Indonesia. It is the disparity of capacities. School council for instance, many schools do not have an active school committee for several years after the reform was implemented, and where they do exist, members have often been selected instead of being elected, meetings between the principal and full committee members are rare, and parents tend to be overly deferential towards school management on decisions (World Bank 2012). Another finding concludes that education reform in Indonesia gives negative effect on teacher effort, particularly in rural areas and among schools with inactive school committees (Leer, 2016). These findings indicate that there should be more improvements in community participation.

Another concern is a lack of clarity in the roles and responsibilities of the different layers in the education bureaucracy. Devolution had originally been propagated as a means of clarifying the ambiguity and redundancy prevalent in the system previously, yet there remained considerable overlaps between roles in the sector even after the intervention (Kristiansen and Pratikno 2006). Even years after reform implementation, several reports indicate that both government officials and school committee members have been unclear about their responsibilities (World Bank 2012).

A final area where Indonesia has struggled has been on fiscal design and transparency. Toi (2010) highlights that the disparity in revenue sharing among local governments actually has been widened as a result of decentralization. He argues that although fiscal transfer to local governments is formula-based, imperfections in the formula imply that the equalizing property of these grants is weak. A lack of self-sufficiency in revenues and the inadequacy of the transfer grant from the central government have further resulted in a notable neglect of development expenditures at the local level (Brodjonegoro, 2004). Moreover, according to Kristiansen and Pratikno (2006), even five years after decentralization no expenditure data had been made available to local oversight bodies or the civil society, thus resulting in a total lack of accountability on this front. Due to the lack of transparency, local government officials often remain unclear about what level of funding was available to them (Brodjonegoro, 2004).

To conclude, increasing decision making power to local government and school levels in education sector has brought better achievements as well as more issues. It requires improvements not only for local government and school capacities but also parent involvement, and community participation.

Based on the foregoing discussions, this study contributes to the existing literatures in two ways. First, this research examines both demand-side factors leading children

to drop out of school, as well as the relationship between localized policy and school dropouts not only at elementary and junior high school levels but also at transition level as recommended by Jane Leer (2016) in her study. Second, this research employs qualitative and quantitative methods so that it can complete each other in explaining the research findings since there are limited studies on school dropout problem using both methods. The expected outcome is to provide better understanding regarding school dropout prevention in Indonesia's basic education.

Research Questions, Hypotheses, and Objectives

This research raises the issue of school dropout in Indonesia's basic education by promoting questions as follows: (1) Why do children drop out of school even with government efforts in bringing service provider closer to the people and spreading 9-year free compulsory education? What are factors associated with school dropouts? (2) Does local policy in term of fiscal autonomy reduce school dropout in Indonesia's basic education?

This study has two hypotheses as follows: (1) Children are more likely to drop out of school if they perceive barriers to their communities and household socio-economic conditions. (2) Decentralized policy will reduce school dropout occurrence in Indonesia's basic education if the local government can spend better on scholarship and other programs targeted for students, especially the poor.

The objective of this research is to provide better understanding regarding school dropout prevention in elementary school, transitional period, and junior high school levels. It would have profound implication for society and the types of interventions needed to break the chain of poverty. It might give suggestions for improving education quality and equity in Indonesia's basic education, since this study is applicable in all local governments because of the similar fiscal structures and policies throughout Indonesia.

Discussions

The last findings show that local policy in term of fiscal autonomy is significantly associated with the increase of school dropouts but only in transition level and junior high school level. It means that fiscal autonomy had not been found to be effective in reducing school dropouts in Indonesia's basic education. Factors that significantly associated with the decrease of school dropouts were scholarship, living with both parents, and parents' academic attainment as indicated by the negative relation in all educational background of the father and the mother especially, since she had more

prominent role in motivating children to staying at school. While father's and mother's income and occupation were not shown to be significantly associated in almost all panels, except for mother's occupation which was associated with higher school dropouts in transition level.

In elementary school level, social relationship at school had been reported to be the most common reason for dropping out school. Younger children are likely more prone to leaving school if they experienced bad relationships with teachers or friends that made them traumatized or marginalized. A similar finding had also been found in Cambodian case where bad relationships with other students and having divorced parents was found to be a sign of dropout in grades 1 to 4 signaling difficulties to adjust with school life (No, et al., 2016). Three main respondents also mentioned bad experiences with schoolmates mainly because they had different condition with other students so that they became socially excluded and got bullied. Some reports were given by main respondents such as being mocked because of her father's physical disability, or his epileptic illness. While bad relationship with teacher was triggered from poor academic performance that made children sometimes being scolded or underestimate by their teachers in front of classmates. In turn, children were being embarrassed or traumatized, and decided not going to school.

In transition level, the likelihood of children for dropping out of school was mostly related with economical problem since their parents, father in particular, did not support them. The father decided not to send the child to continue to junior high school mainly because of the children's bad behavior or low motivation during in elementary school. The father realized it would be more costly and it would be useless if the children show similar behavior as before. Children living in area with higher unemployment and child labor rate as well as living in rural area were likely more tempted to drop out of school.

Poverty appears to influence the demand for schooling, not only because it affects the inability of households to pay school fees and other costs associated with education, but also because it is associated with a high opportunity cost of schooling for children. As children grow older, the opportunity cost of education is even larger, hence increasing the pressure for children to work and earn income for the household as opposed to spending time in education. Those findings highlight prior studies that explore the reasons of students to drop out both in developed and developing countries. For example, studies on school dropout in Spain and China's rural areas indicates the youth labor market condition, the poor family socio-economic status, the residence in rural areas, and the large family size as the determinant factors of school dropout behavior (Liu, 2004; Pearita & Pastor, 2000).

In junior high school level, the likelihood to drop out of school was typically because of peer group influence. If children have low self-esteem or low self-determinant,

they are likely more easily to get influence from outside. This peer group movement was sometimes not intentionally behaving badly, but since they felt classes were not interesting, they started to skip class and even missed too many days. Then, they could not catch up the lessons, and showed low motivation to study. These kinds of behavior were also found in developed country such as United States, that led children to have poor academic performance (Rumberger, 2011). It might lead to another problem such as repetition. When children held back for more than one grades, it will make them older than their classmates, and then drop out because of ashamed. Low motivation to study, particularly being found in male students, causes poor academic performance at school. Studies on school dropout in Malawi, India, and China also confirm that the likelihood of student drop out increases with age (Jukes, Jere & Pridmore, 2014; UNESCO-UIS, 2015; Yi, et. al, 2012).

Meanwhile, higher student : school ratio had been found to be significantly associated with the decrease of school dropouts in elementary and junior school levels. It means that more students in school reflect less school dropouts. Even though this result seems odd, but actually it had also been found by Atsuko Toi (2010) when he studied about Indonesian junior secondary education. He found that learning circumstance as indicated by the characteristic of smaller school increased dropout rate. This research finding explains that it was because the shifted trend toward private schools that left some marginal school with only few students and low quality of education which indicates higher school dropout in marginal school. Less school ratio matters in decreasing school dropouts only in transition level.

Surprisingly, teacher ratio is not associated with school dropouts in all levels of the study. This result contradicts with Khan, et. al (2014) whose findings report that the reduction of student-teacher ratio improves the educational outcome in Ethiopia. T

The robust finding of successful supply-side factor in reducing school dropouts is scholarship assistance. It is significantly associated in almost all level of education being studied. This finding confirms prior study that reports the effectiveness of scholarships in reducing drop-outs at junior secondary school in a time of economic crisis in Indonesia (Cameron, 2009).

Regarding unexpected results of local policy in term of fiscal autonomy, reflect inefficiency and incapacity of local government in favoring public education service. The qualitative finding confirms that when local government has more own-sources revenue and increased total revenue, the allocation for education expenditure has steeply down. Although the local government has high revenue but it does not guarantee that local elite preference will favor local people preference.

It seems that local governments with higher revenues generated by them locally are more likely to disburse away from improvement in delivering public education services for the interest of the local ruling party leaders as to be found in Cambodia and Pakistan (Aslam and Yilmaz, 2011; Eng, 2016). In this case, this finding also suggests the same reason behind this away disbursement, that having more capacity in generating local tax does not necessarily reflect better performance in providing public goods and services.

This research finding is actually in contrast with Habibi, et. al (2003) whose findings show that the higher the ratio of local taxes, the higher the level of human development is since citizen give more attention on the quality of education service. It is because better income citizen would be in the best position to hold local governments in providing a good quality of service (Grindle, 2009). Such differing results may however merely signal the different characters of local citizens and the different fiscal mechanism for local governments in generating local taxes.

The qualitative finding explains that local governments do not only financially depend on central government, but also in managing expenditure itself. There are many policy and projects from central government to do, as education is an obligatory sector. Therefore, the majority of budget allocation in local government is dominated by central government program rather than to be fitted with local needs.

This finding is related to Prud'homme (1995) and Tanzi (1996) arguments that contend about poor capacity of local bureaucrats compared to central bureaucrats. This argument is likely one of the reasons related to the obligatory program from central to local governments. Without the obligatory projects, central government concerns that local governments become confused with their task. On the contrary, this concern also signals that central government only delegates its abundant tasks to local governments rather than to match citizen preferences.

This study leaves a number of limitations which need to be addressed. First, the case study findings may not be generalized to represent all local governments in Indonesia. Second, this research only examines the association of independent variables and dependent variable, not the causal order. The causal effect of fiscal autonomy and other local policy on school dropout is something which future research.

Conclusions

Despite the Indonesian government effort in improving education quality and equity by giving autonomy to local governments to manage 9-year free compulsory education, there were around 2.4 million children who dropped out of school before completing

junior high school level (MoEC, 2015). This research, therefore, aims to examine (1) the reasons behind dropping out behavior in Indonesia's basic education and factors affecting it and (2) the impact of local policy in term of fiscal autonomy on school dropout. It conducts qualitative analysis as well as quantitative analysis to explore and explain the research questions.

The main findings highlight five reasons for dropping out of school mentioned by school dropouts and parents. Social relationship at school had been found to be the main reason for elementary school dropouts. While economic-related reason was the crucial deprivation in transition level. In the mean time, peer group influence was the number one reason for junior high school dropouts. Furthermore, poor academic achievement was mentioned to be the second highest reason in all of three levels being studied. Meanwhile, health-related problem was the least reason reported by the children.

The second findings suggest that poor communities of residence and household poverty were found to be the most significant factors associated with school dropout occurrence in all levels of study, particularly in transition level. Older children were likely to have higher risk to drop out of school because of higher direct cost or being tempted to get a quick job. Living in rural area was also signaling higher school dropout numbers, but it is not the case for children in elementary school level. Children who live with more siblings were also significantly associated with higher risk for dropping out since it might be related with the household poverty. Boys in particular were likely more affected by those above conditions since the result signaled that they had higher risk to drop out as opposed to girls.

The last findings show that local policy in term of fiscal autonomy is significantly associated with the increase of school dropouts but only in transition level and junior high school level. It means that fiscal autonomy had not been found to be effective in reducing school dropouts in Indonesia's basic education. Factors that significantly associated with the decrease of school dropouts were scholarship, living with both parents, and parents' academic attainment as indicated by the negative relation in all educational background of the father and the mother especially, since she had more prominent role in motivating children to staying at school. While father's and mother's income and occupation were not shown to be significantly associated in almost all panels, except for mother's occupation which was associated with higher school dropouts in transition level. To sum up, this study has indicated that school dropouts in Indonesia's basic education is as a result of economical deprivation and social marginalization that need public action from local officials.

**KINERJA BAPPEDA KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
(Studi di Bappeda Kabupaten
Banyuwangi)**

**BAPPEDA BANYUWANGI PERFORMANCE IN
FORMULATING THE LOCAL DEVELOPMENT
ACTION PLAN (RKPD)
(Study in Bappeda of Banyuwangi
Regency)**

Nama : Ribut Rahayu
Unit Kerja : Bappeda Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan konsep value for money (Mardiasmo, 2009). Ada tiga pokok bahasan dalam value for money yaitu: 1) ekonomi yang membahas tentang masukan (input); 2) efisiensi yang membahas tentang masukan (input), proses, dan keluaran (output); serta 3) efektivitas yang membahas tentang keluaran (output) dan dampak (outcome). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD ditinjau berdasarkan hasil pengukuran ekonomi sudah dapat dikatakan ekonomis tetapi menurut hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas masih tidak maksimal. Dalam penyusunan RKPD, ada beberapa pemangku kepentingan yang terlibat yang turut mempengaruhi kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi. Diketahui faktor pendukung kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD adalah faktor jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) yang membantu proses perencanaan, koordinasi yang baik, kepemimpinan yang baik, anggaran yang mencukupi, ketersediaan data dan informasi, dukungan dari lintas sektor serta faktor sarana dan prasarana yang mendukung. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap mekanisme perencanaan serta pengalokasian waktu yang kurang tepat.

Kata Kunci: kinerja, perencanaan pembangunan daerah

ABSTRACT

This research analyze the performance of Bappeda Banyuwangi by using value for money concept (Mardiasmo, 2009). There are three subjects of value for money concept that is: 1) economy which discuss about input; 2) efficiency which discuss about input, process, and output; and 3) effectiveness which discuss about output and outcome. Type of this research is descriptive research by qualitative approach. Data collecting technique include observation, interview, and documentary study. Data analysis method used for this research is interactive model analysis by Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Result of the research show that Bappeda of Banyuwangi Regency performance in formulating the Local Development Action Plan considered by economy, efficiency, and effectivity measurements is not maximal. In this case, Bappeda Banyuwangi is not the only subject that determine the success, but there are some stakeholders involve in this formulation process. Some supporting factors found, that are enough quantity of human resources, application of Local Planning and Budget Information System, good coordination, good leadership, enough budget, availability of data and information, cross-sector support, and adequate infrastructure support. While inhibiting factors are lack of understanding about planning mechanism owned by human resources and not good time scheduling.

Keywords: performance, local development planning

Sebagai sebuah organisasi publik, Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara umum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Esman dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa agar organisasi dapat berjalan dengan baik, maka sangat diperlukan adanya dukungan baik dari dalam maupun luar organisasi. Dukungan tersebut bisa berasal dari masyarakat, pemerintah (aparatur/pegawai) dan kelompok profesi. Berdasarkan pendapat ini dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat kemajuan Bappeda Kabupaten Banyuwangi bisa berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi.

Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik, menggambarkan sampai sejauh mana Bappeda telah mampu mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan strategi yang telah dipilih. Sampai saat ini pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dilakukan secara objektif, karena belum dilaksanakannya sistem pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah (Serdamayanti, 2003).

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa tingkat pendidikan formal dari pegawai Bappeda Kabupaten Banyuwangi, telah menunjukkan pada suatu tingkat yang cukup baik. Berdasarkan data dari dokumen Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 43 orang. Dimana pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 sejumlah 4,65 persen, S2 sejumlah 20,93 persen, S1 sejumlah 46,51 persen, SMA/SMK sejumlah 23,25 persen, dan SD sejumlah 4,65 persen. Artinya sebesar 72,1 persen pegawai telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, berdasarkan data pada Daftar Untuk Kepangkatan (DUK) dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa beberapa pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Kondisi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diuraikan, mendorong peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimanakah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan disana. Dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagai institusi perencanaan di daerah tersebut menjadi pusat perhatian dari penelitian ini.

Penelitian tentang kinerja organisasi publik sudah beberapa kali dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Djalil (2011) yang meneliti tentang kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Dinas PN Kabupaten Malang. Hasilnya diketahui bahwa pencapaian kinerja dilihat dari pencapaian input dan output sudah cukup memadai

namun jika ditinjau lebih lanjut dari pencapaian outcome maka belum maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Dos Reis (2010) tentang kinerja Kantor Sekretariat Negara di Republik Demokrasi Timor Leste menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat kinerja adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian di atas sehingga muncul pertanyaan, "Bagaimanakah kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD?". Sementara penelitian terkait kinerja pada Bappeda Kabupaten Banyuwangi belum pernah ada sebelumnya. Keberhasilan program-program pemerintah atau pembangunan sangat bergantung pada bagaimana perencanaan pembangunannya dilakukan. Dengan dibertakukannya otonomi dan desentralisasi daerah maka pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya. Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan suatu proses yang bersifat kompleks dan rumit karena menyangkut berbagai komunitas, lingkungan, dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Bappeda sebagai institusi perencana di daerah dituntut harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Banyuwangi?

Berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Bappeda ataupun pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi publik. Sehingga akan mampu membawa perbaikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan menjadi daerah yang mampu bersaing dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Kinerja Bappeda Banyuwangi

Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki sebuah struktur organisasi. Berdasarkan struktur yang digunakan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang kepala badan yang membawahi sekretaris, kelompok jabatan fungsional dan 5 (lima). Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan manajemen publik saat ini ada beberapa kriteria pokok yaitu kriteria

ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kriteria pokok tersebut ada persamaan dengan delapan karakteristik good governance menurut United Nation Development Program (UNDP)

Mahsun (2006) berpendapat bahwa dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi beberapa indikator yaitu input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Pada penelitian ini, pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD menggunakan indikator input, proses, output, dan outcome. Sebagaimana pendapat Rai (2008) yang menekankan pengukuran kinerja pada indikator input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti dalam menganalisis tentang kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagai sebuah organisasi sektor publik dalam penyusunan RKPD adalah dengan menggunakan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep value for money dengan indikator input, proses, output, dan outcome.

Bappeda Banyuwangi telah memenuhi kriteria ekonomis

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui dokumen LAKIP tahun 2015 dari beberapa Bappeda di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Bondowoso, Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Bappeda Kota Malang maka diketahui bahwa anggaran untuk program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi terhitung paling kecil, yaitu sebesar Rp. 875.006.623,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 802.886.450,-. Sementara untuk Bappeda Kabupaten Bondowoso, Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Bappeda Kota Malang mencapai di atas 1 milyar rupiah.

Mengingat kembali tentang pengukuran ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Ulum (2012:27) bahwa: "... pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif". Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi misalnya adalah sebagai berikut: "Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?" dan "Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?" (Mardiasmo, 2009).

Untuk menjawab pertanyaan pertama: "Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?", maka telah diuraikan di atas bahwa besarnya realisasi anggaran pada tahun 2012 sampai dengan 2015 untuk kegiatan penyusunan rancangan RKPD, musrenbang RKPD, dan penetapan RKPD tidak pernah melebihi dari jumlah yang telah dianggarkan. Demikian pula pada kelompok program, bahwa jumlah realisasi anggaran untuk program perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2012 sampai dengan 2015 selalu di bawah jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kemudian untuk pertanyaan kedua: “Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?” Berdasarkan tabel perbandingan anggaran di Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Bondowoso, Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Bappeda Kota Malang maka diketahui bahwa anggaran program perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling kecil. Dan untuk total anggaran belanja langsung, nilai anggaran di Bappeda Kabupaten Banyuwangi masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja langsung pada tiga Bappeda lainnya, yaitu Bappeda Kabupaten Ponorogo, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Bappeda Kota Malang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mengacu pada pendapat pengukuran ekonomi Mardiasmo (2009) maka Bappeda Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi kriteria ekonomis.

Efisiensi penyusunan RKPD dan Program Perencanaan Pembangunan

Untuk menjawab tentang efisiensi penyusunan RKPD dalam program perencanaan pembangunan daerah maka yang dibandingkan adalah nilai input dan output. Telah dibahas sebelumnya bahwa pengadaan input telah memenuhi kriteria ekonomis, dan output yang dihasilkan mendapat penilaian baik. Tetapi pada tahap proses pelaksanaannya masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti keterlambatan jadwal pelaksanaan musrenbang kecamatan dan penetapan RKPD Kabupaten Banyuwangi yang mendahului RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Bila proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan dengan tepat, maka sangat mungkin kualitas output yang dapat dihasilkan bisa lebih baik lagi dari yang ada sekarang ini. Sehingga dengan mengacu kepada pendapat Ulum (2012:25) bahwa: “Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*)”, maka dapat dikatakan bahwa efisiensi belum tercapai secara maksimal untuk menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD.

Pengukuran Efektivitas kinerja Bappeda Banyuwangi dinilai Sudah Baik

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap pendapat para informan terkait pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Banyuwangi, yaitu “terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat” dinilai sudah baik dengan skor rata-rata penilaian 4,2. Pengukuran dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dimana

1 untuk penilaian “sangat kurang” dan 5 untuk “sangat baik”. Dalam rangka untuk mencapai tujuan: “terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat”, dengan sasaran: “meningkatkan ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah”.

Indikator kinerja sasaran ini realisasi pencapaiannya selama lima tahun berurut-urut (2011 sampai dengan 2015) adalah 100 persen. Aspek keterkaitan dan konsistensi disini maksudnya adalah keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RKPD Kabupaten Banyuwangi dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional. Kemudian aspek kelengkapan dan keterukuran dalam dokumen RKPD ini, ditunjukkan dengan muatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Indikator persentase Renja SKPD yang memenuhi aspek keterkaitan, konsistensi, dan kelengkapan, realisasi pada tahun 2015 sudah mencapai 100 persen. Hasil ini tercapai berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD, dimana dari 33 SKPD (badan/dinas/kantor) seluruhnya telah sesuai dengan pedoman yaitu pada Lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sementara pada empat tahun sebelumnya capaiannya adalah: 88 persen pada tahun 2011; 94 persen pada tahun 2012; 94 persen pada tahun 2013; dan 96 persen pada tahun 2014. Nilai capaiannya sudah di atas 80 persen, dan juga terlihat ada trend yang selalu naik dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Indikator persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD, persentase capaiannya pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berurut-urut adalah: 93%; 93%; 94%; 98%; dan 97%. Berarti selama lima tahun terakhir, capaian untuk indikator ini belum pernah 100% tetapi sudah di atas 90%. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dari desa, kelurahan dan kecamatan dapat diketahui bahwa usulan kegiatan atau program dari instansi mereka yang menjadi kegiatan RKPD sebesar 50%, 90%, dan 100%. Ada kesesuaian antara hasil perhitungan capaian indikator ini oleh Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan hasil wawancara di lapangan, bahwa untuk indikator sasaran persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir belum 100 persen tercapai.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah menurut Kuncoro (2012), yaitu (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam ataupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan

perekonomiannya, dan (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya, sedangkan daerah lain mengalami penurunan.

Support dari Lintas Sektor Serta Sarana Dan Prasarana

Faktor pendukung kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD berikutnya yang disampaikan oleh informan adalah adanya support dari lintas sektor serta sarana dan prasarana. Support dari lintas sektor yaitu dukungan dari instansi-instansi lainnya misalnya instansi vertikal/instansi Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dukungan tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi yang sangat baik dan adanya kesediaan serta komitmen untuk bekerjasama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan di daerah tidak terlepas dari pola perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kartasasmita, 1997). Sarana dan prasarana memiliki peranan yang penting bagi berjalannya aktifitas atau kegiatan dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tafria (2010) kurangnya sarana dan prasarana yang ada dapat menghambat efektivitas dari Bappeda Kota Padang dalam menyusun perencanaan pembangunan. Keberadaan sarana dan sarana yang mencukupi di Bappeda Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu faktor pendukung bagi kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD.

Kualitas SDM Di Bappeda Dan SKPD Menjadi Faktor Penghambat

Dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Banyuwangi dalam prakteknya masih dijumpai hambatan-hambatan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan 31 Oktober 2016 di ruang kerja beliau diketahui bahwa menurut Bapak AH kualitas SDM di Bappeda dan SKPD yang melaksanakan penyusunan RKPD masih kurang baik. Hal ini menjadi penghambat untuk mewujudkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Tetapi pendapat tersebut berbeda dengan pendapat dari enam informan lainnya yang menyatakan bahwa SDM di Bappeda dan SKPD dari sisi kuantitas maupun kualitas sudah baik dan mendukung dalam melaksanakan penyusunan RKPD. Mengingat pengalaman Bapak AH yang sudah menangani penyusunan RKPD selama kurang lebih sepuluh tahun, didukung juga dengan data kepegawaian dimana pada beberapa jabatan terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan jenis

jabatan, kemudian terjadinya beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah maka dapat dikatakan bahwa pemahaman SDM terhadap mekanisme perencanaan adalah masih kurang baik. Jika kualitas SDM ditingkatkan maka sangat mungkin akan menghasilkan kualitas RKPD yang lebih baik. Karena kualitas perencanaan yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, dan keluwesan dari SDM, disamping teknik dan metode yang dipakai (Riyadi dan Bratakusumah, 2004).

Kinerja Penyusunan RKPD Tidak Maksimal

Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD ditinjau berdasarkan hasil pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara umum dapat dikatakan tidak maksimal. Bappeda Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi kriteria ekonomis dalam menggunakan dana untuk penyusunan RKPD. Tetapi efisiensi dan efektivitas tidak sepenuhnya tercapai dengan masih terjadinya pelaksanaan tahapan yang tidak tepat waktu serta belum sempurnanya pencapaian target usulan musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor pendukung Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD adalah faktor kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, faktor penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memudahkan proses perencanaan, faktor koordinasi yang baik antara sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan SKPD, faktor kepemimpinan yang baik, faktor anggaran yang mencukupi, faktor ketersediaan data dan informasi, faktor dukungan dari lintas sektor serta faktor sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD adalah faktor tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap mekanisme perencanaan dan faktor pengelolaan waktu yang kurang tepat. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa tahap kegiatan yang pelaksanaannya tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**STRATEGIC PLANNING TO PREVENT
FOREST AND LAND FIRE IN INDONESIA
(Case Study in Directorate of Land and
Forest Fire Controlling)**

**PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK
MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Direktorat Pengendalian
Kebakaran Hutan Dan Lahan)**

Nama : Yosi Yosandi
Unit Kerja : Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MIA - UNIBRAW-JEPANG

ABSTRACT

Strategic planning in public sector in Indonesia has been fully supported by the regulations, but the implementation has not been applied properly. Meantime, forest and land fire still occurs and their numbers are increasing. On the other hand, empirical evidence related to the adoption of strategic planning in the public sector in order to support the critique that a strategic planning affects what an organization is, what it does and why it does it and also the exploration related to the strategic planning constraints and how to tackle it is still limited. The research is imperative due to the insight enhancement about the adoption of strategic planning in public sector, to reveal some difficulties associated with strategic planning to enhance forest and land fire prevention and to identify some alternative strategies to prevent forest and land fire. Research result shows that strategic planning principles have been adopted on the arrangement of strategic plan document of Directorate of Forest and Land Fire Controlling (PKHL) to prevent forest and land fire in Indonesia. Related to the difficulties faced by the Directorate of Land and Forest Fire Controlling to improve forest and land fires prevention, there are three barriers: (1) Structural Barrier; (2) Environmental barriers; (3) Resources barriers. Alternative strategies should be taken to solve the strategic issues emerged are: (1) Integrated Patrol Program must be continued; and (2) to encourage BAPPENAS to rearrange RPJMN by adjusting with Money Follow Program approach.

Keywords: strategic planning, public sector, forest and land fire prevention

ABSTRAK

Perencanaan strategis di sektor publik di Indonesia telah didukung penuh oleh peraturan, namun penerapannya belum diterapkan dengan baik. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi dan jumlahnya meningkat. Di sisi lain, bukti empiris terkait dengan penerapan perencanaan strategis di sektor publik untuk mendukung kritik bahwa perencanaan strategis memengaruhi apa itu organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa hal itu dilakukan dan juga eksplorasi yang berkaitan dengan strategi. Kendala perencanaan dan cara mengatasinya masih terbatas. Penelitian ini penting karena adanya peningkatan wawasan tentang penerapan perencanaan strategis di sektor publik, untuk mengungkapkan beberapa kesulitan yang terkait dengan perencanaan strategis untuk meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan untuk mengidentifikasi beberapa strategi alternatif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan strategis telah diadopsi pada penyusunan dokumen rencana strategis Direktorat Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk memperbaiki pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ada tiga hambatan: (1) Hambatan Struktural; (2) Hambatan lingkungan; (3) Hambatan sumber daya. Strategi alternatif yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah strategis yang muncul adalah: (1) Program Patroli Terpadu harus dilanjutkan; dan (2) mendorong BAPPENAS untuk mengatur ulang RPJMN dengan menyesuaikan diri dengan pendekatan Money Follow Program.

Kata kunci: perencanaan strategis, sektor publik, pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Nowadays, forest fires and smoke haze are becoming a regional and global issue due to the impact to cross national administrative border (transboundary haze pollution). In addition, haze problem will affect on various aspects of life, ranging from health, transportation, trade, to the disruption of international relations, especially bilateral relations with countries that are exposed by the smog (Syaufina, 2014, p.35-39).

In global level, forest and peatland fires even have become a major source of greenhouse gases emissions. World Bank (2015) recorded in October 2015 that emissions per day as a result of the forest fires occurrence in Indonesia surpassed the US's emissions, or more than 15.95 million tonnes of CO₂ emissions per day. According to Ministry of Environment and Forestry data in 2014, it was estimated that 44312.78 hectares of forest area was burnt. Meantime, most of the forest and peat land fire occurred in conservation areas, with total burnt area of 18585.90 hectares (Ministry of Environment and Forestry, 2015, p.195).

Based on the fact above, forest and land fire still occurs until today because of the weak of forest governance. This emerges due to the absence of forest managers in site level who are responsible for managing forest area, so that most of the forest areas in Indonesia are open access and it may be utilized by unauthorized parties for their own interests. Furthermore, this condition causes the failure of forestry programs implementation (Directorate of Area Management and Preparation of Forest Area Utilization, 2011, p.18).

In order to achieve good governance in public sector, one of the important things should be considered is determining the interventions needed to optimize the achievement of intended outcomes. In this aspect, to achieve sustainable outcomes in public organizations, some interventions are needed, such as services or appropriate regulations. It means that in order to ensure organizational target achievements, public entities must consider not only strategic plan but also their operational plans consisting of their priorities and annual targets. Regarding to this context, strategic planning is one of the mechanisms that must be conducted and adopted by public organizations (IFAC, 2013, p. 24-25).

Strategic planning was firstly used in businesses sector as a way to maintain or to improve their competitive advantages. Then, many organizations in public sector adopted these practices to improve their effectiveness and efficiency. Nevertheless, in practice, there are many difficulties faced by public organizations in adopting strategic planning and management processes that were designed for private sector. Moreover, this is due to the difficultness found by public managers to transfer strategic planning principles from private to public organizations (Baile, 1998, p. 3).

Specifically, by adopting strategic planning, public organizations can achieve sustainable outcomes, by focusing on executing decisions now in order to achieve better organization's condition in the future (Bryson, 2011, p.42). Strategic planning also can be used to help organization in organizing and managing effective change processes, and figuring out what to change and how to response it properly (Bryson, 2011,p.15).

Meanwhile, in Indonesia, national planning system has been regulated through Law Number 25/2004 regarding National Development Planning System. After that, the guidance to formulate national long-range development plan, national middle range development plan and national annual development plan was enacted through Government Regulation Number 40/2006 regarding the Procedures of National Development Plan Arrangement. Then it was followed by the stipulation of Regulation of National Development Planning Agency No.1/2014 regarding the Guidance of National Middle Range Development Plan (2015-2019) Arrangement and Ministerial Secretary Regulation of National Development Planning Agency No.3/2014 regarding Procedures of National Middle Range Development Plan (2015-2019) Arrangement.

Despite being supported by the regulations, the implementation of strategic planning in public sector in Indonesia has not been applied properly. In addition, after being implemented for more than 10 years, strategic planning in public sector in Indonesia, especially in term of forest and land fire prevention, has not reached a significant result yet. This can be seen through the number of forest and fire occurrences experienced in Indonesia every year, and the budget allocation was mostly focused on fire extinction activities rather than prevention one. Moreover, in term of the constraints faced by public organizations, several things are rising up during the implementation of strategic planning, for instances the conformity between organizational culture and strategic planning, the alignment of strategic plans with political authority, characteristic of each subunit in the public organizations especially in term of its autonomy, support from the organization's leader, performance measurement standard in organization and the diversity and dispersion of stakeholders (Baile, 1998, p.120).

In spite of implementing many programs to prevent forest and land fires, fire still occurs and their numbers are increasing. This may happen due to the lack of good forest governance practice in which the core problem lies on the implementation of strategic planning to achieve desired outcomes. Moreover, legal mandates and obligations from top-down mechanism often limit the movement of public organization in allocating their resources. Therefore, less choices are made or to be omitted in order to carry out actions to achieve goals. This constrains that limit the scope of action are important considerations for strategic managers in public organizations. (Nutt and Backoff, 1993, p. 216).

Meanwhile, empirical evidences related to the adoption of strategic planning in the public sector in Indonesia to support the critique that a strategic planning determine the type of organization in the future, its activities and why it does those activities. Besides, empirical studies regarding to the exploration of strategic planning constraints and strategy alternatives are still limited. Therefore, this research is imperative due to the insight enhancement about the adoption of strategic planning in preventing forest and land fire in Indonesia conducted by Directorate of Land and Forest Fire Controlling as a public organization handling on national level policies. Besides, the research also will reveal some difficulties associated with strategic planning to enhance forest and land fire prevention and strategy alternative to prevent forest and land fire.

Difficulties Related To Alternative Forests to Prevent Forest and Land Fires

In spite of implementing many programs to prevent forest and land fires, fire still occurs and their numbers are increasing. This may happen due to the lack of good forest governance practice in which the core problem lies on the implementation of strategic planning to achieve desired outcomes. Moreover, legal mandates and obligations from top-down mechanism often limit the movement of public organization in allocating their resources. Therefore, less choices are made or to be omitted in order to carry out actions to achieve goals. This constrains that limit the scope of action are important considerations for strategic managers in public organizations. (Nutt and Backoff, 1993, p. 216).

Meanwhile, empirical evidences related to the adoption of strategic planning in the public sector in Indonesia to support the critique that a strategic planning determine the type of organization in the future, its activities and why it does those activities. Besides, empirical studies regarding to the exploration of strategic planning constraints and strategy alternatives are still limited. Therefore, this research is imperative due to the insight enhancement about the adoption of strategic planning in preventing forest and land fire in Indonesia conducted by Directorate of Land and Forest Fire Controlling as a public organization handling on national level policies. Besides, the research also will reveal some difficulties associated with strategic planning to enhance forest and land fire prevention and strategy alternative to prevent forest and land fire.

The research objectives of "Strategic Planning to Prevent Forest and Land Fire in Indonesia" is to explore about how strategic planning is adopted by the Directorate of Land and Forest Fires Controlling to prevent forest and land fires in Indonesia.

Strategic Planning Process in Directorate of Land and Forest Fire Controlling

By involving all Sub-directorates and other external stakeholder's data in the strategic planning process, the quality of document will be more comprehensive and better. Nevertheless, the external involvement has not been optimized due to the budget limitation, so that they could not involve all external stakeholders in arranging strategic plan document. The roles of external stakeholder both in national and sub-national level were only providing data to support Renstra of Directorate of PKHL arrangement.

According to the explanation above, initial agreement has been agreed by not only internal but also external stakeholders. In this step, the role of Director of Land and Forest Land Controlling as the organization's leader is vital due to his commitment to continue or discontinue strategic planning process. The commitment also has emerged among stakeholders, such as between the Director and Strategic Planning team; and Strategic Planning team with external stakeholders involved in the process.

According to Bloom's (1986) findings that greater involvement of internal and external stakeholder in the process of strategic plan arrangement leads to greater ownership and accountability, the organizational goals and objectives also developed in the plan. Therefore, in the future, it is important for Directorate of PKHL to involve more external stakeholder to brainstorm the ideas related to the activities in preventing forest and land fire through Focused Group Discussion (FGD) scheme or other meeting forums. Meanwhile, the use of stakeholder analysis is also needed to identify the degree of importance of all stakeholders involved in strategic planning process, as mentioned by Bryson (2011) that the stakeholder analysis could be used to help in deciding the stakeholders involved in an initial agreement due to the availability of important information that cannot be gained or the necessity of their support to ensure the fruitfulness of strategic planning process.

Development and Clarification of Mission and Values

Furthermore, in order to ensure the development roles of Ministry of Environment and Forestry, strategic targets of environment and forestry development was formulated. The targets would be a guideline and to prompt organizational performance 2015-2019. Strategic targets encompass several areas, namely: (1) Maintaining environmental quality to improve the environmental capacity, water security and public health, by the performance indicators of Environmental Quality Index lying on the range of 66.5 to 68.6. Main elements of the index has to be addressed, namely water, air and forest cover; (2) Utilizing the potential of forest resources and sustainable forest to

improve economy and social welfare, by using performance indicator is the increasing contribution of forest resources and environmental sector to foreign exchange and non-tax revenues. Leverage components that would be addressed is the production of forest yields, both timber and non-timber products (including plants and wildlife) and exports; and, (3) Preserving the ecological balance and biodiversity as well as the existence of natural resources as a life support system to prompt sustainable development, by using performance indicator is the degree of ecosystem functioning is increasing annually. This performance is an aggregation of various markers (such as decreasing the number of land and forest fires occurrences, increasing the population of endangered species, improving the essential ecosystem area managed by the parties, reducing the consumption of ozone destructive materials, etc.).

External environmental assessment

Three major categories monitored in assessing external environment, namely: (1) Forces and trends (political, economic, social, technological, educational, physical); (2) Key resource controllers (clients, customers, payers, members and regulators); (3) Actual or potential competitors or collaborators (Bryson, 2011, pp. 159). Based on those criteria, all of opportunities and threats identified by the Directorate's strategic plan team have been fulfilled the 3 criteria above that was proposed by Bryson. For example, the threats number 1 "Forest and land fire occur every year" is considered as one of the forces/trends in managing forest and land in Indonesia. Meantime, threats number 2 "Disproportionate information related to forest and land fire issue that will lead to the improper public opinion" is closely related to the publication of forest and land fire prevention conducted by other parties, such as television, radio or newspaper. Therefore, they become key resource controllers in implementing forest and land fire preventive activities. The last criteria proposed by Bryson is "actual or potential competitors or collaborators", and this is fulfilled by the opportunities points number 1 and 2 (many partnerships and international aids related to the trans-boundary haze pollution handling; and national and international cooperation in the activity of forest and land fires controlling). Those two points give opportunities to organization to collaborate with international or national parties in order to prevent forest and land fire in Indonesia.

Internal environmental assessment

Furthermore, Directorate of Land and Forest Fire Controlling has fulfilled those three elements developed by Bryson above. Regarding to resources (input), there are several aspects possessed by organization such as: (1) Professional human resources in term

of forest and land fire controlling; (2) The sufficiency of facilities and infrastructure; (3) Budgetary support. Meanwhile, aspects involved in present strategy (process) consists of: (1) Organizational change of Directorate of Forest and Land Fire Controlling; (2) Regulative support related to the forest and land fire controlling; (3) Poor coordination to other related institutions; (4) Un-synchronize interests between central government and local government related to the forest and land fire controlling; (5) In operational level, Manggala Agni has not been becoming an independent organization (they still become a part of Directorate General of KSDAE); (6) The institutional role of forest and land fire controlling in KPH, especially KPHP and KPHL has not reached a maximum level. The last element is performance (output) which is contained of several organizational aspects, namely: (1) The low of MPA involvement to support Manggala Agni's efforts related to the forest and land fire controlling; (2) Database quality related to the burning area and its measurement are still poor and need an improvement; and (3) Law enforcement related to forest and land fire cases are still low.

Difficulties Associated with Strategic Planning to Improve Forest and Land Fires Prevention

This vagueness has brought difficulties in authority division of forest and land fire prevention between Directorate General of Ecosystem and Natural Resources Conservation and Directorate General of Climate Change Controlling. The difficulties also include not only programs execution but also regarding to budget allocation and command pathways to mobilize Manggala Agni to conduct forest and land fire prevention. This finding in accordance with study conducted by Nazemi, S and ST Asadi (2015, p.5-6) that unsuitable organizational structure in Mashhad Electric Energy Distribution (MEEDC) in Iran is a serious obstacle to implement of strategic planning. Meanwhile, David (2011, p.101) asserts that organizational structure dictates about resources allocation, and objectives establishment in an organization. Therefore, when the organization's structure is unclear, it will interrupt the strategic planning process, because it is not only deal with strategy development but also budget allocation.

Resources barriers

In this research, external stakeholder participation in strategic planning process has not been fully optimized by Directorate of Land and Forest Fire Controlling. Their role in the strategic planning process is limited only in preparing data related to forest and land fire occurrences. Therefore, the principle of inclusiveness in strategic planning process has not been reached due to the lack of external participation in the Renstra of Directorate of PKHL arrangement.

Meanwhile, this finding is similar with the study conducted by Nazemi, S and ST Asadi (2015. p.8) showing that the implementation of strategic planning process at Mashhad Electric Energy Distribution Company (MEEDC) had been supported by the managers in top level, but the budgeting system had not been ready to support the implementation of strategic planning process due to structural inflexibility and technical reasons. Therefore, even if top managers support the adoption of strategic planning, but budget availability and support from all of the stakeholders are considered as the most important part in succeeding strategic planning in both private and public organization.

The Principles of Strategic Planning Have Been Adopted

Strategic planning principles have been adopted on the arrangement of strategic plan document of Directorate of Forest and Land Fire Controlling (PKHL) to prevent forest and land fire in Indonesia. Each step in strategic planning process, barriers faced organization during strategic plan arrangement process and strategy alternatives to prevent forest and land fire have been summarized as follows:

Initial agreement on a strategic planning process

Director of PKHL had initiated strategic plan arrangement by establishing a team. Moreover, external stakeholder involved in data preparation in order to support strategic plan arrangement was divided into national level and sub national level. Nevertheless, due to the budget limitation in planning process, the involvement of external stakeholders was restricted.

Identification and clarification mandates

Mandate to conduct forest and land fire prevention efforts consisted of: (1) Law No. 41/1999 regarding Forestry; (2) Government Regulation No.45/2004 regarding Forest Protection; (3) Government Regulation No.4/2001 regarding Damage Controlling and/or Environmental Pollution related to Forest and/or Land Fire; (4) Presidential Instruction No. 11/2015 regarding the Improvement of Forest and Land Fire Controlling; (5) Presidential Regulation No. 2/2015 regarding National Mid-Term Development Plan 2015-2019; (6) Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.39/MenLHK-Setjen/2015 regarding Strategic Plan of Ministry of Environment and Forestry 2015-2019; (7) Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 regarding Forest and Land Fire Controlling.

Development and clarification of mission and values

In Renstra Directorate of PKHL 2015-2016, organization's vision and missions of were not arranged. There were only vision and mission of national development 2015-2019 stipulated by the President. Then it was elaborated into Ministry of Environment and Forestry development goal 2015-2019, namely "to ensure that environmental condition lies on tolerance level needed for human life and resources condition also lies on secure population range, as well as improving the resources capability to contribute for national economy".

External environmental assessment

Directorate of Forest and Land Fire Controlling has scanned the organizational opportunities and threats during the strategic plan arrangement process. All external environmental assessment in Directorate of PKHL has fulfilled three major categories developed by Bryson (2011) consisting of: (1) Forces and trends (political, economic, social, technological, educational, physical); (2) Key resource controllers (clients, customers, payers, members and regulators); (3) Actual or potential competitors or collaborators.

The Impact of Road Infrastructure on Household Expenditure in Indonesia

Dampak Infrastruktur Jalan terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia

Nama : Debby Trisia Lukman

Unit Kerja : Din Perhubungan Komunikasi Informatika
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Diklat : Diklat Gelar 2014

Univ – Prodi : MEP - UGM-JEPANG

ABSTRACT

Road infrastructure is one of the important sector in transport infrastructure to enhance economic growth and to increase household welfare. As developing country, the government of Indonesia focuses to invest on road infrastructure by construct and increase the quality of road. This research aims to analyze the impact of road infrastructure by condition (good, moderate, damaged, badly damaged) on household expenditure in Indonesia by using Fixed-effects Models. The case study uses household level data for household expenditure and data of the length of road by condition from 33 provinces in Indonesia in 2007 and 2011. Both of the data was conducted by The Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS). In general, the result find for the total length of road there is a positive impact of road infrastructure on household expenditure in Indonesia. The other result find for all conditions of road infrastructure (good, moderate, damaged, and badly damaged) also have positive impact.

However only for good condition of road infrastructure has not enough evidence on household expenditure in Indonesia compare to other condition. The most significant finding in this research is the low condition of road infrastructure (damaged, and badly damaged condition) also give benefit for household expenditure. This indicate although they have received less attention than high condition of road (good, and moderate condition) they still generate benefit for household welfare.

Key words: Road infrastructure, household expenditure, Fixed Effect Model, Indonesia.

ABSTRAK

Infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor penting dalam infrastruktur transportasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia fokus untuk berinvestasi pada infrastruktur jalan dengan membangun dan meningkatkan kualitas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur jalan dengan kondisi (baik, sedang, rusak, rusak parah) terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan Fixed-effects Models. Studi kasus ini menggunakan data tingkat pada rumah tangga untuk pengeluaran rumah tangga dan data panjang jalan dengan kondisi dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dan 2011. Kedua data tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum, hasilnya menemukan total panjang jalan ada dampak positif dari infrastruktur jalan terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hasil lainnya menemukan semua kondisi infrastruktur jalan (baik, sedang, rusak, dan rusak parah) juga berdampak positif. Namun hanya untuk kondisi infrastruktur jalan yang baik belum cukup bukti pengeluaran rumah tangga di Indonesia dibandingkan dengan kondisi lainnya. Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah rendahnya kondisi infrastruktur jalan (rusak, dan rusak parah) juga memberi manfaat bagi pengeluaran rumah tangga. Hal ini mengindikasikan walaupun mereka kurang mendapat perhatian dari pada kondisi jalan yang terawat (kondisi baik, dan sedang) namun tetap memberi manfaat bagi kesejahteraan rumah tangga.

Kata kunci: Infrastruktur jalan, pengeluaran rumah tangga, Fixed Effect Model, Indonesia.

Investigate the Impact of Road Infrastructure on Household Expenditure

Infrastructures play a crucial role in the socio-economic development and promoting economic growth by affecting economic activities. World Bank (1994) classifies the type of infrastructure into three types:

- Public utilities power, telecommunications, piped water supply, sanitation and sewerage, solid waste collection and disposal, and piped gas.
- Public works roads and major dam and canal works for irrigation and drainage.
- Other transport sectors urban and interurban railways, urban transport, ports and waterways, and airports.

Previous studies found the positive impacts of such infrastructure on local economy. For instance, Aschauer (1989) found that capital accumulation on public sector improved productivity of private sector in United States. His research showed that basic infrastructure such as road, airport, mass rapid transportation system, water and drainage has positive and significant causal effects on the productivity.

Among infrastructure, Schaffner (2014) described that transport infrastructure is one of the key infrastructures to attract the economic growth. Transport infrastructure includes roads, bridges, culverts, railroads, depots, seaports, and airports, all of which contribute to the movement of goods and people. The advantages of road not only reduce transportation costs but also improve living condition in the long run. This reduction in transportation costs increases the effective prices of local exports, reduces the prices of local imports, easy travel, encouraging households and communities to engage in more exporting, importing, use of services, commuting, migrating, and visiting (Schaffner, 2014) Road infrastructure is an especially important sector in transport infrastructure to enhance economic growth, and this research will only focus on road infrastructure. This research then has two objectives as follow:

- To investigate the impact of road infrastructure on household expenditure
- To identify which condition of road infrastructure that can provide positive impact on household expenditure.
- To achieve these objectives, this research will answer the following questions:
- How does the effect of road infrastructure on household expenditure in Indonesia?
- Which condition of road infrastructure has more effect to household expenditure?

This study uses secondary data from household survey conducted by The Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) in 2007 and 2011. Our identification strategy is the Fixed Effect Model (FEM), by which we can remove the bias coming from province and year fixed factors. This thesis contains seven chapters, and organization of each chapter is as following: The first chapter provides an introduction of general context starting from overview, research objectives, research methods, and structure of this study. The second chapter discusses about the condition of road infrastructure and household expenditure in Indonesia. The third chapter is a literature review that includes previous study about the impact of road infrastructure. The fourth chapter describes about data collection, definition of variables, and methodology. In the fifth chapter explains the effect of road infrastructure on household income. The last chapter offers some conclusions and policy implications.

Current Situation of Road Infrastructure in Indonesia

The sustainability of socio-economic development and decreasing of poverty cannot not gain without adequate and efficient infrastructure. Indonesia is a developing country with the large population (237,641,326 people in 2010, BPS, 2012), but almost 60 % of population live in Java Island that only cover 6.7 % of the total land area of Indonesia. This condition makes the development of infrastructures, particularly road infrastructure, focused only on Java Island. For instance, the main traffic in each island in eastern Indonesia is not yet connected (Presidential Regulation, 2005). Such inequality may cause unequal regional economic growth within Indonesia.

As other developing countries, infrastructure has been one of main focuses of Indonesian government nowadays. Government believes that good infrastructure will support economic growth, and higher economic performance needs more infrastructures. Therefore, to solve the inequality, in 2006, the Ministry of Public Works Indonesia invested 7.5 trillion rupiah for road infrastructure and significantly increasing being 20 trillion rupiah in 2009 and 24 trillion rupiah in 2010 (Zafar & Areef, 2010). The source of the funds is not only from central government but also loans from banks. Following the implementation of decentralization, Decentralization Act of 2004 No 32, where the central government was responsible to manage national roads, while local governments were accountable for the provincial and regency roads. Additionally, the Ministry of Public Works Indonesia made policy in the National Medium Term Development Plan (RPJMN 2004-2009) about road infrastructure as follow:

- Developing the master plan of the road infrastructure network system-based island (Jawa and Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi and Papua).

- Coordinating between the central government and local governments to clarify the rights and obligations in the handling of infrastructure of roads.
- Encouraging the involvement of the private and the public's role in organizing and providing infrastructure road.

However, fundamental question still remains:

- Does higher infrastructure quality will produce higher economic growth?
- Classification of Road Quality

The quality of transport infrastructure in Indonesia are listed in the Global Competitiveness Report 2013-2014, which measure the quality of road infrastructure still lower at 3.7 point in scale 1 to 7 with rank 78 among 148 countries in the world. This indicates that the quality of road in Indonesia is still lower and lag behind South East Asian countries such as Malaysia and Singapore.

According to Ministry of Public Works Indonesia, the condition of road was divided into 4 conditions:

- Good
- Moderate
- Badly
- Badly damaged

The four conditions of road infrastructure in Indonesia in 2007 and 2011 can be drawn in Figure 1 and 2. We can see that the highest percentage of the length of road is good condition road, while the lowest percentage is badly damaged condition.

Characteristic of Household Expenditure in Indonesia

In the developed countries, the variable is used to measure poverty incidence by using real income. However, in the developing country including Indonesia, it's difficult to measure true income due to several reasons:

- The lack of data income in informal sectors where employ many workers.

- People worry that they have to pay tax if someone asked about their income
- People do not provide the real information when they earn income from illegal activity.

While in the developing countries using real expenditure is more effective with economic theory. Other countries using expenditure include Indonesia, Viet Nam, Cambodia, India (Warr, 2005). Deaton (2015) also shown that consumption data in developing countries is often more reliable and useful than income data.

Based on the characteristic of Indonesia above this research uses a household expenditure approach as outcome, not using household income approach. In this research we can see that the highest average monthly expenditure per capita in urban area in 2007 and 2011 is DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia. The same position of the highest percentage of the length of road by good condition where DKI Jakarta province also reach the highest position among other provinces in Indonesia. While the lowest point shown by West Sulawesi. Figure 4 shows the highest average monthly expenditure per capita in rural area in 2007 and 2011 is Bangka Belitung Islands and the lowest point is East Nusa Tenggara.

Literature Review

There are many researchers who examined the impact of road infrastructure on economic growth. Yamauchi, Muto, Chowdhury, Dewina, and Sumaryanto (2011) examined the impact of the road quality in the local area on income growth and transition to non-agriculture activities in Indonesia. They used household panel data and village census for 98 villages in seven provinces in Indonesia during 1995-2007. Their research found that there is a positive impact of improvement of road quality on income growth where the distance to economic centers, household education, and landholding also influence this impact.

Warr (2005) conducted the study using data from the Lao Expenditure and Consumption Survey (LESC) 2 covering 1997-1998, LESC 3, covering 2002-2003. He regressed per capita expenditure on access to some infrastructure. His result found that road access raises real consumption expenditure and reduces poverty.

Other positive effects of roads was found in Viet Nam by Cuong (2011). The research relies on data from Viet Nam Household Living Standard Surveys (VHLSSs) conducted in 2004 and 2006 by the General Statistics Office (GSO) of Viet Nam. By using Fixed

Effect regression and Difference-in-differences with propensity score matching, the result shows that rural roads have a positive effect on household income. The working hours per person also increase for households in village with a good road than those without one.

Fan and Chan-Kang (2005) used provincial level data for 1982-1999 and found that low quality roads have higher cost-benefit ratio than the cost-benefit ratio for high quality roads. It means that high quality roads do not have a statistically significant impact while low quality roads have.

Summary

Based on the empirical analysis from the models presented in the previous chapter, we obtain the following conclusion. First, Indonesia has been successful in reaching economic growth and increasing household expenditure in recent decades. This research by using household level data also found that in general there is a positive impact of road infrastructure on household expenditure in Indonesia.

Second, the highest impact of road on household expenditure is by damaged condition compare to others condition. This indicate that low quality of road infrastructure not only significant but also generate benefit for household expenditure.

Third, the good condition of road has positive coefficient (0.020 SE of 0.012) on the household expenditure, but there is not enough evidence to conclude it.

Finally, we discuss policy implications. First, the government of Indonesia should increase budget allocation to construct road infrastructure because it can enhance economic growth and household expenditure. Second, the government now have less attention for low quality of road infrastructure (damaged and badly damaged condition) than high quality of road infrastructure (good and moderate condition). However our results show that the government should consider investment to road even through it is low quality.

**DAMPAK KREDIT MIKRO TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA
PENGGUNA KREDIT MIKRO DI INDONESIA**

**IMPACT OF MICRO CREDIT ON HOUSEHOLD
WELLBEING THAT USE MICRO CREDIT IN
INDONESIA**

Nama : Eska Nugrahini
Unit Kerja : Bappeda Kabupaten Gunung Kidul
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM

ABSTRAK

Kredit mikro merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga yang diukur dengan pengeluaran perkapita. Data yang digunakan yaitu Indonesia Family Live Survey tahun 2007 dan tahun 2014. Alat analisis yang digunakan propensity score matching. Hasil penelitian menemukan bahwa rumah tangga yang mempunyai kredit mikro mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai kredit mikro. Hal ini menunjukkan bahwa kredit mikro mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia.

Kata kunci: Evaluasi Dampak, Kredit Mikro, Kesejahteraan Rumah Tangga, PSM, IFLS.

ABSTRACT

Microcredit is one of the government programs to increase access to microcredit loans to finance investments and working capital, which in the long term to reduce poverty in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of microcredit on household welfare as measured by per capita expenditure. The data used are Indonesia Family Live Survey in 2007 and 2014. The analysis tool used propensity score matching. The study found that households with micro-credit has an average expenditure per capita is higher than that do not have a micro credit. This suggests that microcredit has a significant impact on household welfare in Indonesia.

Keywords: Impact Evaluation, Microcredit, Household Welfare, PSM, IFLS.

Kebijakan Kredit Mikro

Program kredit mikro adalah salah satu usaha pemerintah memberikan pinjaman kecil kepada orang-orang miskin sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan standar hidupnya (Microcredit Summit, 1997). Kredit mikro diberikan kepada rumah tangga miskin sehingga rumah tangga miskin dapat menjalankan produksi atau dapat berwirausaha untuk menghasilkan pendapatan. Banyak negara telah menerapkan program kredit mikro sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan dengan memberikan kredit kepada rumah tangga miskin. Kredit mikro telah populer diterapkan dan berdampak pada kesejahteraan atau standar hidup rumah tangga.

Dengan kemudahan akses untuk mendapatkan modal maupun investasi melalui kredit mikro bagi masyarakat miskin, diharapkan semakin meningkatnya pendapatan yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti mengembangkan usaha. Dengan peningkatan pendapatan maka akan berdampak terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian Setyarini (2012) menemukan bahwa kredit mikro mempunyai dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga yang diukur dari pengeluaran. Hal ini berarti kredit mikro memberikan pengeluaran yang lebih besar untuk rumah tangga yang memiliki kredit dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai kredit.

Suatu program atau kebijakan dikatakan berhasil ketika memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga evaluasi untuk mengukur dampak dari suatu program atau kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu alat analisis yang bisa digunakan untuk mengukur dampak dari suatu program adalah evaluasi dampak.

Gertler dkk. (2011: 4), menyatakan bahwa evaluasi dampak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan kredibel apakah program tertentu mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, evaluasi dampak dapat digunakan sebagai salah satu alat yang memberikan pengetahuan mengenai efektivitas suatu program. Evaluasi dampak digunakan untuk menilai perubahan yang terjadi dalam kesejahteraan individu yang dikaitkan adanya program atau kebijakan tertentu. Perubahan yang terjadi umumnya memperkirakan dampak rata-rata bagi penerima manfaat. Dalam konteks kredit mikro untuk melihat dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga, evaluasi dampak memperkirakan perbedaan rata-rata kesejahteraan pada pengguna kredit mikro dibandingkan dengan yang tidak kredit.

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, ada perbedaan hasil studi empiris mengenai dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, belum ada yang melakukan penelitian mengenai dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia menggunakan data IFLS gelombang

4 dan 5. Program kredit mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, menimbulkan pertanyaan apakah dengan pemberian kredit mikro akan berdampak terhadap kesejahteraan yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Untuk itu, perlu diteliti bagaimana dampak kredit mikro terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan studi dampak kredit mikro di berbagai negara, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apakah kredit mikro mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kredit mikro mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat yaitu pengeluaran per kapita dengan variabel bebas yaitu kredit mikro dengan variabel kontrol berupa jenis kelamin kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, tempat tinggal yaitu di desa atau di kota, provinsi di Jawa atau luar Jawa, jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan aset berupa rumah/tanah, kepemilikan listrik dan jarak bank terhadap pusat komunitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Indonesia Family Life Survey gelombang empat dan lima. IFLS merupakan survei kesehatan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan di 13 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang bisa menggambarkan 83 persen populasi yang hidup di Indonesia. IFLS empat dilakukan pada tahun 2007 dan IFLS lima dilakukan pada akhir tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015.

Metode Propensity Score Matching

Menurut Caliendo dan Kopeinig (2005 dalam Sulistyaningrum, 2016), ada dua tahapan yang diacu ketika mengestimasi propensity score yaitu pemilihan model dan pemilihan variabel yang seharusnya dimasukkan dalam model. Untuk pemilihan model dapat menggunakan binary logit, binary probit, conditional logit, dan multinomial probit. Lebih lanjut untuk pemilihan variabel harus berdasarkan prinsip teori ekonomi dan penemuan penelitian empiris sebelumnya.

Langkah pertama dalam analisis menggunakan PSM ini adalah membuat model logit dari dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang diukur dengan pengeluaran per kapita.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan partisipasi rumah tangga dalam melakukan kredit mikro adalah pekerjaan, umur, status pernikahan, tempat tinggal (pedesaan/perkotaan), provinsi (Jawa/luar Jawa), jenis atap, jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan aset rumah atau tanah, dan jarak lembaga keuangan dengan pusat komunitas. Hal ini berarti kesembilan variabel kontrol secara signifikan positif berpengaruh terhadap akses mendapatkan kredit mikro, dengan p-value kurang dari alfa pada signifikansi pada level 1-5 persen. Kesembilan variabel tersebut besar pengaruhnya pada probabilitas rumah tangga dalam mengakses kredit mikro.

Setelah mendapatkan model logit terbaik, maka dilakukan uji balancing score dalam hal ini untuk memenuhi asumsi Conditional Independence Assumption (CIA) dimana hasil balancing score harus memuaskan (satisfied). Dari hasil olah data diperoleh hasil yang satisfied dengan jumlah final blok sebanyak 7, jumlah ini memastikan bahwa mean propensity score tidak berbeda untuk kelompok yang mendapatkan treatment dan kontrol pada setiap blok.

Penelitian ini menggunakan Kernel Matching karena distribusi datanya berbeda antara kelompok treatment dan kelompok kontrol. Penelitian ini membandingkan hasil analisis data pooled cross section dengan menggunakan analisis data cross section, yaitu IFLS gelombang lima untuk mendapatkan robustness dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dengan menggunakan data cross section, dalam analisis logit menambahkan satu variabel kontrol yaitu pendidikan kepala rumah tangga.

Dalam estimasi logit, faktor-faktor yang menentukan partisipasi rumah tangga menggunakan kredit mikro adalah umur, pendidikan, status pernikahan, provinsi, jenis atap, dan jumlah anggota rumah tangga. Hasilnya konsisten dengan menggunakan data pooled cross section, namun faktor-faktor yang menentukan rumah tangga dalam partisipasi kredit mikro ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Dari 14 variabel kontrol dalam penelitian, analisis logit dengan menggunakan data cross section menunjukkan ada 6 variabel yang menentukan rumah tangga berpartisipasi menggunakan kredit mikro, sedangkan dengan menggunakan data dua gelombang menunjukkan hasil ada 9 variabel yang menentukan rumah tangga berpartisipasi menggunakan kredit mikro dari 13 variabel kontrol.

Nilai difference ATT (Average Treatment effect on the Treated) pada metode Kernel Matching mempunyai nilai 0,1310. Ini berarti bahwa efek dari treatment untuk kelompok yang mengikuti kredit mikro (treatment) mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita lebih tinggi 13,10 persen dibandingkan dengan yang tidak mengikuti kredit (kelompok kontrol). Dengan menggunakan metode Kernel Matching nilai t statistik sebesar 5,63 yang berarti signifikan pada level 1 persen.

Hasil ini konsisten dengan analisis menggunakan data pooled cross section, namun dengan pooled cross section hasilnya menunjukkan perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih tinggi untuk pengguna kredit mikro sebesar 21,19 persen dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai kredit.

Penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyari di Indonesia, Khadker dan Samad di Bangladesh, You dan Annim di China, Duong dan Thanh di Vietnam, dan Ghalib dkk di Pakistan yang menemukan bahwa bahwa kredit mikro berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crepon di Maroko dan Duflo di India yang menemukan bahwa kredit mikro tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Rumah Tangga Yang Mempunyai Kredit Mikro Mempunyai Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Yang Lebih Besar

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa rumah tangga yang mempunyai kredit mikro mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak mempunyai kredit mikro. Hal ini berarti kredit mikro berdampak signifikan positif terhadap kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia.

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa program kredit mikro meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro di Indonesia. Pemerintah hendaknya terus menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat yang belum terjangkau dari layanan kredit mikro, sehingga kesejahteraan rumah tangga pengguna kredit mikro semakin meningkat.

**DAMPAK KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG
SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)
TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA**

**IMPACT OF DIRECT ASSISTANCE POLICY
(BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT - BLSM) ON HOUSEHOLD
CONSUMPTION**

Nama : Hendra Subiyanto
Unit Kerja : Bappeda Pemerintah Kota Magelang
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM

ABSTRAK

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau disingkat BLSM adalah salah satu program bantuan dari pemerintah berupa pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun program BLSM di Indonesia telah banyak dinilai sukses oleh beberapa kalangan, tidak sedikit kritik dan penilaian kurang memuaskan dari beberapa kalangan baik dari segi teknis maupun dampaknya terhadap keluarga penerima. Berdasarkan beberapa kritik terhadap program BLSM terutama pada potensi penyimpangan penggunaan BLSM maka penelitian ini fokus meneliti Dampak Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dengan basis data Indonesian Family Live Survey (IFLS) gelombang 5 tahun 2014 dengan menggunakan metode Propensity score matching (PSM) dan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil pada metode PSM maupun OLS menunjukkan dampak BLSM secara statistik berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga namun tidak signifikan.

Kata kunci: BLSM, Konsumsi Rumah Tangga, Propensity Score Matching (PSM),

Ordinary Least Square (OLS), Indonesian Family Live Survey (IFLS).

ABSTRACT

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat abbreviated BLSM is one of the government's aid program for the provision of cash to the poor citizen in Indonesia. Although BLSM program in Indonesia has been widely stated a success by some societies, nonetheless the criticism and unsatisfactory ratings from some communities in terms of both technical as well as the impact on the recipient families. Based on some of the criticisms of the program BLSM mainly on the potential misuses of BLSM this research focused in examining Policy Impact of BLSM on Consumption of Households with database Indonesian Family Live Survey (IFLS) part 5 in 2014 by using Propensity Score Matching (PSM) and regression Ordinary Least Square (OLS). The results on the PSM or OLS method showed the impact BLSM statistically positive effect on household consumption expenditure but not significant.

Keywords: BLSM, Household Consumption, Propensity Score Matching (PSM), Ordinary Least Square (OLS), Indonesian Family Live Survey (IFLS).

Pengaruh BLSM Pada Konsumsi Rumah Tangga Penerima

Program bantuan langsung dibuat bukan sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan BLT yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008), membuktikan bahwa program ini telah membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga, yaitu dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Besaran BLSM sebesar Rp150.000,00 per bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM. BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima BLSM diwajibkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat sebagai dokumen verifikasi untuk mengambil bantuan tunai.

Meskipun program BLSM di Indonesia sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. [Bank Dunia](#) menyebutkan dalam Buku Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia, Desember 2010. Indonesia termasuk negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan negara lain. Hal ini dibuktikan dengan laporan triwulanan ketiga pada tahun 2010. Dalam laporan itu Bank Dunia menyatakan Pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif.

Berdasarkan beberapa pertimbangan permasalahan di atas dan memperhatikan beberapa penelitian terdahulu terutama pada potensi penyimpangan penggunaan BLSM, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah ada pengaruh pemberian BLSM terhadap konsumsi rumah tangga yang menerima program kebijakan ini?

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan program BLSM terhadap konsumsi rumah tangga yang memperoleh BLSM dan manfaatnya untuk keluarga miskin. Penelitian ini juga bertujuan sebagai referensi untuk memperkaya kebutuhan penelitian terkait kebijakan bantuan langsung untuk masyarakat miskin

di Indonesia dimana sangat sedikit penelitian yang menitik beratkan pada program bantuan langsung dan dampaknya kepada masyarakat.

Simulasi Penggunaan Desain Quasi Eksperiment

Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experiments atau disebut juga eksperimen semu, desain ini merupakan pengembangan dari True Experiments yang sulit dilaksanakan, dalam desain eksperimen semu terdapat variabel kontrol namun tidak sepenuhnya digunakan untuk mengontrol variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan sebagai solusi terkait sulitnya untuk mendapatkan kelompok kontrol yang memiliki kondisi yang persis dengan perlakuan yang digunakan dalam penelitian.

Keuntungan utama dari desain Quasi Eksperiment adalah bahwa dengan metode ini dapat mendayagunakan sumber data yang dimiliki sehingga lebih cepat dan murah. Keuntungan berikutnya adalah dengan metode desain quasi eksperimen dapat dilakukan setelah program intervensi telah dilaksanakan secara penuh (Kamakura dan Mazzon, 2015).

Hasil Simulasi Desain Quasi Eksperiment

Untuk mengetahui perbedaan total konsumsi rumah tangga antara penerima BLSM dengan Non BLSM pada masing-masing persentil dilakukan uji t-test atau Uji Beda Rata-rata. Tetapi Uji Beda Rata-rata tidak bisa menjadi kesimpulan dasar bahwa perbedaan konsumsi rumah tangga antara penerima BLSM dengan Non BLSM berbeda secara signifikan. Kesimpulan dasar dapat diambil dengan melakukan tes nonparametric menggunakan Mann-Whitney U test atau dikenal juga dengan Wilcoxon Rank Sum Test.

Rerata Penerima BLSM Mempunyai Pengeluaran Konsumsi Lebih Tinggi

Pada metode PSM dan Regresi, variabel BLSM konsisten sama-sama berpengaruh positif terhadap variabel konsumsi rumah tangga hal ini berarti bahwa efek rata-rata kelompok yang mendapat BLSM mempunyai pengeluaran konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima BLSM. Jika dilihat pada p value, semua menunjukkan nilai di atas 0.05 sehingga bisa diartikan tidak signifikan, hal ini bisa diduga meskipun bernilai positif namun variabel BLSM tidak berpengaruh signifikan terhadap naiknya konsumsi rumah tangga.

BLSM meningkatkan jumlah konsumsi keluarga penerima, meskipun tidak signifikan, sehingga tujuan utama BLSM yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi BBM yang mengakibatkan inflasi telah tercapai namun tidak maksimal. Dana BLSM digunakan oleh keluarga penerima untuk konsumsi rumah tangga secara keseluruhan baik untuk kebutuhan konsumsi berupa pangan maupun non pangan.

**PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN
KABUPATEN KULON PROGO DENGAN
PENDEKATAN TABEL INPUT-OUTPUT**

**DETERMINATION OF KULON PROGO
REGENCY LEADING SECTOR WITH INPUT-
OUTPUT TABLE APPROACH**

Nama : Imron Rosyadi
Unit Kerja : Bappeda Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan pendekatan Input-Output. Kabupaten Kulon Progo selama ini belum pernah menyusun Tabel Input-Output sehingga tahapan yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyusun Tabel Input-Output Kabupaten Kulon Progo, yang dilakukan dengan menurunkan Tabel Input-Output Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode nonsurvei yaitu metode RAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan sektor pengadaan listrik, gas dan air minum layak dijadikan sektor unggulan karena memiliki Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat dari analisis angka pengganda output, sektor yang menjadi unggulan ialah sektor pengadaan listrik, gas dan air minum dan jika dilihat dari analisis angka pengganda lapangan pekerjaan, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan adalah sektor yang menjadi unggulan.

Analisis Input-Output juga digunakan untuk menganalisis dampak Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan bandara baru ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Dampak positif dapat dilihat dari analisis simulasi investasi, di mana pembangunan bandara baru ini dapat meningkatkan output Kabupaten Kulon Progo sebesar 141,33 persen dari total output sebelum dibangunnya bandara. Peningkatan output ini kemudian menurun menjadi 139,79 persen, dikarenakan dikurangi dengan dampak negatifnya yaitu terjadi penurunan luas lahan pertanian yang selama ini menghasilkan cabai merah senilai Rp90,09 miliar.

Kata kunci: Tabel Input-Output, Kabupaten Kulon Progo, Metode RAS, sektor unggulan, angka pengganda output, angka pengganda lapangan pekerjaan, analisis dampak, Bandara New Yogyakarta International Airport.

ABSTRACT

This research aimed to determine key sectors within Kulon Progo Regency using Input-Output approach. Such analysis never been conducted in this region, therefore, the first step was compiling Input-Output Tables which done by deriving it from Input-Output Tables of Yogyakarta Special Region Province using RAS method.

Result shown that construction, electricity supply, gas and drinking water supply are prominent sectors compare to other due to their high score on Power of Dispersion Index (IDP) and Sensitivity of Dispersion Index (IDK). Using Multiplier Value Analysis based on output also shown that electricity, gas and drinking water supply remain the as dominant sectors among other while based on employment shown that agriculture in general is on the top of it.

Further analysis using Input-Output approach is impact evaluation of New Yogyakarta International Airport development. The Result shown that the construction gives both positive and negative impact to the economic of Kulon Progo. Positively, by Investment Simulation Analysis, it can increase the output of Kulon Progo up to 141.43 percent of total output before existence of the airport. This increasing output then decrease to 139.79 percent as negative impact on farm land reduction for red chili which estimated about IDR 90.09 billion.

Keywords: Input-Output Analysis, Kulon Progo Regency, RAS Method, key sector, output multiplier, employment multiplier, impact analysis, New Yogyakarta International Airport

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai tantangan dalam pembangunan, salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi yaitu 21,4 persen pada tahun 2015 dan menempati peringkat keempat dari 5 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi DIY. Angka ini berada jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 13,16 persen dan tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,13 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang dicerminkan dengan pertumbuhan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 4,53 persen per tahunnya, namun tingkat pertumbuhan ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumbuh rata-rata 5,24 persen per tahun pada periode yang sama.

Selain tantangan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, Kabupaten Kulon Progo di masa depan merupakan satu-satunya daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peran yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di selatan wilayah Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan telah dimulainya pembangunan beberapa proyek besar yaitu: Pembangunan Bandar Udara Internasional Baru, Pelabuhan Tanjung Adi Karto, dan Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja dan Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Sentolo. Pengembangan proyek-proyek tersebut sinergis dan telah sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta sesuai dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011 – 2025.

Salah satu proyek besar yang akan dilaksanakan yaitu Pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta (New Yogyakarta International Airports). Bandara baru ini akan menggantikan Bandara Adisutjipto yang sudah tidak dapat menampung perkembangan jumlah penumpang yang naik tiap tahunnya. Pembangunan bandara baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Menghadapi hal tersebut agar proses perencanaan pembangunan ke depan dapat dilakukan dengan lebih baik diperlukan alat analisis yang lebih komprehensif, seperti analisis input-output yang dapat melihat hubungan antarsektor ekonomi. Selain itu, dapat dilakukan peramalan bagaimana dampak dari suatu kebijakan terhadap perekonomian suatu daerah. Dalam hal ini akan dianalisis bagaimana dampak Pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta (New Yogyakarta International Airport) terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian sebelumnya, penulis mengidentifikasi perlunya dilakukan penyusunan Tabel Input-Output untuk Kabupaten Kulon Progo dalam rangka perencanaan pembangunan. Tabel Input-Output yang disusun kemudian dapat digunakan untuk menentukan sektor apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Kulon Progo, kemudian juga dianalisis bagaimana dampak pembangunan bandar udara internasional baru terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan Tabel Input-Output dan mengetahui bagaimana estimasi dampak pembangunan bandara internasional baru terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini nantinya akan menyusun Tabel Input-Output Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dengan metode nonsurvei yaitu dengan menurunkan Tabel Input-Output Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan metode RAS. Berdasarkan Tabel Input-Output Kabupaten Kulon Progo hasil estimasi kemudian akan ditentukan sektor yang menjadi unggulan, dan selanjutnya akan dianalisis bagaimana dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode tahun 2010—2015 ditambah data lain untuk melengkapi analisis. Proses penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Input-Output.

Analisis Deskriptif Tabel Input-Output Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Tabel Input-Output Kulon Progo 2015 hasil estimasi diperoleh dari proses menurunkan Tabel Input-Output Provinsi DIY Tahun 2010 dengan menggunakan metode RAS yang dilakukan dengan bantuan software Python IO (PyIO). Namun sebelum dilakukan metode RAS terlebih dahulu dilakukan agregasi dari 83 sektor yang terdapat pada Tabel IO Provinsi DIY menjadi 41 sektor. Agregasi dilakukan untuk memudahkan analisis sekaligus menyesuaikan dengan klasifikasi sektor menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2015. Pada tabel berikut disajikan klasifikasi sektor yang baru yang menjadi dasar dalam melakukan agregasi pada Tabel Input-Output.

Berdasarkan Tabel IO Kulon Progo 2015, total permintaan mencapai Rp14,303 triliun. Terdiri dari Rp6,641 triliun permintaan antara dan Rp7,662 triliun permintaan akhir. Jumlah permintaan akhir ini lebih besar daripada permintaan antara mengindikasikan bahwa output produksi barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo cenderung digunakan untuk konsumsi langsung masyarakatnya. Tabel 4.10 menunjukkan 10 sektor dengan

kontribusi permintaan antara, permintaan akhir dan permintaan total yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

Dilihat dari struktur permintaan, sektor konstruksi dan sektor industri makanan dan minuman secara berurutan merupakan memberikan kontribusi yang paling besar pada struktur permintaan antara, permintaan akhir dan permintaan total. Sektor konstruksi memberikan kontribusi permintaan antara sebesar Rp0,73 triliun atau 10,97 persen dan permintaan akhir sebesar Rp1,3 triliun atau 16,97 persen, dan total permintaan sebesar Rp2,03 triliun atau 14,18 persen. Sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terhadap permintaan antara sebesar Rp0,66 triliun atau 9,99 persen, permintaan akhir sebesar Rp0,83 triliun atau 10,79 persen dan permintaan total sebesar Rp1,49 triliun atau 10,42 persen.

Kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi permintaan antara sebesar Rp0,45 triliun atau 6,74 persen, permintaan akhir sebesar Rp0,82 triliun atau 10,65 persen dan permintaan total sebesar Rp1,26 triliun atau 8,83 persen. Sektor penyediaan makanan dan minuman memberikan kontribusi pada permintaan antara sebesar Rp0,52 triliun atau 7,85 persen, permintaan akhir sebesar Rp0,61 triliun atau 7,96 persen dan permintaan total sebesar Rp1,13 triliun atau 7,91 persen. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi pada permintaan antara sebesar Rp0,35 triliun atau 5,34 persen, permintaan akhir sebesar Rp0,63 triliun atau 8,18 persen, dan permintaan total sebesar Rp0,98 triliun atau 6,86 persen. Sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pada permintaan antara sebesar Rp0,55 triliun atau 8,35 persen, permintaan akhir sebesar Rp0,38 triliun atau 5,02 persen dan permintaan total sebesar Rp0,94 triliun atau 6,56 persen.

Keenam sektor di atas bersama-sama telah memberikan kontribusi kepada permintaan total lebih dari 50 persen. Apabila ditambahkan 4 sektor berikutnya yaitu: sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, sektor pertanian tanaman pangan, sektor real estate, dan sektor angkutan, maka sumbangan terhadap struktur permintaan antara, permintaan akhir dan permintaan total sebanyak lebih dari 75 persen.

Analisis Dampak Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Bandara NYIA direncanakan memiliki landasan pacu sepanjang 5.400m x 525m, dengan luas tersebut dapat didarati oleh pesawat berbadan besar sekelas Airbus 340 atau B777. Kapasitas terminal memiliki luas 105.500m² untuk terminal penumpang yang dapat menampung sampai dengan 12 juta penumpang per tahun. Pembangunan

bandara NYIA sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura I dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019 ini memerlukan lahan seluas sekitar 600 hektar. Investasi yang diperlukan untuk pembangunan bandara ini diperkirakan mencapai Rp9,3 triliun (www.tempo.co.id, 24 Agustus 2016) dengan hampir separuhnya merupakan biaya pembebasan lahan.

Selain bangunan kompleks bandara, juga akan didukung dengan pembangunan infrastruktur lainnya untuk membentuk pusat pertumbuhan di wilayah sekitar bandara, yaitu dengan membangun Airport City yang terdiri dari kompleks perkantoran, pertokoan, dan penginapan. Pembangunan kompleks bandara ini juga akan didukung dengan pembangunan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang kelancaran arus transportasi dari dan menuju bandara.

Sektor konstruksi dipilih karena dianggap mewakili sektor yang langsung terkena dampak pembangunan bandara. Dari hasil perhitungan angka pengganda output, sektor konstruksi memiliki nilai pengganda output sebesar 2,17237 artinya jika terjadi peningkatan permintaan akhir terhadap sektor konstruksi sebesar satu juta rupiah, maka output pada sektor-sektor lain akan meningkat sebesar Rp2.172.370. Apabila terjadi peningkatan permintaan akhir yakni pembangunan Bandara NYIA dengan investasi senilai Rp9,3 triliun akan meningkatkan output total Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp34,51 triliun. Nilai ini berasal dari tambahan output sebesar Rp20,20 triliun sebagai akibat pembangunan bandara tersebut. Peningkatan output yang terjadi ini setara dengan kenaikan 141,33 persen dari output total sebelum ada pembangunan bandara NYIA yaitu sebesar Rp14,30 triliun.

Pembangunan bandara baru di Kulon Progo selain memberi dampak positif yang ditunjukkan dengan peningkatan total output sebesar 141,33 persen dari sebelumnya juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian Kulon Progo. Lokasi bandara baru yang akan dibangun ini berada di Kecamatan Temon yang terdiri dari lima desa yaitu: Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebon Rejo. Dari kelima desa tersebut sebagian besar merupakan lahan pertanian yang selama ini ditanami tanaman cabai merah oleh penduduk setempat.

Menurut hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas lahan pertanian yang terkena dampak pembangunan bandara seluas 421,54 hektar atau sekitar 70 persen dari kebutuhan lahan pembangunan bandara. Produktivitas tanaman cabai merah di Kecamatan Temon menurut data BPS pada tahun 2015 sebesar 10,81 ton per hektar atau jika dihitung menggunakan luas lahan pertanian 421,54 hektar, maka produksinya sama dengan 4.619,9 ton. Jika menggunakan asumsi harga cabai per kilogram Rp19.500,- pada level petani berarti nilainya mencapai

Rp90,09 miliar. Dengan demikian total output Kabupaten Kulon Progo dengan adanya pembangunan bandara baru ini akan berkurang sebanyak Rp90,09 miliar.

Analisis input-output yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dampak positif dan negatif pembangunan bandara yaitu dengan mengurangi nilai investasi untuk pembangunan bandara dengan nilai produksi cabai merah yang berkurang akibat hilangnya lahan pertanian. Dengan adanya dampak negatif pembangunan bandara yaitu berkurangnya lahan pertanian yang selama ini menghasilkan cabai merah senilai Rp90,09 miliar, tambahan output yang tercipta sebagai akibat kenaikan permintaan akhir menjadi berkurang 1,54 persen. Kenaikan output total menjadi Rp34,29 triliun atau meningkat 139,79 persen, nilai ini lebih rendah dibandingkan output total sebelumnya yaitu 141,33 persen atau senilai Rp34,51 triliun.

Pembangunan Bandara NYIA Memberi Dampak Kenaikan Output

Secara umum struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh sektor konstruksi dan sektor jasa pendidikan. Sektor konstruksi memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan permintaan dan output, sedangkan sektor jasa pendidikan merupakan penyumbang paling besar dalam pembentukan nilai tambah bruto.

Apabila dilihat dari keterkaitan antarsektor, sektor jasa pertanian dan perburuan adalah sektor yang memiliki keterkaitan ke depan paling tinggi. Sedangkan untuk keterkaitan ke belakang, sektor pengadaan listrik dan gas menempati urutan pertama.

Penentuan sektor unggulan menggunakan kriteria Rasmussen/Hirschman dibagi ke dalam kategori sektor yang memiliki Indeks Daya Penyebaran (IDP) paling tinggi yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) paling tinggi yaitu sektor konstruksi. Artinya dua sektor ini layak dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan karena memiliki pengaruh yang besar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat dari analisis angka pengganda output, maka sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang memiliki angka pengganda output yang paling tinggi. Apabila dilihat dari analisis angka pengganda lapangan pekerjaan, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati urutan pertama sektor yang memiliki angka pengganda lapangan pekerjaan paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan Bandara NYIA memberikan dampak kenaikan output secara keseluruhan sebesar 141,33 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan output ini diukur melalui

pengaruhnya terhadap kenaikan permintaan pada sektor konstruksi. Namun demikian terdapat dampak negatif pembangunan bandara yaitu berkurangnya lahan pertanian yang selama ini ditanami tanaman cabai merah. Nilai produksi tanaman cabai merah dari lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara mencapai Rp90,09 miliar sehingga kenaikan output total berkurang menjadi 139,79 persen dari output total sebelum ada pembangunan bandara.

Perlu penggunaan Data untuk Memperkuat Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan perlu diperkuat dengan penggunaan data yang lebih komprehensif seperti penggunaan Tabel Input-Output. Tabel ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar sektor dalam perekonomian, sehingga dengan sumber daya yang terbatas penentuan prioritas pembangunan dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan paling besar di antara sektor lainnya. Dalam konteks sistem perencanaan, penggunaan Tabel Input-Output akan memperkuat pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan dalam sektor konstruksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan peningkatan output yang cukup tinggi. Oleh karena itu, prioritas pembangunan pada sektor ini masih diperlukan karena dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dalam suatu daerah.

**ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL
TERHADAP KESEJAHTERAAN DI
INDONESIA**

**ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL IMPACT ON
WELFARE IN INDONESIA**

Nama : Jumirah
Unit Kerja : Biro Adm. Perekonomian Dan SDA Setda DIY
Pemprov DIY
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan di Indonesia. Modal Sosial diukur dari tiga indikator yaitu indeks kepercayaan (trust), indeks kerjasama (cooperativeness) dan jejaring sosial (network). Kesejahteraan diukur dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan (food) dan bukan makanan (non food). Data yang digunakan adalah data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 (IFLS4) dan 2014 (IFLS5). Dengan menggunakan metode Instrumental Variabel (IV) dapat diketahui bahwa modal sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, ukuran rumah tangga (HHsize), wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan dan Jawa/Luar Jawa) juga mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan.

Kata kunci: Modal Sosial, Kesejahteraan, Instrumental Variabel (IV), Endogenitas, IFLS

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the impact of social capital on welfare in Indonesia. Social capital is measured from three indicators, namely, trust index, cooperativeness index and social network. Welfare is measured from household expenditures for food and non-food. The data is acquired from Indonesia Family Life Survey (IFLS) at 2007 (IFLS4) and 2014 (IFLS5). Using Instrumental Variables (IV) method, it can be concluded that social capital has a significant impact on welfare. In addition, other factors such as education, age, sex, household size and residential characteristic (urban/rural and Java/Outside Java) also have significant impact on welfare.

Keyword: Social Capital, Welfare, Instrumental Variabel (IV), Endogeneity, IFLS

Modal sosial dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan seseorang. Hubungan antara modal sosial dengan kesehatan mental pernah diteliti oleh Kawachi dan Berkman (2001). Jaringan sosial mempunyai pengaruh penting dalam kesehatan psikologis seseorang. Partisipasi dalam jaringan sosial dapat memengaruhi kesehatan psikologis, karena membuat anggotanya memperoleh bimbingan normatif tentang perilaku kesehatan yang relevan, seperti perilaku merokok dan olahraga teratur yang nantinya berpengaruh terhadap kesehatan mental. Akses terhadap informasi kesehatan juga lebih mudah didapatkan, ketika seseorang mengikuti jaringan sosial. Keikutsertaan dalam jaringan sosial juga mengakibatkan keadaan psikologis menjadi lebih baik, karena merasa memiliki tujuan yang sama, kenyamanan, dan pengakuan diri. Partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, keterlibatan dalam jaringan sosial, meningkatkan kemungkinan mengakses berbagai bentuk dukungan yang pada gilirannya dapat mencegah dari rasa stres.

Selain mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, modal sosial juga berpengaruh terhadap kesejahteraan. Wetterberg (2005) menemukan bahwa semakin banyak jumlah ikatan sosial yang diikuti, maka dapat meningkatkan potensi untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak. Sebagai contoh, keikutsertaan dalam keanggotaan PKK dapat meningkatkan potensi lebih besar untuk mendapatkan bantuan jika ada program bantuan dari Pemerintah. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Keikutsertaan dalam organisasi masyarakat yang dimandatkan Pemerintah seperti PKK, Dasawisma, Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan akses bantuan dari Pemerintah.

Penemuan Wetterberg tentang modal sosial ini sejalan dengan Grootaert (1999). Modal sosial dapat meningkatkan akses kredit yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Hal ini karena dengan mengikuti partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat dengan lebih mudah mendapatkan informasi termasuk informasi kredit. Modal sosial meningkatkan kesejahteraan melalui kemudahan mendapatkan informasi, mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi keputusan kolektif (Grootaert, 1999).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2014), jaringan sosial seseorang membantu dalam mendapatkan lebih banyak informasi. Manfaat lain jaringan sosial dapat memengaruhi akses terhadap kredit, atau faktor lain yang meningkatkan produktivitas rumah tangga. Rumah tangga yang kurang produktif akan cenderung berinteraksi dengan rumah tangga yang lebih produktif, untuk menambah sumber daya (misalkan informasi) dalam upaya peningkatan produktivitas. Dengan kata lain, rumah

tangga lebih produktif dapat bekerja sama dengan rumah tangga yang kurang produktif, untuk meningkatkan produktivitas secara bersama-sama.

Di Indonesia, bentuk modal sosial sangat beragam. Dari berbentuk formal seperti, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), perkumpulan ibu-ibu (PKK), karang taruna, dharmawanita, dan dasawisma, sedangkan yang berbentuk informal misalnya seperti arisan. Interaksi hubungan manusia yang berbentuk rasa saling percaya (trust), kerjasama (cooperativeness) dan jejaring sosial (social network) inilah, yang diduga mempunyai peran dalam kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah modal sosial yang terdiri dari rasa saling percaya, kerja sama dan jejaring sosial mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi bahwa modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan kerja sama diduga mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Namun demikian, penelitian yang berkenaan dengan tema tersebut masih sangat jarang dilakukan untuk kasus di Indonesia yang mempunyai karakteristik-karakteristik sosio-ekonomi dan demografi yang berbeda dengan negara lain, sehingga dapat memberikan implikasi yang berbeda juga. Hal ini terutama berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang tidak hanya dipengaruhi oleh modal fisik (capital) dan modal manusia (human capital). Selain itu, keunikan modal sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dengan karakteristik modal sosial di negara-negara lain merupakan study gap yang menarik untuk diteliti. Lebih jauh, meskipun berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat peningkatan modal kapital dan modal manusia (human capital), namun kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan latar belakang sosio-ekonomi yang hampir sama. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan menjadi penting untuk dianalisis, sebagai salah satu masukan pembangunan yang dapat menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah Apakah modal sosial berupa rasa saling percaya (trust), kerja sama (cooperativeness) dan jejaring sosial (social network) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan di Indonesia? Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan modal sosial berupa rasa saling percaya (trust), kerja sama (cooperativeness) dan jejaring sosial (social network) terhadap kesejahteraan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari RAND Corporation (www.rand.com).

org/labor/FLS/IFLS). Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan memanfaatkan data survei Indonesia Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2007 (IFLS4) dan 2014 (IFLS5). Data IFLS merupakan data longitudinal yang telah dikumpulkan selama 5 kali survei, yaitu tahun 1993 (IFLS1), tahun 1997-1998 (IFLS2), tahun 2000 (IFLS3), tahun 2007 (IFLS4), dan tahun 2014 (IFLS5). Data IFLS adalah data yang sangat kaya dan lengkap, yang merupakan representasi lebih dari 80 persen populasi Indonesia. Survei IFLS meliputi informasi mengenai karakteristik demografi individu, kondisi sosial ekonomi individu atau rumah tangga, kondisi sosio-demografi, kondisi kesehatan individu, modal sosial, asuransi yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga, informasi tentang ibu hamil dan melahirkan, informasi yang berkenaan dengan anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal rumah tangga, dan kondisi infrastruktur tempat tinggal rumah tangga pada umumnya.

Modal Sosial Adalah Determinan Eksogen Dari Kesejahteraan Rumah Tangga

Kesejahteraan yang dalam penelitian ini diukur dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan (food) dan bukan makanan (nonfood), dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adepoju dan Oni (2012) menggunakan faktor sosio-demografis dan sosio-ekonomis selain modal sosial dalam mengukur pengeluaran rumah tangga. Adepoju dan Oni (2012) menggunakan variabel karakteristik rumah tangga seperti lama pendidikan, usia, jenis kelamin, ukuran rumah tangga (household size), rumah tangga pertanian serta jarak antara desa dengan kota terdekat.

Hal ini juga selaras dengan penelitian Adepoju dan Oni (2012) yang menemukan bahwa terjadi peningkatan nilai koefisien dari indeks modal sosial dalam metode 2SLS jika dibandingkan dengan estimasi OLS, yaitu dari 0,0190 menjadi 0,0280. Hal ini mengindikasikan bahwa, tidak adanya kausalitas terbalik dimana terjadi peningkatan nilai koefisien indeks modal sosial dalam metode IV dibandingkan dengan estimasi metode OLS.

Narayan dan Pritchett (1999) juga menemukan hal yang sama. Nilai estimasi dari metode IV lebih besar jika dibandingkan dengan metode ordinary least square (OLS). Hal ini mendukung bahwa modal sosial adalah determinan eksogen dari income.

Interpretasi

Variabel modal sosial yang diukur dari 3 dimensi yaitu rasa saling percaya (trust), kerja sama (cooperativeness) dan jejaring sosial (network) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (pengeluaran rumah tangga). Kerja sama (cooperativeness) dan

jejaring sosial (network) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga hanya variabel rasa saling percaya (trust) yang mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga.

Jejaring Sosial (Networking)

Variabel jejaring sosial yang diproksi dari partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kesejahteraan. Berdasarkan metode IV, kenaikan satu partisipasi dalam kegiatan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 11,7 persen *ceteris paribus*. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan hasil regresi OLS yang hanya sebesar 0,033 yang berarti bahwa kenaikan partisipasi sebesar 1 unit akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 3,3 persen *ceteris paribus*.

Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan masyarakat (community meeting) di semua tingkat desa, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, LMD/LKMD, kerja bakti rutin seperti Jumat bersih dan bersih desa, program perbaikan kampung, kegiatan kelompok pemuda seperti Karang Taruna, kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kebaktian, siskamling, posyandu dan PKK terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena individu yang lebih banyak mengikuti partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses informasi mengenai misalnya lowongan pekerjaan, bantuan Pemerintah dan akses kredit yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wetterberg (2005) yang menemukan bahwa individu yang memiliki lebih banyak ikatan sosial (social ties) akan mempunyai lebih banyak kemudahan untuk mengakses sumber daya daripada yang memiliki sedikit jaringan. Dampak dari berbagai macam ikatan sosial (social ties) dapat membantu dalam mengakses sumber daya dan peran dari organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat dari pemerintah (mandatory group) menunjukkan peran efektif dalam mengakses bantuan Pemerintah.

Kerja sama (Cooperativeness)

Kerja sama merupakan salah satu indikator modal sosial yang diukur dari kemauan individu bekerjasama dengan orang lain. Kenaikan kerja sama sebesar 1 persen, akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 0,2 persen *ceteris paribus*. Fukuyama (1995) berpendapat bahwa kerja sama sangat penting untuk menjelaskan perbedaan pola kinerja ekonomi nasional. Kerja sama menyebabkan kemudahan dalam bertransaksi. Dalam pandangan Fukuyama, perilaku ekonomi koperasi didukung terutama oleh

budaya khusus, dengan budaya kepercayaan. "Trust" adalah hasil eksplorasi hubungan antara kepercayaan dan kerja sama.

Rasa Saling Percaya (Trust)

Rasa saling percaya merupakan salah satu indikator modal sosial yang diukur dari tingkat kepercayaan individu terhadap orang lain. Pengukuran rasa saling percaya ini diukur dengan menggunakan indeks seperti pada persamaan 1.1. Meningkatnya rasa saling percaya (trust) sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan turun sebesar 0,3 persen *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu semakin tinggi rasa saling percaya (trust), akan dapat menurunkan biaya transaksi. Biaya transaksi ini digambarkan dengan pengeluaran rumah tangga.

Menurut Coleman (1988) rasa kepercayaan terhadap seseorang dapat mengurangi risiko dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap seseorang, maka risiko kegagalan dalam pengembalian kredit dapat berkurang. Seseorang akan lebih memilih untuk bertransaksi dengan orang yang dikenal dan dipercaya karena akan mengurangi risiko kegagalan dalam transaksi.

Kepercayaan dapat mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi. Transaksi ekonomi yang dilakukan dengan seseorang yang telah dipercaya dapat mengurangi biaya negosiasi, selain itu juga mengurangi risiko kegagalan. Rasa saling percaya satu sama lain akan membuat transaksi ekonomi menjadi lebih efisien karena akan mengurangi risiko dalam kegagalan kontrak, gugatan (litigation), penegakan hukum dan birokrasi (Fukuyama, 1995).

Human Capital (Lama Pendidikan)

Variabel human capital diukur dari lama pendidikan yang ditempuh oleh individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa, keikutsertaan dalam partisipasi kegiatan kemasyarakatan, didominasi oleh individu yang memiliki lama pendidikan 6 tahun atau setara lulusan sekolah dasar, yang selanjutnya disusul oleh individu yang mempunyai lama pendidikan 7-9 tahun atau setara lulusan SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa individu dengan level pendidikan yang rendah lebih banyak waktu luang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Beard (2004) menemukan bahwa wanita yang memiliki tingkat pendidikan dan melek huruf yang rendah, cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, sedangkan Pria yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung mengurangi waktu untuk berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode instrumental variable (IV), diperoleh hasil bahwa kenaikan lama pendidikan sebesar satu tahun maka akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 5,5 persen *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adepoju dan Oni (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan memberikan kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan dan memilih pekerjaan.

Karakteristik Wilayah

Karakteristik wilayah digunakan untuk melihat sejauh mana wilayah tempat tinggal berpengaruh terhadap kesejahteraan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 karakteristik wilayah yaitu perkotaan/pedesaan dengan wilayah Jawa dan luar Jawa. Penggunaan karakteristik wilayah ini, karena diduga individu yang tinggal di daerah perkotaan cenderung mempunyai kesejahteraan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena kemudahan akses terhadap sumber daya. Individu yang tinggal di daerah perkotaan lebih mudah mengakses sumber daya jika dibandingkan dengan individu yang tinggal di daerah pedesaan. Selain karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan, juga digunakan karakteristik wilayah Jawa dan luar Jawa. Pembagian wilayah ini karena diduga terjadi gap atau ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Interaction Term Partisipasi Dengan Lama Pendidikan (Education)

Penelitian ini menunjukkan pada tingkat partisipasi sama, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kesejahteraan. Dalam penelitian ini, bahwa responden paling banyak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat adalah yang berpendidikan rendah. Keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat lebih memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan bagi yang memiliki pendidikan rendah.

Interaction Term Partisipasi dengan Urban

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah partisipasi yang diikuti seseorang yang tinggal di perkotaan akan mempunyai kesejahteraan 19,4 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa di pedesaan, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan masyarakat (*community meeting*) di semua tingkat *dasa wisma*, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan,

LMD/LKMD, karang taruna, pengajian dan kebaktian, siskamling, posyandu dan PKK, lebih efektif mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan.

Krishna dan Shrader (1999) menemukan bahwa tingkat modal sosial secara signifikan lebih tinggi di pedesaan bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Masyarakat dengan tingkat modal sosial tinggi lebih mungkin untuk menerima bantuan dari LSM dan hampir empat kali lebih mungkin untuk menerima bantuan dari pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

Modal Sosial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Modal sosial yang diukur dari indikator jejaring sosial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak seseorang mengikuti partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, maka tingkat kesejahteraan semakin naik. Begitupun dengan modal sosial berupa kerja sama (*cooperativeness*), semakin seseorang mau bekerja sama dengan orang lain, maka semakin naik pula tingkat kesejahteraan seseorang. Di sisi lain, modal sosial yang berupa rasa saling percaya (*trust*), mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Ini mengindikasikan bahwa modal sosial yang berupa rasa saling percaya (*trust*) dapat mengurangi biaya transaksi yang berimbas pada menurunnya pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kepercayaan dapat mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi. Transaksi ekonomi yang dilakukan dengan seseorang yang telah dipercaya dapat mengurangi biaya negosiasi dan juga mengurangi risiko kegagalan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan adalah modal manusia (*human capital*) yang diukur dari lama pendidikan (*years of education*), karakteristik rumah tangga yaitu usia, jenis kelamin, dan ukuran rumah tangga (*household size*) serta karakteristik wilayah yaitu perkotaan/pedesaan dan Jawa/luar Jawa.

Kenaikan satu partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 11,7 persen. Kenaikan kerja sama sebesar 1 persen, akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 0,2 persen *ceteris paribus*. Meningkatnya rasa saling percaya (*trust*) sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan turun sebesar 0,3 persen *ceteris paribus*. Rasa saling percaya akan membuat transaksi ekonomi menjadi lebih efisien karena akan mengurangi biaya negosiasi dan mengurangi risiko dalam kegagalan kontrak.

THE IMPACT OF LEVIES ABOLITION POLICY ON FISH CONSUMPTION IN INDONESIA

DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERHADAP KONSUMSI IKAN DI INDONESIA

Nama : Pramahdiansyah
Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah
Kabupaten Bantul
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM-JEPANG
.

ABSTRACT

This research is mainly aimed to evaluate the effectiveness of Levies Abolition Policy on fisheries sector -which was implemented in Indonesia in 2010- towards fish consumption in Indonesia. Three out of five waves of Indonesian Family Life Survey (IFLS) panel data were utilized as the main data in this research. By using difference in differences methodology, this research found that treated households experienced an increase in their fish consumption -both for fresh fish and salted/smoked fish consumption- due to the policy implementation in 2010. Therefore, this study concluded that the policy was effective enough in improving fish consumption of the treated households in Indonesia. Policy makers are proposed to further implement such policy in other regions to increase more the national fish consumption level. The policy could also be elaborated with other programs as the package to enhance the effect of the policy towards fish consumption.

Keywords: Levies Abolition Policy, fisheries sector, difference in differences, fish consumption

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan penghapusan retribusi pada sektor perikanan yang diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2010 terhadap konsumsi ikan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga gelombang data dari lima gelombang data IFLS (Indonesian Family Life Survey) sebagai data utama yang merupakan data panel. Dengan menggunakan salah satu metode evaluasi dampak kebijakan yaitu metode Difference in Differences, penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga yang tinggal di provinsi yang menerapkan kebijakan penghapusan retribusi pada sektor perikanan mengalami peningkatan dalam konsumsi ikan mereka baik pada konsumsi ikan segar maupun ikan asin/asap. Oleh sebab itu, penelitian ini berkesimpulan bahwa kebijakan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan konsumsi ikan rumah tangga terdampak di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menghimbau pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan penghapusan retribusi pada sektor perikanan di provinsi atau di daerah lain untuk lebih meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat dikombinasikan dengan program pendukung lain agar kebijakan ini dapat mempunyai dampak positif yang lebih baik terhadap peningkatan konsumsi ikan rumah tangga di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan penghapusan retribusi, sektor perikanan, difference in differences, konsumsi ikan

Fisheries is one of economic sectors which has quiet high role in human food supply. Moreover, related to fisheries role in global food supply, at least -in the past- there were 2 actions adopted to strengthen the role: (1) The Promotion of Fish in the Campaign Against Malnutrition by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1984 and (2) Declaration and Plan of Action at an International Conference on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food Supply committed by 95 states in 1995 (Kent, 1997). Later on, by realizing one of the world's big challenges which is how to provide enough food for almost 9 billion people around the world by 2050 with respect to natural resources availability, climate change, and economic uncertainty, the 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted in 2015 by UN member states in which fisheries contribution to human food supply is promoted by implementing sustainable development (FAO, 2016).

Parallel with the roles in human food supply, fisheries sector also has significant importance in fulfilling human nutrition needs, especially in animal protein fulfilment. As stated by FAO (2016), 150 grams of fish provide around 50-60% of daily protein requirements of an adult. Furthermore, many fish species exceed the Recommended Nutrient Intakes (RNI) for infant, young children, pregnant and lactating woman (Thilsted et al., 2016). Mozaffarian & Rimm (2006); Sioen, Matthys, De Backer, Van Camp, & De Henauw (2007) also indicated that consuming fish at least twice a week has significant good impacts on human health since fish contain high protein, low saturated fat, and numerous healthy nutrients (Tomić, Matulić, & Jelić, 2016).

Despite of fisheries sector high contribution in global food supply which reflects high production in producer countries and its valuable nutrition in improving people healthy diets, many major producer countries in fisheries sector experienced low fish consumption among the local people. One of plausible explanations is that many fisheries policies in those states are highly constructed only in both enhancing production and improving their fisheries products competitiveness in international market rather than in improving fisheries products accessibility to the local people (Thilsted et al., 2016). Later on, Thilsted et al. (2016) stated that a nutrition-sensitive policy on fisheries sector, by which can make fish more accessible to local people, is needed to improve fish consumption by still maintaining fish availability. Besides maintaining fish availability, reducing fish prices can be considered as one of instruments to increase fish accessibility that can improve fish consumption since variations in fish prices can affect consumers fish consumption (Tomić et al., 2016).

Policy On The Elimination Of Fishery Sector Levies

Regarding to this nutrition-sensitive policy on fisheries sector, to our knowledge, there were limited studies discussed about the effectiveness of this type of policies in enhancing fish consumption. Many studies mainly discussed about the impacts of natural shocks, health information exposure and fisheries sector expansion toward fish consumption. Chaijaroen (2015) indicated that natural shock-the 1998 coral bleaching in Indonesia- reduced fish consumption expenditure among affected households. While Roosen, Marette, Blanchemanche, & Verger (2006) argued that the exposure of risk information on health reduced the fish consumption even though only in small quantity. In addition, Toufique & Belton (2014) reported that aquaculture development in Bangladesh leads to an increase in fish consumption among local people.

Realized that Indonesia -as one of major producers in fisheries sector- experienced such a high fisheries production but low fish consumption -especially among Southeast Asia countries, as shown in Figure 1 and Figure 2- and also the fact that Indonesia implemented one example of nutrition-sensitive policies on fisheries sector in 2010 -called Levies Abolition Policy- to improve fish consumption among local people, then this paper tries to assess the effectiveness of the policy in improving fish consumption by evaluating the impact of Levies Abolition Policy on fisheries sector in Indonesia on fish consumption. By doing so, this paper hopes can fill the gap in the existing literatures as mentioned before.

In order to improve fish consumption among local people, Indonesia's central government through Ministry of Marine Affairs and Fisheries assigned 11 provincial governments to implement Levies Abolition Policy on fisheries sector in 2010. Not all 33 provincial governments were assigned due to high provincial- revenue constraint from fisheries levies, those 11 assigned-provinces experienced lower revenue from fisheries levies while the other 22 unassigned-provinces recorded higher compare to national average. Since by implementing the policy means that the province will experience such a decrease in regional revenue then Indonesia's central government -in 2010- only assigned those 11 provinces because in Indonesia's central government perspective those 11 have higher willingness to implement the policy than those 22 provinces. This condition then provides opportunity for this paper to distinguish between treatment and control provinces by which this paper can evaluate the impact of the policy, those 11 assigned- provinces are considered as treatment provinces while the other 22 are included in control provinces.

By applying Levies Abolition Policy on fisheries sector, those 11 assigned-provinces need to abolish 4 types of provincial fisheries levies: fisheries permit levy, fish port levy,

fish auction levy, and fish market levy which contribute around 25-35% of fisheries production costs. By performing this policy, Indonesia's central government hoped that the regional fisheries production costs will decrease and leads to a decrease in regional fish prices that finally can improve fish consumption among people in assigned-provinces especially. In addition, this policy was targeted on the prices of two main fish commodities consumed by people which are fresh fish and salted/smoked fish. As one of the direct consequences by performing the policy in 2010, the prices of those two fish commodities in assigned- provinces were decreased gradually in the following years, as shown in Figure 3 and Figure 4. But still, it remains unclear yet whether the policy is statistically significant to improve fish consumption or not. This paper tries to prove the effectiveness of the policy in improving fish consumption as well as tries to fill the gap in the existing literatures as mentioned earlier.

The objective of this study is to evaluate the effectiveness of Levies Abolition Policy -as one example of nutrition-sensitive policies on fisheries sector- towards fish consumption in Indonesia. This study mainly focuses in evaluating household's fish consumption on fresh fish and salted/smoked fish since the policy was only targeted on those two main fish commodities consumed by people.

This study provides an empirical evidence about the effectiveness of one example of nutrition-sensitive policies on fisheries sector -namely Levies Abolition Policy- in improving fish consumption in Indonesia. By providing the evidence, this research then can contribute in giving additional considerations and also suggestions for policy makers especially in fisheries sector in Indonesia to further improve fish consumption among Indonesians.

The Policy on the Elimination of Fishery Sector Levies in Indonesia Can Be Improved

This research may indicate that Levies Abolition Policy on fisheries sector in Indonesia in 2010 can effectively improve fish consumption among Indonesians. First, based on Table 7, it can be seen that treated households experienced an increase both in their fresh fish and salted/smoked fish consumption quantity in post-treatment period, in which treated households not only consumed fresh fish 0.184 kg/capita/week higher than untreated households but those treated households also consumed salted/smoked fish 0.031 kg/capita/week higher than untreated households. Second, based on Table 7, since the pre-treatment period estimation results show that there is no significant difference between treated and untreated households both in term of fresh fish and salted/smoked fish consumption quantity, then this research may denote that

the changes in fresh fish and salted/smoked fish consumption of treated households in post-treatment period were occurred due to the policy intervention in 2010.

Furthermore, based on Table 7, this study may also assume that treated households prefer to consume chicken/duck meat rather than salted/smoked fish since those treated households consumed more chicken/duck meat (0.172 kg/capita/week) compare to salted/smoked fish consumption (0.031 kg/capita/week) in post-treatment period. One plausible reason for this preference is the price difference between chicken/duck meat and salted/smoked fish. Treated households tend to consume more chicken/duck meat rather than salted/smoked fish since the price of chicken/duck meat is lower than the price of salted/smoked fish.

In addition, by observing the estimation results on Table 8, this research may strengthen the finding that Levies Abolition Policy on fisheries sector in Indonesia in 2010 can effectively improve fish consumption among Indonesians. First, it can be seen that treated households experienced an increase both in their fresh fish and salted/smoked fish consumption probability in post-treatment period, in which the weekly probability in consuming fresh fish among treated households is 3.10 % higher than untreated households while the weekly probability in consuming salted/smoked fish among treated households is 2.70 % higher than households in control group. Second, since the pre-treatment period estimation results show that there is no significant difference between treated and untreated households both in term of fresh fish and salted/smoked fish consumption probability, then this research may strongly assume that the changes in fresh fish and salted/smoked fish consumption probability of treated households in post -treatment period were existed due to the policy implementation in 2010. Third, chicken/duck meat and egg consumption probability -especially in post-treatment period- are not significantly different between treatment and control group. It means that after the policy implementation in 2010, treated households experienced an increase only in their weekly fresh fish and salted/smoked fish consumption probability while their weekly chicken/duck meat and egg consumption probability were remained the same.

The Fishery Sector Levy Abolition Policy

Based on the estimation results, it can be concluded that Levies Abolition Policy on fisheries sector -which was implemented in Indonesia in 2010- is effective enough in improving fish consumption in Indonesia. Treated households experienced an increase in their weekly fish consumption, both for fresh fish and salted/smoked fish, after the policy implementation. It means that treated households have higher weekly fish consumption than untreated households in post- treatment period. Those treated

households consumed more fish compare to untreated households, 0.184 kg/capita/week for fresh fish consumption and 0.031 kg/capita/week for salted/smoked fish consumption.

In term of preference in consuming fish, treated households prefer to consume chicken/duck meat rather than salted/smoked fish due to the price variations. But still, this study can indicate that those treated households prefer to consume fresh fish rather than both chicken/duck meat and salted/smoked fish. In addition, this research may also indicate that head of household education years, household size, household refrigerator ownership, and household income have positive effect in consuming fish. On the other hand, head of household age, head of household gender (female), and household location (urban) have negative effect in consuming fish.

**PENGARUH BELANJA OPERASI, BELANJA
MODAL, PDRB DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2010 – 2014**

**IMPACT OF OPERATIONAL EXPENSES,
CAPITAL EXPENDITURES, GRDP AND
POVERTY RATE AGAINST HUMAN
DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH SUMATRA
PROVINCE 2010 - 2014**

Nama : Romai Kurniawan
Unit Kerja : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja operasi, belanja modal, PDRB dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Selatan. IPM suatu daerah dapat dijadikan indikator untuk mengetahui seberapa jauh perhatian dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan manusia.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2010-2014. Nilai dari belanja operasi, belanja modal dan PDRB telah dikonstantakan terlebih dahulu dengan menggunakan PDRB Deflator.

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan Generalized Least Squared (GLS) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita, belanja operasi per kapita serta belanja modal per kapita dari sisi pengeluaran pemerintah daerah terhadap IPM di Sumatera Selatan. Sedangkan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Operasi, Belanja Modal, PDRB, Sumatera Selatan, Regresi Data Panel, PDRB Deflator.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of operational expenses, capital expenditure, GRDP and poverty level on Human Development Index (HDI) in South Sumatra. HDI of a region can be used as an indicator to know how far attention and commitment of local government in human development. The analysis method used is panel data regression from 15 regencies / cities in South Sumatera Province in 2010-2014 period. The value of operational expenses, capital expenditures and GDP has been constrained first by using GRDP Deflator.

The result of panel data regression estimation using Generalized Least Squared (GLS) approach shows significant influence between GRDP per capita, per capita operational expenses and capital expenditure per capita from local government expenditure side to HDI in South Sumatera. While the level of poverty does not significantly affect the HDI in South Sumatra.

Keywords: Human Development Index, Operational Expenditure, Capital Expenditure, GRDP, South Sumatra, Panel Data Regression, GDP Deflator.

Konsep pembangunan manusia didefinisikan sebagai usaha perluasan pilihan bagi masyarakat, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai alat pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan dengan produktif (UNDP, 1990).

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau yang dikenal dengan sebutan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom dari Pakistan yang dibantu oleh Gustav Ranis. IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan.

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dasar dari pembangunan manusia. Kesehatan adalah inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dalam pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2004: 404).

Menurut teori public finance Musgrave (1959 dalam Widodo et al. 2011), disebutkan bahwa tidak semua masalah ekonomi mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar. Seperti halnya dengan barang sosial atau barang publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menyediakannya. Aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat kolektif publik dan atau aktivitas tidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan oleh pasar sehingga dalam kaitannya dengan ketiga peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban yang tidak disentuh oleh pasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.

Peran pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik semakin dikuatkan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk dapat mengoptimalkan penggalan potensi sumber pendapatan dan menentukan alokasi secara mandiri prioritas pembangunan sesuai dengan aspirasi lokal dan potensi

yang dimiliki masing-masing daerah untuk mencapai pemerataan pembangunan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barzelay (1991 dalam Sasana, 2012), pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah daerah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan manusia melalui kebijakan fiskal sebagai wujud dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki yakni menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui belanja pemerintah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat tersedia layanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Secara umum perkembangan pembangunan manusia selama ini masih sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak serta merta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, namun kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan masih banyak yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan Kemampuan Fiskal Antar Daerah

Perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Angka pencapaian IPM terus naik dari 64,44 pada tahun 2010 hingga mencapai 66,75 pada tahun 2014. Dengan pencapaian ini Sumatera Selatan berada pada kategori menengah untuk pencapaian IPM dengan nilai maksimal 100, masih jauh berada dibawah angka nasional Indonesia yakni 68,9 pada tahun 2014. Peringkat pencapaian IPM Provinsi Sumatera Selatan secara nasional berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Sedangkan secara wilayah Pulau Sumatera peringkat pencapaian IPM Sumatera Selatan berada pada peringkat 9 dari 10 provinsi di wilayah Pulau Sumatera.

Kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Sumatera Selatan, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka

kemiskinan di Sumatera Selatan. Selain dilihat dari peringkat IPM Sumatera Selatan yang masih rendah, tingkat kemiskinan juga masih tergolong tinggi di Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan sebesar 13,62 persen pada tahun 2014 masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional yakni 10,96 persen.

Selain tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, ternyata pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Sumatera Selatan belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Selatan yang diukur dengan Indeks Wiliamson.

Ketimpangan pembangunan terjadi akibat perbedaan latar belakang daerah terutama potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang digunakan untuk memacu proses pembangunan di masing-masing daerah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menyebabkan adanya perbedaan kemampuan antara daerah yang maju dengan daerah yang terbelakang secara ekonomi dalam memberikan layanan public terhadap masyarakat terutama terkait layanan di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai dua bidang utama dalam usaha peningkatan kesejahteraan manusia.

Paradigma baru pembangunan menempatkan kesejahteraan sebagai indikator kinerja utama. Pertumbuhan ekonomi bukan menjadi tujuan akhir pembangunan, melainkan merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kemampuan fiskal antar daerah dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi menyebabkan perbedaan hasil pencapaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan sehingga pencapaian IPM Sumatera Selatan secara keseluruhan menjadi tidak optimal. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat serta pencapaian IPM Sumatera Selatan yang masih rendah secara nasional sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah diduga belanja operasi per kapita, belanja modal per kapita dan PDRB per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel lain yakni tingkat kemiskinan diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research) dengan tujuan untuk menguji teori dan temuan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan serangkaian pengujian hipotesis untuk menganalisis pengaruh dari variabel belanja operasi per kapita, belanja modal per kapita, PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 – 2014.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda dengan data panel. Teknik regresi berganda dengan data panel dipilih karena dianggap mampu menangkap perilaku dari masing-masing kabupaten/kota dalam mengetahui pengaruh belanja operasi per kapita, belanja modal per kapita, PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010-2014.

Pengaruh Belanja Operasi per Kapita dan Belanja Modal per Kapita terhadap IPM

Koefisien belanja operasi per kapita sebesar 0,00172 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 rupiah belanja operasi per kapita akan meningkatkan IPM sebesar 0,00172. Kemudian koefisien belanja modal per kapita sebesar 0,000943 menunjukkan setiap kenaikan 1000 rupiah belanja modal per kapita akan meningkatkan IPM sebesar 0,000943. Hasil koefisien regresi dari kedua variabel ini sesuai dengan oleh teori dasar penggunaan pergeseran budget line dalam penyediaan barang publik. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang direalisasikan melalui belanja operasi dan belanja modal dalam APBD, maka akan semakin meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Brata (2002), Mirza (2012), Sasana (2012), dan Pratowo (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang dapat dilakukan untuk pembangunan manusia di daerah.

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap IPM

Besaran koefisien PDRB per kapita sebesar 0,000151 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 rupiah PDRB per kapita akan meningkatkan IPM sebesar 0,000151. Temuan ini sesuai dengan penelitian Ranis et al. (2004) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah akan mendorong terciptanya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan manusia. Pada tahap awal pembangunan akan muncul adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang tinggi sebagai akibat belum meratanya pembangunan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan juga dapat diikuti dengan aspek pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang, meskipun menurut Sjafrizal (2008: 108) ketimpangan ini merupakan hal yang wajar terjadi pada awal proses pembangunan di negara-negara berkembang.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM

Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM adalah negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi diduga karena kebijakan pemerintah kepada masyarakat miskin bukanlah pemberian bantuan keuangan atau barang yang secara langsung dapat mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah melalui kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak secara langsung mampu serta merta mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan sebagai ukuran kemiskinan. Meskipun berada di bawah garis kemiskinan, namun pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama pembentukan IPM tetap mampu dipenuhi oleh pemerintah melalui berbagai program yang ditujukan kepada penduduk miskin.

Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang disinergikan dengan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan contoh penanganan terhadap kemiskinan dalam usaha pembangunan manusia. Dengan adanya program ini masyarakat meskipun berada dalam kategori miskin akan mempunyai kemampuan untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara baik.

Secara khusus di Sumatera Selatan 2 program dari pusat ini dijalankan bersama program unggulan daerah yakni berobat gratis dan sekolah gratis yang sudah diterapkan sejak tahun 2009 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme cost sharing. Dasar hukum untuk kedua program tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan peraturan ini Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan

keuangan kepada kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan untuk membiayai program berobat dan Sekolah Gratis bagi masyarakat di seluruh Sumatera Selatan.

Adanya program bantuan pendidikan dan kesehatan memang tidak serta merta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun demikian, kedua program ini secara efektif mampu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi sekolah dan menjamin kelanjutan pendidikan siswa miskin pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, indeks pendidikan sebagai komponen pembentuk IPM pada masyarakat miskin tetap dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat secara umum yang akan mendorong indeks kesehatan sebagai komponen pembentuk IPM di Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah belanja operasi per kapita, belanja modal per kapita dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel lainya yakni tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**EDUCATIONAL GENDER GAP AND
REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA**

**KESENJANGAN PENDIDIKAN GENDER DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
INDONESIA**

Nama : Wahyu Dona Pasa Sulendra
Unit Kerja : Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY
Pemprov DIY
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MEP - UGM-JEPANG

ABSTRACT

This study aims to find the linkage between educational gender gap and regional economic growth in Indonesia. This topic is examined because following the Millennium Development Goals (MDGs), Government of Indonesia has made various efforts to provide equal education to all Indonesians. By issuing legislation and also implementing a number of programs, the government strives for gender equality in education in Indonesia. As a result, gender equality in Indonesia has experienced significant improvement over the past decades. Women's participation in education also increased at all levels of education. Using the latest data from Statistics Indonesia of 458 districts/cities in Indonesia covering the period 2010-2015, this empirical study present cross-section regression on sub-national data using several education variables. The author also run panel data regression, fixed effect method, and system GMM estimation in order to check the relationship between educational gender gap and regional economic growth in Indonesia. From the estimations result, the author concludes that the importance of investment in education is proven to have a positive effect on economic growth. Although the impact of narrowing educational gender gap on Indonesia's economy has not been optimal probably due to the limited number of employment opportunity for women and also a gender gap in employment that still exist in Indonesia.

Keywords: Education, Gender, Economic Growth, GMM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara kesenjangan gender dalam dunia pendidikan dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Topik ini diteliti karena semenjak diterapkannya Millenium Development Goals (MDGs), Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang dan juga melaksanakan sejumlah program, pemerintah mengupayakan kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia. Hasilnya, kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Partisipasi perempuan dalam pendidikan juga meningkat hampir di semua tingkat pendidikan. Dengan menggunakan data terakhir dari BPS terhadap 458 kabupaten / kota di Indonesia yang mencakup periode 2010-2015, penelitian empiris ini menyajikan regresi cross-section pada sub-nasional data dengan menggunakan beberapa variabel pendidikan. Penulis juga melakukan regresi data panel, metode fixed effect, dan sistem GMM untuk mengetahui hubungan antara kesenjangan gender pendidikan dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Dari hasil estimasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pentingnya investasi di bidang pendidikan terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun dampak penyempitan kesenjangan gender pendidikan terhadap perekonomian Indonesia belum optimal kemungkinan disebabkan karena terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan dan juga kesenjangan gender dalam dunia pekerjaan yang masih terjadi di Indonesia.

Kata kunci: pendidikan, gender, pertumbuhan ekonomi, GMM

Indonesia, as an archipelagic country, has long experienced inequality between its regions. Since 1954, the state has implemented a centralized government system that results in most of the development happening in the western part of Indonesia, such as in Java, Sumatra, and Bali. Since the ongoing reforms, following the economic crisis in 1999, the authority has implemented a decentralized system based on Law Number 22 of 1999 on regional government and followed by the issuance of Law Number 25 of 1999 on the financial balance between central and local government. These policies were issued in the hope of overcoming the welfare gap between regions. However, when seen from the data of Statistics Indonesia (BPS) using recent data from 2010 to 2015, there is still a gap in the gross regional domestic product (GRDP) among the regions in Indonesia.

De Silva and Sumarto (2015) mentioned that the factors that create imbalances between regions in Indonesia can occur due to the factor of human resources, depending on the level of human capital in each region. Using data of 300 districts in Indonesia for the period of 2001 to 2012, they found on their research that human capital had a greater impact on economic growth in Indonesia compared to physical capital.

A number of previous studies also highlighted the role of human resources and economic growth by examining the gender gap in education and linking it to the level of economic development of a region. Hill and King (1995) argued that educational gender inequality affects the rate of GDP per capita. Using cross-country data, they found that regions with low female-male enrollment ratios tend to have lower GDP per capita. Another researcher, Knowles et al. (2002) also found that wider gender inequality in education has a significant effect in reducing GDP per capita, thus hurting the economic growth of the country.

A number of studies indicate that education has a significant role in economic growth and it is in line with one of the goals of the Millennium Development Goals (MDGs) that want to achieve education achievement by 2015 (Todaro and Smith, 2014). MDGs which was initiated by the United Nations, in September 2000 approved eight points of commitment, among others to promote education, support gender equality, and women's empowerment. Indonesia, as one of the countries that participated in implementing the MDGs, started to give priority to gender equality in all aspect, including education.

The government's commitment to education is stated in Law Number 20 of 2003 on National Education System (Sisdiknas) Chapter IV Part 1 Article 5, one of which states that every citizen is entitled to the opportunity to improve the education throughout life. That commitment also supported by Presidential Instruction Number 5 of 2006 on the National Movement for the Acceleration of Compulsory Education of Nine Years Basic Education and Illiteracy Eradication. A number of programs were implemented by the

government that helped drive this effort. Through several programs such as the School Operational Assistance (BOS), building satellite schools in remote areas, and giving out funds such as The Special Allocation Assistance (BAK) and Direct Cash Assistance (BLT), the government has been trying to reduce barriers to access education.

Gender mainstreaming efforts have also been made by publishing Presidential Instruction No. 9 of 2000 on Gender Mainstreaming within National Development. The program intended to make the whole development process from the preparation, implementation, monitoring, and evaluation involving citizen participation both men and women. The Ministry of National Education (Depdiknas) also stipulated gender mainstreaming effort in the Indonesian Education Plan (2005-2009). Such as increasing the capacity of institutions for the empowerment of women and children at the provincial and district/city; developing material and implementation of communication, information, and education (CIE) on gender equality; and developing model of family education with gender and child responsive (PKBG) in collaboration with social organizations, religious and community organizations. Through these regulations and programs, the Indonesian government has sought to achieve the MDGs goals in terms of gender equality, especially in education. The government effort to provide equitable education for gender equality makes Indonesia's education indicators have improved in recent years. Based on data from Statistics Indonesia, the mean year's gap between gender shows a declining trend from 2010-2015.

The Government has sought to provide equitable education to its population and seeks to enhance the role of women in education and to reduce the educational gender gap in Indonesia. A number of previous research attempted to provide empirical evidence of an interrelationship between educational gender gaps and economic growth. Through a similar frame of mind, this thesis examines whether the educational gender gap affects regional economic growth in Indonesia?

Education and Economic Growth

Over time, looking at the development of advanced technology, the role of technology and human development has been increasingly important. This increase makes the economic success of a region not only supported by the physical capital but also the role of human capital in it. According to Blanchard and Johnson (2013), human capital can be defined as a set of skills possessed by workers in the economy. Todaro and Smith (2014) argue that human capital is crucially influenced by education because this factor has a significant impact on economic growth through the enhancement of skills and labor productivity.

Education has been studied as one of the determinant factors affecting economic growth after the endogenous growth model pioneered by Romer (1986) and Lucas (1988). This theory evolved from two ideas that rely on the importance of human resources in the economy. First, the notion that considers knowledge as a major source of increasing economic productivity. This idea puts the stock of knowledge as one of the increasing factors of production, such that the growth rate can be continuously improved in accordance with the ability of each country to improve and create knowledge stock.

Secondly, it emphasizes the importance of learning by doing and the introduction of new things in the economy that are the driving factors for increasing productivity. Human capital can be accumulated through formal education or non-formal education (on the job training), followed by the learn-by-doing process, which can lead to new discoveries that can improve production efficiency. These efficiencies can increase productivity and affects economic growth.

The influence of education on economic growth itself can take place in several ways. First, education can help enlarge the amount of human capital in labor (Mankiw et al., 1992). Second, education can enhance innovation, knowledge and technological development (Lucas, 1988; Romer 1990). And thirdly, education can facilitate the dissemination of new knowledge, information, and technologies that ultimately affect growth (Nelson and Phelps, 1966).

With a variety of observations and outcomes, education became a topic that many discussed when reviewing economic growth. Hassan and Mirza (2005) studied the effect of education on growth in Pakistan and evaluated the government's policy of education in four provinces during 1973-1998. Using panel regression, they concluded that the mean years of schooling, the average change in years of schooling, and Gini education coefficient have a significant effect on economic growth. While the lag per capita variable and the ratio of education expenditure to GDP is not significant to economic growth. They conclude that the failure of education policy in Pakistan is due to the inefficiency of education spending.

Other researchers, like Gungor (2006) examine the impact of education inequality on economic growth. This inequality is seen from the education and accumulation of human capital in Turkish provinces in 1975 to 2000. Using panel data analysis fixed effect method, one of the research results showed that education inequality negatively affects economic growth. The variables used are income per capita, accumulation of physical capital with a proxy of electricity consumption of industry sector and growth of labor. Human capital is measured by mean years of schooling of the labor force. He found that educational inequality affects provincial economic growth in Turkey through inefficient allocation of resources rather than accumulated human capital pathways.

Qian and Smyth (2005) also examine the impact of education on the regional inequalities in China. They compare it by looking at disparities between provinces in coastal and inland areas, compared to rural inequality in rural and urban areas. The results of the study found that: 1) the inequality of education in coastal and inland areas is not as sharp as income inequality, 2) village and city gaps on education are the dominant causes of inequality in overall educational attainment.

Other researchers found mixed results of education on economic growth. Bils and Klenow (2000) studied 93 countries from 1960 to 1990 and found that the impact of education on economic growth was limited. They argue that the impact of education has only affected one-third of the economic growth between countries in their observations. Islam (1995) in his research failed to find a significant effect of education on growth. Using data from various countries and growth regression, he points out that this could happen because the school enrollment rates only measure a partial aspect of the rate of investment in human capital and it did not account for differences in the quality of schooling.

Meanwhile, Pritchett (2001) found that growth of human capital has a negative effect toward economic growth. He argued that this could happen because of the poor institutional environment in a country that does not appreciate the increasing skill of its workers. Another thing that causes it is the flood of educated workers while the number of jobs is stagnant so that the increase in human capital has a declining impact on economic growth.

Educational Gender Gap and economic growth

The effect of education on economic growth has led researchers to pursue a focus on the educational gender gap and education's achievements for gender equality. According to Todaro and Smith (2014), the educational gender gap is the difference between men and women in accessing and completing school.

Haddad (1990) said that narrowing the gender gap in education by expanding educational opportunities for women is very economically advantageous because: 1) The rate of return of higher education on women. 2) Increase productivity, increase labor participation, lower fertility, and improve child health and nutrition. 3) Better health and nutrition of children and better-educated mothers will have a multiplier effect on the quality of the children. 4) Improvement in education has an important impact in eliminating the vicious cycle of poverty because women bear the greatest burden of poverty.

A number of mechanisms linking educational gender gaps with economic growth is explained by researchers such as Klasen (2002) that mention a number of means linking the gender gap in education with economic growth. Firstly, given the assumption that human capital is a combination of ability and learning opportunities, gender gaps in education can eliminate the chance of women who have higher levels of ability to receive an education so that ultimately will lower the level of human capital in society. Second, it deals with the wage discrimination that women often receive in the formal sector. By increasing women's participation in education, the output of female workers will increase so that this will affect the investment of industries that employ female workers, which leads to an increase in economic growth. Third, it deals with the external effects of women's education. With the increase of women's education, this will affect the quality improvement of human capital for future generations that in the long run have a positive effect on economic development.

The mechanisms linking the gender gap in education to economic growth can also be seen from a number of empirical studies such as Schultz (1994) using panel regression and fixed effect method examined 68 low-income countries from 1972 to 1989. He found that gender inequality education contributed significantly to higher fertility rates and child mortality. He concluded that the gender gap in education indirectly affects economic development through demographic influence.

Hill and King (1995) also found the linkage between educational gender gap and economic growth. Through their research on various countries from 1975 to 1985, they used panel regression analysis and found that a low female-male enrollment ratio correlated with lower GDP per capita. Other researchers such as Galor and Weil (1996) linked the gender gap in education to fertility rates and economic growth. They found that low-income countries have a tendency to experience gender gaps in education, due to high fertility rates.

Meanwhile, Dollar and Gatti (1999) studied 127 countries using the time range from 1975-1990. They found that improving education for women had a positive impact on economic growth, with a more significant impact on developed countries. Knowles, Lorgelly, and Owen (2002) examined the effect of educational gender gaps on a number of countries from 1960 to 1990. They concluded that equitable distribution of education between men and women would result in higher per capita income.

A number of recent studies such as Klasen (2002) also found a link between educational gender gaps and economic growth. Using the cross countries regression method, Klasen finds that the educational gender gap affects economic growth directly through declining human capital levels and indirectly through the impact of investment and population growth. Klasen and Lamanna (2009) follow up the 2002 findings by including the

variable of labor in viewing the effect of gender gaps in education on economic growth. They found that the gender gap in education and employment was able to significantly reduce economic growth, with the gender gap in employment having various influences in different countries.

In this research, the author seeks to find a link between the educational gender gap and regional economic growth in Indonesia. This topic is still rarely studied in Indonesia. Most of the related research highlighted the education imbalance among regions. While through this research, the author wants to deepen the discussion by observing the gender gap in education and its influence on the economic performance of the regions. Another aspect that this research can contribute is that whereas the majority of existing research used cross-country data, this paper utilizes district-level data that is still little used when analyzing this topic.

The relationship between educational gender gap and economic growth in Indonesia is the background of this research. Using various analysis, from the cross section, data panel, FEM, and GMM this research determines the impact of the educational gender gap on economic growth in Indonesia in the period 2010-2015. A number of control variables were included in this study including the influence of population growth as well as female labor on economic growth.

The Government of Indonesia has made various efforts to provide equal education to all Indonesians. By issuing legislation and also implementing a number of programs, the government strives for gender equality in education in Indonesia.

A number of studies have been conducted to examine the relationship between the educational gender gap and economic growth. However, most of the previous research was conducted on an inter-country scope. While studies that examine the relationship of educational gender gap using subnational data is still rarely carried out.

From a number of estimations, the result obtained is that the role of educational gender gap does not have a significant effect on economic growth in Indonesia. This can happen for several reasons. First, the government program in the reduction in the gender gap in education does not necessarily allow the role of women in the economy to increase. The lack of uptake rates of female workers, even though there are more women looking for work, indicates that there are more male workers recruited than female. This means that the improvement of women's education does not contribute optimally to the economy. Secondly, there is still a gender gap in employment in Indonesia. This is supported by data from Statistics Indonesia and World Bank that shows female labor force participating rate is lower and the number of unemployment is higher compared to male in Indonesia.

Although the author has attempted to make the research robust, it is possible that the portrayal of women's education role to economic growth is limited due to the short coverage time span of 2010-2015. Also, the limited data availability especially related to the level of investment in each district/city makes this research may encounter omitted variables. Further investigations regarding women's education effect on economic growth are needed to corroborate or compare the findings of this research.

In conclusion, the decline in educational gender gap has not necessarily reduced the obstacles in the working world for women. The lack of uptake rates of female workers and the gender gap in employment in Indonesia still an obstacle for women to contribute positively to economic growth. An active government role is still needed in order to tackle and reduce these constraints. In order to increase women's participation in regional economic growth, the government should not only focus on women's education but also provides support and training to prospective female workers so that they can compete in giving a positive contribution to regional economic growth.

**PENGARUH KEKAYAAN SUMBER
DAYA ALAM BATUBARA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**THE EFFECT OF COAL ABUNDANCE
ON INCOME INEQUALITY IN EAST
KALIMANTAN PROVINCE**

Nama : Ahmad Zaini
Unit Kerja : Subbag Perencanaan Dan Evaluasi Program
Lembaga Administrasi Negara
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MET - UNPAD

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang massive dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model *pooled least square*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata kunci : ketimpangan pendapatan, kutukan sumber daya alam, pengeluaran pemerintah, *pooled least square* model, data panel.

ABSTRACT

East Kalimantan Province is the largest producer of natural resources in Indonesia. In this province, mining sector dominates the economic due to its massive exploitation and high value. Of the many natural resources, coal is the biggest to contribute to the economic sector of that province. Related to these conditions, this study aims to determine the effect of coal to income inequality in East Kalimantan. This study uses panel data from nine districts/cities in East Kalimantan during 2006 until 2014, which is then processed by a pooled least square model.

The study concluded that the contribution of coal sub-sectors in the economy are positively related to income inequality. The higher the contribution of coal sub-sectors in the economy, the higher the income inequality in that province. In addition, this study also found out that local government's expenditure are not significant related to income inequality, which means that the local government has not succeeded in creating equitable prosperity in that region. While the economic growth and the contribution of agricultural sector have no significant effect on income inequality.

Keywords: income inequality, natural resources curse, government's expenditure, pooled least square model, panel data.

Keberadaan sumber daya alam dalam sebuah perekonomian masih menjadi bahasan menarik hingga saat ini. Ada anggapan bahwa dalam jangka panjang kekayaan sumber daya alam akan berdampak buruk pada perekonomian. Hasil penelitian Auty (1993) menyatakan sejak tahun 1960 kinerja perekonomian negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam lebih buruk dari negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, ditandai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi (Roy, Sarkar, & Mandal, 2013). Hipotesis ini didukung oleh penelitian Sach dan Warner (1995) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kekayaan sumber daya alam pada tahun 1970-1990 di berbagai negara.

Namun tidak semua mendukung pendapat di atas, beberapa diantaranya memberikan kritik. Tidak ada yang salah dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, dengan kata lain tidak ada negara yang ditakdirkan miskin karena memiliki banyak sumber daya alam. Sebagian besar berpendapat bahwa permasalahannya bukan pada keberadaan sumber daya alamnya tetapi cenderung pada pengelolaannya. Wright dan Czelusta (2004) berpendapat bahwa inti permasalahan ada pada ketidaktepatan mendefinisikan sumber daya alam. Menurutnya sumber daya alam hendaknya didefinisikan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, bukan sebagai rejeki atau keberuntungan yang dapat dinikmati, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati. Sumber daya alam hendaknya digunakan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

Adapun sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, beberapa penelitian menyatakan tidak menjadi sebuah kutukan. Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil mengelola sumber daya alam dengan cara melakukan diversifikasi ekonomi dan industrialisasi. Selain itu melakukan investasi jangka panjang yang membuat Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita tumbuh rata-rata di atas 4 persen pada tahun 1970-1998 (Gylfason, 2001). Sedangkan menurut Komarulzaman dan Alisjahbana (2006), kutukan sumber daya alam tidak terjadi pada sektor kehutanan, minyak bumi, dan gas alam dimana memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun untuk sektor pertambangan menunjukkan adanya kutukan sumber daya alam, dimana memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Memang tidak ada jaminan bahwa sumber daya alam dapat berkontribusi positif terhadap suatu perekonomian. Bahkan ada beberapa data empiris yang menunjukkan kecenderungan korelasi negatif antara kekayaan sumber daya alam dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Namun dengan sumber daya alam yang dimiliki, beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk. Kondisi ini membawa kita

untuk berpikir kembali apakah keberadaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur selama ini adalah sebuah keberuntungan atau justru kutukan.

Dampak adanya sumber daya alam dalam suatu perekonomian hingga saat ini masih diperdebatkan, apakah berdampak positif atau negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara kekayaan sumber daya alam dengan kinerja perekonomian, namun beberapa penelitian lainnya menyatakan tidak demikian. Fakta tersebut memang terjadi, tetapi tidak ada yang salah dengan sumber daya alam, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengelolaannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan sebarannya pun relatif merata hampir di semua kabupaten/kota. Keberadaan batubara memang dapat meningkatkan PDRB per kapita bagi daerah penghasil, namun ada indikasi distribusi pendapatannya tidak merata karena tingkat kemiskinan di daerah penghasil relatif lebih tinggi.

Penelitian terkait keberadaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur dan pengaruhnya terhadap perekonomian sebenarnya telah dilakukan. Namun sepengetahuan penulis, penelitian-penelitian tersebut tidak fokus pada keterkaitan antara kekayaan sumber daya alam batubara dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara dan pengeluarannya terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel independen yang mempengaruhi suatu variabel dependen yang selanjutnya akan dianalisis pengaruh atau hubungan antara beberapa variabel tersebut berdasarkan data empirik dengan metode explanatory research.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara runtut waktu (time series) dan data silang tempat (cross section) sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan memperbesar degree of freedom, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel cross section dan time series.

Analisa Ekonomi dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perkonomian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan koefisien 0,0005206, berarti setiap ada kenaikan kontribusi subsektor batubara dalam perkonomian sebesar 1% akan berdampak pada kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan, yang digambarkan oleh koefisien gini, sebesar 0,0005206 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini kembali mendukung penelitian-penelitian yang menyatakan adanya kutukan sumber daya alam (*resource curse*), dimana kekayaan sumber daya alam berdampak negatif terhadap perekonomian. Hasil sumber daya alam batubara yang cukup besar dan bernilai tinggi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, ternyata tidak terdistribusi secara merata kepada penduduk di wilayah tersebut. Peningkatan kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian justru memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan rendah dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Loayza & Rigolini (2016) di Peru, yang menyimpulkan pertambangan memperburuk distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan penguasaan teknologi, karena tidak semua orang dapat menggunakan alat berat dan teknologi pertambangan lainnya. Kegiatan pertambangan memang menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, namun juga menarik tenaga kerja dari luar daerah khususnya untuk tenaga profesional.

Dengan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, sangat sedikit penduduk di sekitar daerah pertambangan yang dapat bekerja di sektor tersebut. Umumnya penduduk di sekitar hanya mampu menjadi tenaga kerja nonskill seperti security, driver, dan petugas administrasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.6. dari total penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, hanya 6-10 persen saja yang bekerja di sektor pertambangan. Kondisi ini berbeda jauh dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 50 persen. Sehingga tidak banyak pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar pertambangan, jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan tambang. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan tingginya ketimpangan pendapatan karena hanya sebagian kecil penduduk di wilayah tersebut yang dapat merasakan keuntungan dari kegiatan pertambangan batubara.

Melihat dampak yang ditimbulkan, aktifitas pertambangan batubara hendaknya dibatasi meskipun mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan memberikan masukan yang besar bagi penerimaan pemerintah daerah setempat. Selain karena berdampak buruk terhadap kesenjangan pendapatan yang berpotensi memicu konflik sosial, pembatasan aktifitas pertambangan batubara juga perlu dilakukan agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah dan berdampak buruk pada generasi yang akan datang.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah per kapita di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lima tahun sebelumnya ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan koefisien 0,028542, berarti setiap ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah per kapita di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebesar Rp. 1 juta, akan berdampak pada kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan lima tahun mendatang, yang digambarkan oleh koefisien gini, sebesar 0,028542 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

Meskipun berpengaruh signifikan menurut perhitungan statistik, namun bukan berarti pemerintah daerah sebaiknya mengurangi pengeluarannya atau bahkan tidak melakukan belanja barang publik. Pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan pemerataan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini hanya mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi distribusi. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah selama ini cenderung tidak berdampak pada pemerataan kesejahteraan penduduknya. Kondisi ini bisa terjadi diantaranya disebabkan oleh permasalahan dalam alokasi anggaran yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan di Provinsi Kalimantan Timur cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah daerah sangat besar dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut. Meskipun jumlahnya meningkat, sebaran fasilitas-fasilitas tersebut masih dianggap kurang merata. Fasilitas pendidikan dan kesehatan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Dari 1.536 dokter di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014, sebanyak 43,29 persennya berada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, selebihnya tersebar di 8 kabupaten/kota lainnya. Adapun jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014, hanya 41,12

persen yang permukaannya aspal, selebihnya permukaan jalannya berupa kerikil, tanah, dan lainnya (BPS, 2015).

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Pada Tingkat Ketimpangan

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dengan melihat nilai koefisiennya yang negatif, ada kecenderungan PDRB per kapita berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan pendapatan.

Meskipun menurut perhitungan statistik PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, namun dari hasil perhitungan yang didapat ada kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan PDRB per kapita yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak selalu bertentangan dengan pemerataan pendapatan. Hasil ini juga membantah pendapat Kuznets yang menyatakan ketimpangan pendapatan adalah syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltim yang didorong sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian sangat mendominasi perekonomian, sehingga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian, khususnya subsektor batubara, berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu perlu diupayakan mengembangkan sektor lain untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi juga menyiapkan keberlangsungan perekonomian di masa datang saat sektor sumber daya alam telah habis.

Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kecilnya kontribusi serta kurang berkembangnya sektor pertanian adalah penyebab mengapa sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

Kurang berkembangnya sektor pertanian di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya disebabkan oleh lahan pertanian yang cenderung menurun (BPS, 2016b). Banyak lahan pertanian yang telah dikonversi menjadi wilayah pertambangan dan juga pemukiman. Masih terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, masyarakat di wilayah pertambangan cenderung berfikir pragmatis ketika tanahnya akan dibeli oleh perusahaan tambang. Masyarakat di wilayah pertambangan yang sebagian besar adalah petani akan menjual tanahnya dengan harapan mendapatkan uang yang banyak, tanpa berfikir ke depan dari mana mereka akan mendapatkan sumber penghasilan. Selain itu aktifitas pertambangan seringkali merusak lahan pertanian masyarakat sekitar, khususnya di waktu musim penghujan dimana limbah pertambangan ikut larut dengan air. Lahan pertanian di sekitar wilayah tambang akan menjadi tidak produktif, sehingga pendapatan petani menjadi berkurang. Kondisi ini pula yang menyebabkan para petani di sekitar tambang menjual tanah mereka.

Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi program unggulan pemerintah daerah ternyata belum mampu berkontribusi banyak pada perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Baru dimulainya program tersebut serta belum lengkapnya infrastruktur pendukung mengakibatkan perkebunan kelapa sawit belum bisa berkembang dengan baik, sehingga masih belum bisa berkontribusi banyak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Kebijakan dan Solusi terhadap Permasalahan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing termasuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kewenangan yang semakin besar dalam mengelola daerahnya, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya agar perekonomian di daerahnya tetap tumbuh sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan sumber daya alam batubara sebagai penggerak perekonomiannya, sebagaimana terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Namun pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mensejahterakan masyarakatnya jika tidak terdistribusi secara merata. Keuntungan perekonomian hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang, sehingga kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin akan semakin lebar. Terkait hal tersebut dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka implikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Membatasi eksploitasi sumber daya alam, khususnya batubara, karena akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Penggunaan sumber daya alam dalam perekonomian memang suatu dilema, di satu sisi diperlukan untuk menggerakkan

perekonomian, namun di sisi lain berdampak buruk terhadap distribusi pendapatan dan juga lingkungan. Oleh karena itu penggunaannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak negatifnya serta ketersediaannya untuk generasi yang akan datang. Maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membatasi kegiatan pertambangan batubara dengan tidak menerbitkan ijin pertambangan baru sembari membangun sektor sekunder dan tersier agar lebih produktif, sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian yang baru serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Memperbaiki alokasi belanja pemerintah karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seharusnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, selama ini terbukti belum mampu memperbaiki kesenjangan ekonomi masyarakatnya. Maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperbaiki alokasi belanja dengan mengevaluasi kembali program-program yang telah dijalankan, apakah berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas atau tidak. Perbanyak program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat diturunkan. Selain itu perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan oleh pemerintah daerah dengan cara membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan membangun fasilitas publik disana. Hal tersebut penting dilakukan mengingat daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang cukup luas disertai dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik.

Menjaga perekonomian daerah tetap tumbuh agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Meskipun dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan, namun ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan cenderung dapat berjalan beriringan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka pemerintah daerah harus mendorong perekonomian di daerahnya agar terus tumbuh, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula membuat basis pertumbuhan dari sektor non sumber daya alam. Selain tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sumber daya alam juga berdampak negatif terhadap pemerataan pendapatan.

Mengembangkan sektor pertanian agar lebih produktif sebagai alternatif basis pembangunan di masa yang akan datang. Meskipun dalam penelitian ini sektor pertanian tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan,

namun ada kecenderungan sektor pertanian dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar bekerja di sektor pertanian, sehingga menjadikan sektor tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Maka pemerintah daerah perlu mendorong sektor pertanian agar berorientasi pada pasar dan industri sehingga lebih produktif. Peningkatan produktifitas sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Program perkebunan kelapa sawit tetap perlu dikembangkan dengan membangun infrastruktur pendukungnya sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian.

**ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA
BARAT**

**ANALYSIS OF DISTRICT OWN SOURCE
REVENUE (PAD) IMPACT AGAINST
FINANCIAL PERFORMANCE OF CITY OR
DISTRICT GOVERNMENT IN WEST JAVA
PROVINCE**

Nama : Ai Kania
Unit Kerja : Bappeda
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MET - UNPAD

ABSTRAK

Penelitian ini mengestimasi nilai efisiensi teknis pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2011-2014 menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan orientasi output. Input yang digunakan adalah anggaran pendidikan per siswa, anggaran kesehatan per kapita dan anggaran infrastruktur per kapita, sedangkan output yang digunakan adalah Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kematian Bayi, imunisasi campak, panjang jalan dan luas irigasi. Setelah menghitung nilai efisiensi, penelitian menggunakan regresi Tobit untuk melihat faktor lain yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata efisiensi teknis kabupaten/kota di Jawa Barat relatif efisien, yaitu untuk bidang pendidikan sebesar 97,47%; kesehatan sebesar 95,74%; dan infrastruktur sebesar 82,82%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal dan aspek manajerial memiliki efek yang positif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah, sedangkan jarak dan jumlah penduduk memiliki efek negatif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Efisiensi, DEA, Regresi Tobit.

ABSTRACT

This research aims to estimate the technical efficiency level of government spending of education, health, and infrastructure of the 26 districts/cities in West Java Province for the period 2011-2014 by using Data Envelopment Analysis (DEA) with output oriented. Inputs are government spending of education, health, and infrastructure, and outputs are Adult Literacy, Mean Year Schooling, Infant Mortality Rate, Immunization against measles, length of road and irrigation. Tobit regression model is then used to determine the effect of environmental factors on government spending efficiency of education, health, and infrastructure.

The results show that most of the government spending of the districts/cities in West Java are relatively efficient with an average score for education is 97,47%; health is 95,74%; and infrastructure is 82,82%. The results also indicate that the degree of fiscal decentralization and managerial aspect have a positive effect on government spending efficiency. However, distance and number of population have a negative effect on government spending efficiency.

Keywords: Education, Health, Infrastructure, Efficiency, DEA, Tobit Regression.

Rendahnya Akses Terhadap Layanan Publik Di Jawa Barat

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian, sehingga adanya infrastruktur dapat mempercepat akselerasi pembangunan. Tersedianya infrastruktur merangsang pembangunan ekonomi di suatu daerah. Sebaliknya, pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat (Basri, 2002).

Mengingat pentingnya peranan pembangunan infrastruktur, alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional. Investasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengukuran keberhasilan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dapat dilihat dari kondisi infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang sangat vital fungsinya sebagai sarana penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jalan memfasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, sebagai saluran akses pasar yaitu mempermudah akses ke pasar, saluran tenaga kerja yaitu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja baru (Najman, Gachassin, & Raballand, 2010).

Terdapat beberapa indikasi keberhasilan di daerah selain PDRB yaitu tingkat pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah.

Anggaran pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan IPM, karena pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial merupakan salah satu jalur yang menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dengan pembangunan manusia, disamping aspek lain yaitu pengeluaran rumah tangga. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Satu diantara penyebab utama rendahnya kualitas hidup sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah rendahnya akses terhadap layanan publik terutama akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut bersamaan dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Mahalnya layanan kesehatan bahkan di tingkat paling dasar juga menjadi masalah tersendiri, sehingga banyak masyarakat miskin yang

mengabaikan kesehatan. Sulitnya akses kesehatan dan pendidikan juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur terutama di daerah „*remote area*“ yang sulit untuk dijangkau oleh sarana transportasi (Merini & Saputra, 2012).

Penelitian Santosa & Jumadi (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur belum efisien dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) dengan variabel *input* adalah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. *Output* pendidikan yang digunakan adalah jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru SD, SMP, dan SMA sebagai indikator pendidikan. *Output* kesehatan diwakili oleh jumlah rumah sakit dan tenaga medis. *Output* infrastruktur menggunakan indikator distribusi air bersih, irigasi, distribusi listrik, panjang jalan, dan jembatan provinsi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam alokasi anggaran adalah keterbatasan anggaran, dengan demikian pemerintah disarankan untuk melakukan peninjauan kembali alokasi anggaran.

Bagaimana Pemerintah Jawa Barat Menggunakan Anggaran Dengan Seharusnya?

Pada dasarnya belanja pemerintah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu pemerintah daerah. Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bagi pemerintah daerah belanja infrastruktur mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus pembangunan ekonomi, demikian pula dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang tercerminkan dari kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Untuk mendapatkan efek positif bagi perekonomian, maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran.

Dengan karakteristik belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang berbeda-beda, menjadi sebuah pertanyaan bagaimana pemerintah menggunakan anggaran pemerintah dengan seharusnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk menganalisis efisiensi belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kabupaten/kota di Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan anggaran belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa tingkat efisiensi belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yaitu penggunaan *input* yang optimal dan potensi pencapaian *output* yang optimal. Hal ini diharapkan akan memudahkan perumus

kebijakan, khususnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mengidentifikasi kelemahan maupun kelebihan sebuah kegiatan, sehingga dapat meningkatkan upaya penguatan belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Efisiensi Bidang Pendidikan

Secara rata-rata, efisiensi kabupaten/kota di Jawa Barat adalah 97%, artinya rata-rata *output* kabupaten/kota tersebut dapat ditingkatkan lagi sebesar 3% dengan *output* yang sama. Daerah dengan rata-rata efisiensi tertinggi adalah Kota Cimahi dan Kota Depok (100%) dan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu (86,02%), sedangkan yang mendapatkan efisiensi 100% secara konsisten selama empat tahun berturut-turut adalah Kota Cimahi dan Kota Depok.

Kota Cimahi menjadi *benchmark* bagi kabupaten/kota lain yang efisiensinya di bawah 100%. Hal ini dikarenakan dengan anggaran tertentu Kota Cimahi mendapatkan *output* yang lebih tinggi, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang paling tinggi di Jawa Barat untuk tahun 2011-2014. *Slack* terbesar dalam rentang waktu tersebut terjadi pada indikator *output*: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), artinya pemerintah kabupaten/kota masih bisa meningkatkan *output* sebesar *slack* yang dianjurkan dalam perhitungan DEA.

Efisiensi Bidang Kesehatan

Secara rata-rata, efisiensi kabupaten/kota di Jawa Barat adalah 95%, artinya rata-rata *output* kabupaten/kota tersebut dapat ditingkatkan lagi sebesar 5% dengan *output* yang sama. Daerah dengan rata-rata efisiensi tertinggi adalah Kabupaten Tasikmalaya (100%), dan terendah adalah Kabupaten Majalengka (89,59%), sedangkan yang mendapatkan efisiensi 100% secara konsisten selama empat tahun berturut-turut adalah Kabupaten Tasikmalaya.

Kota Bekasi menjadi *benchmark* bagi kabupaten/kota lain yang efisiensinya di bawah 100%. Hal ini dikarenakan dengan anggaran tertentu Kota Bekasi mendapatkan *output* yang lebih tinggi, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) terendah dan cakupan imunisasi yang paling tinggi di Jawa Barat untuk tahun 2011-2014. *Slack* terbesar dalam rentang waktu tersebut terjadi pada indikator *output*: ISR (*Infant Survival Rate*), artinya pemerintah kabupaten/kota masih bisa meningkatkan *output* sebesar *slack* yang dianjurkan dalam perhitungan DEA.

Efisiensi Bidang Infrastruktur

Secara rata-rata, efisiensi kabupaten/kota di Jawa Barat adalah 82%, artinya rata-rata *output* kabupaten/kota tersebut dapat ditingkatkan lagi sebesar 18% dengan *output* yang sama. Daerah dengan rata-rata efisiensi tertinggi adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Bogor yang secara konsisten selama empat tahun berturut-turut mencapai efisiensi 100%, sedangkan terendah adalah Kota Cirebon (50,79%).

Kota Bandung menjadi *benchmark* bagi kabupaten/kota lain yang efisiensinya di bawah 100%. Hal ini dikarenakan dengan anggaran tertentu Kota Bandung mendapatkan *output* yang lebih tinggi. *Slack* terbesar dalam rentang waktu tersebut terjadi pada indikator *output*: panjang jalan, artinya pemerintah kabupaten/kota masih bisa meningkatkan *output* sebesar *slack* yang dianjurkan dalam perhitungan DEA.

Peringkat Rata-Rata Efisiensi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Pemerintah yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota. Berdasarkan kategori kabupaten atau kota, analisis DEA memperlihatkan bahwa daerah kota memiliki rata-rata efisiensi teknis yang lebih baik daripada kabupaten. Luas wilayah yang kecil, kemudahan akses, dan infrastruktur yang baik membuat pelayanan pendidikan dan kesehatan di kota menjadi lebih baik dibanding kabupaten yang lebih luas dan komposisi penduduknya yang tidak merata.

Pemetaan Efisiensi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Anggaran yang ditentukan belum terdistribusi baik atau alokasinya belum sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa dalam alokasi anggaran untuk tahun-tahun berikutnya sebaiknya dikurangi, karena telah ada Undang-Undang yang mengamankan proporsi minimal anggaran pendidikan 20% dari APBN maupun APBD (UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003) dan proporsi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBN maupun APBD (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009). Adapun untuk anggaran infrastruktur, dalam hal ini belanja modal, diatur dalam Permendagri. Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun 2014 sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014".

Selain itu, pemberian pelayanan pendidikan maupun kesehatan kepada masyarakat harus patuh terhadap standar acuan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kementerian Pendidikan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM mengukur keberhasilan pembangunan dari tersedianya pelayanan dasar yang paling minimal bagi masyarakat. Menurut Afridian (2010), SPM ini penting agar pemerintah daerah dapat menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan pelayanan publik.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berfluktuasi dalam rentang waktu 2011-2014, dan hanya beberapa kabupaten/kota yang secara konsisten mendapatkan rata-rata tingkat efisiensi relatif 100% yakni: Kota Cimahi dan Kota Depok untuk bidang pendidikan, Kabupaten Tasikmalaya untuk bidang kesehatan, serta Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kota Bandung untuk bidang infrastruktur.

Diperlukan banyak perbaikan dalam melakukan penganggaran belanja dan penggunaan anggaran untuk mencapai tingkat *output* yang optimal. Beberapa implikasi kebijakan yang disarankan antara lain:

- Pemerintah kabupaten/kota harus mematuhi ketentuan proporsi anggaran kesehatan 10% (Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009) maupun pendidikan 20% (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003), serta mengalokasikan anggaran tertentu untuk infrastruktur. Besarnya anggaran ini menjadi modal dasar yang akan mempengaruhi *output* yang akan dicapai. Hal ini terkait dengan tingkat capaian *output*, karena sesungguhnya dengan besarnya alokasi anggaran yang ada selama ini semestinya *output* yang dicapai bisa lebih baik.
- Untuk mendorong tercapainya opini WTP dari BPK maka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat diperlukan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus berbasis akrual dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

- Perlu mendorong peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan daerah terhadap ketersediaan atau alokasi dana dari pusat berkurang.
- Optimalisasi modal sumber daya manusia dan sumber daya fisik harus ditingkatkan karena fakta di lapangan hampir sebagian besar fasilitas dan sumber daya manusia belum memenuhi standar yang diharapkan.

Nilai Rata-Rata Efisiensi Teknis Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Relatif Efisien

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan alokasi belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rentang waktu 2011-2014 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efisiensi menggunakan regresi Tobit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- Nilai rata-rata efisiensi teknis bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rentang waktu 2011-2014 cukup tinggi yaitu 97,47% untuk bidang pendidikan; 95,74% untuk bidang kesehatan; dan 82,82% untuk bidang infrastruktur. Meskipun demikian, hanya beberapa kabupaten/kota yang secara konsisten mendapatkan rata-rata tingkat efisiensi relatif 100% dalam rentang waktu 2011-2014 yakni: Kota Cimahi dan Kota Depok untuk bidang pendidikan, Kabupaten Tasikmalaya untuk bidang kesehatan, serta Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kota Bandung untuk bidang infrastruktur.
- Faktor jarak dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap efisiensi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Faktor Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi bidang kesehatan, tetapi tidak berpengaruh terhadap efisiensi bidang pendidikan dan infrastruktur. Aspek manajerial (WTP) berpengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi bidang infrastruktur, tetapi tidak berpengaruh terhadap efisiensi bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal yang diperbaiki adalah terkait penggunaan anggaran. Efisiensi dapat tercapai apabila dalam perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada didasarkan pada data yang akurat, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan akan tepat sasaran. *Mapping* atas kebutuhan masing-masing daerah sangat dibutuhkan. Alokasi anggaran bukan

hanya sebatas mendapat jumlah anggaran yang besar, namun tingkat capaian *output* dan *outcome* yang paling penting. Penempatan sarana, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang dibangun harus tepat agar masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya terpencil juga mendapatkan layanan yang sama.

Dalam penyusunan perencanaan, pemerintah daerah seharusnya memiliki analisis belanja publik yang kuat. Ketidakmampuan daerah dalam melakukan analisis belanja publik yang tepat akan mengakibatkan alokasi anggaran pemerintah daerah pun menjadi tidak tepat. Dalam melakukan analisis belanja publik yang baik diperlukan data yang akurat dan tepat waktu. Kelengkapan analisis efisiensi belanja publik pada tahun sebelumnya akan mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran dan memiliki target *output* yang ingin dicapai. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi salah sasaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah faktor-faktor lain yang dapat dijadikan sebagai *input* maupun *output* dalam pengolahan data sehingga didapatkan nilai efisiensi yang lebih dapat menjelaskan fenomena efisiensi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian juga untuk faktor-faktor lain yang diduga memengaruhi efisiensi perlu ditambahkan agar dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah yang lebih baik.

**ANALISIS MENGENAI KETERSEDIAAN
KEDELAI LOKAL DALAM MENDUKUNG
SWASEMBADA KEDELAI DI KABUPATEN
GROBOGAN**

**ANALYSIS OF LOCAL SOYBEAN
AVAILABILITY FOR SUPPORTING SOYBEAN
SELF SUFFICIENCY IN GROBOGAN
DISTRICT**

Nama : Taufiq Budi Prasetyo
Unit Kerja : Din Pertanian Pemerintah Kabupaten
Grobogan
Diklat : Diklat Gelar 2015
Univ – Prodi : MET - UNPAD

ABSTRAK

Di Indonesia sampai saat ini masih terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara permintaan dan penawaran kedelai. Ketersediaan produksi kedelai harus dibangun atas dasar kemampuan produksi dalam negeri (swasembada). Untuk itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi kedelai dari dalam negeri perlu terus dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa permintaan kedelai lokal, harga kedelai lokal dan penawaran kedelai lokal dalam mendukung swasembada kedelai di Kabupaten Grobogan. Data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun 2001-2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan serta berbagai sumber lainnya. Metode penelitian menggunakan persamaan simultan dengan analisis regresi TSLS (Two Stage Least Square).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan kedelai lokal dipengaruhi secara negatif oleh harga kedelai lokal, sementara pendapatan perkapita penduduk dan pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif. Harga kedelai lokal tidak secara signifikan dipengaruhi oleh penawaran kedelai lokal. Sedangkan harga kedelai impor berpengaruh secara positif terhadap harga kedelai lokal. Penawaran kedelai lokal dipengaruhi secara positif oleh permintaan kedelai lokal dan luas panen. Sedangkan curah hujan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penawaran kedelai lokal.

Kata kunci: kedelai, permintaan, harga kedelai lokal, penawaran, persamaan simultan, TSLS (Two Stage Least Square).

ABSTRACT

In Indonesia until now there is still a huge gap between demand and supply of soybeans. The availability of soybean production should be built on the basis of domestic production capability (self-sufficiency). To that end, efforts to increase the capacity of the domestic soybean production is needed. The purpose of this study was to analyze the soybean demand model, local soybean prices and supply model of local soybean in supporting soybean self-sufficiency in Grobogan. The data used are secondary data from the period 2001-2015 sourced from the Central Bureau of Statistics and the Department of Agriculture Grobogan and various other sources. Research methods. The research method using simultaneous equations with regression.

The results showed that the price of local soybean have negative effect on the amount of soybean demand, while the per capita income of the population and the number of people positively affect the amount of soybean demand. Local soybean prices are influenced by the price of imported soybean. The demand of local soybean and harvested area have significant effect on the amount of soybean supply. While the rainfall there is no significant effect on soybean supply.

Keywords: soybean, demand, local soybean prices, supply, simultaneous equations, TSLS (Two Stage Least Square).

Program pemerintah mengenai pelaksanaan strategis Kementerian Pertanian ternyata belum mencapai titik sasaran yang diinginkan. Impor kedelai yang sangat tinggi justru semakin membuat ketidakstabilan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Para petani harus didukung dalam memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, sehingga tercapai ketersediaan dan harga pangan yang stabil, kualitas komoditi terjamin, swasembada pangan terwujud, lepas dari kebijakan impor (Ramadhani, 2006)

Kebijakan pasar bebas mendorong pada kenaikan harga kedelai impor yang cukup tinggi sehingga berdampak pada pengrajin tahu dan tempe seperti pada berita Kompas tanggal 13 Mei 2012 dengan judul berita harga kedelai naik, pengrajin tahu tempe mogok, dimana produk tahu dan tempe menghilang di pasaran Kota Tangerang, menyusul aksi mogok para perajin tahu tempe akibat harga kedelai naik lagi. Hilangnya tahu dan tempe di pasaran ini karena perajin tahu dan tempe mogok berproduksi karena harga kedelai terus naik. Tadinya harga kedelai Rp 5.500 per kilogram, naik menjadi Rp 7.000 per kilogram. Aksi mogok perajin tahu dan tempe ini menuntut pemerintah segera menurunkan harga kedelai, menciptakan stabilitas harga kedelai, dan meningkatkan

swasembada kedelai. Kenaikan harga kedelai ini diduga disebabkan harga komoditas tersebut di pasar dunia yang juga cenderung naik.

Sentra produksi kedelai di Jawa Tengah berada di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terluas kedua di Jawa Tengah terdiri dari sembilan belas Kecamatan. Dengan potensi luas wilayah yang besar menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah bahkan Indonesia, mayoritas penduduk Kabupaten Grobogan juga bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2012 Kabupaten Grobogan mampu memberikan kontribusi luas panen kedelai sebesar 27.170 ha dengan produksi mencapai 65.114 ton (Hardiansyah, 2012).

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang menjadi prioritas di Indonesia sebagai salah satu pilot project swasembada kedelai, sebagaimana tertuang dalam Permentan No 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Dengan potensi wilayah pertanian yang luas tersebut Kabupaten Grobogan menjadikan sektor pertanian menjadi sektor utama dan diharapkan dapat menjadi lumbung kedelai di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Grobogan memiliki varietas kedelai unggulan yaitu Varietas Grobogan (Balitkabi, 2016). Varietas ini memiliki kualitas yang tidak kalah dari kedelai impor. Oleh karena itu maka Kabupaten Grobogan menjadi bagian dari kebijakan kedaulatan pangan. (Cike, 2015).

Dengan tingkat produksi pada tahun 2015 mencapai angka 48.003 ton atau sekitar 36,9 % dari total pasokan kedelai Jawa Tengah, produksi kedelai merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Grobogan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam hal produktivitas kedelai, Kabupaten Grobogan menduduki posisi tertinggi daerah penghasil kedelai di Jawa Tengah. Akan tetapi dalam lingkup industri produksi kedelai Grobogan belum cukup untuk memenuhi kapasitas industri berbahan baku kedelai yang ada. Sebaliknya ketika panen raya kedelai tiba dimana hasil produksi kedelai melimpah, kelebihan supply ini menyebabkan dipasarkannya kedelai ke daerah lain seperti Pati, Blora, Demak, dan daerah sekitarnya (Fahma, 2009).

Pada saat ini penelitian yang membahas tentang ketersediaan kedelai lokal dalam mendukung swasembada kedelai di Kabupaten Grobogan sangat perlu di lakukan, mengapa hal ini menjadi hal yang sangat penting karena komoditas kedelai di Kabupaten Grobogan merupakan komoditas unggulan, sementara jika dilihat dari potensi Kabupaten Grobogan merupakan lumbung kedelai nasional.

Merujuk pada perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan, maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh permintaan dan harga kedelai local dalam mendukung swasembada kedelai di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan di Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam evaluasi pelaksanaan program pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan.

Permintaan Kedelai Sebanding Dengan Kenaikan Jumlah Penduduk

Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu dan pasar tertentu pula, makna lain dari permintaan adalah kemampuan konsumen yang didukung daya beli untuk mengkonsumsi suatu barang atau produk. Berdasarkan hasil analisis diatas, model permintaan kedelai di kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu perubahan harga kedelai lokal, perubahan pendapatan per kapita dan perubahan pertumbuhan jumlah penduduk. Variabel perubahan harga kedelai memiliki pengaruh negatif terhadap perubahan permintaan kedelai. Sedangkan perubahan pendapatan per kapita dan perubahan pertumbuhan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap permintaan kedelai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif dan positif dari masing-masing variabel. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dwi Sartika Adetama (2011).

Harga kedelai merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap tingkat permintaan kedelai dimana menurut hukum permintaan bahwa perubahan jumlah barang yang diminta berubah secara berlawanan dengan perubahan harga. Dalam penelitian ini variabel perubahan harga kedelai mempunyai pengaruh negatif yang berarti penurunan harga kedelai akan mengakibatkan permintaan kedelai meningkat. Kondisi ini dikarenakan kedelai merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kebutuhan bahan baku industri tempe, tahu dan kecap. Sehingga apabila harga kedelai mengalami penurunan maka permintaan kedelai untuk bahan baku makanan dan minuman yang berbahan baku kedelai akan semakin banyak atau mengalami peningkatan permintaan. Penurunan perubahan harga kedelai lokal (P_x) sebesar 100% akan meningkatkan jumlah permintaan (Q_d) sebanyak 26,89 %.

Pada umumnya, semakin besar penghasilan semakin besar pula permintaan. Hal tersebut disebabkan oleh daya dukung konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu barang lebih banyak seiring dengan semakin besar penghasilannya. Dalam penelitian ini dimana ketika pendapatan per kapita mengalami kenaikan, masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsinya untuk bahan makanan dan minuman yang

berbahan baku kedelai sehingga kebutuhan akan kedelai atau permintaan kedelai akan meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita (Y) sebanyak 100% akan meningkatkan permintaan kedelai sebanyak 38,84%. Perubahan pendapatan per kapita juga dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk yang bekerja dan tingkat pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja berarti kemungkinan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita.

Jumlah penduduk pada umumnya berpengaruh nyata terhadap permintaan kedelai. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat konsumsi akan bahan makanan dan minuman yang berbahan kedelai. Dari hasil penelitian ini peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 100% akan meningkatkan permintaan kedelai sebanyak 440%. Seperti penelitian Zakki Faizin Fitrianto dkk (2014), bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk pada umumnya akan meningkatkan jumlah pendapatan per kapita, jika diikuti peningkatan kualitas dan kuantitas angkatan kerja.

Harga Kedelai Lokal dipengaruhi oleh Penawaran Kedelai secara Negatif

Harga kedelai lokal dipengaruhi oleh penawaran kedelai secara negatif, sehingga apabila terjadi penurunan penawaran kedelai lokal maka harga kedelai lokal akan naik. Penurunan penawaran kedelai lokal sebesar 100% akan menaikkan harga kedelai lokal sebesar 1,85%. Tetapi dalam penelitian ini penawaran kedelai lokal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga kedelai lokal.

Kenaikan harga kedelai impor berdampak langsung terhadap harga kedelai lokal. Hal ini disebabkan, kebutuhan industri makanan dan minuman berbahan baku kedelai yang sangat tinggi tidak bisa di cukupi oleh produksi dalam negeri, sehingga industri makanan dan minuman berbahan baku kedelai lebih banyak menggunakan kedelai impor. Tinggi rendahnya harga kedelai di pasar domestik sangat bergantung pada mekanisme pasar. Karena banyaknya beredar kedelai impor dibandingkan kedelai lokal telah mengakibatkan harga kedelai lokal turut dipengaruhi oleh harga kedelai pasar internasional (kedelai impor). Perubahan harga kedelai lokal dipengaruhi oleh perubahan harga kedelai impor, apabila harga kedelai lokal lebih tinggi dari kedelai impor, maka masyarakat cenderung membeli kedelai impor. Hal inilah yang menyebabkan kedelai lokal ini sangat dipengaruhi oleh harga kedelai impor secara signifikan. Tetapi dengan meningkatnya harga kedelai lokal maka akan merangsang minat petani untuk menanam kedelai, sehingga produksi kedelai Indonesia akan meningkat dan secara otomatis akan dapat meningkatkan swasembada pangan kedelai di Indonesia.

Dalam model harga kedelai lokal pada penelitian ini, jika harga kedelai impor naik 100% maka harga kedelai lokal akan ikut naik sebesar 106,85%. Apabila harga kedelai di pasar meningkat maka akan memacu produsen untuk meningkatkan ketersediaan komoditi kedelai. Sesuai dengan bunyi hukum penawaran yaitu makin tinggi harga suatu barang maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga kedelai akan mempengaruhi produsen untuk lebih meningkatkan ketersediaan komoditi kedelai, yang tentu saja akan menyebabkan peningkatan jumlah keuntungan yang akan diterima oleh produsen dari kenaikan harga kedelai.

Peningkatan Perubahan Luas Lahan Panen akan Meningkatkan Penawaran Kedelai

Hasil pengolahan data model penawaran komoditi kedelai di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh permintaan kedelai lokal, perubahan luas lahan panen dan intensitas curah hujan. Variabel perubahan luas lahan panen memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penawaran kedelai, yang berarti peningkatan perubahan luas lahan panen akan meningkatkan jumlah penawaran kedelai. Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel dapat dilihat dari nilai koefisien dari variabel tersebut. Bertambahnya perubahan luas lahan panen (LP) sebesar 100% akan meningkatkan penawaran kedelai sebesar 78,09 %. Kondisi ini masih memungkinkan adanya penambahan luas lahan panen. Petani menanam kedelai dengan mempertimbangkan kebiasaan dan untuk menjaga kesuburan tanah setelah ditanami padi atau jagung. Lahan setelah ditanami kedelai mengandung banyak nitrogen, karena bintil-bintil akar tanaman polong-polongan seperti kedelai mampu mengikat nitrogen dari udara.

Variabel permintaan kedelai berdasarkan analisa regresi berpengaruh terhadap penawaran kedelai. Bertambahnya perubahan permintaan kedelai lokal (Q_d) sebesar 100% akan meningkatkan penawaran kedelai sebesar 70,38 %. Hal ini didukung oleh kenyataan di lapangan, bahwa petani akan menentukan pilihan menanam kedelai, jagung atau kacang hijau setelah menanam padi. Kenaikan permintaan kedelai akan berdampak pada penambahan luas panen kedelai di mana dengan kenaikan permintaan kedelai membuat petani untuk menentukan pilihan menanam kedelai dari pada kacang hijau ataupun jagung setelah menanam padi, sehingga adanya kenaikan atau penurunan permintaan kedelai akan mempengaruhi petani dalam menanam kedelai.

Luas Lahan panen kedelai yang tidak stabil atau fluktuatif diakibatkan karena adanya pengaruh kondisi alam seperti iklim dan cuaca. Tanaman kedelai sangat peka terhadap perubahan iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca ini mempengaruhi jumlah curah hujan. Penawaran kedelai lokal akan dipengaruhi oleh tingkat curah hujan dimana curah hujan

yang tinggi akan menurunkan jumlah penawaran kedelai. Terdapat perbedaan jumlah penawaran kedelai antara pada saat kondisi curah hujan yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Penawaran kedelai pada saat kondisi curah hujan tinggi lebih kecil sebesar 2,36% dibandingkan penawaran kedelai pada saat curah hujan rendah. Tanaman kedelai membutuhkan air yang cukup diawal pertumbuhan dan masa pengisian biji. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan biji polong menjadi busuk. Dan juga pada saat panen apabila curah hujan meningkat membuat hasil panen komoditas kedelai kurang bagus yang mengakibatkan dampak pada penawaran kedelai. Hal inilah salah satu yang membuat penawaran kedelai lokal sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca.

Ketersediaan Kedelai Perlu Di Tingkatkan Penawaran Yang Optimal

Dari hasil pendugaan model diatas dimana permintaan sangat besar maka upaya yang harus dilakukan untuk ketersediaan kedelai perlu di tingkatkan penawaran yang optimal dimana penawaran kedelai diupayakan dari produksi dalam negeri. Kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi perlu terus diupayakan untuk mendukung ketersediaan pangan, sehingga kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi secara mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Untuk meningkatkan produksi kedelai domestik, pemerintah harus membuat kebijakan yang akan bermanfaat bagi petani selaku produsen maupun konsumen. Untuk mendorong petani agar mau meningkatkan produksinya, kebijakan pemerintah selain memberikan bantuan berupa subsidi sarana produksi juga harus dibarengi oleh adanya jaminan harga ketika terjadi panen raya, karena pada saat ini posisi tawar petani sangat rendah. Kebijakan perlindungan harga bertujuan untuk stabilitas harga output yang akan menentukan pendapatan usahatani yang pada akhirnya akan merubah kesejahteraan petani selaku produsen kedelai.

Dalam upaya pengembangan kedelai agar dapat memberikan manfaat bagi produsen, konsumen dan dapat meningkatkan penerimaan negara serta dapat menurunkan penggunaan devisa, pemerintah perlu menyusun grand design komoditas kedelai baik lingkungan nasional maupun wilayah atau daerah agar kebijakan tersebut tepat sasaran, mengingat peran kedelai yang cukup strategis.

Pemerintah memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kedelai dilakukan dengan penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dimaksudkan untuk memberikan intensif produksi dan perlindungan kepada petani, sekaligus perlindungan untuk konsumen serta untuk berkontribusi pada stabilitas harga kedelai. Kebijakan ini dapat terus dilaksanakan untuk

menjaga stabilitas harga, karena harga berdasarkan analisis regresi dalam penelitian ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai.

Permintaan Kedelai Lokal Dipengaruhi Secara Negatif Oleh Harga Kedelai Lokal

Permintaan kedelai di pengaruhi secara negatif oleh harga kedelai lokal, dimana apabila ada penurunan harga kedelai lokal maka permintaan akan kedelai juga akan mengalami kenaikan. Untuk pendapatan perkapita penduduk berpengaruh secara positif terhadap permintaan kedelai lokal dimana apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan maka jumlah permintaan kedelai juga akan mengalami kenaikan. Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh secara positif pula dimana kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan kedelai lokal.

Harga kedelai lokal secara nyata di pengaruhi oleh harga kedelai impor. Jika harga kedelai impor mengalami kenaikan maka harga kedelai lokal juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan penawaran kedelai lokal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga kedelai lokal.

Penawaran kedelai di pengaruhi secara nyata (positif) permintaan kedelai lokal, dimana jika permintaan kedelai lokal meningkat maka penawaran kedelai juga akan meningkat. Luas panen kedelai juga sangat mempengaruhi secara signifikan penawaran kedelai lokal, dimana jika luas panen mengalami kenaikan maka jumlah penawaran kedelai juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan untuk faktor curah hujan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penawaran kedelai lokal.

BUNGA RAMPAI TESIS/DISERTASI PHRD-IV

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
LOAN JICA NO. IP 568

Administrasi dan Ekonomi

PHRD-IV merupakan program beasiswa Bappenas bergelar S2 dan S3 maupun non-gelar (*Short-term Training Program, Staff Enhancement Program, dan Program for Academic Staff*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia khususnya dari daerah. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan meningkatkan sumber daya manusia di pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan mengurangi disparitas ekonomi antardaerah.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan bagi para penerima beasiswa PHRD-IV dapat melakukan pendalaman pengetahuan dan penelitian terkait pembangunan bersifat konkret yang dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing. Di samping itu, para penerima beasiswa juga diharapkan dapat mengunjungi fasilitas-fasilitas publik dan pemangku kepentingan setempat yang terkait dengan bidang studinya sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan pemahaman lebih mendalam.

Agar hasil-hasil penelitian tesis/disertasi dalam program PHRD-IV dapat tersebar luas maka hasil-hasil penelitian tersebut dirangkum untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Tujuan *pertama* setelah diterbitkan adalah agar dapat direplikasi atau diadopsi di tempat kerja karyasiswa; *kedua*, sebagai *benchmark* pemanfaatannya di instansi pemerintah lain; dan *ketiga*, merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan kegiatan PHRD-IV, dalam bentuk terbitan ilmiah buku ber-ISBN sehingga dapat disebutkan oleh karyasiswa dalam resume masing-masing.

Serial buku ini dapat di akses secara *online* www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

